KETIMPANGAN YANG SEMAKIN LEBAR

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Australian Aid

Kantor Bank Dunia di Jakarta
Gedung Bursa Efek
Indonesia Tower II/Lantai 12
Jl Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12910
T (6221) 5299-3000
F (6221) 5299-3111
W www.worldbank.org/id

Bank Dunia
1818 H Street NW
Washington DC 20433 USA
T (202) 458-1876
F (202) 522-1557/1560
W www.worldbank.org

DICETAK PADA
MARET 2016

Ketimpangan yang Semakin Lebar adalah produk dari staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang dinyatakan di sini tidak serta-merta mencerminkan pandangan Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia atau Pemerintah yang diwakilinya.

Bank Dunia tidak menjamin akurasi data yang termasuk dalam tulisan ini. Batasan, warna, denominasi, dan informasi lainnya pada peta mana pun dalam tulisan ini tidak menyiratkan pendapat pihak Bank Dunia mengenai status hukum wilayah apa pun atau dukungan atau pengakuan atas batas-batas tersebut.

Jika ada pertanyaan mengenai laporan ini, silakan hubungi:

Vivi Alatas
(valatas@worldbank.org)
Matthew Wai-Poi
(mwaipoi@worldbank.org).

PHOTO CREDITS
Bank Dunia
Josh Estey
shutterstock.com

Kata Pengantar

Rodrigo A. Chaves
Country Director, Indonesia
The World Bank

Indonesia telah melalui transformasi yang mengagumkan dalam lima belas tahun terakhir. Angka kemiskinan nasional telah berkurang setengahnya, dari 24 persen di tahun 1999 menjadi 11.3 persen di tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan ekonomi bertahan di angka sekitar 6 persen dalam dasawarsa terakhir. Indonesia juga menjadi anggota G-20, satu-satunya dari Asia Tenggara.

Namun, perjalanan menuju kesejahteraan bersama masih belum selesai. Indonesia berisiko tidak membantu rakyat miskin dan rentannya. Pengentasan kemiskinan mulai stagnan, dengan penurunan yang mendekati nol pada tahun 2014. Ketimpangan pendapatan naik dengan cepat dan hampir sepertiganya berasal dari ketimpangan kesempatan. Anak-anak yang sehat dan terdidik hidup berdampingan dengan anak-anak yang menderita malnutrisi, tidak mampu belajar di sekolah, dan putus sekolah terlalu dini. Ketimpangan antar daerah juga mencolok: hanya 6 persen anak di Jakarta yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi, sedangkan di Papua, 98 persen anak tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Ketimpangan seperti ini menghambat prospek segmen-segmen masyarakat dari generasi ke generasi.

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi ketimpangan sebagai hambatan terhadap pertumbuhan dan menetapkan target penurunan ketimpangan. Untuk mendukung target tersebut, Bank Dunia melakukan penelitian untuk mengetahui apa penyebab naiknya ketimpangan di Indonesia, mengapa ketimpangan penting untuk diatasi, dan apa langkah yang tepat untuk mengatasinya. Penelitian ini adalah hasil dari kemitraan antara Bank Dunia dengan berbagai lembaga pemerintah Indonesia. Studi ini didukung secara finansial dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Ketimpangan adalah isu yang kompleks, melibatkan banyak faset kehidupan dan banyak pelaku. Kami berharap laporan ini dapat mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berbasis bukti dan didukung oleh informasi dan pengalaman dari negara lain yang telah sukses menurunkan ketimpangan.

Yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat adalah Indonesia tanpa kemiskinan. Indonesia yang diimpikan oleh rakyat adalah negara dimana orang miskin mendapat peluang untuk menikmati kemakmuran negara. Ini bukanlah agenda redistribusi perekonomian dengan ukuran yang tetap. Indonesia harus mengembangkan ukuran perekonomian tersebut sekaligus membaginya dengan lebih adil, agar semua orang semakin sejahtera, terutama mereka yang masih tertinggal.

Mandat untuk memperlambat – atau bahkan membalikkan – trend kenaikan ketimpangan ini adalah tantangan yang berat, yang akan memakan waktu sangat banyak. Namun, kami percaya bahwa apabila Indonesia berdiri bersama – pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dengan dukungan dari mitra pembangunan – maka Indonesia dapat mendatangkan perubahan bagi generasi kini dan mendatang yang layak mendapatkan peluang memperbaiki hidupnya.

Kami dari Bank Dunia siap mendukung mandat pembangunan tersebut.

KETIMPANGAN YANG

MENGAPA,
APA DAMPAKNYA,
DAN APA SOLUSINYA?

Maret 2016, Bank Dunia

SEMAKIN LEBAR

KETIMPANGAN YANG SEMAKIN LEBAR
disusun oleh tim Poverty Global Practice Bank Dunia di kantor perwakilan Jakarta. Tim yang dipimpin Vivi Alatas (Lead Economist, GPV02) ini memberikan nasihat teknis dan kebijakan berdasarkan penelitian dan analisis empiris yang dapat diandalkan kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung usaha pemerintah mengentaskan kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan.

Dukungan finansial untuk laporan ini diberikan oleh Department of Foreign Affairs and Trade Australia melalui dana perwalian untuk Kemitraan untuk Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengetahuan (Partnership for Knowledge-Based Poverty Reduction). Dana perwalian tersebut berada di bawah pengawasan strategis Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Rahma Iryanti dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Laporan ini disusun oleh tim inti yang dipimpin oleh Matthew Wai-Poi (Senior Economist, GPV02) berdasarkan serangkaian makalah dan presentasi. Makalah mengenai Dampak Distribusional Kebijakan Fiskal di Indonesia ditulis oleh Rythia Afkar (Education Economist, GED02), Jon Jellema (Consultant, EACVF) dan Matthew Wai-Poi; mengenai Ketimpangan Peluang oleh Grace Hadiwidjaja (Consultant, GPVDR), Ray Hervandi (Consultant, GPVDR), Matthew Wai-Poi dan Laura Wijaya (Consultant, GPV02); dan mengenai Persepsi Publik tentang Ketimpangan oleh Taufik Indrakesuma (Consultant, GPVDR) dengan bimbingan Edgar Janz (Senior Knowledge Management Specialist, GPVDR) dan Matthew Wai-Poi. Presentasi latar belakang mengenai Pendapatan Tertinggi di Indonesia oleh Michaelino Mervisiano (Consultant, GPVDR), Imam Setiawan (Consultant, GPV02), Matthew Wai-Poi, Monica Wihardja (Poverty Specialist, GPV02) dan Dody Suria Wijaya (Consultant, GPVDR); mengenai Kelas Menengah Indonesia oleh Ririn Purnamasari (Senior Economist, GPV02), Ikuko Uochi (Consultant, GPV02) dan Matthew Wai-Poi; dan mengenai Ketimpangan Hasil oleh Amri Ilmma (Research Analyst, GPVDR), Taufik Hidayat (Consultant, GPVDR) dan Matthew Wai-Poi. Kontribusi tambahan turut diberikan oleh Edgar Janz, Mattia Makovec (Konsultan, GPVDR), Audrey Sacks (Social Development Specialist, GSUID), Astrid

KON

PARA

TRIBUTOR

Rengganis Savitri (Consultant, GPV02), dan Bagus Arya Wirapati (Research Analyst, GPV02).

Komentar diberikan oleh para Peninjau Ulang, Luis-Felipe Lopez-Calvo (Lead Economist, DECWD), Caterina Laderchi (Senior Economist, GPV03), dan Hal Hill (H.W. Arndt Professor of Southeast Asian Economies, Australian National University), selain juga dari Emma Allen (ILO), Chantelle Boudreaux (Consultant, GHNDR), Melissa Chew (Consultant, GHN02), David Gottlieb (Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, Kedutaan Besar Australia), Pandu Harimurti (Senior Health Specialist, GHN02), Ahya Ihsan (Economist, GMF06), Yue Man Lee (Economist, GMF06), Norman Loazya (Lead Economist, DECMG), Neil McCulloch (Director, Economic Policy Program, Oxford Policy Management), Puti Marzoeki (Senior Health Specialist, GHN02), Iene Muliati (Senior Social Protection Specialist, GSP02), Arvind Nair (Economist, GGO14), Truman Packard (Lead Economist, GSP04), Eko Setyo Pambudi (Research Analyst, GHN02), Samer al-Samarrai (Senior Economist, GED02), Ali Winoto Subandoro (Health Specialist, GHN02), Ajay Tandon (Senior Economist, GHN02), Violeta Vulovic (Consultant, GMF06), Mitch Wiener (Senior Social Protection Specialist, GSPDR), Rob Wrobel (Senior Social Development Specialist, GSUID), dan Wei Aun Yap (Konsultan, GHN02), selain juga staf Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Laporan ini menjadi lebih baik karena komentar-komentar tersebut.

Laporan ini disunting oleh Edgar Janz dan Peter Milne, dengan dukungan dari Taufik Indrakesuma.

Laporan ini dirancang oleh tim Bentuk ((Andreas Pranoto, Muhammad Kamal, Phoebe Wathoel, Randy Kurnia).

Laporan ini dibuat di bawah bimbingan umum Shubham Chaudhuri (Practice Manager, GMF06), Ana Revenga (Senior Director, GPVDR), Carlos Silva-Jaurequi (Lead Economist, GPVGE) dan Salman Zaidi (Practice Manager, GPV02). Bimbingan strategis dan komentar penting diberikan oleh Rodrigo Chaves (Country Director, EACIF), Ndiame Diop (Lead Economist, GMF06) dan Cristobal Ridao-Cano (Program Leader, EACIF).

Laporan ini merujuk pada proyek bersama mengenai insiden fiskal dengan tim dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dipimpin oleh Luky Alfirman (Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF) serta beranggotakan Arti Dyah Woroutami (Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan PKEM-BKF) dan Ahmad Fikri Aulia (Eksekutif Subbidang Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan PKEM-BKF). Proyek insiden fiskal ini menggunakan pendekatan Commitment to Equity. Diluncurkan pada tahun 2008, proyek Commitment to Equity (CEQ) adalah inisiatif dari Center for Inter-American Policy and Research (CIPR) dan Department of Economics, Tulane University, Center for Global Development and the Inter-American Dialogue. Alat diagnostik Commitment to Equity ini, yang dikembangkan oleh Nora Lustig dan timnya di Tulane University, mengandalkan analisis komprehensif insiden fiskal yang dirancang untuk menelaah bagaimana perpajakan dan pengeluaran pemerintah memengaruhi ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan kelompok sosioekonomi berbeda. Untuk detail lebih lanjut, kunjungi www.commitmentoequity.org.

Laporan ini juga merujuk pada proyek bersama tentang pendapatan tertinggi di Indonesia, yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Luky Alfirman dari Badan Kebijakan Fiskal dan Bank Indonesia. Tim dari Bank Indonesia terdiri dari N.A. Anggini Sari (Deputi Direktur, Kepala Divisi, Divisi Pengaturan, Perizinan, dan Pengembangan Informasi Kredit, Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan), Sani Eka Duta (Asisten Direktur, Divisi Informasi Kredit, Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan) dan Darma Saputra (Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan).

Data persepsi yang digunakan dalam laporan ini dan makalah latar belakang tentang persepsi diperoleh dari Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Daftar Singkatan, Akronim dan Istilah Page I
Bagan, Tabel & Boks Page II

GAMBARAN UMUM Page 1

I
RINGKASAN EKSEKUTIF
Page 5

1
KETIMPANGAN YANG MENINGKAT: TREN BELAKANGAN INI DAN MENGAPA PENTING DIPAHAMI
Page 35

1.1. Tren ketimpangan belakangan ini PAGE 37
1.2. Apakah ketimpangan penting? PAGE 42

2
MENGAPA KETIMPANGAN MENINGKAT
Page 45

2.1. Kerangka untuk memahami ketimpangan PAGE 47
2.2. Mengapa awal yang tidak setara dalam hidup membuat kaum miskin tidak bisa berkembang PAGE 53
2.3. Mengapa peningkatan kesenjangan antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil meningkatkan ketimpangan PAGE 71
2.4. Mengapa keuangan dan aset fisik membantu orang kaya meninggalkan kelompok lainnya PAGE 81
2.5. Mengapa guncangan membuat kebanyakan orang semakin sulit mengejar ketertinggalan PAGE 87

2.2.1 Sebagian besar ketimpangan keseluruhan disebabkan oleh keadaan saat lahir PAGE 53
2.2.2 Awal yang tidak adil dimulai dengan perbedaan kesehatan anak PAGE 54
2.2.3 Perubahan pola kelahiran juga memengaruhi ketimpangan, baik kini maupun di masa depan PAGE 64
2.2.4 Awal hidup yang tidak setara berlanjut dengan perbedaan dalam pengembangan keterampilan dan pendidikan PAGE 65

2.3.1 Peningkatan permintaan dan kekurangan tenaga kerja terampil akan meningkatkan upah mereka lebih tinggi, ini akan menguntungkan anak-anak yang mendapatkan permulaan yang tepat dalam hidup PAGE 71
2.3.2 Pada saat yang bersamaan, kebanyakan pekerja terjebak di dalam pekerjaan dengan penghasilan rendah PAGE 75
2.3.3 Kesenjangan yang melebar antara sedikit pekerja terampil dan mayoritas pekerja tidak terampil merupakan faktor pemicu peningkatan ketimpangan pada dekade lalu PAGE 79

DAFTAR ISI

3 BAGAIMANA KETIMPANGAN DAPAT DIATASI
Page 91

3.1.
Meningkatkan pelayanan di daerah, khususnya bidang kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana
PAGE 97

3.1.1 Memastikan semua anak mendapatkan permulaan yang adil dalam hidup melalui perawatan kesehatan yang berkualitas PAGE 97
3.1.2 Memastikan seluruh anak mendapatkan awal yang adil melalui pendidikan yang berkualitas PAGE 101
3.1.3 Revitalisasi keluarga berencana untuk membantu rumah tangga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang diinginkan
PAGE 105

3.2.
Meningkatkan keterampilan tenaga kerja saat ini dan menyediakan pekerjaan yang lebih produktif
PAGE 107

3.2.1 Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan PAGE 107
3.2.2 Meningkatkan perlindungan bagi pekerja berpendapatan rendah dan rentan PAGE 109
3.2.3 Mereformasi sistem pelatihan keterampilan untuk mempermudah tenaga kerja mengakses lapangan pekerjaan
PAGE 110

3.3.
Memastikan semua kelompok rumah tangga memiliki perlindungan efektif dari guncangan
PAGE 111

3.3.1 Menangani harga beras yang tidak stabil
PAGE 111
3.3.2 Memperkuat perlindungan sosial
PAGE 113
3.3.3 Pengawasan dan respon terhadap krisis: mengembangkan sistem yang permanen dan menyeluruh
PAGE 116

3.4.
Menyelaraskan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk penanganan ketidaksetaraan yang lebih baik
PAGE 117

3.4.1 Kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk menghadapi ketimpangan saat ini dan masa yang akan datang PAGE 117
3.4.2 Pilihan pembelanjaan memiliki pengaruh besar terhadap ketimpangan yang terjadi PAGE 118
3.4.3 Menutup kesenjangan besar di sektor infrastruktur dapat mengurangi ketimpangan di Indonesia dengan menguatkan pertumbuhan, menstimulasi pekerjaan, meningkatkan akses terhadap layanan publik dan, menurunkan harga bahan makanan PAGE 119
3.4.4 Namun, kebijakan fiskal harus tetap berkelanjutan
PAGE 121
3.4.5 Kombinasi pendapatan ini digunakan untuk mencapai kondisi fiskal berkelanjutan dan dapat pula memengaruhi ketimpangan yang ada saat ini
PAGE 109

3.5.
Kebanyakan kebijakan yang disarankan memiliki dukungan publik yang luas sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan
PAGE 125

4 KESIMPULAN Page 127

129 REFERENSI

Daftar Singkatan, Akronim dan Istilah

TERM	DEFINITION
AEC	ASEAN Economic Community
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Central Government Budget)
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ave.	average
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)
BCC	Behavioral Change Communication
BCG	Bacillus Calmette-Guerin vaccine
bidan	midwife
BKKBD	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (Regional Population and Family Planning Agency)
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (National Population and Family Planning Board)
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal (Investment Coordinating Agency)
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan (Operational Assistance for Education)
BOS	Bantuan Operasional Sekolah (Operational Assistance for Schools)
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Operational Assistance for Schools from Local Government)
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Social Security Organizing Body)
BPS	Badan Pusat Statistik (Central Statistics Agency)
Bulog	Badan Urusan Logistik (Logistics Agency)
CMRS	Crisis Monitoring and Response System
CPI	Consumer Price Index
DAK	Dana Alokasi Khusus (Special Allocation Fund)
DHS	Indonesia Demographic and Health Survey
DKI	Daerah Khusus Ibukota (Special Capital Region)
DPT	Diphtheria, Pertussis, and Tetanus vaccine
ECD	Early Childhood Development
EI	Effectiveness Index
FHH	Female-Headed Household

GDP	Gross Domestic Product
GIC	Growth Incidence Curve
HH/hh	Household
ICT	Information and communications technology
IDR	Indonesian Rupiah
IEC	Information education and communication
IFLS	Indonesia Family Life Survey
IMF	International Monetary Fund
IT	Information technology
IUD	Intrauterine Device
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat (Public Health Insurance)
JCI	Jakarta Composite Index
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional (National Health Insurance)
kabupaten	regency
KIP	Kartu Indonesia Pintar (Indonesia Smart Card)
km	kilometer
kotamadya	mid-size city
LSI	Lembaga Survei Indonesia (Indonesian Survey Institute)
MHH	Male-Headed Household
MP3EI	Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Master Plan for the Acceleration and Expansion of Economic Development in Indonesia
MSS	Minimum service standards
NCD	Non-communicable disease
NES	National education standards
NGO	Non-government organization
NTR	Non-tax revenue
NVMS	National Violence Monitoring System

OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OP	Operasi Pasar (Market Operation)
ORT	Oral Rehydration Therapy
OSS	One-stop service
PISA	Programme for International Student Assessment
PKH	Program Keluarga Harapan (Family Hope Program)
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Family Planning Field Official)
PNPM-Generasi	PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Healthy and Smart Generation Program)
PNPM-Mandiri	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (National Community Empowerment Program)
PNPM-Rural	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Rural (National Rural Community Empowerment Program)
Podes	Sensus Potensi Desa (Village Potential Census)
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu (Integrated Service Post)
PTT	Pegawai tidak tetap (contract employee)
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat (Public Health Centre)
Q1	Quintile 1, yaitu, poorest 20 percent
Q2	Quintile 2, yaitu, second poorest 20 percent
Q3	Quintile 3, yaitu, third poorest 20 percent
Q4	Quintile 4, yaitu, second richest 20 percent
Q5	Quintile 5, yaitu, richest 20 percent
Raskin	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rice Subsidies for Low Income People)
RPJM-N	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (National Medium-Term Development Plan)
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional (National Labor Force Survey)
SBM	school-based management
SD	Sekolah Dasar (Primary School)
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional (National Social Security System)
SKPD-KB	Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (Regional Family Planning Work Unit)
SMA	Sekolah Menengah Atas (Senior Secondary School)

SME	Small and medium enterprises
SMP	Sekolah Menengah Pertama (Junior Secondary School)
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional (National Socio-Economic Survey)
TFR	Total Fertility Rate
UHC	Universal Health Coverage
US$	United States Dollar
USAID	United States Agency for International Development
VAT	Value-added tax
WDI	World Development Indicators
WHO	World Health Organization

Bagan, Tabel & Boks

BAGAN

Bagan ES.1.	Setelah stabil cukup lama, rasio Gini mulai naik, kemudian turun seiring krisis keuangan Asia, sebelum naik tajam sejak pemulihan 8
Bagan ES.2.	Kenaikan rasio Gini di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir adalah salah satu yang tertinggi secara regional. 8
Bagan ES.3.	Kelas "konsumen" yang mapan secara ekonomi telah tumbuh pesat sebesar 10 persen per tahun sejak 2002, dan kini nyaris satu dari lima orang Indonesia termasuk ke dalam kelas ini. Namun, pengurangan kemiskinan dan kerentanan amatlah rendah. 8
Bagan ES.4.	Orang Indonesia yang disurvei berpendapat ketimpangan sebaiknya lebih rendah dari yang ada saat ini, tetapi kenyataannya ketimpangan sekarang ini malah lebih tinggi dari yang mereka pikirkan. 10
Bagan ES.5.	Kerangka aset yang menghasilkan pendapatan dapat membantu kita memikirkan mengapa ketimpangan muncul. Kerangka ini diterapkan berlaku lintas generasi dan dapat memperparah ketimpangan seiring waktu. 11
Bagan ES.6.	Gizi pendek terkait erat dengan angka kematian, kognitif, pendidikan, pendapatan saat dewasa dan kesehatan yang lebih buruk. (Gizi pendek di Indonesia jauh lebih tinggi daripada sebagian besar negara tetangga.) 12
Bagan ES.7.	Kesenjangan dalam akses kesehatan anak yang lebih baik semakin berkurang (seperti dalam air dan sanitasi, seperti ditunjukkan), walaupun tingkat kualitas masih tetap rendah di banyak tempat. 12
Bagan ES.8.	Kesenjangan angka partisipasi sekolah antara anak yang lebih kaya dan lebih miskin telah berkurang seiring waktu... 13
Bagan ES.9.	...tapi di balik angka partisipasi sekolah yang lebih tinggi terdapat perbedaan kualitas pendidikan pada sekolah dan daerah yang berbeda... 13
Bagan ES.10.	...yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan nilai terburuk dalam tes sains dan matematika internasional 14
Bagan ES.11.	Persentase pekerjaan yang membutuhkan jenjang pendidikan lebih tinggi telah meningkat. 16
Bagan ES.12.	Nyaris separuh pengusaha yang disurvei menemukan kesenjangan keterampilan pada staf mereka. 16
Bagan ES.13.	Indonesia memiliki salah satu konsentrasi kekayaan tertinggi dari 38 negara yang datanya tersedia 18
Bagan ES.14.	Kurang dari setengah populasi Indonesia memiliki asuransi kesehatan 20
Bagan ES.15.	Ada lebih dari dua kali lipat orang Indonesia yang rentan daripada yang miskin. Mereka hidup kurang dari 50 persen di atas garis kemiskinan dan mudah jatuh kembali ke dalam kemiskinan jika mengalami guncangan 20
Bagan ES.16.	Koefisien gini Brazil & Amerika Latin 22
Bagan ES.17.	Kurva pertumbuhan insidensi Brazil, 2001-2009 22
Bagan 1.1.	Konsumsi per kapita bulanan rata-rata (Rp) berdasarkan desil, 2002 dan 2014 38
Bagan 1.2.	Koefisien Gini (angka) dan angka kemiskinan nasional (persen) 1980-2014 38
Bagan 1.3.	Koefisien Gini di Asia Timur, periode 1990an dan 2000an 39
Bagan 1.4.	Perubahan angka koefisien Gini di Asia Timur disetahunkan, periode 1990an dan 2000an 39
Bagan 1.5.	Koefisien Gini untuk negara berpendapatan menengah ke bawah 39
Bagan 1.6.	Pembagian populasi berdasarkan kelas (persen) 2002-14 39
Bagan 1.7.	Rata-rata insiden konflik pada daerah dengan ketimpangan rendah, menengah dan tinggi 43
Bagan 1.8.	Jenis pekerjaan untuk lulusan sekolah menengah atas 44

Bagan 1.9.	Pembagian konsumsi nasional per kuintil: jumlah seharusnya menurut orang Indonesia, jumlah saat ini menurut mereka, jumlah sebenarnya (persen) 47
Bagan 2.1.	Kurva insiden pertumbuhan berdasarkan persentil konsumsi per kapita rumah tangga, 1996-2010 49
Bagan 2.2.	Memahami ketimpangan melalui kerangka aset yang menghasilkan pendapatan dengan siklus umpan balik yang memperkuat 54
Bagan 2.3.	Persentase ketimpangan konsumsi karena perbedaan antar dan dalam kelompok dengan keadaan berbeda saat lahir 54
Bagan 2.4.	Persentase ketimpangan konsumsi karena perbedaan antar dan dalam kelompok dengan keadaan berbeda saat lahir, berdasarkan angkatan Kepala Rumah Tangga 54
Bagan 2.5.	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran) 55
Bagan 2.6.	Kekerdilan berdasarkan negara (persen) 55
Bagan 2.7.	Kemungkinan kekerdilan berdasarkan pendidikan orangtua (persen) 55
Bagan 2.8.	Penggunaan perawatan prakelahiran dan pascakelahiran terampil (persen) 55
Bagan 2.9.	Kelahiran tanpa menggunakan bidan berdasarkan daerah (persen) 56
Bagan 2.10.	Kelahiran tanpa menggunakan bidan berdasarkan desil konsumsi per kapita (persen) 56
Bagan 2.11.	Tingkat imunisasi penuh berdasarkan populasi (persen) 56
Bagan 2.12.	Pemberian ASI pada usia yang tepat berdasarkan usia (persen) 57
Bagan 2.13.	Asupan mikronutrisi dan obat cacing berdasarkan populasi (persen) 57
Bagan 2.14.	Kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi memadai berdasarkan desil konsumsi per kapita rumah tangga (persen) 58
Bagan 2.15.	Kasus diare dan perawatannya (persen) 58
Bagan 2.16.	Ketersediaan Puskesmas (persentase pemukiman dengan Puskesmas) dan jarak ke Puskesmas jika tidak ada di pemukiman (km) 58
Bagan 2.17.	Skor indikator pelayanan terpilih dan indeks kesiapan pelayanan umum untuk Puskesmas berdasarkan provinsi, 2011 59
Bagan 2.18.	Tingkat imunisasi penuh untuk anak usia 12-23 bulan berdasarkan pendidikan ibu (persen) 60
Bagan 2.19.	Tingkat imunisasi untuk anak berdasarkan urutan lahir (persen) 60
Bagan 2.20.	Kemiskinan kota dalam hal tempat tinggal, air dan sanitasi 60
Bagan 2.21.	Kemiskinan desa dalam hal tempat tinggal, air dan sanitasi 60
Bagan 2.22.	Perbandingan rasio Gini 2002 aktual dan konseptual jika jumlah anggota keluarga pada 2002 tetap sama seperti 1993 61
Bagan 2.23.	Perbandingan rasio Gini 2014 aktual dan konseptual jika jumlah anggota keluarga pada 2014 tetap sama seperti 2002, dan jika jumlahnya terus menurun pada taraf yang sama seperti pada 1993-2002 62
Bagan 2.24.	Lama bersekolah, usia 16-18 tahun (persen) 65
Bagan 2.25.	Lama tahun bersekolah, usia 19-21 tahun (persen) 65
Bagan 2.26.	Biaya sekolah tahunan berdasarkan jenjang sekolah (ribu Rp) 66
Bagan 2.27.	Persentase rumah tangga dengan anak usia sekolah yang mendapat beasiswa berdasarkan desil pengeluaran per kapita rumah tangga (persen) 66
Bagan 2.28.	Median pendapatan bulanan anak usia 15-18 tahun (rupiah) 67
Bagan 2.29.	Angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun berdasarkan kuintil konsumsi orang tua 67
Bagan 2.30.	Angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun berdasarkan pendidikan orang tua 67
Bagan 2.31.	Probabilitas perolehan pendidikan untuk anak yang lahir pada tahun 1960an dan 1970an dengan orang tua yang tidak lulus SD, dibandingkan anak yang lahir tahun 1950an (persen) 68
Bagan 2.32.	Probabilitas kuintil pendapatan saat dewasa untuk anak yang lahir pada tahun 1960an dan 1970an dengan orang tua yang tidak lulus SD, dibandingkan anak yang lahir tahun 1950an (persen) 68
Bagan 2.33.	Angka partisipasi PAUD untuk anak usia 5-6 tahun berdasarkan daerah, jenis kelamin dan pendapatan

	(persen) 68
Bagan 2.34.	Probabilitas anak usia 7-14 tahun berada di kuintil teratas atau terbawah dalam skor kemampuan kognitif berdasarkan pendidikan orang tua (persen) 68
Bagan 2.35.	Ketersediaan PAUD di pemukiman (persen) dan jarak ke PAUD terdekat jika letaknya tidak di pemukiman (km) berdasarkan daerah 69
Bagan 2.36.	Kualitas fasilitas pendidikan dan guru (persen) 69
Bagan 2.37.	Anak yang mengaku membaca buku teks dalam seminggu terakhir (persen) 70
Bagan 2.38.	Anak yang mengaku membaca buku sains dalam seminggu terakhir (persen) 70
Bagan 2.39.	Proporsi anak umur 15 tahun dengan nilai PISA matematika dan sains di bawah Level 2 (kemampuan dasar, 420 poin) 70
Bagan 2.40.	Tingkat pendidikan Pekerja, 2002-13 (persen) 72
Bagan 2.41.	Dekomposisi pendidikan angkatan kerja (persen) 72
Bagan 2.42.	Kemampuan-kemampuan penting yang diidentifikasi oleh pemilik pekerjaan dan kesenjangan keterampilan 72
Bagan 2.43.	Metode untuk mendapatkan pekerjaan, usia anak muda 15-24 tahun (persen) 73
Bagan 2.44.	Metode untuk mendapatkan pekerjaan, seluruh pekerja berusia 25 tahun keatas (persen) 73
Bagan 2.45.	Anak-anak Muda berusia 19-24 tahun yang mendatangi atau menyelesaikan pelatihan (persen) 73
Bagan 2.46.	Pembaguan Perusahaan yang menyediakan pelatihan formal (persen) 73
Bagan 2.47.	Pertumbuhan upah tahunan 2001-2014 terhadap produktivitas sektoral (nilai tahunan 2012 yang ditambahkan kepada setiap pekerja, Juta Rupiah). 74
Bagan 2.48.	Pembagian dari jumlah total pekerjaan, 2014 (persen) 75
Bagan 2.49.	Pertumbuhan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja per sektor, 2001-2012 (persen) 75
Bagan 2.50.	Komposisi pekerjaan berdasarkan status (persen) 76
Bagan 2.51.	Pekerja informal per sektor, 2012 (persen) 76
Bagan 2.52.	Indeks peraturan pasar tenaga kerja di berbagai negara 77
Bagan 2.53.	Minimum wages in selected East Asian countries (US$ per month) 79
Bagan 2.54.	Upah pekerja premium yang berpendidikan primer atau dibawahnya, 2003-10 (persen) 80
Bagan 2.55.	Premi konsumsi RT per kapita terhadap RT dengan KRT berpendidikan SD, 2003-2010 (persen) 80
Bagan 2.56.	Koefisien Gini Upah Primer, 2000-13 80
Bagan 2.57.	Pembagian pendapatan buruh, perubahan 10 tahun (poin persentase) 81
Bagan 2.58.	Pembaguan pendapatan pekerja di sektor manufaktur (persen) 82
Bagan 2.59.	Jakarta Composite Index, 1997-2014 82
Bagan 2.60.	Pasar Perumahan dan Kondominium di Jakarta 82
Bagan 2.61.	Pembagian dari total kekayaan yang dimiliki oleh 10 rumah tangga terkaya (persen) 84
Bagan 2.62.	Perubahan pembagian total kekayaan yang dimiliki 10 rumah tangga terkaya (poin persentase) 85
Bagan 2.63.	Kurva pertumbuhan, 1993-2014 (pertumbuhan konsumsi riil per kapita tahunan dari rumah tangga (kuantil)) 86
Bagan 2.64.	Akses terhadap Asuransi Kesehatan (persen) 88
Bagan 2.65.	Akses terhadap Pensiun (persen) 88
Bagan 2.66.	Tiga dimensi dari jangkauan kesehatan universal 88
Bagan 2.67.	CPI dan CPI untuk orang miskin, 2002-13 89
Bagan 2.68.	CPI orang miskin (makanan) dan CPI orang miskin (non-makanan), 2002-13 89
Bagan 2.69.	Laju kemiskinan dan kerentanan di Indonesia, 2014 (persen) 90
Bagan 2.70.	Proporsi kelompok miskin yang telah miskin pada tahun sebelumnya 90
Bagan 3.1.	Growth incidence curve Thailand 2000-06 93
Bagan 3.2.	Growth incidence curve, Thailand 2006-10 93
Bagan 3.3.	Growth incidence curve, Vietnam 2004-12 94
Bagan 3.4.	Growth incidence curve, Brazil 2001-09 95

Bagan 3.5	Koefisien Gini di Brazil dan Amerika Latin 95
Bagan 3.6	Growth incidence curve, Brazil 2001-2009 96
Bagan 3.7.	Belanja Kesehatan Publik (persen PDB) dan Pengeluaran Kesehatan Pribadi (persen total pengeluaran kesehatan) secara internasional 98
Bagan 3.8.	Perubahan Belanja Kesehatan riil (persen, 2003-2011) dan perubahan proses kelahiran oleh tenaga kesehatan terampil (persen 2003-2011) 99
Bagan 3.9.	Perubahan belanja kesehatan riil (persen 2003-2011) dan perubahan jangkauan imunisasi (persen 2003-2011) 99
Bagan 3.10.	Penerimaan pembayaran pesangon buruh yang dilaporkan oleh buruh (persen) 103
Bagan 3.11.	Pekerja yang menerima pembayaran kurang dari upah minimum berdasarkan kuantil konsumsi (persen) 103
Bagan 3.12.	Penurunan koefisien Gini melalui kebijakan Fiskal, beberapa negara (poin) 110
Bagan 3.13.	Efektivitas pengurangan ketimpangan dan pembelanjaan pemerintah di berbagai program dan kebijakan, 2012 111
Bagan 3.14.	Dampak dari pajak tidak langsung di berbagai negara (persen dari pendapatan pasar) 116

TABEL

Tabel 2.1.	Rata-rata jumlah anggota keluarga berdasarkan desil konsumsi per kapita, 1993 dan 2002 67
Tabel 2.2.	Rata-rata jumlah anggota keluarga berdasarkan desil konsumsi per kapita, 2002 dan 2014 67
Tabel 2.3.	Keunggulan kefasihan membaca lisan berdasarkan partisipasi PAUD, lokasi dan pendapatan (kata per menit lebih cepat dari rujukan) 73
Tabel 2.4	Kemudahan berbisnis di Asia Timur 78
Tabel 2.5.	Dekomposisi perubahan koefisien Gini konsumsi, 2003-2010 (persen perubahan) 80
Tabel 2.6.	Matrix pendapatan mobilitas rumah tangga 1993-2007 86
Tabel 3.1.	Faktor pemicu ketimpangan berdasarkan model simulasi pendapatan 86
Tabel 3.2	Faktor pemicu ketimpangan dan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menghadapinya 88
Tabel 3.3.	Biaya dan pendanaan di DKI Jakarta untuk mencapai berbagai standar pendidikan yang berbeda (IDR '000) 97
Tabel 3.4.	Kebijakan yang dianggap prioritas dalam penurunan ketimpangan 116

BOKS

Boks ES.1	Bagaimana Brasil mengurangi ketimpangan 22
Boks 1.1.	Mengukur ketimpangan 52
Boks 2.1.	Memahami ketimpangan dengan menggunakan kurva insiden pertumbuhan 57
Boks 2.2.	Putri adalah warga miskin dengan aset terbatas dan imbal hasil rendah 60
Boks 2.3.	Fitri adalah konsumen berkembang dengan sedikit akumulasi aset 60
Boks 2.4.	Dewi adalah bagian dari kelas menengah yang aman secara ekonomi dengan aset meningkat 61
Boks 2.5.	Siti adalah warga kelas atas yang punya banyak aset dan imbal hasil tinggi 61
Boks 2.6:	Isu strategis dan berkembang mengenai keluarga berencana di Indonesia 69
Boks 2.7.	Peningkatan Ketimpangan: Tidak hanya terkait dengan lonjakan komoditas 83
Boks 3.1.	Bagaimana Brazil Mengurangi Ketimpangan 95
Boks 3.2.	Reformasi Pendidikan terakhir di DKI Jakarta menunjukkan BOSDA dapat berperan sebagai pelengkap BOS untuk membantu sekolah mencapai standar kualitas yang lebih tinggi, mendukung sekolah di daerah tertinggal, dan mendorong kinerja yang lebih tinggi 96
Boks 3.3.	A public works program for Indonesia 107
Boks 3.4.	Meningkatkan Infrastruktur di Indonesia 112
Boks 3.5.	Meningkatkan Keberlangsungan fiskal: Aksi Prioritas 113

KETIN
MELEBA

Gambaran Umum

MPANGAN

AR

MENINGKATNYA KETIMPANGAN MEMBUAT KESENJANGAN DI INDONESIA SEMAKIN LEBAR DARI YANG PERNAH ADA SEBELUMNYA. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun di Indonesia telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Namun, pertumbuhan selama satu dasawarsa terakhir hanya menguntungkan 20 persen warga terkaya, sementara 80 persen populasi sisanya—sekitar 205 juta orang—tertinggal di belakang. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan Indonesia relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur.

PERLU DILAKUKAN TINDAKAN KONKRIT UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN KARENA MENIMBULKAN KETIDAKADILAN, MEMPERLAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN SERTA MENINGKATKAN RISIKO KONFLIK. Ketimpangan dalam taraf tertentu dapat menjadi hal positif, karena mereka yang bekerja keras, berinovasi dan mengambil risiko mendapat imbalan atas usahanya. Namun, ketimpangan pendapatan menjadi tidak adil ketika tidak semua orang memiliki peluang awal yang sama. Ketimpangan yang tidak ditanggapi dan dibiarkan berkembang dapat menimbulkan akibat serius, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang lebih lambat serta peningkatan risiko konflik. Kebanyakan warga Indonesia kini menyadari isu ini dan meyakini bahwa Pemerintah harus mengambil tindakan.

BBG
JAKARTA UTARA
275
JU

Membiarkan ketimpangan terus naik dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi & pengentasan kemiskinan, serta dapat memicu konflik.

ADA EMPAT PENDORONG UTAMA KETIMPANGAN DI INDONESIA YANG MEMENGARUHI HIDUP GENERASI MASA KINI MAUPUN MASA DEPAN. Untuk mengambil tindakan yang tepat, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengapa ketimpangan meningkat. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan didukung oleh Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Bank Dunia melaksanakan proyek penelitian yang menyelidiki masalah ini dan menemukan empat sebab utama.

Ketimpangan peluang

Anak-anak miskin seringkali tidak memiliki kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk sukses di masa depan. Setidaknya sepertiga ketimpangan disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu.

Pekerjaan yang tidak merata

Pasar tenaga kerja terbagi menjadi pekerja berketerampilan tinggi yang upahnya semakin meningkat, dan pekerja yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut sehingga terjebak dalam pekerjaan berproduktivitas rendah, informal, dan berupah rendah.

Tingginya konsentrasi kekayaan

Segelintir warga Indonesia meraup keuntungan lewat kepemilikan aset keuangan yang kadang diperoleh melalui korupsi, sehingga mendorong ketimpangan menjadi lebih tinggi baik saat ini maupun di masa mendatang.

Ketahanan ekonomi rendah

Guncangan semakin umum terjadi dan sangat memengaruhi rumah tangga miskin dan rentan, sehingga mengikis kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka.

KEBIJAKAN PUBLIK DAPAT MEMBANTU INDONESIA MEMUTUS SIKLUS KETIMPANGAN ANTARGENERASI. Tingginya ketimpangan dapat dihindari. Para pembuat kebijakan dapat mengurangi ketimpangan dengan menangani faktor-faktor di luar kendali individu yang memperparah ketimpangan. Bank Dunia merekomendasikan empat tindakan utama:

Memperbaiki pelayanan publik di daerah

Kunci utama agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik adalah peningkatan pelayanan publik di daerah, sehingga dapat memperbaiki peluang kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana bagi semua orang.

Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja

Program pelatihan keterampilan dapat meningkatkan daya saing pekerja yang tidak sempat mengenyam pendidikan berkualitas. Selain itu, Pemerintah dapat membantu menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik melalui investasi lebih besar di infrastruktur, iklim investasi yang lebih kondusif dan perundang-undangan yang tidak terlalu kaku.

Memastikan perlindungan dari guncangan

Kebijakan pemerintah dapat mengurangi frekuensi dan keparahan guncangan, selain juga memberikan mekanisme penanggulangan untuk memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses ke perlindungan memadai jika guncangan melanda.

Menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan

Kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial dan jaminan sosial. Merancang sistem perpajakan yang lebih adil dengan memperbaiki sejumlah peraturan perpajakan yang saat ini mendukung terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang.

RINGKASAN[1] EKSEKUTIF

PADA TAHUN 2015, INDONESIA MENJADI NEGARA YANG SEMAKIN TERBAGI DAN TIDAK SETARA DALAM BANYAK HAL. Terdapat kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara 10 persen warga terkaya dan populasi sisanya, didorong oleh banyak jenis ketimpangan di Indonesia. Masyarakat terbagi menjadi orang berpunya dan tidak berpunya bahkan sebelum dilahirkan. Hanya sebagian anak-anak terlahir sehat dan tumbuh dengan baik pada tahun-tahun pertama mereka. Demikian pula hanya sebagian anak mampu bersekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas. Ini berarti sebagian besar tidak dapat memasuki lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan ekonomi modern dan dinamis. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Banyak keluarga tidak memiliki akses ke jaring pengaman sosial yang dapat melindungi mereka dari berbagai guncangan yang melanda dalam hidup. Sejumlah kecil orang Indonesia yang beruntung memiliki akses ke aset keuangan dan fisik (seperti tanah dan properti) yang membuat kekayaan mereka meningkat seiring waktu. Kekayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk uang maupun aset fisik, dan melalui akses lebih besar pada kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Alhasil, ketimpangan semakin berlipat ganda dan semakin lebar seiring berjalannya waktu.

LAPORAN INI MEMPERTANYAKAN MENGAPA KETIMPANGAN MENINGKAT, MENGAPA ISU INI PENTING DIPAHAMI, DAN APA YANG DAPAT DILAKUKAN. Bagian pertama dari laporan ini meneliti tren ketimpangan, yang sudah relatif tinggi di Indonesia dan naik lebih pesat ketimbang negara tetangga. Bagian ini juga membahas mengapa isu tersebut penting. Ketimpangan dalam taraf tertentu dapat menjadi hal positif karena memberi peluang bagi mereka yang mau bekerja keras dan berinovasi untuk mendapatkan imbalan. Namun, ketimpangan yang terlalu tinggi bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengentasan kemiskinan, dan melemahkan kerukunan sosial. Bagian kedua bertujuan memahami apa yang mendorong peningkatan ketimpangan di Indonesia. Mengapa semakin banyak anak tidak tumbuh sehat dan lulus dari sekolah dengan keterampilan yang tepat meskipun ada begitu banyak sekolah dan sarana kesehatan? Mengapa banyak pekerja tidak mampu pindah dari pekerjaan berupah rendah ke pekerjaan lebih produktif dengan gaji lebih besar? Bagaimana guncangan ekonomi dapat mencegah pekerja kasar meningkatkan derajat ekonomi mereka? Dan mengapa kekayaan yang semakin terpusat di tangan segelintir orang dapat meningkatkan ketimpangan, baik kini maupun di masa depan, dan berpotensi melemahkan pertumbuhan ekonomi serta mengarah pada pembuatan kebijakan yang mengutamakan kepentingan segelintir orang, bukan mayoritas? Bagian terakhir menelaah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah negara ini menjadi semakin terbagi lagi. Bagian ini menganjurkan cara-cara untuk menghindarkan Indonesia dari situasi di mana hanya sedikit orang yang sehat, bahagia dan sejahtera, sementara sisanya hanya bisa mendambakan hidup yang lebih baik namun tidak mampu mencapainya.

[1] Ringkasan Eksekutif ini merangkum pesan kunci laporan Ketimpangan yang Semakin Melebar. Laporan ini mengacu pada serangkaian makalah teknis yang dirujuk secara individu.

TREN KETIMPANGAN DI INDONESIA

Ketimpangan semakin meningkat karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang

KETIMPANGAN DI INDONESIA MENINGKAT PESAT. Berdasarkan sebagian besar pengukuran, ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi. Pada tahun 2002, 10 persen warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin.

UKURAN KETIMPANGAN YANG POPULER DIGUNAKAN ADALAH KOEFISIEN GINI, DI MANA 0 BERARTI SEPENUHNYA SETARA DAN 100 BERARTI SEPENUHNYA TIDAK SETARA. Selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997-98, saat angka kemiskinan naik tajam rasio Gini juga turun. Semua orang terkena dampak krisis, tetapi segmen masyarakat terkaya terhantam paling keras. Rasio Gini meningkat dari 30 (tahun 2000) menjadi 41 (tahun 2014), yaitu angka tertinggi yang pernah tercatat (bagan ES. 1). Namun, kenaikan ini pun kemungkinan masih lebih rendah dari sebenarnya karena survei rumah tangga biasanya kurang representatif menggambarkan rumah tangga terkaya.[2] Meskipun dahulu relatif moderat berdasarkan standar internasional, tingkat ketimpangan Indonesia kini menjadi tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur (Bagan ES. 2).

PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN SELAMA 15 TAHUN TELAH MEMBANTU MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN KELAS SOSIAL YANG MAPAN SECARA EKONOMI. Setelah pulih dari krisis keuangan Asia, PDB riil per kapita Indonesia tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun antara 2000 dan 2014. Pertumbuhan ini membantu banyak orang keluar dari kemiskinan. Angka kemiskinan berkurang lebih dari separuhnya dari 24 persen saat krisis menjadi 11 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi juga membantu menciptakan kelas menengah yang lebih kuat dari yang pernah ada sebelumnya. Saat ini terdapat 45 juta orang (18 persen orang terkaya dari seluruh masyarakat Indonesia) yang mapan secara ekonomi dan menikmati kualitas hidup lebih tinggi. Mereka adalah segmen populasi yang berkembang paling pesat, dengan peningkatan 10 persen per tahun sejak 2002 (Bagan ES. 3).[3]

NAMUN, KELOMPOK ORANG INDONESIA YANG MAPAN SECARA EKONOMI TERSEBUT MENINGGALKAN 205 JUTA SISANYA DI BELAKANG. Manfaat pertumbuhan ekonomi sebagian besar telah dinikmati oleh kelas konsumen yang berkembang. Antara tahun 2003 dan 2010, konsumsi per orang untuk 10 persen warga terkaya Indonesia naik lebih dari enam persen per tahun setelah memperhitungkan inflasi, tapi kenaikannya kurang dari dua persen per tahun untuk 40 persen warga termiskin. Ini berpengaruh pada perlambatan laju pengentasan kemiskinan, dengan jumlah orang miskin turun hanya dua persen per tahun sejak 2002, dan nyaris tidak ada penurunan pada jumlah orang yang rentan kemiskinan (Bagan ES. 3).

[2] Bank Dunia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sedang bekerja sama dalam sebuah proyek untuk memperkirakan secara lebih akurat jumlah warga Indonesia pada kelas menengah dan atas. Pendapatan Temuan penelitian akan dipublikasikan dalam laporan Bank Dunia yang akan datang.

[3] Untuk laporan ini, rumah tangga dalam kelas menengah di Indonesia diartikan sebagai mereka yang secara ekonomi aman dari kemiskinan dan kerentanan. Garis kemapanan ekonomi pada 2014 berkisar pada konsumsi Rp 1 juta per orang per bulan. Lihat catatan pada grafik dan laporan *"Indonesia's New Climbers: Who are the middle class and what does it mean for the country?"* (*World Bank, forthcoming (a)*)

Setelah stabil cukup lama, rasio Gini mulai naik, kemudian turun seiring krisis keuangan Asia, sebelum naik tajam sejak pemulihan. (bag. ES.1)

Koefisien Gini (angka) dan tingkat kemiskinan nasional (persen) 1980-2014

SUMBER BPS, Susenas dan kalkulasi Bank Dunia
CATATAN Rasio Gini konsumsi nominal. Garis kemiskinan nasional diubah pada tahun 1998, dan angka tahun 1996 dihitung menggunakan metode baru sekaligus lama.

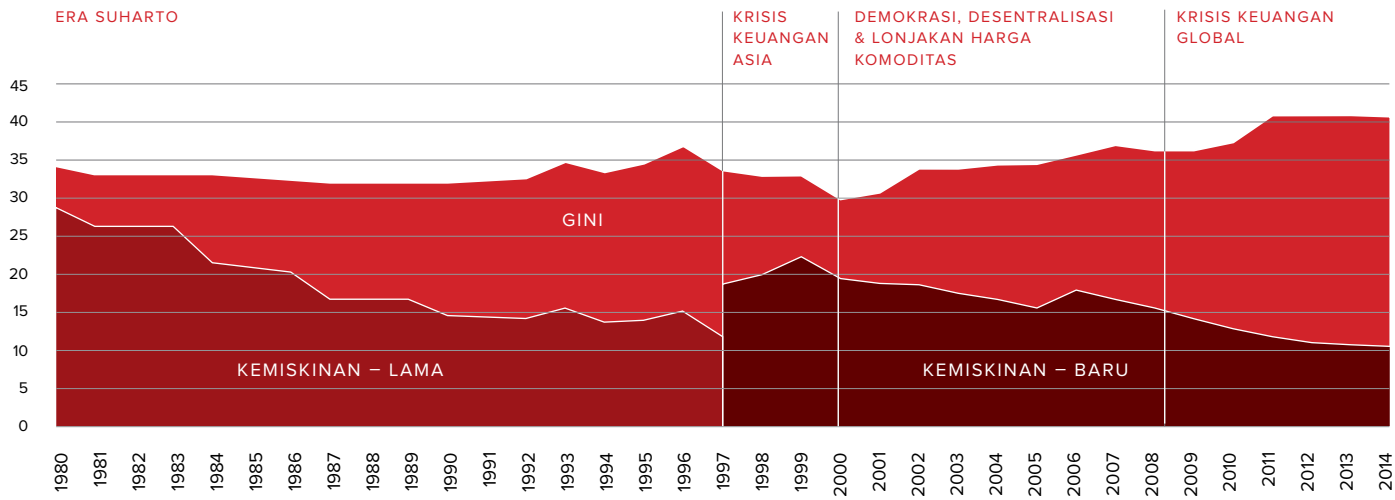

Kenaikan rasio Gini di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir adalah salah satu yang tertinggi secara regional. (bag. ES.2)

Koefisien Gini di Asia Timur, periode 1990an dan 2000an

CATATAN Rasio Gini konsumsi untuk semua negara kecuali Malaysia, yang menggunakan pendapatan. Periode untuk tiap negara adalah: Indonesia 1990-2011; Malaysia 1992-2009; Laos 1992-2008; Tiongkok 1990-2008; Vietnam 1992-2008; Thailand 1990-2009; Filipina 1991-2009; dan Kamboja 1994-2008.
SUMBER Kanbur, Rhee dan Zhuang (2014) Inequality in Asia and the Pacific, dari PovCalNet.

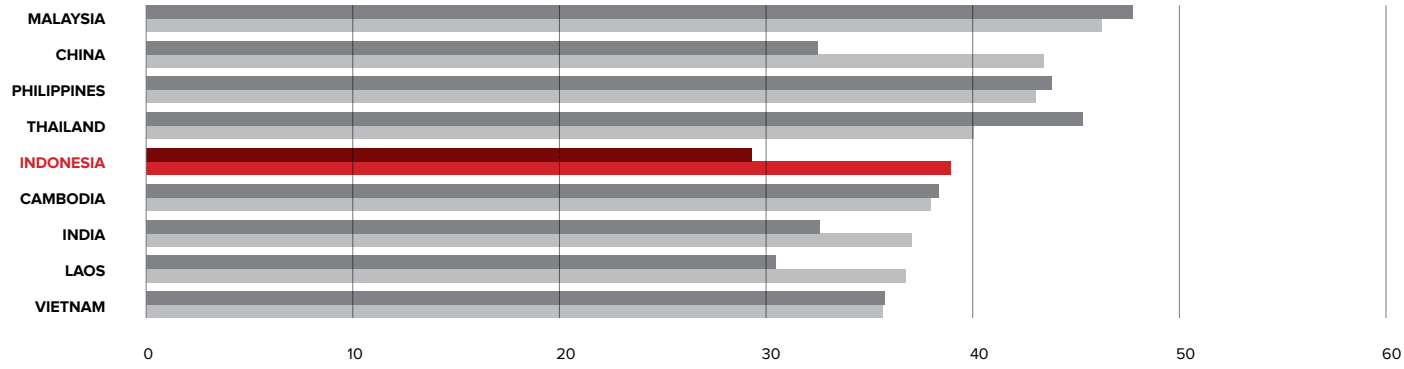

Kelas "konsumen" yang mapan secara ekonomi telah tumbuh pesat sebesar 10 persen per tahun sejak 2002, dan kini nyaris satu dari lima orang Indonesia termasuk ke dalam kelas ini. Namun, pengurangan kemiskinan dan kerentanan amatlah rendah. (bag. ES.3)

Pembagian populasi berdasarkan kelas (persen) 2002-14

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia. Orang miskin berada di bawah garis kemiskinan nasional yaitu sekitar Rp 300.000 per orang per bulan. Orang yang rentan punya kemungkinan lebih dari 10 persen untuk menjadi miskin pada tahun berikutnya dan berada di bawah 1,5 kali garis kemiskinan. Kelas konsumen mapan secara ekonomi, dengan kemungkinan kurang dari 10 persen untuk menjadi miskin atau rentan pada tahun berikutnya, dan mengonsumsi lebih dari Rp 1 juta per orang per bulan. Kelas konsumen yang berkembang aman dari kemiskinan tapi tidak dari kerentanan, dan berada di antara garis kerentanan dan kemapanan ekonomi. Lihat laporan Bank Dunia (2015a) untuk detail lebih lanjut.

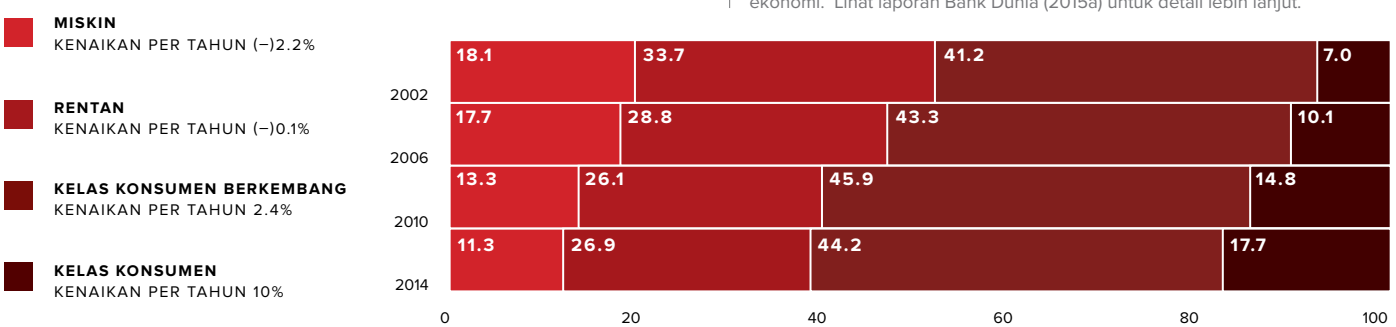

MENGAPA KETIMPANGAN PENTING

Ketimpangan pendapatan menjadi tidak adil ketika tidak semua orang memiliki peluang awal yang sama

KETIMPANGAN PENDAPATAN TIDAK SELALU MERUPAKAN HAL BURUK, KARENA TERDAPAT KESEMPATAN UNTUK MEMBERI IMBALAN BAGI MEREKA YANG BEKERJA KERAS DAN MENGAMBIL RISIKO. Kerja keras dan inovasi menguntungkan masyarakat karena dapat menciptakan barang dan jasa baru yang bisa dinikmati semua orang sehingga memberi kontribusi ekonomi lebih luas. Kemampuan Pemerintah menyediakan pelayanan publik pun menjadi lebih besar. Jika kemudian ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan di antara mereka yang bekerja keras dan kurang keras, maka dapat dibenarkan dan bahkan diinginkan. Banyak orang Indonesia setuju dengan pandangan ini. Ketika ditanya dalam sebuah survei pada tahun 2014 apakah ketimpangan akan pernah dapat diterima, 74 persen responden mengatakan "ketimpangan kadang-kadang dapat diterima" selama kekayaan diperoleh dengan adil dan berbasis kepatutan, harga barang terjangkau, dan orang miskin dilindungi.[4]

NAMUN, KETIMPANGAN DAPAT MENJADI TIDAK ADIL JIKA DISEBABKAN OLEH FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KENDALI INDIVIDU. Ada banyak jenis ketimpangan. Ketimpangan ekonomi dalam pendapatan, kekayaan dan konsumsi. Ketimpangan peluang, ketika tidak semua orang memiliki akses ke peluang yang sama dalam hidup. Ada pula faktor-faktor di luar kendali individu yang sangat berpotensi memengaruhi fase kehidupan nantinya: di mana Anda lahir, seberapa berpendidikan atau kayanya orangtua Anda, dan akses pada pelayanan publik apa saja yang didapatkan saat tumbuh dewasa. Mendapatkan awal yang sehat dalam hidup dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat mendasar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan memperoleh penghidupan layak di masa depan. Saat ketimpangan ekonomi timbul karena 'ketimpangan peluang'—yakni ketika tidak semua orang mendapatkan awal yang setara dalam hidup—maka itu tidak adil. Faktor-faktor lain di luar kendali individu yang dapat memengaruhi pendapatan, standar kehidupan dan ketimpangan antara lain: kebijakan pemerintah, seperti pembatasan impor pangan yang meningkatkan biaya hidup sebagian besar orang miskin, atau pola perpajakan dan alokasi belanja pemerintah yang tidak mengumpulkan dan menyalurkan sumber daya yang cukup untuk rakyat miskin dan rentan atau yang tidak mempunyai akses setara.

TINGKAT KETIMPANGAN YANG TINGGI DAPAT MEMPERLAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI, SEMENTARA NEGARA YANG LEBIH SETARA DAPAT TUMBUH LEBIH CEPAT. Tingginya ketimpangan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat jika warga miskin tidak mampu berinvestasi dengan tepat dalam pertumbuhan anak-anak mereka, jika warga gagal keluar dari kemiskinan dan kerentanan dan pindah ke kelas konsumen, dan jika warga tidak bisa mendapatkan pekerjaan produktif. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa rasio Gini yang lebih tinggi mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang stabil. Ketika total penghasilan dari 20 persen warga terkaya naik 5 poin persentase, pertumbuhan ekonomi turun 0,4 poin. Sebaliknya, ketika total penghasilan dari 20 persen warga termiskin naik sebesar 5 poin persentase, pertumbuhan justru naik 1,9 poin. Demikian pula peningkatan pendapatan dari 20 persen warga termiskin golongan kedua dan ketiga, turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

TINGGINYA KETIMPANGAN MENIMBULKAN DAMPAK SOSIAL YANG DAPAT MEMPERPARAH KONFLIK. Ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, maka potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik. Memang terbukti bahwa daerah-daerah

[4] Untuk pembahasan mendetail mengenai pendapat orang Indonesia tentang ketimpangan dan apa yang sebaiknya dilakukan, lihat makalah *latar belakang Ketimpangan Dalam Persepsi Orang Indonesia dan Solusi yang Diharapkan* (Bank Dunia, 2015a).

dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah. Seperti yang terlihat pada bagan berikut, masyarakat Indonesia sudah menyadari adanya ketimpangan yang terlalu tinggi dan harus dikurangi. Konflik tentunya dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui gangguan tenaga kerja dan penurunan investasi. Dampak semakin buruk ketika ketimpangan disebabkan oleh perilaku cari untung sendiri—mencoba menguasai sumber daya yang ada tanpa menghasilkan kekayaan baru melalui kegiatan produktif. Oknum-oknum tertentu mencari perlakuan khusus dan perlindungan terhadap posisi mereka, sehingga menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, korupsi dan nepotisme, yang semuanya dapat menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap lembaga publik.

SUMBER Bank Dunia (2015b) menggunakan data LSI (2014)

Orang Indonesia yang disurvei berpendapat ketimpangan sebaiknya lebih rendah dari yang ada saat ini, tetapi kenyataannya ketimpangan sekarang ini malah lebih tinggi dari yang mereka pikirkan. (bag. ES.4)

Pembagian konsumsi nasional per kuintil: jumlah seharusnya menurut orang Indonesia, jumlah saat ini menurut mereka, jumlah sebenarnya (persen)

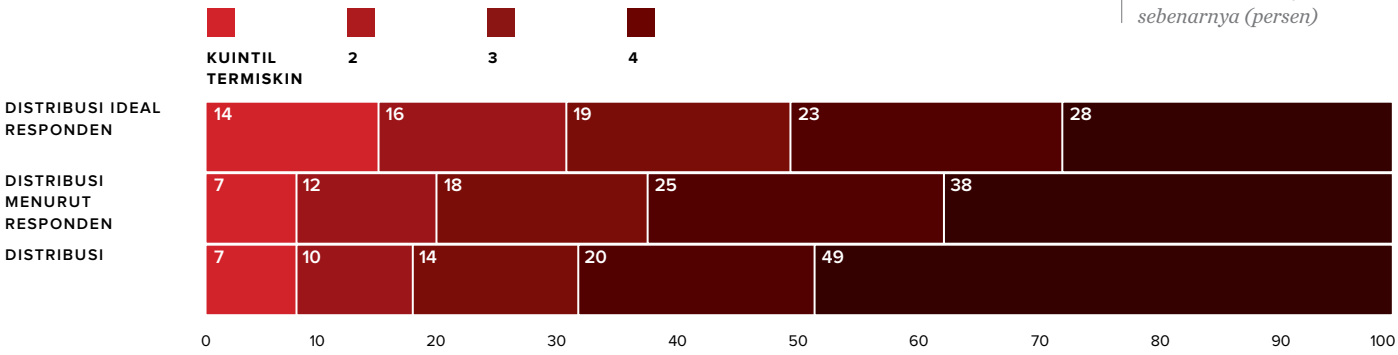

ORANG INDONESIA BERPIKIR BAHWA KETIMPANGAN KINI SUDAH TERLALU TINGGI. Warga yang disurvei rata-rata mengatakan mereka menginginkan negara yang lebih setara dengan seperlima warga terkaya mengonsumsi 28 persen dari total konsumsi. Responden memperkirakan bahwa saat ini, seperlima warga terkaya Indonesia tersebut mengonsumsi 38 persen dari total konsumsi. Meskipun kebanyakan responden sudah menyadari bahwa Indonesia terlalu timpang, data nasional menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan justru jauh lebih tinggi dari persepsi mereka: seperlima warga terkaya Indonesia mengonsumsi 49 persen dari total konsumsi.

MENGINGAT PERSEPSI INI, SEBAGIAN BESAR ORANG INDONESIA BERPIKIR PERLU SEGERA DIAMBIL TINDAKAN, DAN MENGAPA KETIMPANGAN TELAH MENJADI ISU PENTING DI MASYARAKAT. Ketimpangan adalah salah satu isu utama menjelang pemilihan presiden pada bulan Juli 2014. Ketika itu baik media nasional maupun internasional memberitakan tentang peningkatan ketimpangan, dan kedua calon presiden membuat pernyataan publik tentang strategi untuk mengurangi ketimpangan. Mereka pun didukung oleh masyarakat. Sejumlah 47 persen responden yang disurvei mengatakan "sangat mendesak" bagi Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan, sementara 41 persen lainnya berpendapat masalah ini "cukup mendesak."

UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN DIPERLUKAN PEMAHAMAN LEBIH BAIK TENTANG MENGAPA KETIMPANGAN MENINGKAT, MENGAPA ISU INI PENTING DAN APA YANG DAPAT DILAKUKAN. Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan didukung oleh Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, melaksanakan proyek penelitian untuk menelaah ketimpangan dan faktor-faktor pendorongnya di Indonesia. Tujuan proyek ini adalah mendukung Pemerintah agar lebih memahami isu yang sedang berkembang ini dan lebih mampu membuat keputusan terkait kebijakan, yang didukung penelitian mendalam serta bukti-bukti, mengenai cara menanggapinya. Bagian ikhtisar ini menelaah tren ketimpangan baru-baru ini dan mengapa isu ini dapat menjadi hal yang mengkhawatirkan. Bagian berikutnya mengulik alasan mengapa ketimpangan meningkat dan mengapa respon kebijakan dibutuhkan. Bagian keempat dan terakhir membahas apa yang dapat dilakukan para pembuat kebijakan di pemerintahan untuk mengatasi ketimpangan yang kian meningkat.

Kesadaran publik terhadap ketimpangan dan permintaan terhadap tindakan pemerintah mulai naik

MENGAPA KETIMPANGAN MENINGKAT

UNTUK MEMAHAMI APA YANG MENDORONG KETIMPANGAN DI INDONESIA DAN MENGAPA KETIMPANGAN MENINGKAT, KITA PERLU MEMAHAMI SUMBER DAYA APA SAJA YANG DIMILIKI RUMAH TANGGA YANG BERBEDA DAN BAGAIMANA MEREKA MENGGUNAKANNYA UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN (Bagan ES. 5). Setiap rumah tangga menggunakan sumber daya berbeda untuk menghasilkan pendapatan: bisa berupa tenaga untuk mendapatkan upah dan gaji atau berupa aset keuangan dan fisik. Kunci untuk memahami peningkatan ketimpangan adalah memahami mengapa sebagian rumah tangga memiliki pekerjaan lebih baik dan penghasilan lebih besar, sementara sebagian lainnya memiliki aset keuangan lebih banyak dan penghasilan lebih besar. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketimpangan adalah bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan: seberapa banyak yang dikonsumsi (dan harus dibagi untuk berapa orang) dan yang ditabung. Selain itu, guncangan dan bencana dapat tiba-tiba mengikis aset dan pendapatan rumah tangga sehingga penting untuk memahami mengapa rumah tangga kaya lebih mampu bertahan menghadapi masalah semacam itu.

ADA EMPAT PENDORONG UTAMA KETIMPANGAN DI INDONESIA YANG MEMENGARUHI GENERASI SEKARANG MAUPUN MASA DEPAN. Dengan menerapkan kerangka di atas, kami menemukan bahwa ada empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia. Pertama, ketimpangan peluang berarti tidak semua orang dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan berupah tinggi. Kedua, dengan semakin besarnya tuntutan untuk memiliki keterampilan yang tepat dalam ekonomi modern, imbalan bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan bagus semakin tinggi. Sementara mereka yang tidak punya keterampilan yang dibutuhkan, terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Jika kedua faktor ini digabungkan maka ketimpangan upah meningkat. Ketiga, semakin terpusatnya sumber daya keuangan di tangan segelintir rumah tangga kaya menimbulkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi saat ini dan memperkuat ketimpangan sumber daya manusia dan keuangan pada generasi berikutnya. Keempat, guncangan dapat memengaruhi ketimpangan pada tahap mana pun dalam kerangka ini dengan cara mengikis kemampuan rumah tangga

Kerangka aset yang menghasilkan pendapatan dapat membantu kita memikirkan mengapa ketimpangan muncul. Kerangka ini diterapkan berlaku lintas generasi dan dapat memperparah ketimpangan seiring waktu.(bag. ES.5)

Memahami ketimpangan melalui kerangka aset yang menghasilkan pendapatan dengan siklus umpan balik yang memperkuat

untuk mendapatkan penghasilan, menabung, dan berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan. Pada bagian berikutnya kita akan membahas masing-masing faktor pendorong ini.

01

Awal kehidupan yang tidak setara berarti kehidupan yang tidak setara di masa depan

KETIMPANGAN PELUANG SEJAK LAHIR DAPAT MENJELASKAN SEBAGIAN BESAR KETIMPANGAN PENDAPATAN DI MASA DEPAN. [5] Tidak adil bila ketimpangan pendapatan atau konsumsi saat dewasa diakibatkan oleh ketimpangan peluang yang terjadi akibat faktor di luar kendali individu pada saat lahir. Sepertiga ketimpangan konsumsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah kecil faktor di luar kendali individu, terutama faktor pendidikan orang tua dan tempat di mana mereka lahir. Perbedaan jenis kelamin relatif tidak banyak berkaitan dengan tingkat ketimpangan di Indonesia.

KETIMPANGAN PELUANG DIMULAI KETIKA LEBIH DARI SEPERTIGA ANAK INDONESIA TIDAK MENDAPATKAN AWAL HIDUP YANG SEHAT. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dalam rumah tangga sebagai aset terpenting, menyumbang sebagian besar angka ketimpangan konsumsi di Indonesia. Perbedaan ini dimulai bahkan sebelum lahir. Sebagian anak-anak dari rumah tangga miskin tidak mendapatkan nutrisi memadai selama tahap tumbuh kembang terpenting—sejak masih dalam kandungan hingga berusia dua tahun. Alhasil, anak-anak ini mengalami stunting, yaitu gagal mencapai tinggi badan yang tepat sesuai usia mereka. Kemampuan kognitif mereka berkembang lebih lambat dibandingkan anak-anak yang tumbuh sehat, sehingga tingkat pendidikannya lebih rendah, dan mendapatkan penghasilan lebih rendah saat dewasa, Ini adalah salah satu tantangan pembangunan terpenting, 37 persen anak-anak Indonesia mengalami tinggi badan kurang—angka yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara tetangga (Bagan ES. 6).

BERTAHANNYA TINGKAT GIZI PENDEK PADA ANAK SEBAGIAN DISEBABKAN OLEH TIDAK MERATANYA AKSES PADA NUTRISI, AIR BERSIH, SANITASI MEMADAI DAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS. Banyak anak miskin tidak mendapatkan ASI dengan tepat, dan sangat kecil kemungkinannya untuk mendapat mikronutrisi yang dibutuhkan. Meskipun sebagian besar memulai proses imunisasi, hanya sedikit yang menyelesaikannya. Selain itu, banyak anak tidak punya akses ke air bersih dan sanitasi memadai, sehingga meningkatkan risiko penyakit dan memengaruhi asupan nutrisi.

KESENJANGAN DALAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN TELAH BERKURANG SEIRING WAKTU TAPI MASIH TETAP SIGNIFIKAN (Bagan ES. 7). Yang lebih penting, masih ada kesenjangan dalam hal kualitas. Masih banyak sarana kesehatan di daerah kekurangan fasilitas dasar serta personel terlatih dan kompeten yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai amanat undang-undang. Salah satu alasannya adalah, anggaran kesehatan Indonesia dibandingkan PDB adalah yang kelima terendah di dunia, meskipun kini sudah naik di bawah pemerintahan Jokowi.

Kesehatan anak-anak dan nutrisi pada dua tahun pertama hidup mereka akan berpengaruh terhadap sisa hidup mereka

[5] Untuk pembahasan lebih mendetail tentang bagaimana ketimpangan peluang bagi anak-anak mengakibatkan ketimpangan penghasilan saat dewasa, lihat makalah latar belakang Titik Mula Yang Tidak Adil: Pengaruh peluang yang timpang terhadap masa depan anak Indonesia (Bank Dunia, 2015b).

Gizi pendek terkait erat dengan angka kematian, kognitif, pendidikan, pendapatan saat dewasa dan kesehatan yang lebih buruk. Gizi pendek di Indonesia jauh lebih tinggi daripada sebagian besar negara tetangga.) (bag. ES.6)

SUMBER WHO Child Nutrition Indicators.

Kurangnya tinggi badan berdasarkan negara (persen)

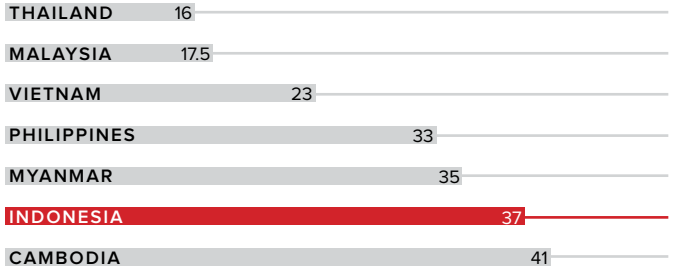

Kesenjangan dalam akses kesehatan anak yang lebih baik semakin berkurang (seperti dalam air dan sanitasi, seperti ditunjukkan), walaupun tingkat kualitas masih tetap rendah di banyak tempat. (bag. ES.7)

SUMBER susenas

Kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi memadai berdasarkan desil konsumsi rumah tangga per kapita (persen)

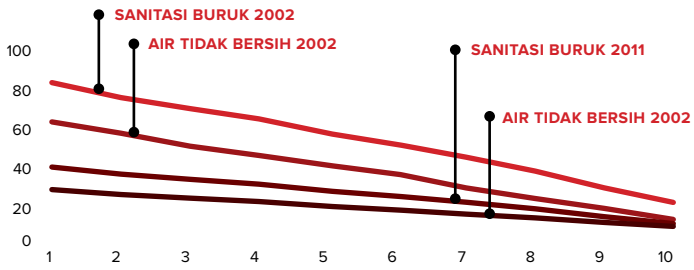

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA DALAM RUMAH TANGGA YANG LEBIH MISKIN BERKURANG LEBIH CEPAT DARIPADA RUMAH TANGGA YANG LEBIH KAYA PADA TAHUN 1990AN, SEHINGGA MEMBANTU MENURUNKAN KETIMPANGAN. Lebih banyak anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga berarti lebih sedikit sumber daya yang tersedia untuk setiap orang. Rumah tangga miskin cenderung memiliki lebih banyak anak. Sehingga, mereka tidak hanya berpenghasilan lebih rendah daripada rumah tangga yang lebih kaya, tetapi penghasilan tersebut harus dibagi kepada lebih banyak orang. Berkat program keluarga berencana nasional sejak tahun 1970an, jumlah anggota keluarga rumah tangga miskin berkurang lebih cepat daripada rumah tangga kaya pada tahun 1990an. Seandainya program keluarga berencana gagal saat itu, ketimpangan mungkin akan lebih tinggi. Karena rumah tangga miskin memiliki lebih sedikit anak, konsumsi per kapita mereka naik lebih cepat. Rasio Gini diperkirakan mencapai 2,5 poin lebih rendah dibandingkan dengan skenario jika rumah tangga miskin pada tahun 2002 sama besarnya dengan tahun 1993.

PADA TAHUN 2000AN, JUMLAH ANGGOTA KELUARGA DALAM RUMAH TANGGA KAYA TURUN SEMENTARA RUMAH TANGGA MISKIN TETAP SAMA BESAR, SEHINGGA BERKONTRIBUSI SIGNIFIKAN TERHADAP MENINGKATNYA KETIMPANGAN. Antara tahun 2002 dan 2014, jumlah anggota keluarga pada separuh populasi yang lebih miskin tetap stabil. Pada separuh populasi yang lebih kaya, ukuran rumah tangga mereka terus menyusut meski lebih lambat daripada pada tahun 1990an. Ini memberi kontribusi pada peningkatan ketimpangan selama periode ini. Jika pengurangan besar rumah tangga warga miskin dan kaya terus mengikuti pola yang sama yang terjadi antara tahun 1993 dan 2002, rasio Gini akan berada di 4 poin lebih rendah pada tahun 2014, yaitu di angka 37 dan bukan 41.

HAL INI TERJADI KARENA EFEKTIVITAS KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA MENURUN SELAMA DASAWARSA TERAKHIR. Penggunaan kontrasepsi saat ini kurang lebih sama dengan satu dasawarsa yang lalu. Meskipun kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi tidak terlalu tinggi dibandingkan negara lain, namun selama beberapa tahun belakangan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Ini menunjukkan tidak meratanya akses program keluarga berencana antara orang kaya dan miskin, terutama metode jangka panjang seperti IUD (spiral), yang justru lebih efektif membatasi jumlah anggota keluarga. Hal lain yang turut memperlemah pelaksanaan program keluarga berencana: desentralisasi, kurangnya dukungan politik di tingkat daerah, dan lemahnya peraturan. Pertama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dulu merupakan lembaga kuat di bawah kendali pemerintah pusat, kesulitan mempertahankan efektivitasnya setelah Indonesia menerapkan desentralisasi. Tanggung jawab untuk penerapan dan pengawasan dialihkan ke pemerintah daerah (kabupaten dan kota). Kedua, dukungan anggaran dari pemerintah daerah menurun.

PERUBAHAN DEMOGRAFI INI TENTUNYA AKAN BERDAMPAK PADA PELUANG GENERASI

Keluarga miskin cenderung lebih besar, sehingga sumber daya terbagi lebih tipis

Kesenjangan angka partisipasi sekolah antara anak yang lebih kaya dan lebih miskin telah berkurang seiring waktu... (bag. ES.8)

SUMBER Susenas 2012

Angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun berdasarkan kuintil konsumsi per kapita orang tua

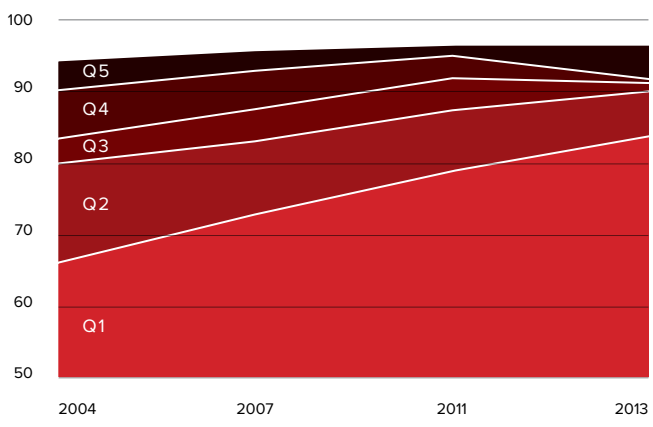

...tapi di balik angka partisipasi sekolah yang lebih tinggi terdapat perbedaan kualitas pendidikan pada sekolah dan daerah yang berbeda... (bag. ES.9)

Nasional
Pedesaan
Perkotaan
Maluku/ Papua

SUMBER Podes 2011 Infrastructure Survey

Kualitas fasilitas pendidikan dan guru (persen)

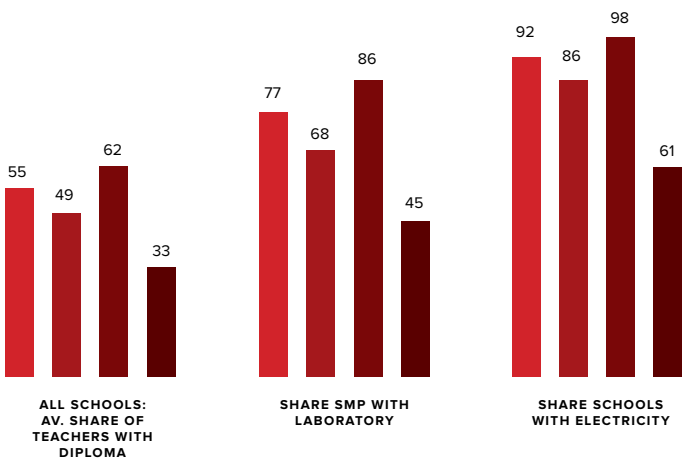

BERIKUTNYA. Berbaliknya tren jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga miskin dan kaya tidak hanya memberi kontribusi terhadap tingginya ketimpangan konsumsi saat ini, tapi juga masa depan. Sedikitnya jumlah anggota keluarga yang lebih kaya berarti akan membawa sejumlah manfaat positif bagi anak-anak mereka dibandingkan anak-anak dari rumah tangga yang lebih miskin. Keluarga yang lebih kecil dapat memberi kontribusi pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, sementara jeda di antara kehamilan membuat tubuh ibu dapat pulih dan memberikan lebih banyak gizi sehingga bayi dapat dilahirkan dengan berat badan sehat. Ini juga berarti lebih banyak perhatian dapat diberikan kepada setiap anak, sehingga membantu mereka lebih siap masuk prasekolah. Mengurangi angka kehamilan remaja dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak serta rendahnya berat badan bayi saat lahir. Anak-anak yang lebih sehat yang terlahir dalam keluarga mapan dapat meningkatkan ketimpangan di masa depan karena mereka mendapatkan awal yang lebih baik dalam hidup.

KETIMPANGAN PELUANG SEMAKIN PARAH KETIKA TIDAK SEMUA ANAK MENDAPATKAN AWAL YANG BAIK DI SEKOLAH. Kecil kemungkinan bagi anak-anak yang tinggal di luar Jawa atau di wilayah pedesaan, khususnya mereka yang miskin untuk mengikuti program pendidikan anak usia dini, di mana proses pembelajaran dimulai. Di tingkat sekolah dasar, angka partisipasi sekolah hampir merata. Kesenjangan angka partisipasi sekolah menengah pertama antara anak yang lebih kaya dan lebih miskin semakin berkurang seiring waktu (Bagan ES. 8). Meskipun demikian, anak yang lebih miskin tidak naik ke jenjang pendidikan berikutnya pada taraf yang sama dengan anak yang lebih kaya. Angka partisipasi sekolah di kelas enam Sekolah Dasar untuk 20 persen anak-anak terkaya hanya 9 poin persentase lebih tinggi daripada 20 persen anak-anak termiskin, namun 21 poin persentase lebih tinggi pada kelas satu Sekolah Menengah Pertama.

TANTANGAN TERBESAR UNTUK KESETARAAN AWAL BAGI SEMUA ORANG ADALAH KUALITAS PENDIDIKAN. Sekolah-sekolah di pedesaan dan di Indonesia timur lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki guru terlatih atau fasilitas memadai. Tidak adanya guru juga menjadi masalah di beberapa daerah (Bagan ES. 9). Ketimpangan kualitas pendidikan tetap terjadi bahkan jika anak miskin tetap bersekolah. Nilai yang mereka dapatkan seringkali lebih kecil dari yang didapatkan anak kaya. Ini berdampak buruk pada hasil pembelajaran murid-murid miskin dan di daerah terpencil. Contohnya, anak kelas tiga sekolah dasar di Jawa membaca 26 kata per menit lebih cepat dibandingkan anak di Nusa Tenggara, Maluku atau Papua. Demikian pula, anak yang lebih kaya membaca 18 kata lebih cepat daripada anak yang lebih miskin. Rendahnya kualitas pendidikan untuk mereka yang kurang beruntung (mayoritas anak Indonesia) menyebabkan rendahnya kualitas rata-rata hasil pembelajaran. Tujuh puluh empat persen anak Indonesia usia 15 tahun bahkan tidak mencapai kemampuan dasar Tingkat 2 (nilai 420) dalam tes matematika dan sains internasional PISA. Ini adalah nilai kelima terburuk dari 82 negara (Bagan ES. 10).

MESKIPUN KESENJANGAN AKSES PADA PENDIDIKAN DASAR DAN KESEHATAN BERKURANG, KETIMPANGAN TERUS MENINGKAT, DENGAN KEADAAN SAAT LAHIR MASIH MEMAINKAN PERAN SIGNIFIKAN. Berkat kemajuan signifikan dalam bidang ekonomi dan pendidikan yang dinikmati rakyat Indonesia pada periode 1960an dan 1970an, pengaruh keadaan saat lahir terhadap ketimpangan menurun, seperti pendidikan orang tua dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan.

...yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan nilai terburuk dalam tes sains dan matematika internasional (bag. ES.10)

Persentase anak usia 15 tahun dengan nilai tes matematika dan sains internasional PISA di bawah Tingkat 2 (kemampuan dasar, nilai 420)

SUMBER
OECD 2015

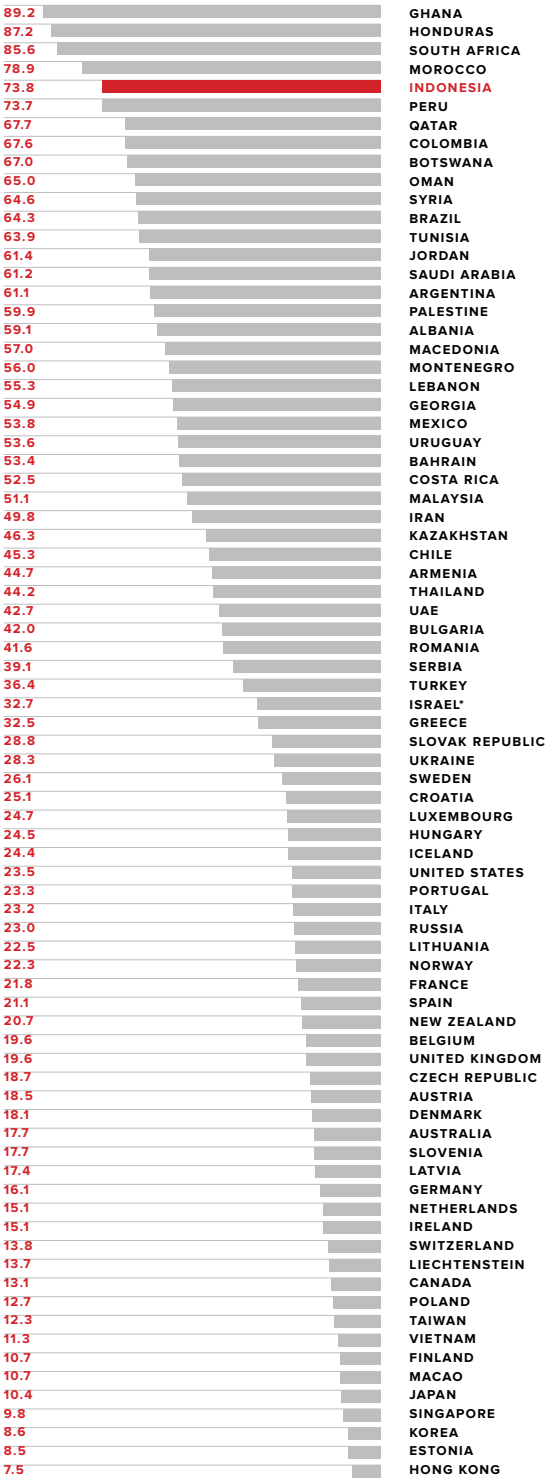

Dari 39 persen ketimpangan konsumsi saat ini turun menjadi 34 persen untuk mereka yang dilahirkan pada tahun 1950an dibandingkan kelahiran tahun 1970an. Namun, penurunan ini telah berhenti dan mungkin bahkan berbalik untuk mereka yang lahir pada tahun 1980an dan seterusnya. Ini sebagian karena akses pada pelayanan publik *berkualitas* tetap tidak merata, meskipun kesenjangan akses fisik telah berkurang. Ketimpangan *meningkat* selain karena faktor kesenjangan keterampilan yang terus terjadi antara anak yang beruntung dan kurang beruntung, ditambah semakin tingginya kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil.

Naiknya permintaan & kurangnya jumlah pekerja terampil membuat upah mereka semakin tinggi

02

Dua pasar tenaga kerja: upah semakin tinggi untuk segelintir pekerja terampil dan pekerja kurang terampil yang terjebak dengan produktivitas dan upah rendah

DI ERA EKONOMI GLOBAL YANG DINAMIS SAAT INI, KEMAJUAN TEKNOLOGI, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI, MEMBUAT KETERAMPILAN SEMAKIN PENTING. Kemajuan teknologi telah membawa manfaat signifikan dalam belasan tahun terakhir: transportasi dan barang yang lebih murah, akses lebih besar pada pasar bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, serta komunikasi dan pembagian pengetahuan yang lebih baik. Untuk menggunakan dan meningkatkan teknologi-teknologi baru di balik kemajuan ini, dibutuhkan tingkat kemampuan yang semakin tinggi. Karena itu, permintaan akan pekerja terampil dalam berbagai sektor telah meningkat di sebagian besar negara di seluruh dunia. Profil para pekerja terampil ini merupakan mereka yang sejak awal menyelesaikan sekolah dan mengambil manfaat dari pendidikan berkualitas tinggi. Ini membuktikan adanya konsekuensi dari ketimpangan peluang sejak lahir.

DI INDONESIA, PEMBERI KERJA SEMAKIN MEMBUTUHKAN LEBIH BANYAK PEKERJA TERAMPIL NAMUN KESULITAN MENCARINYA. Pemberi kerja di Indonesia juga mencari pekerja dengan tingkat keterampilan lebih tinggi. Persentase pekerjaan yang membutuhkan pendidikan setingkat sekolah menengah atas telah meningkat selama dasawarsa terakhir dari 22 persen pada tahun 2002 menjadi 35 persen pada tahun 2013 (Bagan ES. 11). Tetapi jenjang pendidikan tidaklah sama dengan keterampilan. Meskipun semakin banyak orang mengenyam pendidikan di Indonesia, semua pengusaha manufaktur dan jasa di luar pendidikan yang disurvei Bank Dunia mengatakan "sulit" atau "sangat sulit" menemukan tenaga kerja profesional. Empat puluh sampai 50 persen pengusaha mengatakan staf mereka memiliki keterampilan berpikir, perilaku, komputer dan bahasa yang kurang baik (Bagan ES. 12).

PADA SAAT YANG SAMA, HANYA SEDIKIT PELUANG PELATIHAN BAGI MEREKA YANG MENINGGALKAN SEKOLAH TANPA MENDAPATKAN KETERAMPILAN YANG MEREKA BUTUHKAN. Banyak dari tenaga kerja Indonesia meninggalkan sekolah tanpa keterampilan dasar karena pendidikan yang tidak selesai dan berkualitas rendah. Kesempatan bagi mereka kelak untuk mengembangkan keterampilan tersebut sangat terbatas. Tercatat kurang dari 1 persen anak muda usia 19 sampai 24 tahun yang telah mengikuti pelatihan teknik, TI atau bahasa. Kendala di dua bidang pertama disebabkan terbatasnya pelatihan. Sementara, kesempatan untuk belajar langsung di tempat kerja juga terbatas, karena sebagian besar perusahaan adalah usaha kecil dan menengah (UKM) dan biaya pelatihan terlalu mahal. Hanya sedikit perusahaan di Indonesia yang menyediakan pelatihan semacam ini dibandingkan negara-negara lain di Asia Timur dan belahan dunia lainnya. Sekitar 70 persen perusahaan di Asia Timur yang mempekerjakan lebih dari 100 orang menawarkan pelatihan formal, namun di Indonesia persentasenya kurang dari 40 persen. Kesenjangan ini meningkat untuk skala UKM dibandingkan perusahaan lain secara regional. Dengan akses terbatas untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, para pekerja kesulitan meningkatkan keterampilan mereka dan menemukan pekerjaan yang lebih baik.

AKIBATNYA, UPAH PEKERJA TERAMPIL NAIK LEBIH PESAT DIBANDINGKAN UPAH

PEKERJA TIDAK TERAMPIL. Terdapat kesenjangan upah yang semakin lebar antara pekerja terampil dan tidak terampil. Upah pada sektor dengan produktivitas tinggi yang membutuhkan keterampilan lebih, seperti jasa keuangan, telekomunikasi dan sejumlah sektor manufaktur, telah naik lebih pesat dibandingkan upah pada sektor dengan produktivitas rendah. Secara rata-rata per tahun, setiap tambahan Rp 200 juta produktivitas tenaga kerja per tahun yang dinikmati suatu sektor menyebabkan pertumbuhan upah riil yang lebih tinggi 1,0 poin persentase antara 2001 dan 2014.[6] Dalam pasar tenaga kerja ini, pekerja dari rumah tangga yang lebih kaya yang kemungkinan besar lebih terdidik dan lebih terampil, meraup keuntungan dari upah lebih tinggi.

BELUM TENTU PENINGKATAN UPAH PEKERJA TERAMPIL MENJADI MASALAH, KARENA KEBUTUHAN YANG LEBIH TINGGI AKAN KETERAMPILAN MERUPAKAN INDIKATOR POSITIF DALAM SEBUAH EKONOMI NEGARA, NAMUN PENINGKATAN INI BERPOTENSI MENJADI MASALAH JIKA TIDAK SEMUA ORANG PUNYA KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN TERSEBUT. Saat suatu negara ingin naik peringkat dari pendapatan menengah bawah ke menengah atas, penting bagi ekonominya untuk berubah, sektor-sektor dan perusahaan-perusahaan naik posisinya di rantai nilai ke barang dan jasa yang lebih maju. Saat proses ini terjadi, pengusaha akan membutuhkan pekerja dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Maka, upah pekerja terampil yang lebih tinggi dapat menjadi tanda positif bahwa ekonomi sedang menjalani transisi. Artinya, upah pekerja terampil yang lebih tinggi belum tentu menjadi masalah. Namun, saat tidak semua orang punya kesempatan mengembangkan keterampilan karena adanya ketimpangan kesempatan, seperti yang saat ini terjadi di Indonesia, sehingga peningkatan upah pekerja terampil justru mendorong ketimpangan jangka panjang yang lebih tinggi.

SEBAGIAN BESAR PEKERJAAN YANG TERSEDIA DAN PEKERJAAN BARU TERPUSAT DI SEKTOR DENGAN PRODUKTIVITAS RENDAH, SEHINGGA PEKERJA TERJEBAK DALAM PEKERJAAN BERUPAH RENDAH, UMUMNYA DI SEKTOR PERTANIAN DAN INFORMAL. Di antara tahun 2001 dan 2012, tercipta lebih dari 20 juta pekerjaan baru. Namun penciptaan lapangan kerja terpusat pada sektor-sektor yang produktivitasnya rendah dan tidak membutuhkan keterampilan tinggi. Dari total pertumbuhan lapangan kerja, 30 persen terjadi dalam layanan masyarakat, sosial dan pribadi dan 28 persen dalam grosir, perdagangan dan ritel, sementara manufaktur menyumbang hanya 16 persen total pertumbuhan (3,3 juta lapangan pekerjaan).

PROSPEK BAGI PARA PEKERJA INI SURAM KARENA KURANGNYA INVESTASI PADA INFRASTRUKTUR DAN BURUKNYA IKLIM INVESTASI SEHINGGA MEMPERLAMBAT TERCIPTANYA PEKERJAAN YANG LEBIH PRODUKTIF. Kurangnya investasi pada infrastruktur dan buruknya iklim investasi telah menghalangi terciptanya pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Investasi pada infrastruktur kolaps saat krisis keuangan Asia dan masih belum pulih sepenuhnya.

kurang dari 1 persen anak muda yang telah mengikuti pelatihan teknik, TI atau bahasa

[6] Produktivitas tenaga kerja di sini diukur sebagai nilai keluaran PDB pada sektor tertentu dibagi jumlah pekerja. Produktivitas pekerja berkisar antara Rp 20 juta dari PDB pada sektor yang produktivitasnya sangat rendah seperti pertanian, Rp 100-200 juta pada sektor dengan produktivitas lebih tinggi dalam jasa manufaktur dan keuangan, sampai lebih dari Rp 500 juta pada sektor pertambangan nonmigas.

Persentase pekerjaan yang membutuhkan jenjang pendidikan lebih tinggi telah meningkat. (bag. ES.11)

SUMBER Sakernas, kalkulasi Bank Dunia

Pekerjaan berdasarkan jenjang pendidikan, 2002-13 (persen)

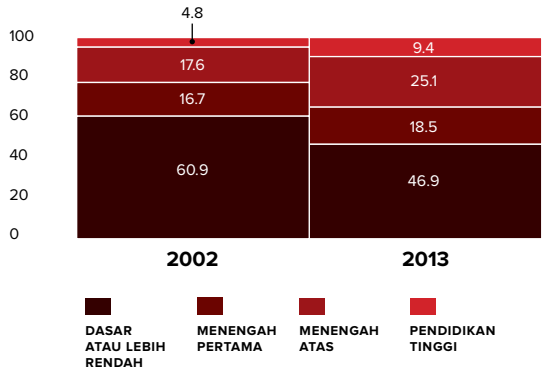

Nyaris separuh pengusaha yang disurvei menemukan kesenjangan keterampilan pada staf mereka. (bag. ES.12)

SUMBER Bank Dunia (2011) Keterampilan untuk Pasar Tenaga Kerja di Indonesia.

Keterampilan yang penting bagi pengusaha, serta kesenjangan keterampilan (persen)

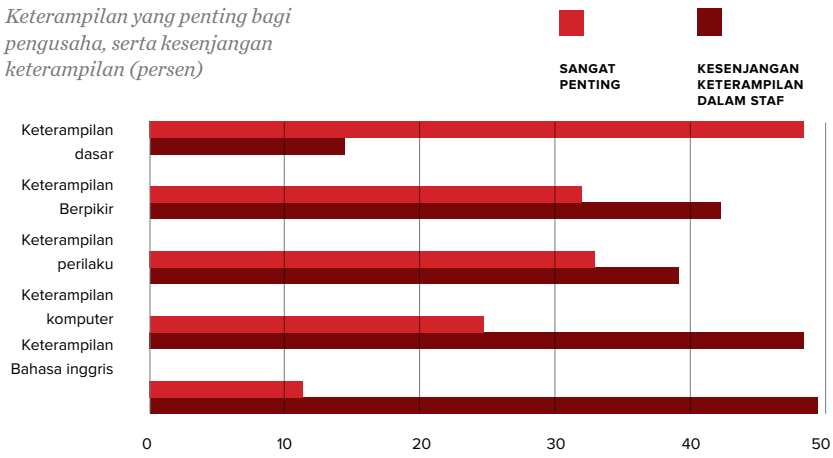

Total investasi infrastruktur per tahun turun dari rata-rata 7 persen pada 1995-97 ke sekitar 3-4 persen dari PDB dalam beberapa tahun belakangan. Tertinggal dibandingkan Thailand dan Vietnam yang lebih dari 7 persen dan 10 persen di Tiongkok selama satu dasawarsa terakhir.

MESKIPUN BELANJA PEMERINTAH MENINGKAT SELAMA BEBERAPA TAHUN BELAKANGAN, INFRASTRUKTUR INTI INDONESIA, SEPERTI JALAN, PELABUHAN, LISTRIK, DAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI, BELUM BISA MENGEJAR PERTUMBUHAN EKONOMI. Indonesia kehilangan lebih dari 1 poin persentase pertumbuhan PDB tambahan per tahun karena kurangnya investasi pada infrastruktur. Masalah transportasi adalah satu di antara kendala bisnis terbesar untuk perusahaan manufaktur, dan biaya transportasi yang terlalu tinggi melemahkan daya saing mereka. Produsen bahan mentah tidak mampu memanfaatkan potensi peluang yang terkait permintaan konsumen akhir. Akibatnya, lebih murah mengimpor jeruk dari Tiongkok daripada mendapatkannya dari Kalimantan. Ditambah lagi, proses untuk memperoleh izin usaha sangat berbelit-belit, mahal dan menghabiskan waktu. Indonesia menduduki peringkat ke-114 dari 189 negara dalam indeks Kemudahan Menjalankan Bisnis oleh Bank Dunia, lebih rendah ketimbang Malaysia (18), Thailand (26), Vietnam (78), Tiongkok (90) dan Filipina (95). Contohnya, untuk memperoleh izin membuka usaha di bidang manufaktur butuh 794 hari berdasarkan undang-undang, namun dalam penerapannya bisa lebih lama. Dibutuhkan 101 hari untuk mendapatkan aliran listrik di Indonesia, sementara hanya 35 hari di Thailand.

PERATURAN PASAR TENAGA KERJA INDONESIA JUGA MENGHALANGI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL DAN MENYULITKAN PEKERJA UNTUK PINDAH KE SEKTOR-SEKTOR YANG LEBIH PRODUKTIF. Indonesia memiliki salah satu peraturan tenaga kerja paling kaku secara regional. Hukum mewajibkan pembayaran pesangon sebesar setidaknya 100 minggu gaji. Sementara, proses penetapan upah minimum berujung pada kenaikan signifikan. Pada tahun 2013, 25 provinsi menaikkan upah minimum sebesar rata-rata 30 persen, sementara Jakarta sebesar 44 persen. Ini menyebabkan upah minimum di Indonesia lebih tinggi dari Thailand dan Vietnam, Tiongkok dan Filipina. Padahal tingkat produktivitas buruh Indonesia adalah salah satu yang terendah di kawasan. Dengan adanya peraturan baru yang diberlakukan pada waktu laporan ini naik cetak, upah minimum kini mulai ditetapkan dengan formula berbasis inflasi dan pertumbuhan PDB. Walaupun peraturan baru ini menjanjikan, namun masih belum mengatasi masalah produktivitas pekerja dan diskresi di pihak pemerintah provinsi. Tingginya pesangon dan proses negosiasi upah minimum yang tidak jelas, memperkecil kemungkinan perusahaan mempekerjakan buruh secara formal. Kebanyakan perusahaan menanggapinya dengan tidak menggunakan kontrak resmi, melainkan kontrak jangka pendek atau mengandalkan perusahaan perantara yang menyediakan tenaga kerja alih daya. Faktanya, sekitar sepertiga buruh di Indonesia masih bekerja tanpa kontrak. Jumlah buruh yang menerima upah memang mencapai 45 persen total lapangan kerja namun hanya seperlimanya saja yang dibayar di atas upah minimum , sisanya pekerja tidak resmi tanpa jam kerja yang jelas.

SAAT INI, HUKUM HANYA MELINDUNGI SEBAGIAN KECIL PEKERJA. Kebanyakan pekerja tidak menerima pesangon sama sekali (66 persen), sementara mereka yang menerima biasanya mendapatkan lebih sedikit daripada hak mereka. Hanya 7 persen pekerja yang di-PHK menerima pesangon penuh. Peraturan ini membuat pekerja sulit pindah dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal karena pemberi kerja formal mempertimbangkan tingginya biaya pesangon dan ketidakjelasan peraturan tentang kenaikan upah minimum saat menerima pekerja. Ketidakpatuhan terhadap peraturan tenaga kerja dapat memperkuat segmentasi pasar tenaga kerja dan kesenjangan upah, sehingga pekerjaan dengan kualitas dan produktivitas rendah akan semakin banyak.

KETIMPANGAN MENINGKAT KETIKA PELUANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TAK MERATA, TERDAPAT IMBALAN YANG SEMAKIN BESAR TERHADAP MEREKA YANG MEMILIKI KEAHLIAN. Meskipun angka partisipasi sekolah meningkat, anak miskin dan kurang beruntung seringkali masih mendapatkan pendidikan dengan kualitas kurang baik, ditambah dengan kelemahan kognitif karena tinggi badan kurang saat usia dini. Ini berarti mereka tidak akan mampu berkompetisi bahkan ketika terdapat peluang yang semakin besar akan pekerja terampil dengan imbalan lebih baik. Akhirnya, pilihan pekerjaan yang bisa mereka dapatkan bersifat informal dan rendah produktivitasnya sehingga para pekerja ini terjebak dalam pekerjaan berupah rendah. Kondisi ini berbeda bagi pekerja berasal dari rumah tangga

1 persen orang terkaya memiliki separuh dari seluruh kekayaan Indonesia

yang lebih kaya dengan bekal keterampilan, mereka meraup keuntungan dari pasar tenaga kerja yang kekurangan keterampilan.

KESENJANGAN UPAH YANG MAKIN LEBAR ANTARA SEGELINTIR PEKERJA TERAMPIL DAN MAYORITAS YANG TIDAK TERAMPIL ADALAH SALAH SATU PENDORONG UTAMA MENINGKATNYA KETIMPANGAN SELAMA DASAWARSA TERAKHIR. Kesenjangan upah pekerja terampil yang makin lebar tercermin pada ketimpangan upah yang lebih tinggi. Koefisien Gini untuk upah primer naik sekitar 5 poin selama tahun 2000an, sehingga memberi kontribusi pada ketimpangan yang lebih tinggi. Faktanya, sekitar 28 persen peningkatan ketimpangan konsumsi pada tahun 2000an berkorelasi dengan imbal hasil yang semakin meningkat atas pendidikan. Karena keterampilan dalam tiap jenjang pendidikan amat bervariasi, kontribusi imbal hasil yang semakin meningkat atas keterampilan, dan bukan pendidikan, mungkin bahkan lebih tinggi lagi.

03 Tingginya konsentrasi kekayaan & konsekuensinya

SEMAKIN TERPUSATNYA KEKAYAAN DI TANGAN SEGELINTIR ORANG BERARTI PENDAPATAN DARI ASET KEUANGAN DAN FISIK JUGA MENDORONG KETIMPANGAN SEMAKIN TINGGI. Rumah tangga memperoleh pendapatan tidak hanya melalui pekerjaan tapi juga aset keuangan dan fisik. Bagian pendapatan yang dihasilkan dengan bekerja telah menurun. Sementara bagian yang dihasilkan oleh modal, seperti aset keuangan dan properti, telah meningkat. Hal ini terjadi tak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara lain di dunia. Di Indonesia, terdapat imbal hasil tinggi atas aset-aset ini selama dasawarsa terakhir. Namun, kebanyakan rumah tangga kayalah yang memiliki akses ke sumber daya ini. Sepuluh persen orang Indonesia terkaya menguasai sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan di negeri ini. Satu persen orang terkaya bahkan memiliki separuh dari seluruh kekayaan (Bagan ES. 13), menempati posisi tertinggi kedua (bersama Thailand) setelah Rusia dari 38 negara. Ini berarti pendapatan dari aset keuangan dan fisik dinikmati lebih sedikit rumah tangga di Indonesia dibandingkan di banyak negara lain.

KEKAYAAN YANG DIHIMPUN MENGHASILKAN BAHKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN DI MASA DEPAN, SEHINGGA MENDORONG KETIMPANGAN MENJADI JAUH SEMAKIN TINGGI. Aset keuangan dan fisik menghasilkan pendapatan lebih tinggi hanya untuk sejumlah kecil rumah tangga kaya di Indonesia, dan rumah tangga tersebut kemudian menyimpan pendapatan yang kemudian akan tumbuh menjadi kekayaan yang lebih besar lagi. Bagian kekayaan yang dikuasai 10 persen orang terkaya di Indonesia naik 7 poin persentase antara tahun 2007 dan 2014. masuk 10 besar negara dengan angka tertinggi dari 46 negara selama periode tersebut. Aset yang meningkat di masa kini juga akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi lagi di masa depan.

SEBAGIAN PENGUMPULAN KEKAYAAN DISEBABKAN PERBEDAAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK ANTARA PENGHASILAN PEKERJA DAN modal. Meningkatnya konsentrasi kekayaan sebagian disebabkan perbedaan dalam cara pemungutan pajak penghasilan dari pekerja dan modal. Contohnya, pajak yang dipotong dari dividen hanya 10 persen (dan pajak yang

Segelintir warga Indonesia meraup keuntungan lewat kepemilikan aset keuangan dan fisik

Indonesia memiliki salah satu konsentrasi kekayaan tertinggi dari 38 negara yang datanya tersedia (bag. ES.13)

SUMBER Credit Suisse (2014)

Pembagian total kekayaan yang dikuasai 1 persen rumah tangga terkaya (persen)

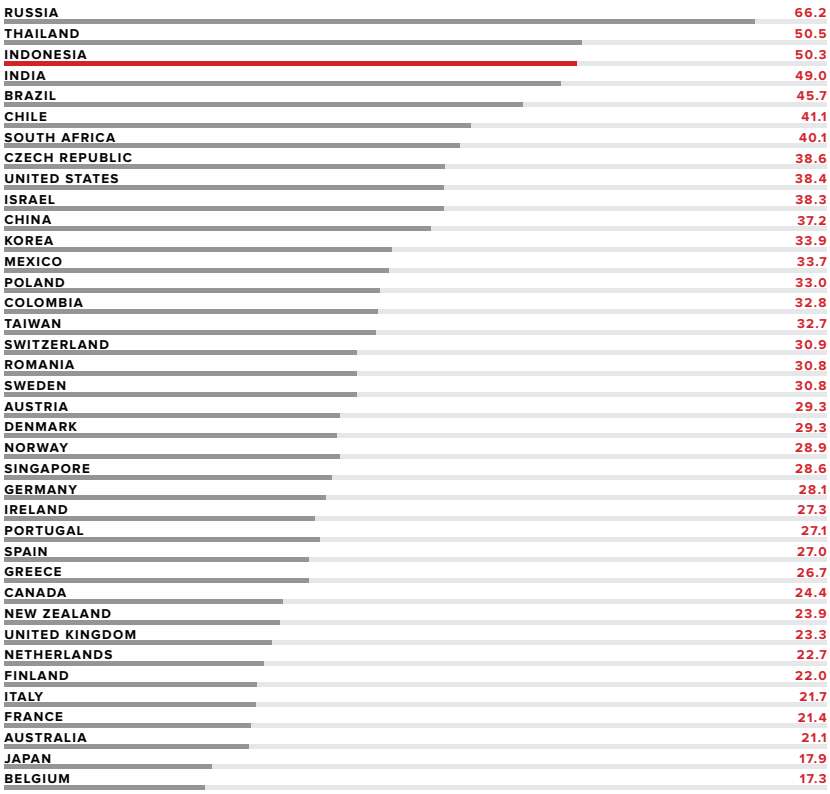

dipotong dari bunga hanya 20 persen), lebih rendah daripada semua tarif pajak penghasilan pekerja kecuali tarif terbawah, dan jauh lebih rendah daripada pungutan pajak penghasilan tertinggi sebesar 30 persen. Di sisi lain, secara teori keuntungan modal signifikan yang diperoleh dari pasar properti dan saham harus dikenakan pajak penghasilan pribadi, tapi tidak dikenakan pajak yang dipotong pihak ketiga (*withholding tax*). Dengan lemahnya pengawasan dan kepatuhan pada pajak penghasilan pribadi, *withholding tax* yang rendah seringkali berarti lebih sedikit pajak yang dibayar. Sementara, untuk banyak pekerja, pajak penghasilan dari gaji dipotong pemberi kerja, sehingga memastikan taraf kepatuhan tertentu untuk penghasilan pekerja. Alhasil, sekitar 95 persen pajak penghasilan pribadi (sekitar 20 persen dari total pajak penghasilan, sisanya terdiri dari pajak penghasilan badan) dipungut dengan cara dipotong pihak lain, biasanya dari gaji, dan hanya 5 persen sisanya berasal dari penghasilan modal.

PENGUMPULAN KEKAYAAN LAINNYA MUNGKIN BERASAL DARI BERBAGAI BENTUK TINDAK KORUPSI. UNTUK SEBAGIAN ORANG, ASET KEUANGAN DAN FISIK DIDAPATKAN MELALUI KONEKSI PRIBADI DAN PRAKTIK KORUPSI. Pada tahun 2014 Indonesia mendapat nilai 34 dari 100 (di mana nilai 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) dalam Indeks Persepsi Korupsi yang mengukur persepsi korupsi sektor publik di seluruh dunia, dan menempati peringkat ke-107 dari 175 negara. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari pengumpulan kekayaan terjadi melalui korupsi—atau setidaknya dinilai dikumpulkan dengan cara demikian.

NAMUN MASIH BANYAK ASPEK KORUPSI YANG BELUM DIKETAHUI, KHUSUSNYA ASPEK EKONOMI POLITIK LEMBAGA-LEMBAGA DAN SIFAT KORUPSI DI INDONESIA, SEHINGGA SULIT UNTUK MENGETAHUI TINDAKAN TERBAIK YANG DAPAT DIAMBIL. Tidak banyak yang diketahui tentang sifat korupsi di Indonesia dan bagaimana korupsi mendorong ketimpangan. Persepsi publik mengindikasikan bahwa korupsi terjadi secara luas, dan dari kasus-kasus besar yang terungkap memberi contoh bagaimana peraturan menguntungkan orang dalam atau dilangkahi begitu saja tanpa ada konsekuensi hukum. Korupsi kemungkinan besar berkaitan dengan ketimpangan melalui pertumbuhan yang lebih rendah: konsentrasi kekayaan yang tinggi dan pembuatan kebijakan yang memperburuk ketimpangan (contohnya, pasar tenaga kerja yang menghambat terciptanya pekerjaan produktif atau alih profesi, atau pembatasan impor yang menaikkan harga pangan). Namun, diperlukan analisis ekonomi politik untuk menemukan sebab-sebab mendasar. Aspek-aspek apa sajakah dalam kerangka politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia yang memberi insentif pada perilaku cari untung sendiri semacam itu? Bagaimanakah kebijakan dibuat, oleh siapa dan untuk keuntungan siapa? Apakah perilaku korupsi atau cari untung sendiri disebabkan kurangnya pengawasan yang memadai? ataukah perilaku itu disebabkan kurangnya penegakan pengawasan (entah melalui keleluasaan dalam penyelidikan dan penuntutan dugaan korupsi atau subversi proses hukum secara terang-terangan melalui mafia peradilan)?

04
Guncangan mengikis kemampuan rumah tangga untuk menghasilkan uang dan menabung, serta berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan

ADA BANYAK JENIS GUNCANGAN YANG DAPAT MENGIKIS SUMBER DAYA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA, ANTARA LAIN: GUNCANGAN EKONOMI, KESEHATAN, SOSIAL DAN POLITIK, SERTA BENCANA ALAM.

Guncangan dapat memengaruhi aset mendasar yang menghasilkan pendapatan. Bencana alam, misalnya, dapat menimbulkan kerugian ternak atau kerusakan peralatan yang dipakai untuk mencari nafkah. Guncangan juga bisa mengurangi pendapatan yang berasal dari aset tersebut, contohnya kekeringan dapat mengurangi panen. Guncangan pun dapat mengurangi manfaat pendapatan jika terjadi perubahan harga pangan. Kenaikan harga beras terkait pembatasan impor beras pada tahun 2006 menyebabkan angka kemiskinan naik 2 poin persentase. Hal ini mengurangi pendapatan masa depan dengan menguras aset masa kini (contohnya menjual mesin jahit untuk membayar biaya rumah sakit) atau mencegah pengumpulan aset untuk masa depan (contohnya tidak mendapatkan penghasilan karena kehilangan pekerjaan).

Guncangan sangat memengaruhi rumah tangga miskin dan rentan serta berpotensi menghalangi peningkatan derajat ekonomi mereka

BANYAK ORANG INDONESIA LEBIH BERGANTUNG PADA TEMAN DAN SAUDARA UNTUK MENGATASI GUNCANGAN SEMACAM INI DARIPADA MEKANISME FORMAL. Pegawai negeri sipil dan orang kaya punya akses pada asuransi kesehatan dan asuransi pegawai yang dapat diandalkan dalam masa sulit. Meskipun Pemerintah menanggung premi asuransi kesehatan untuk orang miskin dan rentan, program tersebut tidak selalu efektif karena penerimanya tidak selalu mengetahui pelayanan apa yang dapat mereka terima, atau tidak bisa mengaksesnya karena keterbatasan pelayanan. Selain itu, bagi pekerja yang tidak miskin atau pun kaya namun bekerja di sektor informal, perluasan cakupan asuransi kesehatan untuk mereka mungkin masih sekian tahun lamanya (Bagan ES. 14). Saat orang tidak punya akses pada mekanisme penanggulangan dalam masa sulit, mereka biasanya meminta tolong kepada keluarga dan teman. Namun, cara ini biasanya tidak cukup untuk mengatasi masalah sepenuhnya, dan tidak bisa dilakukan jika guncangan seperti bencana alam menimpa seluruh anggota dalam suatu komunitas. Saat meminjam secara informal tidak cukup, sebuah keluarga mungkin terpaksa melakukan tindakan yang mengurangi pendapatan di masa depan, seperti menjual aset produktif atau tidak menyekolahkan anak.

GUNCANGAN MENGURANGI PENDAPATAN SEMUA ORANG INDONESIA, TAPI KARENA RUMAH TANGGA YANG LEBIH KAYA MEMILIKI KETAHANAN LEBIH, MEREKA CENDERUNG TIDAK TERLALU TERPENGARUH, SEDANGKAN RUMAH TANGGA RENTAN DAPAT JATUH KEMBALI KE DALAM KEMISKINAN. Dengan tingginya kerentanan di Indonesia, guncangan kecil pun dapat dengan mudah mengurangi pendapatan. Ada 28 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan 68 juta lainnya hidup kurang dari 50 persen di atasnya (Bagan ES. 15). Alhasil, guncangan kecil dapat dengan mudah membuat mereka yang rentan kembali menjadi miskin. Faktanya, setiap tahun sekitar separuh warga tidak miskin, menjadi miskin pada tahun berikutnya. Bahkan orang yang tidak rentan pun dapat terkena dampak buruk guncangan seperti penyakit atau pemutusan hubungan kerja jika mereka tidak punya akses pada asuransi atau mekanisme penanggulangan lainnya. Selama periode 14 tahun, kebanyakan orang Indonesia telah mengalami naik turun yang cukup terjal dalam hal pendapatan. Namun, seperlima rumah tangga terkaya tetap berada dalam kuintil teratas selama periode yang sama (padahal fakta menunjukkan mereka lah yang paling terpengaruh oleh krisis keuangan Asia karena memiliki aset keuangan paling banyak,).

Kurang dari setengah dari seluruh populasi Indonesia memiliki asuransi kesehatan (bag. ES.14)

Akses pada asuransi kesehatan (persen)

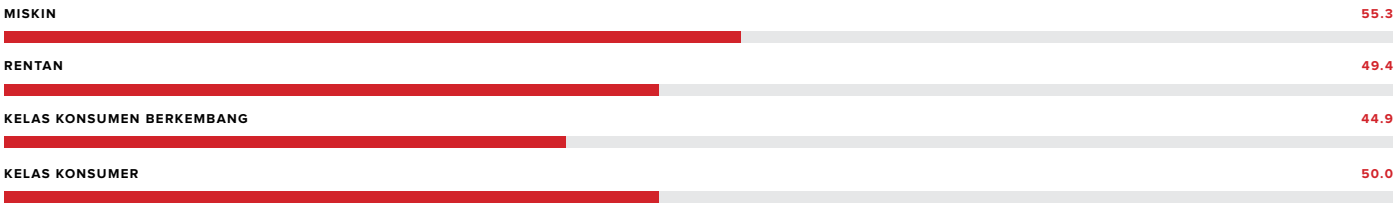

Ada lebih dari dua kali lipat orang Indonesia yang rentan daripada yang miskin. Mereka hidup kurang dari 50 persen di atas garis kemiskinan dan mudah jatuh kembali ke dalam kemiskinan jika mengalami guncangan (bag. ES.15)

Angka kemiskinan dan kerentanan di Indonesia, 2014 (persen)

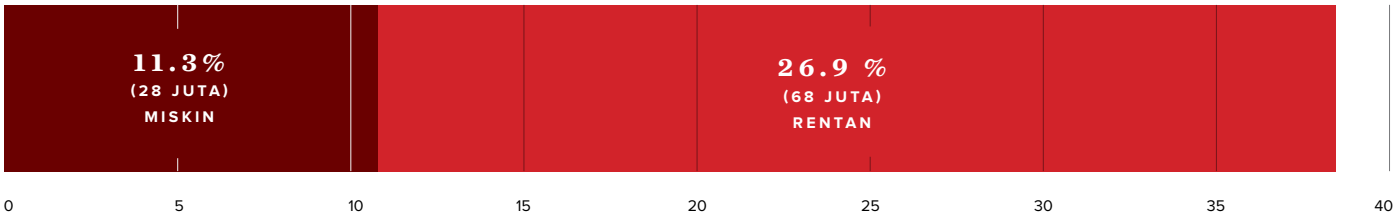

SUMBER Susenas dan Bank Dunia (2015a). **CATATAN** Orang miskin berada di bawah garis kemiskinan yaitu sekitar US$1,30; orang rentan berada di bawah 1,5 kali garis kemiskinan yaitu sekitar US$1,90; kelas konsumen berkembang berada di bawah 3,5 kali garis kemiskinan yaitu sekitar US$4,50; dan kelas konsumen berada di atasnya. Lihat laporan Bank Dunia (2015a) untuk detail.

MENGURANGI KETIMPANGAN

Tingginya ketimpangan bukan hal yang tak terhindarkan. Para pembuat kebijakan dapat menguranginya dengan menangani ketimpangan yang disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu

KETIMPANGAN YANG TINGGI DAN SEMAKIN MENINGKAT BUKAN BAGIAN YANG HARUS TERJADI DARI PROSES PEMBANGUNAN. Banyak ekonomi negara tetangga telah tumbuh tanpa meningkatkan ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Ketimpangan naik pesat di Indonesia bersamaan dengan meningkat atau menurunnya kestabilan di negara tetangga di Asia Timur yang juga tengah berkembang pesat seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Ini menandakan bahwa ketimpangan bukanlah efek samping tak terhindarkan dari pertumbuhan. Faktanya, sejumlah negara seperti Brasil telah berhasil memperlambat dan pada akhirnya membalikkan ketimpangan yang meningkat melalui pendekatan kebijakan terencana (Boks ES. 1).

KEBIJAKAN PUBLIK DAPAT MEMBANTU MENGURANGI DAMPAK FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KENDALI INDIVIDU YANG MEMENGARUHI NASIB MASYARAKAT, DENGAN MEMASTIKAN BAHWA MEREKA TIDAK LAGI TERBAGI MENJADI ORANG BERPUNYA DAN TIDAK BERPUNYA SEJAK SEBELUM LAHIR. Tidak semua ketimpangan perlu diatasi. Pemerintah dapat berusaha mengatasi ketimpangan yang disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu, dan membiarkan ketimpangan yang memberi imbalan untuk individu yang bekerja keras, mengambil risiko dan berinovasi. Ini berarti memutus siklus kemiskinan dan ketimpangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua anak harus terlahir sehat, tumbuh dengan baik pada usia dini, pergi ke sekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas, serta memasuki lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat untuk ekonomi masa kini yang modern dan dinamis. Selain itu, semua keluarga memerlukan akses pada mekanisme yang dapat melindungi mereka dari berbagai potensi guncangan yang dapat melanda dalam hidup. Harus ada lebih banyak orang yang memperoleh akses pada aset keuangan dan fisik seiring waktu, dan membayar pajak dengan besaran adil atas pendapatan yang mereka hasilkan. Untuk melakukan ini, para pembuat kebijakan punya serangkaian instrumen yang dapat digunakan. Instrumen terbaik adalah yang dapat mengatasi pendorong utama naiknya ketimpangan sekaligus memungkinkan secara politik.

BAGIAN TERAKHIR LAPORAN INI MENELAAH BEBERAPA INSTRUMEN TERSEBUT DAN MENGGARISBAWAHI TINDAKAN YANG HARUS DIPRIORITASKAN. Bagian akhir Ringkasan Eksekutif ini menyarankan untuk:

- Memperbaiki pelayanan publik di daerah untuk memberi peluang setara bagi semua orang: Kunci agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik adalah meningkatkan pelayanan publik di daerah, yang dapat memperbaiki peluang kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana bagi semua orang.
- Menggalakkan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan kesempatan melatih keterampilan bagi tenaga kerja: Pekerja yang dulu tidak mendapatkan awal yang adil masih bisa meningkatkan keterampilan mereka. Saat keterampilan mereka sudah meningkat, Pemerintah dapat membantu dengan memastikan tersedianya pekerjaan yang lebih baik melalui iklim investasi yang lebih kondusif dan peraturan perlindungan tenaga kerja yang tidak kaku tapi lebih efektif.
- Memastikan perlindungan dari guncangan: Kebijakan pemerintah dapat mengurangi frekuensi dan keparahan guncangan, sekaligus memberikan mekanisme penanggulangan agar semua rumah tangga memiliki akses ke perlindungan memadai jika guncangan melanda.
- Menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan: Prioritas terakhir ini adalah prasyarat untuk ketiga prioritas pertama. Menetapkan kebijakan fiskal yang tepat sehingga mampu meningkatkan belanja negara untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial serta jaminan sosial. Pemerintah menciptakan peluang yang lebih setara di masa

depan dan lapangan kerja yang lebih baik di masa kini agar rumah tangga berkemampuan melindungi diri sendiri. Artinya, ketiga tindakan prioritas pertama hanya mungkin dilakukan jika anggaran belanja negara cukup dan efektif. Hasil pajak untuk mendanai anggaran belanja dapat digunakan mengurangi ketimpangan saat ini, sekaligus mengatasi sebagian aspek konsentrasi kekayaan yang tidak adil.

BOKS ES.1

Bagaimana Brasil mengurangi ketimpangan

Brasil telah berhasil mengurangi ketimpangan pada tahun 2000an, meskipun diawali dengan keadaan yang amat tidak setara. Antara tahun 2001 dan 2009, rasio Gini penghasilan Brasil turun lima poin dari 58,8 ke 53,7.[7] Penurunan ini lebih drastis daripada rata-rata di wilayah Amerika Latin, yang juga mengalami penurunan ketimpangan selama era 2000an.

Dengan banyak persamaan antara konteks Brasil dan Indonesia, ada beberapa pelajaran relevan yang dapat diambil tentang cara mengurangi ketimpangan. Brasil mirip dengan Indonesia dalam beberapa hal: ekonomi Brasil yang besar dan berbasis sumber daya alam mengalami pertumbuhan pesat selama tahun 2000an; sistem politiknya sangat terdesentralisasi; Brasil telah melewati transisi untuk menjadi negara berpendapatan menengah atas. Brasil pun sempat didera ketimpangan pendapatan dan peluang yang tinggi serupa dengan yang dialami Indonesia kini. Ada empat pendorong di balik menurunnya tingkat ketimpangan di Brasil yang dapat dipelajari oleh Indonesia: (i) stabilitas makroekonomi; (ii) perluasan pendidikan dasar dan menengah; (iii) belanja negara yang pro-rakyat miskin; dan (iv) perluasan bantuan sosial.

Warga miskin telah mengambil manfaat dari stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi. Karena kaum miskin tidak punya akses pada instrumen keuangan yang dapat melindungi mereka dari inflasi, iklim makroekonomi yang menjaga harga barang tetap stabil menguntungkan warga miskin dan rentan di Brasil. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi secara luas telah mendorong terciptanya lapangan kerja, sehingga memungkinkan rumah tangga miskin untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Perluasan pendidikan dasar dan menengah telah mengubah profil tenaga kerja. Ketimpangan pendapatan pekerja di Brasil sebagian besar disebabkan ketimpangan di bidang pendidikan. Brasil mulai melaksanakan kebijakan terencana untuk memperluas pendidikan bagi rumah tangga miskin. Perluasan ini amatlah sukses. Pada tahun 1993, anak yang ayahnya tidak mengenyam pendidikan formal hanya bersekolah selama empat tahun, sedangkan saat ini siswa bersekolah selama 9-11 tahun, tak peduli tingkat pendidikan orang tuanya. Saat semakin banyak pekerja menjadi terampil, mereka pun menikmati upah lebih tinggi. Ini berarti ada lebih sedikit pekerja tidak terampil. Seiring pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap pekerja tidak terampil pun meningkat, dan upah untuk pekerja tidak terampil juga naik. Diperkirakan bahwa menurunnya perbedaan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil menyumbang dua pertiga penurunan ketimpangan.

Kebijakan belanja negara yang lebih pro-rakyat miskin, dan perluasan signifikan bantuan sosial, juga memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan. Nyaris separuh belanja pemerintah dihabiskan untuk program sosial, termasuk bantuan langsung tunai, kesehatan dan pendidikan. Kenaikan signifikan belanja negara

[7] Income Ginis are higher than consumption Ginis because rich households save more income, meaning consumption is more equally distributed than income. The Indonesian income Gini was 6.4 points higher than the consumption Gini, based on the average difference for the three years when both income and consumption Ginis were collected in Indonesia (1984, 1990 and 1993).

Koefisien gini Brazil & Amerika Latin (bag. ES.16)

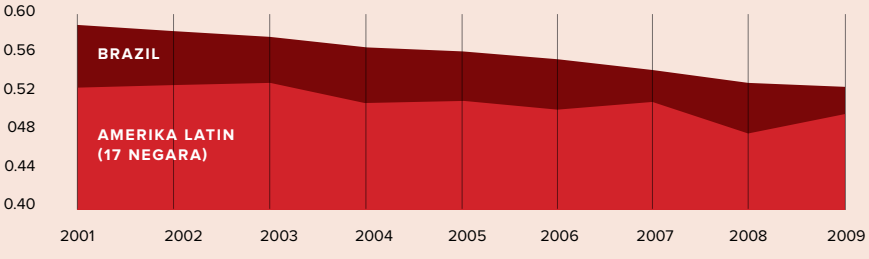

Growth incidence curve, Brazil 2001-2009 (bag. ES.17)

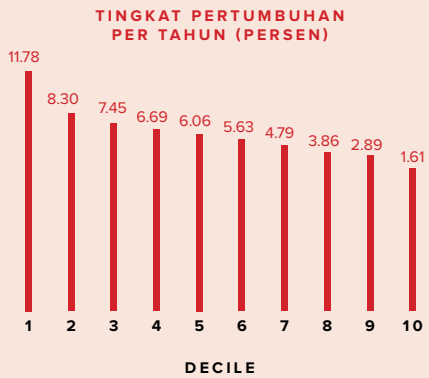

PERTUMBUHAN PENDAPATAN PER KAPITA RATA-RATA

5.91%

BOKS 1 (CONT.)

untuk bantuan sosial memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan. Peningkatan bantuan kontribusi dan nonkontribusi dari pemerintah Brasil menyumbang sekitar 30 persen pengurangan rasio Gini antara tahun 2001 dan 2009. Yang terpenting adalah perluasan *Bolsa Familia*, yaitu program bantuan langsung tunai bersyarat, yang mirip PKH di Indonesia. Tidak seperti PKH yang hanya menjangkau sekitar 5 persen rumah tangga di Indonesia, Bolsa Familia telah berkembang hingga menjangkau 25 persen rumah tangga di Brasil, dan dipandang sebagai salah satu kontribusi yang paling efektif dalam hal biaya untuk menjangkau kaum miskin dan mengurangi ketimpangan. Program-program lain seperti *Beneficio de Prestacao Continuada* (jaminan pensiun nonkontribusi) memberikan tingkat manfaat lebih tinggi daripada *Bolsa Familia*, tapi memainkan peran lebih kecil dalam mengurangi ketimpangan, sementara program jaminan sosial formal dan sektor publik perkembangannya sangat kurang.

Berkat kebijakan-kebijakan ini, pendapatan orang miskin di Brasil naik paling tinggi selama periode tersebut. Pertumbuhan pendapatan rata-rata untuk separuh populasi Brasil yang lebih miskin berada di atas rata-rata nasional. Warga termiskin paling diuntungkan, terbukti dengan pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata sebesar 12 persen per tahun, nyaris dua kali lipat rata-rata nasional dan 10 kali lipat dari angka untuk 10 persen warga terkaya.

Kasus Brasil menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan secara signifikan adalah hal yang mungkin. Jelas bahwa Indonesia bisa melakukan lebih dari sekadar memperlambat peningkatan ketimpangan, dan bahkan bisa mulai menguranginya, jika (i) hal ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, (i) pemerintah mengembangkan strategi yang koheren dan spesifik, (iii) seorang menteri senior diberi tanggung jawab utama lewat mandat penting dari presiden untuk mengawasi dan menerapkan strategi tersebut, (iv) proposal kebijakan baru di semua kementerian dan institusi pemerintah ditelaah untuk melihat potensi efeknya pada ketimpangan, dan (v) semua kebijakan dan program yang bertujuan mengurangi ketimpangan dirancang, didanai dan diterapkan dengan baik.

Selain pendanaan yang mencukupi, tindakan kebijakan terpenting untuk mendukung awal hidup yang lebih baik bagi semua orang Indonesia adalah memperbaiki pelayanan publik di daerah

01 Layanan publik di daerah

SISTEM DESENTRALISASI DI INDONESIA AMAT BERPERAN DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS SECARA EFEKTIF JIKA INGIN SEMUA ORANG MENIKMATI PELUANG YANG SAMA. Sejak diterapkannya demokratisasi dan desentralisasi, kekuatan finansial, politik dan tanggung jawab pemerintah daerah meningkat drastis. Saat ini sebagian besar wewenang atas pelayanan dasar yang memberi peluang untuk awal hidup yang baik, seperti kesehatan, air dan sanitasi, nutrisi dan keluarga berencana, dikendalikan atau dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Banyak hal harus dilakukan agar mereka memiliki sarana, kapasitas dan insentif untuk menyediakan atau mendukung layanan tersebut secara efektif.

SEJUMLAH KEBIJAKAN UTAMA DAPAT MENDUKUNG PERBAIKAN ASPEK PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH. Membangun kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dengan menerapkan sistem transfer yang lebih berbasis kinerja dan menyediakan instrumen bagi warga untuk mengawasi pelayanan publik setempat. Sejumlah prioritas lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah termasuk: mengubah cara alokasi anggaran belanja pusat, menerapkan insentif untuk mencapai standar pelayanan publik di daerah, dan meningkatkan permintaan akuntabilitas publik. Kita akan melihat bagaimana hal ini dapat dicapai khususnya dalam kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana.

SALAH SATU LANGKAH TERPENTING DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PELUANG DIMULAI DENGAN MENINGKATKAN AKSES RUMAH TANGGA MISKIN PADA PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS. Agar anak dari rumah tangga miskin mendapatkan awal yang baik mereka harus memperoleh akses pelayanan kesehatan berkualitas di tahap tumbuh kembang usia dini. Bila tidak, mereka akan berada dalam posisi kurang beruntung sepanjang sisa hidup mereka. Peningkatan anggaran belanja untuk kesehatan dapat membantu mengurangi kesenjangan akses. Namun, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Tindakan spesifik antara lain:

- Meningkatkan pembiayaan kesehatan, dengan investasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bertarget dan insentif yang tepat, agar fasilitas kesehatan

di daerah dapat membuahkan hasil. Pertama, kenaikan anggaran kesehatan masyarakat belum lama ini harus dipertahankan. Anggaran kesehatan Indonesia terhadap rasio PDB adalah yang kelima terendah dari 188 negara, yaitu hanya 1,2 persen dari PDB pada tahun 2014 (termasuk anggaran untuk sistem jaminan sosial kesehatan nasional), sebelum diumumkan kenaikan dalam anggaran 2016. Namun anggaran kesehatan masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan cara membuat pemerintah daerah lebih akuntabel dan mampu menyediakan pelayanan kesehatan di lapangan. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan investasi DAK (Dana Alokasi Khusus) bertarget yang digabung dengan insentif untuk membuahkan hasil. Contohnya, besarnya DAK untuk pemerintah kabupaten/kota dapat dikaitkan dengan indikator ketertinggalan pelayanan kesehatan terhadap standar dasar, contohnya kesehatan ibu dan anak. Kontribusi pemerintah kabupaten/kota dapat diganti oleh pusat apabila ada bukti penyediaan layanan. Seterusnya, alokasi DAK dapat juga memperhitungkan kemajuan dalam indikator tersebut. Kabupaten/kota yang kinerjanya kurang bisa dibantu, apabila terbukti masalahnya adalah kekurangan kapasitas.

- Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dalam jumlah memadai dan memastikan cukup banyak dari mereka disalurkan ke daerah tertinggal.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan jumlah, kualitas dan penyaluran tenaga kesehatan. Menghasilkan jumlah yang tepat dimulai dengan lebih memahami dinamika tenaga kesehatan di tingkat nasional dan subnasional, dengan menggunakan metode perencanaan modern untuk menghasilkan dan menyalurkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan riil, dan lebih melibatkan sektor swasta. Kualitas dapat ditingkatkan dengan membatasi rekrutmen pegawai negeri sipil pada mereka yang sudah mendapat sertifikasi menurut standar nasional dan membatasi pemberian pelayanan untuk pasien dengan asuransi kesehatan pada pelayanan yang sudah disediakan tenaga kesehatan bersertifikasi baik di sektor publik maupun swasta. Memperbaiki sistem sertifikasi, akreditasi dan perizinan pendidikan tenaga kesehatan dan tenaga medis profesional. Terakhir, agar bisa mengerahkan cukup banyak tenaga kesehatan berkualifikasi ke daerah tertinggal diperlukan penekanan sektor publik pada penempatan dokter di daerah pedesaan yang kekurangan pelayanan kesehatan. Meningkatkan penggunaan uang rakyat secara efisien dan mencoba insentif berbeda dari yang digunakan sampai saat ini untuk mendorong tenaga kesehatan agar bersedia bekerja di daerah terpencil. Contohnya, alih-alih memberi insentif keuangan untuk menarik tenaga kesehatan ke daerah pedesaan dan terpencil, bisa saja semua dokter diwajibkan bekerja selama beberapa waktu di daerah tersebut demi mendapatkan akreditasi nasional, seperti yang diwajibkan di Australia, atau pemberian beasiswa pemerintah untuk tenaga medis profesional dengan syarat wajib bekerja selama satu atau dua tahun di daerah tertinggal.

- Menciptakan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sanitasi melalui penguatan tenaga kesehatan masyarakat (kader Posyandu). Kebutuhan dan pengetahuan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak serta air dan sanitasi dapat ditingkatkan melalui: pendidikan, dukungan dan tekanan sosial, dan insentif, termasuk sosialisasi yang lebih baik tentang pentingnya perilaku sehat; penjangkauan dari pejabat kesehatan setempat, tokoh masyarakat terpercaya dan LSM; serta insentif melalui bantuan langsung tunai bersyarat seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau program bantuan sosial lainnya. Peningkatan profesionalisasi kader Posyandu khususnya penting dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan, insentif berbasis kinerja, dan pengawasan ketat dari Puskesmas. Para kader tersebut harus turun langsung ke masyarakat untuk memastikan ibu hamil menerima perawatan prakelahiran secara rutin, ibu membawa anak mereka untuk diimunisasi, dan tindakan dasar lainnya untuk mengurangi ancaman penyakit sekaligus tingginya biaya perawatan yang terlambat. Sehubungan dengan kurangnya tinggi badan dan nutrisi, kader Posyandu dapat memainkan peran utama dalam Komunikasi Perubahan Perilaku yang efektif, terutama lewat konseling pribadi yang menitikberatkan pada praktik perawatan kesehatan ibu yang lebih baik dan perilaku pemberian makanan untuk bayi dan anak kecil. Seperti telah ditunjukkan di negara-negara lain, kuncinya adalah kunjungan ke rumah secara teratur untuk memberikan dukungan yang disesuaikan bagi setiap ibu. Percontohan pelatihan Posyandu di bawah PNPM Generasi juga dapat ditingkatkan lebih lanjut.

rasio anggaran kesehatan Indonesia terhadap PDB adalah yang kelima terendah dari 188

KESENJANGAN AKSES UNTUK BERSEKOLAH PERLAHAN MULAI BERKURANG, TAPI TETAP HARUS DIIKUTI OLEH PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAR DAPAT MENGURANGI

KETIMPANGAN. Kesenjangan angka partisipasi sekolah antara orang kaya dan miskin telah berkurang seiring waktu, namun kontribusi ketimpangan peluang pada ketimpangan secara keseluruhan belum menurun karena kesenjangan kualitas terus terjadi. Ini juga faktor penting yang menghambat kenaikan pertumbuhan ekonomi. Mendorong semua anak untuk tetap bersekolah setidaknya sampai selesai sekolah menengah atas merupakan langkah penting. Artinya pemerintah perlu meningkatkan akses di daerah tertentu, meningkatkan pentargetan, cakupan, tingkat manfaat dan penyerapan beasiswa untuk rumah tangga miskin di semua daerah serta pemberian insentif bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Namun, ketimpangan peluang dapat berkurang lebih jauh dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat, jika kesenjangan kualitas diatasi (manfaat dalam hal pertumbuhan untuk Indonesia diperkirakan sekitar tujuh kali lebih tinggi jika kesenjangan kualitas dikurangi, dibandingkan jika kesenjangan akses dikurangi). Mungkin diperlukan manajemen sekolah yang menyeluruh dan reformasi pendidikan seperti yang berhasil dilakukan di negara lain, dan mencari jawaban mengapa penerapan reformasi semacam ini di Indonesia masih tersendat. Ada beberapa tindakan spesifik yang dapat membantu, antara lain:

- Memastikan pembiayaan sekolah yang cukup, khususnya di daerah tertinggal, untuk mencapai standar kualitas minimum. Sebuah laporan Bank Dunia baru-baru ini mengidentifikasi beberapa opsi untuk memperbaiki BOS (Bantuan Operasional Sekolah), antara lain: (i) mengaitkan pendanaan lebih langsung pada standar pendidikan untuk menandakan pentingnya menggunakan sumber daya BOS untuk memenuhi standar tersebut; (ii) merevisi daftar hal-hal yang dapat dibiayai dengan BOS agar sekolah dapat lebih luwes berinvestasi sesuai masukan yang meningkatkan kualitas; (iii) menyesuaikan nilai BOS secara berkala untuk memperhitungkan perbedaan harga secara regional dan inflasi agar memastikan semua sekolah dapat memenuhi standar operasi; (iv) menggunakan formula BOS untuk memberi lebih banyak pendanaan bagi sekolah yang melayani anak miskin dan kurang beruntung; dan (v) mulai mengurangi penggunaan sumber daya BOS untuk pengeluaran 'di luar kantong' siswa miskin dan lebih mengutamakan program

bertarget yang sudah ada, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar)., Pemerintah daerah sekaligus didorong menggunakan dukungan operasional mereka untuk sekolah yang melengkapi BOS (Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA) . BOS memungkinkan sekolah memenuhi standar pelayanan minimum sedangkan BOSDA memungkinkan sekolah memenuhi standar pendidikan nasional yang lebih tinggi. Reformasi di DKI Jakarta baru-baru ini memberikan suatu contoh pendekatan potensial, dengan menggabungkan komponen ekuitas (alih-alih pengeluaran merata per orang, sekolah-sekolah di Kepulauan Seribu menerima lebih banyak dana karena biaya penyediaan pelayanan yang lebih tinggi) dan komponen insentif (sekolah-sekolah dengan nilai Ujian Nasional tertinggi dan kenaikan nilai Ujian Nasional tertinggi menerima alokasi tambahan pada tahun berikutnya). Selain itu, investasi DAK bertarget dan berbasis kinerja yang diusulkan di bidang kesehatan juga bisa diterapkan di bidang pendidikan berdasarkan kesenjangan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota.

- Meningkatkan kompetensi guru di semua daerah, dan memastikan kecukupan penyalurannya ke daerah tertinggal. Strategi yang bisa digunakan antara lain: (i) seleksi masuk dan keluar yang lebih ketat (melalui penggunaan tes kompetensi) dan akreditasi institusional untuk memastikan tersedianya guru kompeten; (ii) rekrutmen dan penyaluran guru kompeten, khususnya di daerah tertinggal, dengan menggabungkan insentif keuangan, skema bonding dan penempatan berbasis kelompok; (iii) pengembangan dan dukungan profesional yang lebih kuat; dan (iv) akuntabilitas guru yang lebih tinggi, seperti melalui penggunaan penilaian dan tes kompetensi tahunan untuk menentukan kemajuan karir, dan mengaitkan pembaruan kontrak dengan kinerja.

DENGAN STRATEGI TEPAT SASARAN, PEMERINTAH DAPAT MEMBERIKAN KELUARGA MISKIN AKSES YANG ADIL PADA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA UNTUK MENGENDALIKAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA. Selain karena urbanisasi dan kenaikan angka partisipasi sekolah, jumlah anggota keluarga akan berkurang saat pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berlanjut. Namun dibutuhkan usaha untuk mentargetkan rumah tangga miskin supaya mereka tidak tertinggal karena terlalu banyak anak. Caranya dengan mengurangi ketimpangan dalam pengetahuan, penggunaan, akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, sekaligus memastikan bahwa keluarga berencana dianggap sebagai hak yang sangat penting.

Sektor swasta digunakan oleh 73 persen peserta keluarga berencana di Indonesia, maka kemampuan swasta untuk menyediakan pelayanan efektif bagi sebagian besar rakyat Indonesia harus diperkuat, bukan dilemahkan. Namun, kecil kemungkinan sektor swasta cukup menjangkau semua rumah tangga miskin karena sulit dan mahal untuk menjangkau kelompok miskin dan termarginalkan. Maka, usaha lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan untuk merevitalisasi program keluarga berencana, dengan strategi mentargetkan mereka yang paling membutuhkan. Tindakan spesifik antara lain:

- Mensosialisasikan konsep keluarga berencana sebagai hak bagi semua orang. Salah satu penyebab berbaliknya tren kelahiran anak adalah meningkatnya angka kehamilan remaja. Ini sebagian disebabkan tekanan sosial terhadap pemberian kontrasepsi untuk remaja dan orang yang belum menikah. Kenaikan angka pernikahan dini juga

Kecukupan pendanaan untuk program keluarga berencana sangat penting

96 persen orang Indonesia punya akses pada persalinan oleh tenaga kesehatan terampil, tapi seperempat dari semua persalinan tidak dibantu oleh tenaga terampil

mengakibatkan kelahiran anak lebih cepat dan keluarga lebih besar. Sangat penting untuk memastikan semua orang punya akses pada keluarga berencana.

- Membantu sektor swasta untuk memberikan pelayanan keluarga berencana yang efektif, sementara program pemerintah menutupi kesenjangan dalam hal cakupan. Karena sebagian besar orang Indonesia menggunakan pelayanan keluarga berencana swasta, maka kemampuan sektor swasta harus diperkuat. Perbaikan infrastruktur dan logistik akan memperluas jangkauan sektor swasta ke daerah terpencil yang sampai sekarang kurang terlayani sehingga mengurangi penyediaan pelayanan publik. Pemerintah juga harus mencari cara mendorong pelayanan sektor swasta untuk kembali menggunakan metode jangka panjang dan permanen bagi keluarga yang sudah mencapai ukuran ideal. Metode semacam ini lebih efektif daripada metode jangka pendek. Saat ini, inisiatif untuk mengkriminalisasi penyediaan alat kontrasepsi oleh swasta, memperparah tren kelahiran anak. Rumah tangga miskin tidak mampu mengakses pelayanan sektor swasta, sementara pendanaan program keluarga berencana pemerintah sangat minim. Perjanjian di tingkat pusat antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Dalam Negeri (yang menangani permasalahan pemerintah daerah) tentang pendanaan keluarga berencana amatlah penting karena anggaran keluarga berencana kini adalah hak prerogatif daerah.

- Para pendukung keluarga berencana di daerah harus menerima bantuan teknis dan badan keluarga berencana daerah harus didirikan di lebih banyak kabupaten/kota di bawah peraturan yang ada. Penggunaan DAK dapat diubah agar anggaran keluarga berencana tidak terlalu berfokus pada infrastruktur dan lebih pada biaya operasional, seperti pelatihan bidan dan penyediaan alat kontrasepsi.

- Mengembangkan strategi lokal untuk merevitalisasi pelayanan keluarga berencana bertarget. Strategi pemerintah yang jelas dapat memperbaiki penyediaan informasi dan pelayanan keluarga berencana, dengan fokus pada kelompok target yang termarginalkan dan miskin. Strategi yang efektif antara lain: pembatasan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN, serta fokus memperbaiki penyediaan informasi dan pelayanan keluarga berencana; menggalakkan penggunaan kontrasepsi oleh pasangan dari kelompok miskin dan termarginalkan dalam merencanakan keluarga mereka. Diperlukan lebih banyak usaha untuk menangani kebutuhan kontrasepsi pasangan dari keluarga kurang beruntung yang belum terpenuhi, termasuk melalui sosialisasi; pemberian layanan kontrasepsi terjangkau bagi rumah tangga miskin; dan peningkatan jumlah bidan yang memiliki kualifikasi untuk memasang IUD dan implan.

- Bahkan ketika keluarga memiliki akses pada pelayanan, mereka tidak selalu menggunakannya. Pendekatan-pendekatan baru harus dijadikan contoh untuk lebih memahami apa yang dapat mendorong mereka untuk menerapkan perilaku yang tepat. Ketimpangan peluang tidak selalu merupakan masalah kurangnya akses. Sejumlah 96 persen orang Indonesia punya akses pada persalinan oleh tenaga kesehatan terampil, tapi seperempat dari semua persalinan tidak dibantu oleh tenaga kesehatan terampil, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu. Anak yang lahir lebih dulu dalam keluarga lebih besar berkemungkinan diimunisasi penuh daripada anak yang lahir belakangan. Ini menandakan bahwa masalahnya bukan pada akses pada pelayanan kesehatan, tetapi karena motivasi keluarga untuk menerapkan perilaku yang tepat menurun seiring waktu. Sebagian kasus kurangnya tinggi badan disebabkan oleh perilaku rumah tangga, seperti mempersingkat ASI eksklusif dan memberikan makanan pendamping yang salah. Pengetahuan bisa ditambah melalui penguatan kader Posyandu seperti dibahas di atas, tapi perubahan perilaku akan membutuhkan pendekatan baru dan inovatif yang diuji di lapangan, kemungkinan lewat pelaku nonpemerintah seperti LSM dan sektor swasta.

02
Meningkatkan keterampilan pekerja masa kini dan memberikan mereka akses lebih besar pada lapangan kerja produktif

Dalam jangka pendek, lebih banyak hal bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pekerja saat ini dan menciptakan lebih banyak pekerjaan produktif

INDONESIA DAPAT MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG LEBIH BAIK DENGAN MENGATASI PENGHALANG DAN KENDALA PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS, KHUSUSNYA MELALUI INFRASTRUKTUR YANG LEBIH BAIK DAN DAYA SAING YANG LEBIH TINGGI. Salah satu aspek terpenting pembaruan adalah memperbaiki infrastruktur, konektivitas, dan logistik, yang dibahas secara mendetail di bagian berikutnya. Di luar itu, peringkat Indonesia dalam indeks Kemudahan Menjalankan Bisnis harus terus ditingkatkan, selain juga akses pembiayaan untuk usaha kecil yang ingin memperluas bisnis. Sektor manufaktur maupun pertanian dapat menyerap pekerjaan produktif dan semiterampil untuk pekerja miskin dan rentan, sehingga revitalisasi kedua sektor tersebut sangat diperlukan.

INDONESIA DAPAT PULA MENERAPKAN "GRAND BARGAIN" ANTARA PEMERINTAH, PENGUSAHA, DAN SERIKAT PEKERJA UNTUK MENINJAU ULANG PERATURAN PASAR TENAGA KERJA DAN MEMBERI PERLINDUNGAN LEBIH EFEKTIF KEPADA PEKERJA. Peraturan pasar dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu yang paling kaku secara regional dan menghalangi penciptaan lapangan kerja formal namun justru memiliki perlindungan *de facto* yang rendah. Reformasi peraturan dan program tertentu secara sedikit demi sedikit sulit dilakukan karena jika ada perubahan dalam hubungan industri, keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lain. Karena alasan inilah barangkali dibutuhkan *Grand Bargain* untuk melaksanakan reformasi menyeluruh yang dinilai menguntungkan bagi pengusaha, serikat pekerja, maupun pencari kerja.

REFORMASI SISTEM PELATIHAN KETERAMPILAN NASIONAL JUGA MEMUNGKINKAN PEKERJA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEREKA DAN MENDAPATKAN PEKERJAAN LEBIH BAIK. Pemberian insentif kepada pengusaha untuk pelatihan berbasis kebutuhan dan berorientasi hasil, idealnya bermitra dengan penyedia pelatihan, sehingga dapat menghasilkan taraf keterlibatan sektor swasta yang lebih tinggi. Menyesuaikan tingkat subsidi dengan jenis pekerja yang dilatih dapat mengatasi ketimpangan, misalnya perempuan, anak muda dan orang yang hidup dengan disabilitas. Kemitraan dengan sektor swasta dalam pengadaan dan pembiayaan pelatihan, akan membuat pemerintah lebih leluasa

mengalokasikan dana untuk memperluas sistem pelatihan ke semua provinsi dan daerah tertinggal.

03
Memperkuat perlindungan sosial untuk membantu rumah tangga mengatasi guncangan

UNTUK MELINDUNGI RUMAH TANGGA DARI GUNCANGAN DIBUTUHKAN TINDAKAN DALAM BANYAK BIDANG. Rumah tangga menghadapi guncangan dari berbagai sumber. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menelaah jenis-jenis guncangan yang paling memengaruhi rakyat Indonesia (seperti bencana alam, efek lingkungan jangka panjang dari perubahan iklim, masalah kesehatan pribadi, atau penyakit yang memengaruhi ternak). Penelitian ini kemudian dapat dipakai untuk menentukan tindakan kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi guncangan tersebut, termasuk menanggulangi bencana alam, membangun sistem jaminan sosial yang efektif dan memastikan kecukupan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah tertinggal. Selain itu, tindakan-tindakan kebijakan di bawah ini dapat memberi dampak sangat besar pada penurunan ketimpangan dengan melindungi warga miskin dan rentan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAPAT MENANGGULANGI DAMPAK KENAIKAN HARGA PANGAN TERHADAP KAUM MISKIN DAN RENTAN. Ada sejumlah aspek kebijakan Pemerintah yang dapat mendorong stabilitas untuk mencegah guncangan. Salah satu aspek penting yang memengaruhi warga miskin adalah harga pangan, terutama beras. Produksi beras dalam negeri telah menurun selama beberapa dasawarsa terakhir karena sejumlah alasan, termasuk lambatnya mekanisasi dan buruknya infrastruktur dan konektivitas. Peningkatan belanja pemerintah belum berhasil memacu produksi pertanian. Di sisi lain, kebijakan stabilisasi harga belum efektif dan mungkin turut menyebabkan masalah. Skema impor beras saat ini khususnya berdampak buruk, dengan impor dibatasi pada Badan Urusan Logistik (Bulog). Pemerintah enggan mengimpor karena target swasembada beras nasional pada tahun 2017, dan kurang akuratnya data yang menunjukkan surplus beras terus-menerus padahal stok kurang dan harga tinggi, sehingga memicu spekulasi pedagang. Untuk mencapai keamanan stok beras dibutuhkan sistem peringatan dini yang efektif dan informasi *real-time* yang dapat diandalkan tentang harga, stok dan distribusi beras. Perbaikan struktural jangka panjang di sektor pertanian sangat diperlukan untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dalam keamanan stok beras dan meningkatkan produktivitas.

BANTUAN SOSIAL YANG EFEKTIF TIDAK HANYA AKAN MENDORONG PENDAPATAN TAPI JUGA MEMUNGKINKAN WARGA MISKIN DAN RENTAN MENGATASI GUNCANGAN DENGAN LEBIH BAIK. Untuk mereka yang tidak mampu mengatasi guncangan sendiri atau mengakses jaminan sosial, dibutuhkan bantuan sosial lebih besar. Jaring pengaman juga berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Indonesia telah membangun dan memperluas kerangka bantuan sosial sejak krisis finansial Asia. Namun, program-program ini tidak sepenuhnya efektif dalam melindungi rakyat miskin dan rentan. Reformasi lebih lanjut hendaknya fokus pada memperbaiki pentargetan program kemiskinan karena guncangan, bukan hanya kemiskinan kronis; memperluas cakupan dan paket manfaat program yang berhasil supaya dapat memberikan

perlindungan memadai kepada semua rumah tangga rentan; dan menambah program baru untuk jenis risiko yang saat ini belum tercakupi (program pekerjaan umum yang menyediakan pekerjaan jangka pendek, misalnya).

SELAIN ITU, PERLU DITERAPKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BARU, KHUSUSNYA DI BIDANG KESEHATAN DAN PERLUASAN CAKUPANNYA DIBARENGI DENGAN KETERSEDIAAN PELAYANAN YANG MEMADAI. Akses pada pelayanan kesehatan preventif dan perawatan untuk semua orang Indonesia amat penting untuk membantu melindungi dari penyakit dan kecelakaan yang dapat berdampak sangat buruk pada pendapatan, pengeluaran dan tabungan rumah tangga. Premi sekitar 90 juta rakyat Indonesia, kebanyakan warga miskin dan rentan, ditanggung oleh Pemerintah. Namun, masih banyak orang yang walaupun tidak hidup di bawah garis kerentanan, perekonomiannya akan sangat terpengaruh jika mengalami guncangan kesehatan yang serius. Mereka kebanyakan bekerja di sektor informal, tidak membayar premi, dan belum menjadi tertanggung. Upaya menjangkau rumah tangga semacam ini akan menjadi langkah terpenting dalam mencapai cakupan asuransi kesehatan universal. Namun, cakupan saja tidak akan memberi perlindungan cukup terhadap guncangan bila tidak tersedia pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua orang. Rekomendasi tentang pembiayaan dan tenaga kesehatan untuk melindungi masyarakat dari guncangan sama pentingnya dengan memberikan awal yang sehat kepada semua anak.

MENGETAHUI DI MANA, KAPAN DAN CARA MENANGGAPI KETIKA KRISIS MELANDA JUGA SANGAT PENTING. Contoh kasus, selama krisis keuangan global pada tahun 2008-09, Indonesia tidak punya sistem pengawasan untuk mengetahui dengan cepat di mana efek negatif dirasakan dan oleh siapa. Respon pemerintah kurang efektif karena seringkali lamban dan tidak terkoordinasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, sangatlah penting mengembangkan sebuah Sistem Pengawasan dan Tanggap Krisis untuk mendeteksi efek suatu krisis dan menanggapinya dengan tepat. Sistem semacam ini punya tiga komponen: (i) sistem pengawasan permanen dan *real-time* di tingkat nasional maupun rumah tangga; (ii) protokol yang disetujui sebelumnya tentang kapan, di mana dan apa respon yang akan diambil; (iii) pengaturan institusional yang disetujui sebelumnya tentang perencanaan, koordinasi, pendanaan dan penyaluran, serta pengawasan dan evaluasi.

Komponen pengawasan sudah dikembangkan dan diterapkan oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), berikutnya perlu memfokuskan pada protokol respon dan pengaturan institusional. Sistem Pengawasan dan Tanggap Krisis yang terkait erat dengan perangkat penanggulangan bencana yang sudah ada akan membantu memberi perlindungan yang tepat kepada orang yang tepat.

04
Menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengatasi ketimpangan saat ini dan di masa depan

FOKUS PADA KEBIJAKAN FISKAL DIBUTUHKAN UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN DALAM JANGKA PANJANG. Untuk mengatasi ketimpangan peluang dan menyediakan pekerjaan yang lebih baik dalam jangka panjang dibutuhkan anggaran belanja pemerintah lewat kebijakan prioritas seperti: peningkatan anggaran kesehatan dan kelanjutan pendanaan pendidikan, investasi lebih besar pada infrastruktur, dan peningkatan cakupan bantuan sosial, manfaat dan jaminan sosial untuk semua orang. Menyelaraskan anggaran pemerintah di balik prioritas tersebut adalah satu peran utama yang dapat dimainkan kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan jangka panjang karena faktor-faktor di luar kendali individu.

KEBIJAKAN FISKAL JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN DALAM JANGKA PENDEK WALAUPUN SECARA UMUM BELUM DIPRAKTIKKAN DI INDONESIA, Banyak tindakan kebijakan yang dibahas hanya berdampak pada ketimpangan jangka panjang, seperti perbaikan kesehatan dan nutrisi anak, kualitas pendidikan dan pengembangan keterampilan yang lebih baik, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dan lingkungan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Namun, rancangan kebijakan fiskal keseluruhan juga dapat berdampak pada ketimpangan jangka pendek melalui beberapa cara. Saat ini, pendapatan rumah

Pemerintah dapat mengatasi ketimpangan dengan menentukan cara menghasilkan & membelanjakan pendapatan negara

tangga yang berbeda dapat terkena dampak lewat berbagai cara: pilihan pajak, bantuan langsung, subsidi dan bantuan jasa oleh Pemerintah.

DI SEJUMLAH NEGARA, RASIO GINI MENURUN SECARA DRASTIS SETELAH MEMPERHITUNGKAN KEBIJAKAN FISKAL. CONTOHNYA, RASIO GINI BRASIL 14 POIN LEBIH RENDAH SETELAH MEMPERHITUNGKAN SEMUA PAJAK DAN BELANJA PEMERINTAH, DIBANDINGKAN RASIO GINI YANG HANYA BERDASARKAN PENDAPATAN PASAR.

Namun, di Indonesia perubahan bersih pendapatan rumah tangga dari pajak dan bantuan langsung nyaris tidak mengubah rasio Gini. Contohnya, saat mengikutsertakan belanja kesehatan dan pendidikan berupa barang atau jasa, rasio Gini hanya turun dua poin.[8] Untuk menyelaraskan kebijakan fiskal demi mendorong pemberantasan ketimpangan dibutuhkan:

• Belanja negara di bidang yang tepat: bantuan sosial, kesehatan dan infrastruktur. Hal utama yang dapat mengurangi ketimpangan adalah alokasi belanja negara yang tepat. Indonesia sejak dulu telah menghabiskan banyak biaya untuk kebijakan yang dampaknya paling kecil untuk mengurangi ketimpangan, seperti subsidi, dan sedikit biaya untuk kebijakan yang memberi efek paling besar, contohnya program bantuan sosial seperti PKH (sejenis bantuan tunai bersyarat), BSM (sekarang

[8] Lihat Jellema, Wai-Poi dan Afkar (2015) "The Distributional Impact of Fiscal Policy in Indonesia dan Kementerian Keuangan dan Bank Dunia (2015) "*Taxes and Public Spending in Indonesia: Who pays and who benefits?*".

Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yaitu program beasiswa untuk murid miskin), dan kesehatan. Padahal penting untuk mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih adil semacam ini. Belanja negara dapat dibuat lebih pro-rakyat miskin. Anggaran pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial saat ini tidak mengurangi ketimpangan sebanyak anggaran di negara-negara lain. Sebagian besar kenaikan anggaran kesehatan yang diusulkan untuk tahun 2016 dimaksudkan untuk sistem asuransi kesehatan nasional (Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN) yang cenderung berpihak ke rumah sakit besar di kota-kota besar dan menguntungkan rumah tangga yang lebih mapan, padahal jangkauan anggaran peningkatan pelayanan kesehatan primer akan lebih pro-rakyat miskin.

• Infrastruktur merupakan kunci penting pendukung kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pada semua aspek lainnya. Rencana alokasi ulang subsidi BBM untuk investasi lebih besar pada infrastruktur juga sangat penting. Anggaran belanja infrastruktur dapat meningkatkan akses pada pelayanan publik. Seperempat populasi Indonesia berada di perkotaan dan lebih dari separuh penduduk pedesaan kurang memiliki akses transportasi. Manfaat perbaikan transportasi berlipat ganda: meningkatkan akses pada pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan. Selain itu, akan mengurangi biaya transportasi sehingga meningkatkan konektivitas dan produktivitas. Masalah transportasi adalah kendala besar bagi industri manufaktur. Mengurangi kendala ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing, membantu menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, serta mendekatkan produsen lokal bahan mentah ke pasar domestik. Contohnya, saat ini lebih murah mengimpor jeruk dari Tiongkok daripada mendapatkannya dari Kalimantan. Peningkatan konektivitas untuk daerah terpencil dan penurunan biaya logistik akan membantu menurunkan harga beras maupun bahan pokok lainnya yang sangat memengaruhi rakyat miskin. Terakhir, Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari 1 poin persentase pertumbuhan PDB tambahan per tahun karena kurangnya investasi pada infrastruktur, khususnya transportasi. Dengan menghilangkan kendala ini, maka serapan tenaga kerja akan lebih banyak, pendapatan dan konsumsi rumah tangga meningkat. Artinya, sumber daya fiskal untuk belanja pemerintah pada program sosial pun meningkat, yang akhirnya akan membantu menciptakan situasi adil bagi setiap orang.

• Meski kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan, hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan, dan pertumbuhan anggaran belanja tidak boleh melebihi pertumbuhan pendapatan. Ketika biaya untuk distribusi ulang dan anggaran sosial lainnya lebih besar dibandingkan pendapatan, maka kerangka fiskal akan sulit dipertahankan. Indonesia mampu mengalokasikan lebih banyak dana untuk anggaran sosial, tetapi penambahan anggaran tidak boleh didasarkan pada peningkatan pendapatan negara yang tidak realistis. Risiko ini berlaku untuk anggaran 2015 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-19. Dibutuhkan reformasi signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika diasumsikan keadaan tetap seperti saat ini, tanpa reformasi signifikan pada kebijakan pendapatan atau administrasi, maka pendapatan dasar untuk 2015-19 diproyeksikan tetap stabil di antara 13,3 sampai 13,5 persen dari PDB. Jika tidak dibatasi secara hukum untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3,0 persen dari PDB (ini disebut aturan fiskal), berarti defisit akan mencapai 4,6 persen dari PDB pada 2015, dan naik sampai 6,0 persen dari PDB pada 2019. Tanpa skema ruang fiskal tambahan, Pemerintah harus mengurangi secara drastis peningkatan anggaran belanja yang direncanakan (dan diperlukan) untuk prioritas pembangunan dan ketimpangan.

• Kebijakan mencampurkan pendapatan yang digunakan untuk mencapai kesinambungan fiskal juga dapat memengaruhi ketimpangan saat ini. Pemerintah bisa membiayai anggaran belanja untuk memberantas ketimpangan dengan beberapa cara. Namun perlu dipertimbangkan siapa yang membayar pajak dan pendapatan nonpajak, serta bagaimana ini berdampak pada ketimpangan. Ada pendekatan yang menghasilkan pendapatan sekaligus menanggulangi ketimpangan untuk pajak tidak langsung seperti: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak barang mewah, pajak penghasilan pribadi dan badan, serta pendapatan nonpajak dari sumber daya.

KESIMPULAN KAMI

PERLU DIAMBIL TINDAKAN SESEGERA MUNGKIN DAN DAMPAKNYA DAPAT LANGSUNG DIRASAKAN. Tindakan perbaikan membutuhkan waktu agar efeknya mulai terasa. Artinya aksi penanggulangan ketimpangan harus dimulai sekarang. Caranya dengan memanfaatkan kemauan politik yang ada dan dukungan masyarakat (88 persen orang Indonesia yang disurvei mengatakan mengatasi ketimpangan adalah hal yang "sangat mendesak" atau "cukup mendesak"). Menunda-nunda bisa berbahaya. Ini melihat banyaknya warga Indonesia yang lebih kaya yang memilih untuk tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan pemerintah, sehingga berisiko berkurangnya desakan kuat kepada pemerintah untuk menyediakan dan mengalokasikan anggaran pajak yang lebih tinggi dan adil bagi pelayanan publik yang lebih baik.

MENGATASI KETIMPANGAN SEBAGIAN BESAR MERUPAKAN USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMBUTUHKAN KOMITMEN KEBIJAKAN JANGKA PANJANG PULA. Ketimpangan secara umum berubah perlahan-lahan seiring waktu, maka penurunan pesat dalam jangka pendek tidaklah mungkin. Sejumlah kebijakan utama untuk mengatasi ketimpangan, seperti peluang yang lebih merata bagi anak-anak saat ini untuk memperoleh kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, akan membutuhkan satu generasi untuk membuahkan hasil. Walau demikian, mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan tanpa memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan dari generasi ke generasi, yang merupakan tujuan kebijakan yang mendapat dukungan luas.
Untuk melakukan ini kesetaraan peluang harus diusahakan secepat mungkin yang tentu saja akan membutuhkan pengumpulan pendapatan negara yang lebih tinggi, pengalihan anggaran belanja negara, yang berujung pada pentargetan dan penyediaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

KETIMPANGAN YANG MENINGKAT

Tren Belakangan Ini dan Mengapa Penting Dipahami[9]

1.1
Tren ketimpangan belakangan ini
37

1.2
Apakah ketimpangan penting?
42

[9] Bagian ini merangkum analisis mendetail berbagai makalah latar belakang. Lihat Bank Dunia (2015a) untuk bukti dan analisis tentang persepsi dan preferensi masyarakat terkait ketimpangan. Lihat Bank Dunia (2015b) untuk bukti dan analisis tentang seberapa tidak setaranya akses pada layanan publik dan peluang lainnya. Lihat pula Bank Dunia (akan datang (c)) tentang "Pendapatan Tertinggi di Indonesia." Temuan utama dirangkum dalam Bank Dunia (2014b).

1.1. TREN KETIMPANGAN BELAKANGAN INI

Ketimpangan telah meningkat di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak dinikmati sama rata oleh semua orang

KETIMPANGAN TELAH MENINGKAT DI INDONESIA SEJAK TAHUN 2000. Berdasarkan pengukuran mana pun, kesenjangan antara standar hidup ekonomis rumah tangga yang berbeda telah meningkat. Pada tahun 2002, 10 persen warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin. Konsumsi riil per kapita (setelah memperhitungkan inflasi) naik hanya 12 persen antara tahun 2002 dan 2014 untuk 10 persen warga termiskin dan rata-rata 25 persen untuk 80 persen warga termiskin. Tapi kenaikannya mencapai 56 persen untuk 10 persen warga terkaya kedua dan bahkan 74 persen untuk 10 persen warga terkaya (Bagan 1.1). Dari beberapa cara mengukur ketimpangan (lihat Boks 1.1), ukuran yang paling populer digunakan adalah koefisien Gini, di mana 0 berarti sepenuhnya setara dan 100 berarti sepenuhnya tidak setara.[10] Di Indonesia, rasio Gini meningkat dari 30 pada tahun 2000—angka yang relatif moderat berdasarkan standar internasional—menjadi 41 pada tahun 2014. Ini kenaikan yang cukup tajam selama periode tersebut.

SERINGKALI TARAF KETIMPANGAN DIANGGAP LEBIH RENDAH DARI YANG SEBENARNYA. Dalam data survei rumah tangga yang digunakan untuk mengukur ketimpangan, hanya 2 juta rakyat Indonesia yang mengonsumsi lebih dari Rp 4 juta per bulan, atau hanya 0,8 persen jumlah penduduk. Hanya 218.000 orang yang mengonsumsi lebih dari Rp 10 juta per bulan, atau kurang dari 0,1 persen jumlah penduduk.[11] Secara mengejutkan, angka-angka ini tampak cukup rendah. Selain itu, sekitar separuh dari semua mobil yang terdaftar di Polri (5 juta mobil) tidak muncul dalam data survei.[12] Ini artinya jika warga Indonesia yang lebih kaya masuk dalam data survei, maka ketimpangan akan lebih tinggi lagi.[13] Terlebih bila korupsi juga tinggi, maka keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut dan kontribusinya pada ketimpangan bisa jadi tidak terungkap. Ranking Indonesia pada peringkat ke-107 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (ranking lebih rendah berarti sebuah negara dianggap lebih korup) juga menunjukkan bahwa sebagian ketimpangan pendapatan karena korupsi tidak tertangkap oleh data (Transparency International 2015).

NAIKNYA KETIMPANGAN BELAKANGAN INI BERLAWANAN DENGAN TREN HISTORIS, DAN MENCAPAI TINGKAT TERTINGGI DARI YANG PERNAH TERUKUR SEBELUMNYA. Rasio Gini relatif stabil pada paruh kedua pemerintahan Suharto, meskipun angkanya mulai naik pada periode menjelang krisis keuangan Asia pada tahun 1997-98. Rumah tangga kaya terhantam paling keras oleh krisis dan mereka pulalah yang paling lambat pulih, sehingga rasio Gini malah turun antara tahun 1996 dan 2000. Namun setelah itu, dalam periode demokratisasi, desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh lonjakan komoditas, rasio Gini naik signifikan dari angka 30 setelah krisis keuangan Asia pada tahun 2000 menjadi

[10] Angka ini lebih sering diungkapkan sebagai proporsi antara 0 dan 1.
[11] Konsumsi per kapita bulanan rumah tangga dari data Susenas, disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup perkotaan dan pedesaan tiap provinsi, diukur berdasarkan garis kemiskinan BPS. Hasil serupa didapatkan jika yang digunakan adalah konsumsi nominal.
[12] Sejumlah 11,5 juta mobil penumpang terdaftar di kepolisian. Dengan asumsi bahwa sekitar 1 juta dari jumlah tersebut digunakan untuk tujuan komersial atau merupakan mobil kedua dalam suatu rumah tangga (yang relatif jarang terjadi di Indonesia), maka sekitar 10,5 juta rumah tangga di Indonesia memiliki mobil penumpang, padahal hanya 5,6 juta yang muncul dalam data Susenas.
[13] Salah satu latar belakang makalah kami mencoba menghitung berapa orang kaya Indonesia yang tidak terwakili dalam data survei tersebut, dan memperkirakan pengukuran ketimpangan yang lebih akurat. Lihat Bank Dunia (akan datang (c)) "Pendapatan Tertinggi di Indonesia."

37 saat krisis keuangan global tahun 2008-09. Indonesia berhasil melewati krisis terakhir ini dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tapi sejak itu ketimpangan terus merangkak naik hingga rasio Gini mencapai 41 pada tahun 2014 (Bagan 1.2). Namun, rasio Gini tetap stabil di angka 41 sejak tahun 2011, dan diduga sebagian peningkatan yang terjadi antara tahun 2010 dan 2011 disebabkan perubahan metodologi survei (lihat Boks 1.1).

Konsumsi per kapita bulanan rata-rata (Rp) berdasarkan desil, 2002 dan 2014 (bag. 1.1)

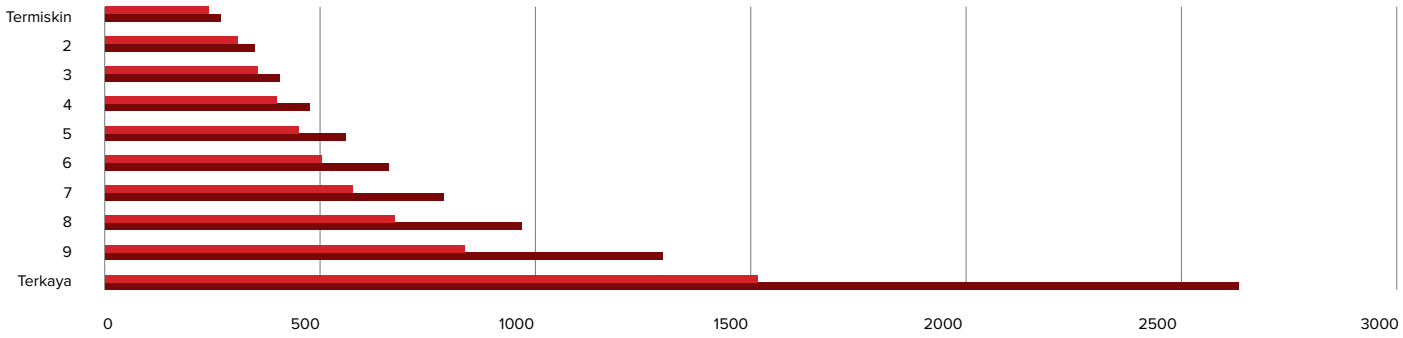

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia.
CATATAN Semua nilai disesuaikan berdasarkan lokasi dan waktu, dengan menggunakan rasio garis kemiskinan rata-rata nasional pada tahun tertentu terhadap garis kemiskinan daerah untuk tahun tersebut.

Koefisien Gini (angka) dan angka kemiskinan nasional (persen) 1980-2014 (bag. 1.2)

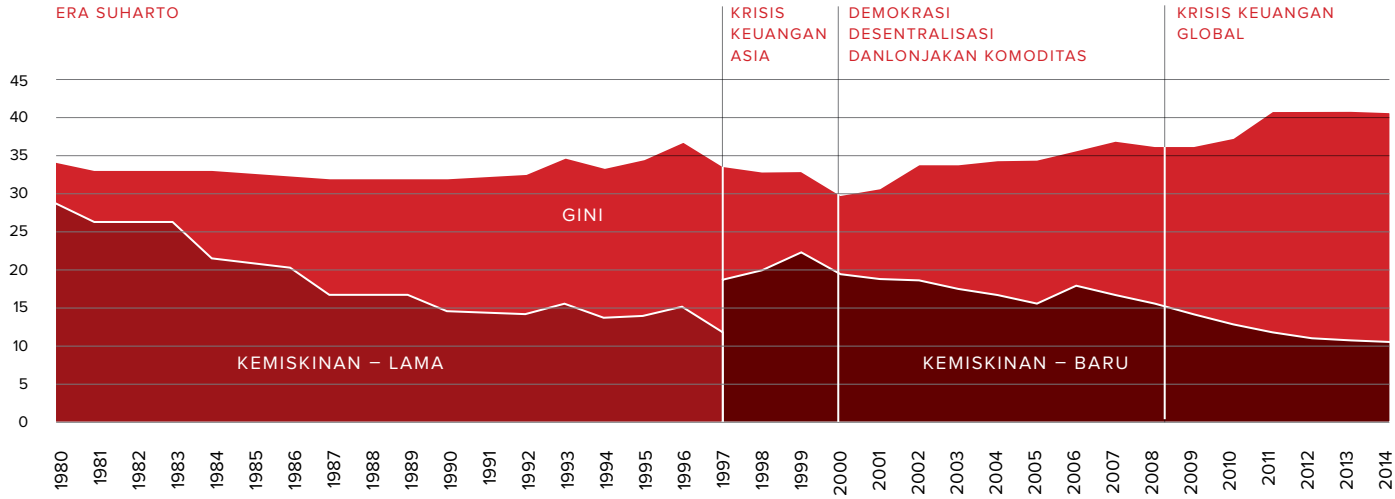

SUMBER BPS, Susenas dan kalkulasi Bank Dunia.
CATATAN: Rasio Gini konsumsi nominal. Garis kemiskinan nasional diubah pada tahun 1998, dan angka tahun 1996 dihitung menggunakan metode baru sekaligus lama.

BERDASARKAN STANDAR REGIONAL, TINGKAT KETIMPANGAN INDONESIA TENGAH MENINGKAT PESAT, WALAUPUN MASIH BELUM SETINGGI DI BEBERAPA NEGARA BERKEMBANG. Pada awal era 1990an, rasio Gini Indonesia adalah yang terendah secara regional (Bagan 1.3)[14]. Namun pada akhir periode 2000an angkanya berhasil, atau nyaris berhasil, mengejar sebagian besar negara tetangga lain. Ini karena besarnya kenaikan rasio Gini selama periode ini hanya lebih rendah dari Tiongkok, dan sebagian besar kenaikan rasio Indonesia terjadi hanya dalam satu dasawarsa terakhir. Dan lagi, ketimpangan naik pesat di Indonesia pada saat yang sama ketika tingkat ketimpangan stabil atau malah turun di negara tetangga di Asia Timur lainnya yang juga tengah berkembang pesat seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam (Bagan 1.4). Laju peningkatan ini juga pesat jika diukur dengan standar internasional, walaupun ketimpangan masih lebih tinggi di beberapa negara berpendapatan menengah ke bawah lainnya, khususnya di Amerika Latin (Bagan 1.5).

[14] Rasio Gini untuk Indonesia pada Bagan 1.3 dan Bagan 1.5 sedikit berbeda dari rasio Gini pada Bagan 1.2. Perbandingan regional didasarkan pada kalkulasi dari PovcalNet, dan meskipun mereka menggunakan data dasar survei rumah tangga yang sama, metodologinya berbeda dari rasio Gini Indonesia yang resmi dan tidak menghitung rasio Gini langsung dari data dasar.

Koefisien Gini di Asia Timur, periode 1990an & 2000an (bag. 1.3)

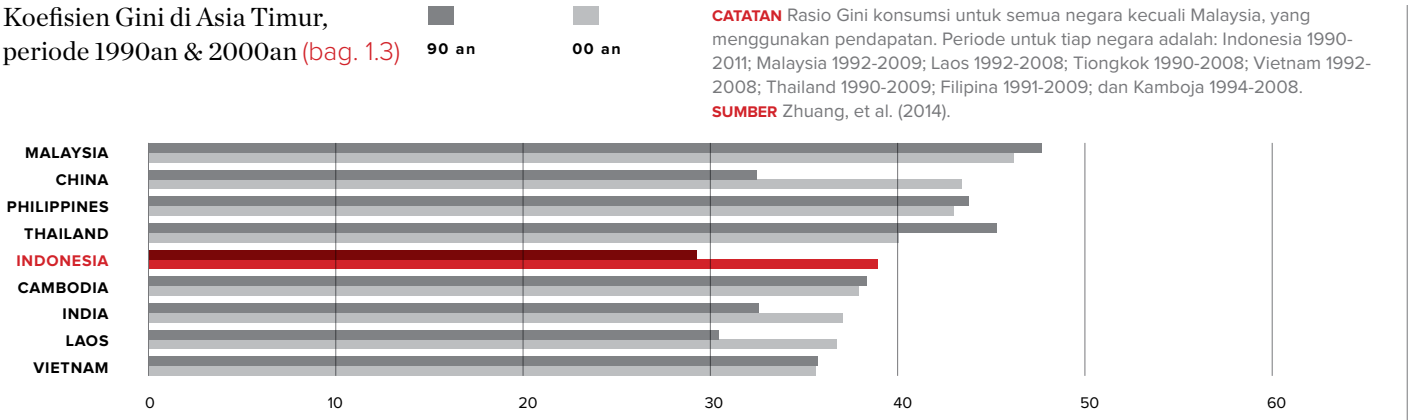

CATATAN Rasio Gini konsumsi untuk semua negara kecuali Malaysia, yang menggunakan pendapatan. Periode untuk tiap negara adalah: Indonesia 1990-2011; Malaysia 1992-2009; Laos 1992-2008; Tiongkok 1990-2008; Vietnam 1992-2008; Thailand 1990-2009; Filipina 1991-2009; dan Kamboja 1994-2008.
SUMBER Zhuang, et al. (2014).

Perubahan angka koefisien Gini di Asia Timur disetahunkan, periode 1990an dan 2000an (bag. 1.4)

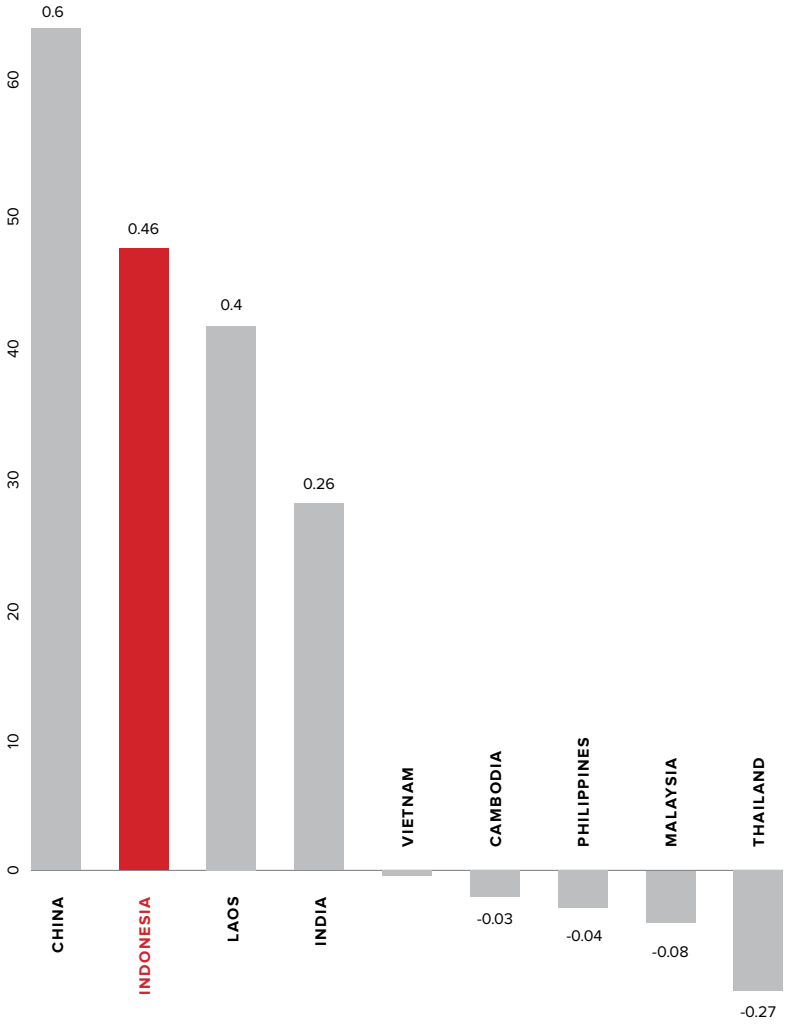

PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN SELAMA 15 TAHUN TELAH MEMBANTU MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENCIPTAKAN KELAS SOSIAL BERKEMBANG YANG AMAN SECARA EKONOMI. Setelah pulih dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997-98, PDB riil per kapita Indonesia tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun antara 2000 dan 2014. Laju pertumbuhan yang pesat ini membantu banyak orang keluar dari kemiskinan. Angka kemiskinan berkurang lebih dari separuhnya dari 24 persen saat krisis keuangan Asia menjadi 11 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi juga membantu menciptakan kelas menengah yang lebih kuat dari yang pernah ada sebelumnya. Saat ini terdapat 45 juta orang (18 persen orang terkaya dari seluruh masyarakat Indonesia) yang aman secara ekonomi dan menikmati kualitas hidup lebih tinggi. Mereka adalah segmen populasi yang berkembang paling cepat, dengan peningkatan 10 persen per tahun sejak 2002 (Bagan 1.6)[15].

NAMUN, MEREKA YANG POSISINYA AMAN SECARA EKONOMI SEKARANG MENINGGALKAN 205 JUTA RAKYAT SISANYA SEMAKIN JAUH DI BELAKANG. Manfaat pertumbuhan ekonomi sebagian besar hanya dinikmati oleh kelas konsumen yang berkembang. Antara tahun 2003 dan 2010, konsumsi per orang untuk 10 persen warga terkaya Indonesia naik lebih dari 6 persen per tahun setelah memperhitungkan inflasi, tapi kenaikannya kurang dari 2 persen per tahun untuk 40 persen warga termiskin. Ini turut menyumbang pada perlambatan laju pengentasan kemiskinan. Jumlah orang miskin turun hanya 2 persen per tahun sejak 2002, dan jumlah orang yang rentan kemiskinan nyaris tidak turun sama sekali (Bagan 1.6).

[15] Untuk laporan ini, rumah tangga dalam kelas menengah di Indonesia diartikan sebagai mereka yang secara ekonomi aman dari kemiskinan dan kerentanan. Lihat catatan pada grafik dan Bank Dunia (akan datang (a)) untuk detail lebih lanjut.

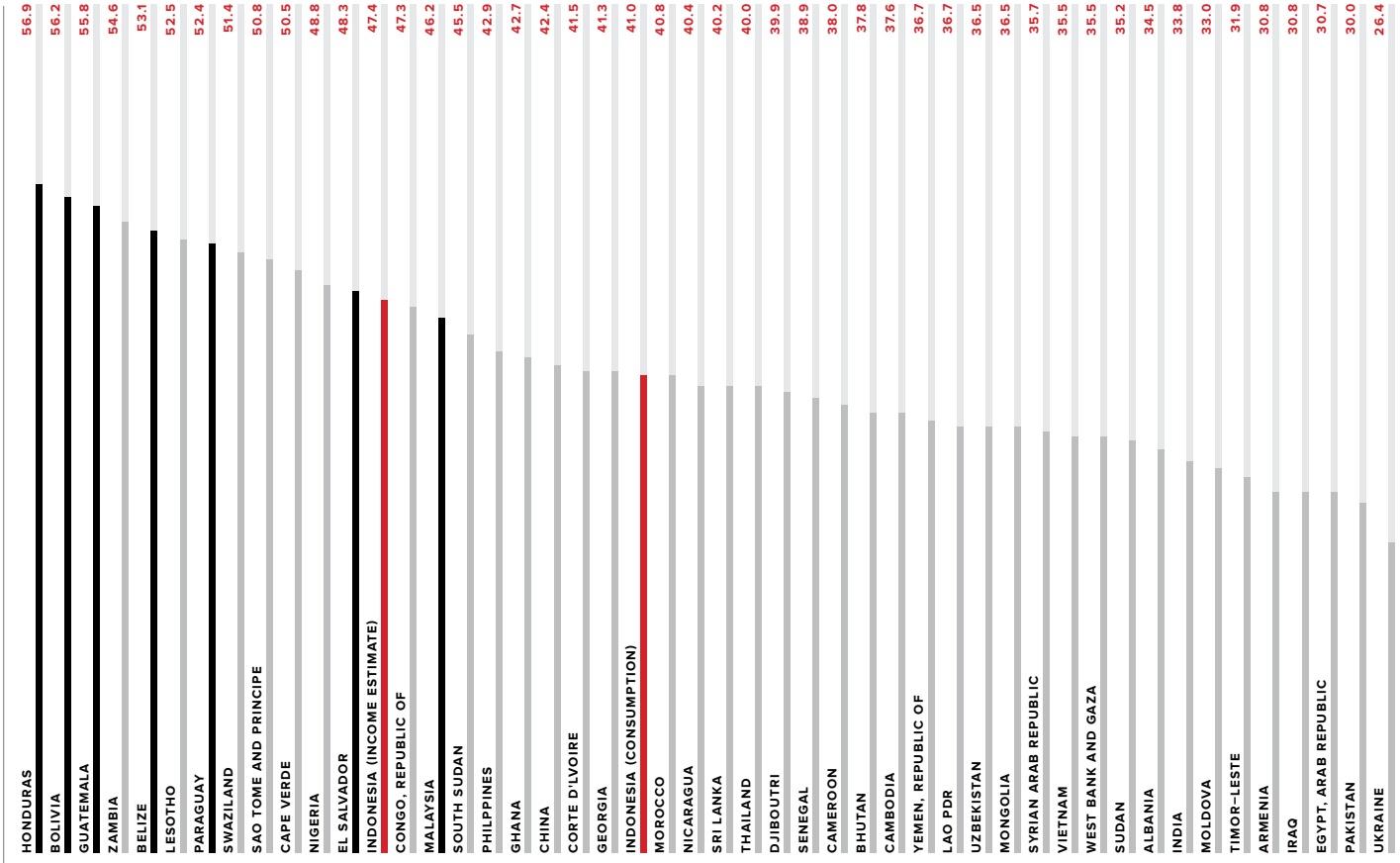

Koefisien Gini untuk negara berpendapatan menengah ke bawah (bag. 1.5)

SUMBER Indikator Pembangunan Dunia, tahun terakhir yang tersedia.
CATATAN Rasio Gini pendapatan berwarna hitam, rasio Gini konsumsi berwarna abu–abu. Rasio Gini pendapatan Indonesia diperkirakan sebagai Gini konsumsi ditambah 6,4 poin, yaitu kenaikan rata-rata rasio Gini dari konsumsi ke pendapatan selama tiga tahun saat baik Gini pendapatan maupun konsumsi dihitung di Indonesia (1984, 1990 dan 1993).

Pembagian populasi berdasarkan kelas (persen) 2002-14 (bag. 1.6)

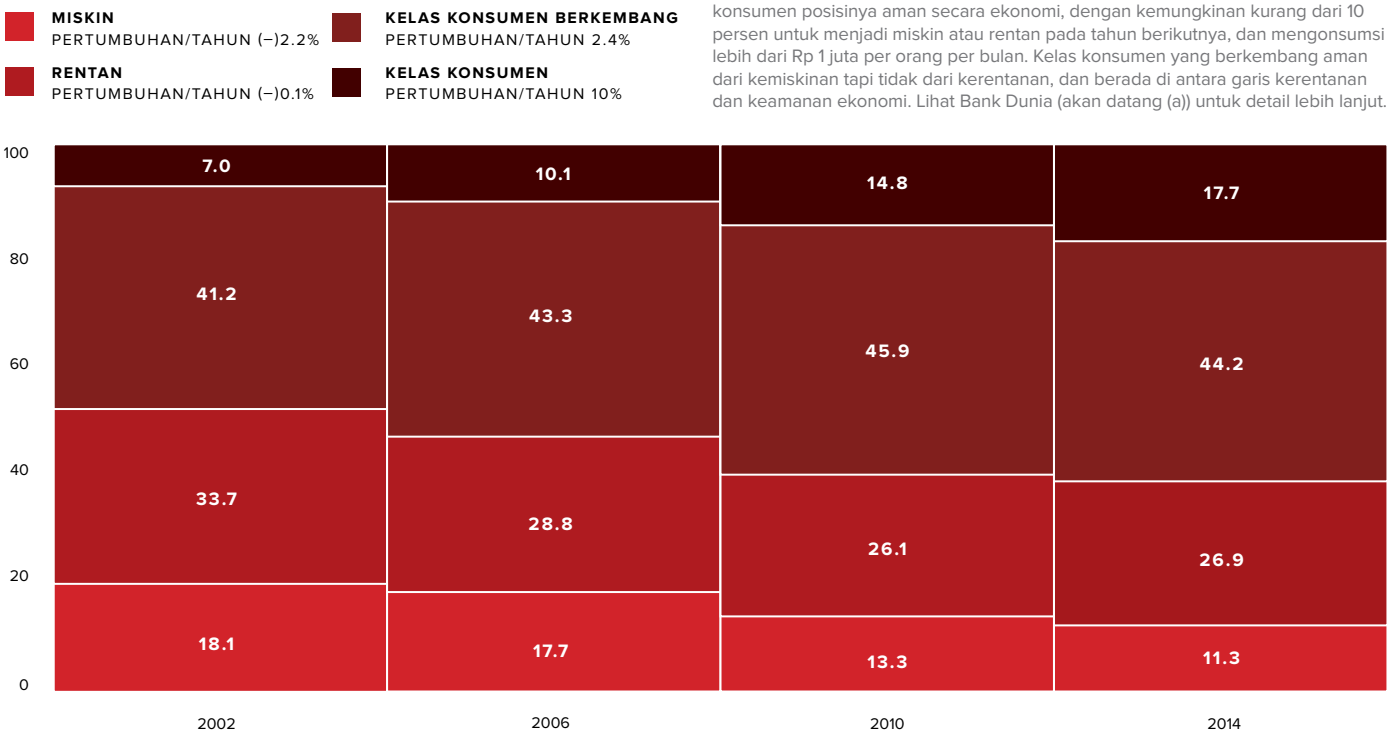

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia. Pendapatan orang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan nasional yaitu sekitar Rp 300.000 per orang per bulan. Orang yang rentan punya kemungkinan lebih dari 10 persen untuk menjadi miskin pada tahun berikutnya dan berada 1,5 kali di bawah garis kemiskinan. Kelas konsumen posisinya aman secara ekonomi, dengan kemungkinan kurang dari 10 persen untuk menjadi miskin atau rentan pada tahun berikutnya, dan mengonsumsi lebih dari Rp 1 juta per orang per bulan. Kelas konsumen yang berkembang aman dari kemiskinan tapi tidak dari kerentanan, dan berada di antara garis kerentanan dan keamanan ekonomi. Lihat Bank Dunia (akan datang (a)) untuk detail lebih lanjut.

BOKS 1.1

Mengukur ketimpangan

Pengukuran Ketimpangan.

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan. Rasionya berada di antara 0 (sepenuhnya setara) dan 1 (sepenuhnya tidak setara), dengan jangkauan umum di antara 0,3 dan 0,5. Ini seringkali dinyatakan dalam angka antara 0 dan 100, seperti dilakukan dalam laporan ini. Rasio Gini umumnya dihitung dari distribusi pendapatan atau konsumsi (distribusi konsumsi biasanya lebih setara rata-rata 6,6 poin daripada distribusi pendapatan; Deininger dan Squire 1996). Rasio Gini dibangun dari kurva Lorenz, seperti ditunjukkan di sebelah kanan, yang membandingkan kurva frekuensi kumulatif distribusi aktual (konsumsi dalam kasus Indonesia) dengan kurva frekuensi kumulatif yang akan dihasilkan jika konsumsi semua individu sama. Rasio Gini dihitung sebagai A/(A+B), di mana A dan B adalah area yang ditunjukkan dalam grafik. Meskipun memenuhi banyak syarat untuk suatu ukuran ketimpangan, namun rasio Gini tidak mudah dibagi atau ditambah berdasarkan kelompok, maka rasio Gini nasional tidak sama dengan jumlah rasio Gini di bawah tingkat nasional (misalnya perkotaan/pedesaan atau daerah).

Ukuran ketimpangan yang umum digunakan dan memenuhi semua syarat adalah indeks Theil, yang merupakan bagian dari kelompok ukuran ketimpangan entropi yang disamaratakan. Rumus umumnya adalah:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{y_i}{\bar{Y}} \right)^{\alpha} - 1 \right]$$

di mana y adalah konsumsi untuk orang i, yaitu konsumsi rata-rata per orang, dan α adalah parameter yang melambangkan bobot yang diberikan pada jarak antara konsumsi pada bagian distribusi pendapatan yang berbeda dan dapat diberi nilai riil apa pun. Ukuran GE dapat diberi nilai antara 0 sampai tak terhingga, di mana 0 melambangkan kesetaraan dan nilai yang lebih tinggi melambangkan tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi. Untuk nilai α yang lebih rendah, ukuran ini lebih sensitif terhadap perubahan pada bagian distribusi terbawah, dan untuk nilai α yang lebih tinggi, ukuran ini lebih sensitif terhadap perubahan yang memengaruhi bagian distribusi teratas. Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0, 1, dan 2. Indeks T pada Theil adalah GE(1) dan index L pada Theil adalah GE(0), yang juga dikenal sebagai ukuran deviasi log rata-rata. Untuk informasi lebih lanjut tentang koefisien Gini dan indeks Theil, lihat Haughton dan Khandker (2009) Handbook on Poverty and Inequality.

Mengukur Ketimpangan Indonesia dengan Data Survei Rumah Tangga

Ketimpangan konsumsi rumah tangga (dan angka kemiskinan resmi) diukur di Indonesia menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yaitu survei yang mewakili seluruh rumah tangga secara nasional yang diadakan setiap tahun. Metodologi pengambilan sampel survei ini berubah secara signifikan pada tahun 2011. Jumlah unit sampel primer (Blok Sensus) yang disurvei bertambah hampir dua kali lipat, dan jumlah rumah tangga yang disurvei dalam tiap Blok Sensus berkurang hampir setengahnya. Walaupun jumlah total sampel secara nasional dan untuk tiap daerah tetap sama, dengan metode ini jenis rumah tangga yang diikutsertakan sangat lebih bervariasi. Karena metodologi baru pengambilan sampel tersebut, angka kemiskinan dan ketimpangan tidak bisa semata-mata dibandingkan antara tahun 2010 dan sebelumnya dengan tahun 2011 dan setelahnya. Ini mungkin menjelaskan lonjakan ketimpangan yang tidak biasa antara tahun 2010 dan 2011. Metodologi yang baru mungkin saja menangkap lebih banyak rumah tangga kaya yang tidak tercakup dalam survei-survei sebelumnya.

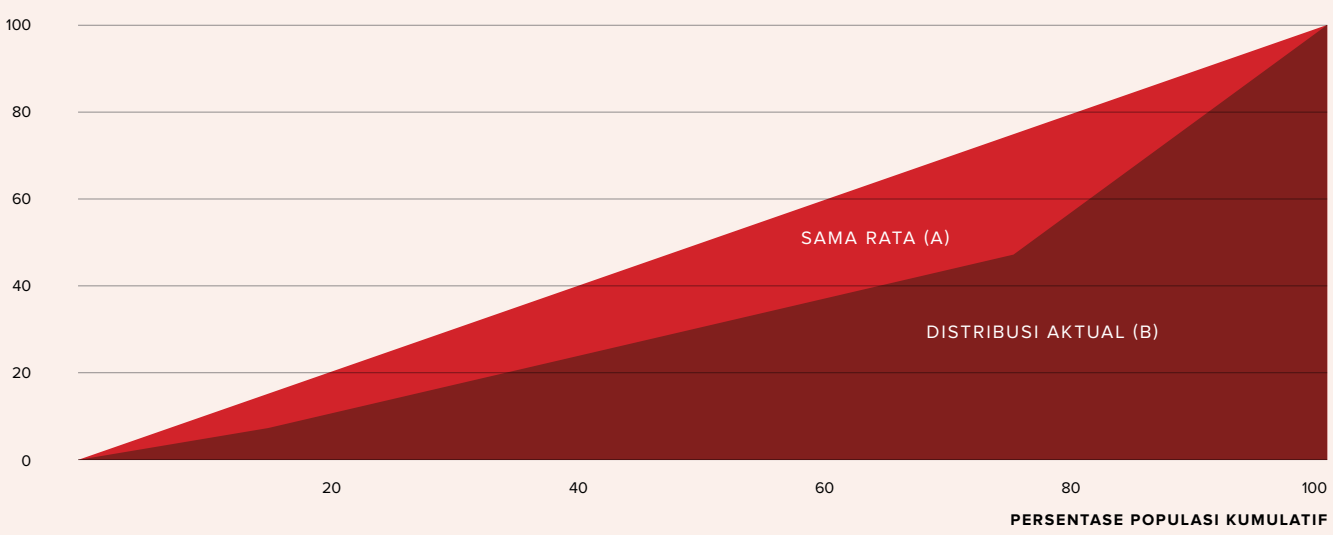

APAKAH KETIMPANGAN PENTING?

1.2

Tidak semua ketimpangan itu buruk, tapi ketimpangan bisa menjadi tidak adil saat tidak semua orang memiliki peluang awal yang sama

KETIMPANGAN TIDAK SELALU MERUPAKAN HAL YANG BURUK, KARENA DAPAT MEMBERI IMBALAN BAGI MEREKA YANG BEKERJA KERAS DAN MENGAMBIL RISIKO. Kerja keras dan inovasi menguntungkan masyarakat karena dapat menciptakan barang dan jasa baru yang bisa dinikmati semua orang, selain juga memberi kontribusi pada ekonomi yang lebih luas. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan Pemerintah kemampuan lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik bagi semua orang. Jika ini menimbulkan kesenjangan pendapatan antara mereka yang bekerja keras tersebut dan mereka yang bekerja kurang keras, maka sedikit ketimpangan dapat dibenarkan dan bahkan diinginkan. Banyak orang Indonesia setuju dengan pandangan ini. Ketika ditanya dalam sebuah survei pada tahun 2014 apakah ketimpangan akan pernah dapat diterima, 74 persen responden mengatakan "ketimpangan kadang-kadang dapat diterima" selama kekayaan diperoleh dengan adil dan berbasis kepatutan (LSI 2014).

NAMUN KETIMPANGAN BISA MENJADI TIDAK ADIL DAN BERBAHAYA JIKA DISEBABKAN FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KENDALI INDIVIDU. Tidak semua orang Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam hidup. Faktor-faktor di luar kendali individu—di mana Anda lahir, seberapa berpendidikan atau kayanya orangtua Anda, dan akses pada pelayanan publik apa saja yang Anda dapatkan saat tumbuh dewasa—dapat sangat memengaruhi kehidupan Anda nantinya. Awal hidup yang sehat dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat mendasar untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di masa depan. Ketimpangan peluang terjadi saat tidak semua orang mendapatkan awal yang adil sehingga mencegah mereka memenuhi potensi mereka, yang berujung pada kehidupan yang tidak setara. Faktor-faktor lain di luar kendali individu yang dapat memengaruhi pendapatan, standar kehidupan dan ketimpangan antara lain: kebijakan pemerintah, seperti pembatasan impor pangan yang meningkatkan biaya hidup sebagian besar orang miskin; pola perpajakan dan belanja pemerintah yang tidak mengumpulkan dan menyalurkan sumber daya memadai untuk membantu mereka yang paling membutuhkan.

TINGKAT KETIMPANGAN YANG TINGGI DAPAT MEMPERLAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI, SEMENTARA NEGARA YANG LEBIH SETARA DAPAT TUMBUH LEBIH CEPAT. Tingginya ketimpangan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat jika warga miskin tidak mampu berinvestasi dengan tepat dalam pertumbuhan anak-anak mereka, jika warga gagal keluar dari kemiskinan dan kerentanan, pindah ke kelas konsumen, atau jika tidak bisa mendapatkan pekerjaan produktif. Penelitian baru-baru ini (Dabla-Norris, et al. 2015) menunjukkan bahwa rasio Gini yang lebih tinggi mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang stabil.[16] Ketika bagian dari total pendapatan 20 persen warga terkaya naik sebesar 5 poin persentase, pertumbuhan ekonomi justru turun sebesar 0,4 poin. Sementara, ketika bagian dari total pendapatan 20 persen warga termiskin naik sebesar 5 poin persentase, pertumbuhan juga naik sebesar 1,9 poin. Bagian pendapatan yang meningkat untuk 20 persen warga termiskin kedua dan ketiga turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KURANGNYA LAPANGAN PEKERJAAN YANG BERKUALITAS MENYEBABKAN KETIMPANGAN DAN BERDAMPAK NEGATIF PADA PERTUMBUHAN EKONOMI. Banyak warga miskin tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik karena mereka tidak mengenyam pendidikan memadai. Sementara itu, banyak orang yang tidak

Tingginya ketimpangan juga dapat mengakibatkan lebih lambatnya pertumbuhan & pengentasan kemiskinan serta meningkatnya konflik

[16] Sejumlah data empiris lain mendukung argumen bahwa kenaikan ketimpangan terkait dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi (misalnya Berg dan Ostry 2011), walaupun bukti antarnegara belum meyakinkan (Banerjee dan Duflo 2003).

miskin dan mengenyam pendidikan lebih baik namun tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan produktif (Bagan 1.8). Sebagian besar lapangan kerja yang tercipta sejak tahun 2001, bahkan hingga sekarang, adalah di sektor dengan produktivitas rendah. Ini melemahkan pertumbuhan ekonomi, karena potensi produktif tenaga kerja yang ada saat ini tidak bisa dimaksimalkan ketika jumlah penduduk usia produktif mencapai puncaknya.

KETIMPANGAN JUGA BISA BERAKIBAT BURUK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN CARA LAIN. Tingginya tingkat ketimpangan dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara. Pertama, meningkatnya ketidakstabilan sosial sehingga memengaruhi ekonomi dengan menghambat investasi dan mengganggu hubungan tenaga kerja.[17] Kedua, ketidakmampuan 40 persen rakyat termiskin untuk keluar dari kerentanan dan pindah ke kelas menengah, melemahkan pertumbuhan konsumsi di masa depan yang didorong oleh kelas menengah. Terlebih lagi, bila pertumbuhan konsumsi 40 persen rakyat termiskin tetap di bawah rata-rata nasional, maka naiknya ketimpangan yang dihasilkan juga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, antara lain[18] kurangnya pasar kredit, rendahnya investasi pada modal manusia (Galor dan Zeira 1993) dan kegiatan wirausaha (Banerjee dan Newman 1993).

KETIMPANGAN YANG MENINGKAT JUGA MENGHAMBAT UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN. Antara tahun 2003 dan 2010, angka kemiskinan turun sebesar 5,4 poin persentase dari 17,4 persen menjadi 12,0 persen. Namun, karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi selama periode ini hanya dinikmati oleh orang kaya, konsumsi warga miskin lambat naik. Apa yang akan terjadi pada kemiskinan bila pertumbuhan ekonomi dibagi secara merata ke seluruh rumah tangga? Sebenarnya pertumbuhan ekonomi cukup mampu menarik semua orang keluar dari garis kemiskinan. Artinya, angka kemiskinan resmi bisa turun sampai nol jika pertumbuhan konsumsi rata-rata pada periode ini dinikmati semua orang.[19] Tentu saja dalam skenario ini, Indonesia mungkin tidak akan menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang sama, tapi jelas bahwa pola pertumbuhan yang tidak merata pada era 2000an mengakibatkan kemiskinan turun lebih lambat dari yang seharusnya.

KETIMPANGAN YANG TINGGI JUGA BERDAMPAK BURUK PADA KESATUAN BANGSA. Penelitian belum lama ini (Pierskalla dan Sacks 2015) menemukan bahwa lebih banyak konflik terjadi di daerah yang ketimpangannya lebih tinggi. Berdasarkan data yang digunakan dalam studi tersebut, diperkirakan bahwa rata-rata jumlah konflik di daerah dengan ketimpangan menengah (rasio Gini 30) 25 persen lebih tinggi daripada daerah dengan ketimpangan rendah (rasio Gini 20), sedangkan konflik di daerah dengan ketimpangan tinggi (rasio Gini 40) 54 persen lebih tinggi daripada daerah dengan ketimpangan rendah (Bagan 1.7).

Rata-rata insiden konflik pada daerah dengan ketimpangan rendah, menengah dan tinggi (bag. 1.7)

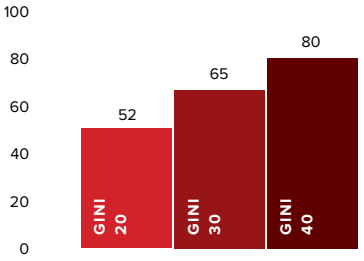

SUMBER *Pierskalla and Sacks* (2015). Kalkulasi berdasarkan database konflik NVMS yang mencakup 14 provinsi antara 1997 – 2015 dan DAPOER

Jenis pekerjaan untuk lulusan sekolah menengah atas (bag. 1.8)

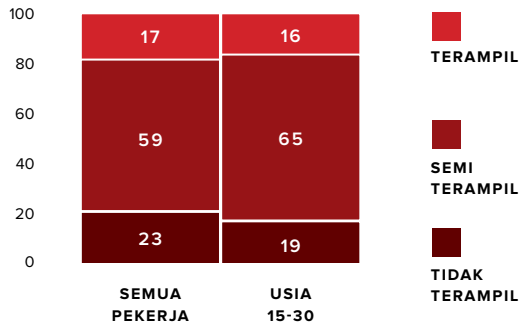

SUMBER Sakernas 2001-10 dan kalkulasi World Bank

[17] Lihat Gupta (1990), Keefer dan Knack (2002) mengenai efek ketidakstabilan politik pada pertumbuhan ekonomi, dan Alesina dan Rodrik (1994), Alesina dan Perotti (1994) dan Persson dan Tabellini (1994) mengenai hubungan antara ekonomi politik dan pertumbuhan ekonomi.

[18] Lihat pula Mason (1988) tentang investasi yang tidak produktif, Marshall (1988) tentang pola permintaan, Galor dan Zang (1997) dan Kremer dan Chen (2002) tentang kelahiran, Murphy, et. al. (1989) dan Mani (2001) tentang besarnya pasar domestik.

[19] Ini adalah hasil dekomposisi Datt-Ravallion. 2003 digunakan sebagai tahun basis untuk dekomposisi. Ada sisa pertumbuhan ekonomi dalam jumlah besar yang tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai hasil pertumbuhan atau perubahan distribusi. Seluruh sisa tersebut biasanya dialokasikan untuk distribusi ulang, maka estimasi komponen pertumbuhan merupakan batas bawah. Dengan asumsi konservatif seperti ini sekalipun, kemiskinan akan turun sampai nol.

Pembagian konsumsi nasional per kuintil: jumlah seharusnya menurut orang Indonesia, jumlah saat ini menurut mereka, jumlah sebenarnya (persen) (bag. 1.9)

SUMBER Bank Dunia (2015a) menggunakan data LSI (2014)

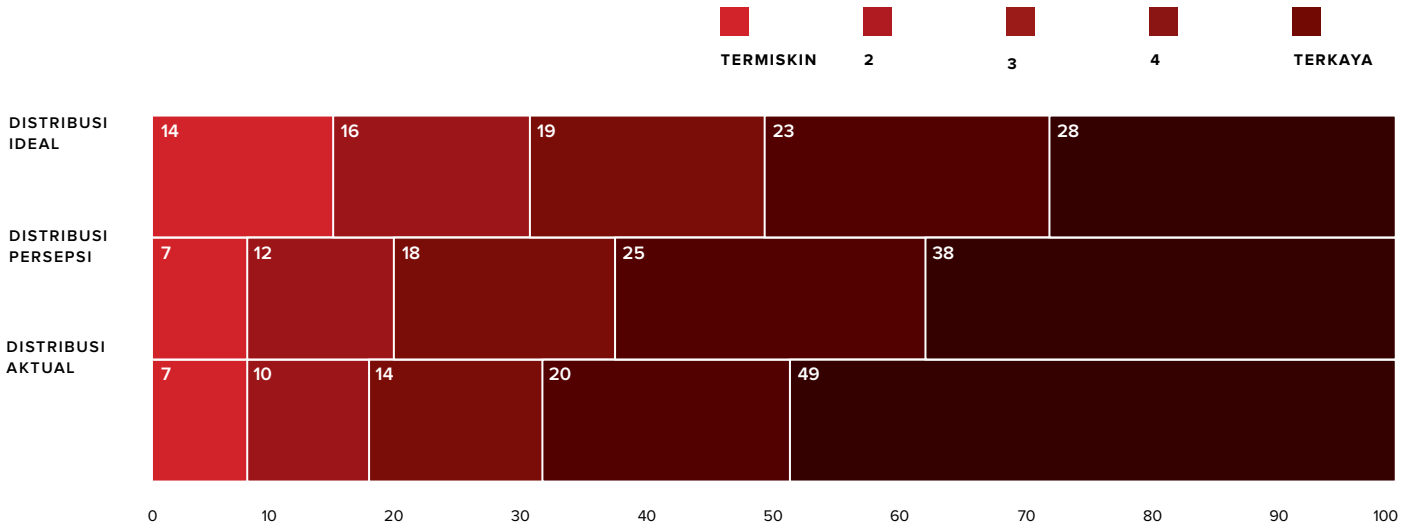

Sebagian besar masyarakat Indonesia berpendapat ketimpangan sudah terlalu tinggi dan harus segera ditangani

KEBANYAKAN ORANG INDONESIA DAPAT MENERIMA KETIMPANGAN DALAM TARAF TERTENTU. Ketika masyarakat ditanya apakah ketimpangan akan pernah dapat diterima, 74 persen responden mengatakan “ketimpangan kadang-kadang dapat diterima” (LSI 2014). Ada beberapa kondisi yang membuat orang bisa menoleransi ketimpangan (Bank Dunia 2015a), yaitu selama kekayaan diperoleh dengan adil dan berbasis kepatutan, ketika warga lainnya tidak dirugikan karena harga pangan terjangkau dan angka kemiskinan lebih rendah.

NAMUN, BANYAK ORANG BERPIKIR KETIMPANGAN SUDAH TERLALU TINGGI. Kebanyakan orang yang disurvei berpendapat ketimpangan sudah terlalu tinggi. Mereka memperkirakan bahwa seperlima warga terkaya Indonesia mengonsumsi 38 persen dari total konsumsi, sementara jumlah ideal menurut mereka seharusnya hanya 28 persen. Sebaliknya, mereka memperkirakan bahwa seperlima warga termiskin hanya mengonsumsi 7 persen dari seharusnya sekitar 14 persen (Bagan 1.9).

PADAHAL, KETIMPANGAN SESUNGGUHNYA LEBIH TINGGI DARI PERKIRAAN SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT. Data survei konsumsi rumah tangga nasional menunjukkan bahwa seperlima warga terkaya sebenarnya mengonsumsi 49 persen dari total konsumsi, dibandingkan 38 persen yang diperkirakan sebagian besar orang, dan 28 persen yang menurut mereka adalah jumlah ideal (Bagan 1.9).

SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT BERPENDAPAT MENGATASI KETIMPANGAN ADALAH PRIORITAS YANG MENDESAK UNTUK DILAKUKAN. Sejumlah 47 persen responden yang disurvei mengatakan "sangat mendesak" bagi Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan, sementara 41 persen lainnya berpendapat masalah ini "cukup mendesak" (LSI 2014).

UNTUK MEMAHAMI APA YANG MENDORONG KETIMPANGAN DI INDONESIA DAN BAGAIMANA CARA MENGATASINYA, LAPORAN INI MENELAAH BERBAGAI SUMBER DAYA YANG DIMILIKI RUMAH TANGGA DAN BAGAIMANA MEREKA MENGHASILKAN PENDAPATAN DARI SUMBER DAYA TERSEBUT. Setiap rumah tangga menggunakan sumber daya berbeda untuk menghasilkan pendapatan. Selain menggunakan tenaga mereka untuk mendapatkan upah dan gaji, juga bisa menghasilkan pendapatan dari aset keuangan dan properti. Memahami mengapa sebagian rumah tangga memiliki pekerjaan lebih baik dan mendapatkan lebih banyak uang, dan mengapa sebagian punya lebih banyak aset keuangan dan mendapatkan lebih banyak penghasilan, adalah kunci untuk memahami mengapa ketimpangan meningkat.

MENGAPA KETIMPANGAN MENINGKAT

2.1 Kerangka untuk memahami ketimpangan 47

2.2 Mengapa awal yang tidak setara dalam hidup membuat kaum miskin tidak bisa berkembang 53

2.3 Mengapa peningkatan kesenjangan antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil meningkatkan ketimpangan 71

2.4 Mengapa keuangan dan aset fisik membantu orang kaya meninggalkan kelompok lainnya 81

2.5 Mengapa guncangan membuat kebanyakan orang semakin sulit mengejar ketertinggalan 87

Bagian ini meneliti faktor-faktor pendorong utama ketimpangan. Kami akan mengawali bagian ini dengan membahas mengapa konsumsi rumah tangga kaya tumbuh lebih cepat untuk dibandingkan yang lain dengan menggunakan kerangka untuk memahami bagaimana masing-masing rumah tangga menghasilkan pendapatan. Inti dari bagian ini menelaah faktor-faktor pendorong utama ketimpangan pendapatan: bagaimana awal yang tidak setara membuat sebagian keluarga tidak dapat mengembangkan sumber daya manusia sebaik mungkin; bagaimana hal ini menyebabkan hanya sebagian orang dapat meraup untung dari perbedaan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil; bagaimana segelintir orang meraup keuntungan dari sumber daya finansial; dan bagaimana perbedaan dalam kerentanan dan ketahanan terhadap guncangan membuat banyak orang tidak mampu meningkatkan derajat ekonomi mereka. Selanjutnya bagian ini dibagi menjadi lima bagian:

I Kerangka untuk memahami ketimpangan;

II Mengapa awal yang tidak setara membuat kaum miskin tidak bisa berkembang;

III Mengapa kesenjangan yang kian lebar antara upah pekerja terampil dan tidak terampil membuat ketimpangan meningkat;

IV Mengapa aset keuangan membuat posisi orang kaya semakin jauh meninggalkan yang lain; dan

V Mengapa guncangan membuat banyak orang miskin atau rentan semakin sulit mengejar ketertinggalan mereka.

KERANGKA UNTUK MEMAHAMI KETIMPANGAN

2.1 Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini lebih dinikmati oleh rumah tangga kaya

KETIMPANGAN MENINGKAT KARENA PENDAPATAN RUMAH TANGGA KAYA NAIK LEBIH CEPAT DARIPADA PENDAPATAN KAUM MISKIN DAN KELAS MENENGAH. Selama periode 1996 hingga 2010, pertumbuhan rata-rata per tahun konsumsi rumah tangga, naik tiga kali lebih cepat untuk keluarga terkaya daripada keluarga termiskin (Bagan 2.1 dan Boks 2.1). Pertumbuhan konsumsi 60 persen rumah tangga termiskin berada di bawah rata-rata, dan pertumbuhan untuk kaum miskin dan rentan secara riil nyaris nol.

Kurva insiden pertumbuhan berdasarkan persentil konsumsi per kapita rumah tangga, 1996-2010 (bag. 2.1)

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia

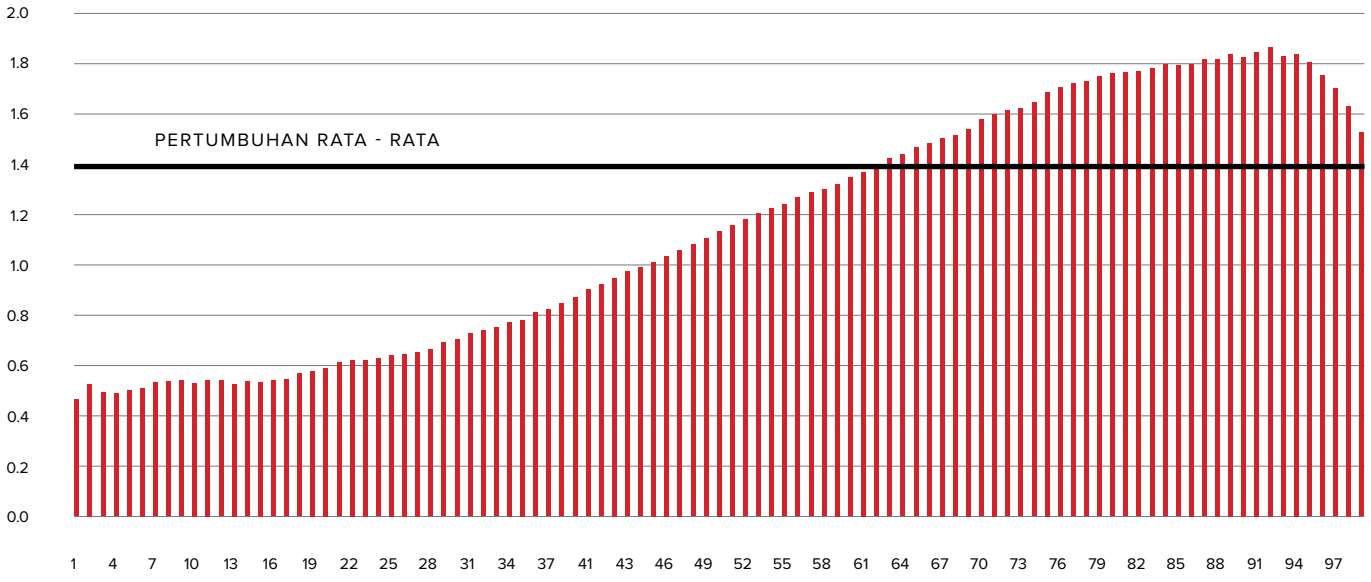

BOKS 2.1

Memahami ketimpangan dengan menggunakan kurva insiden pertumbuhan

Catatan Kurva insiden pertumbuhan menyuguhkan analisis tingkat pertumbuhan konsumsi per kapita rumah tangga per tahun berdasarkan persentil selama periode tertentu. Ini berguna untuk memberi konteks untuk mengevaluasi kinerja pengentasan kemiskinan. Untuk mencerminkan pola konsumsi yang berubah-ubah dari rumah tangga termiskin sampai terkaya, kurva ini menunjukkan seberapa pro-miskinnya pertumbuhan konsumsi. Kurva insiden pertumbuhan dibangun hanya dengan menghitung pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita secara riil untuk tiap persentil distribusi konsumsi selama periode tertentu, dan menggambarkan tingkat pertumbuhan tersebut berdasarkan persentil. Dalam analisis yang disuguhkan di sini, pengeluaran konsumsi per kapita saat ini disesuaikan ke nilai riil menggunakan garis kemiskinan perkotaan di DKI Jakarta pada 2007 sebagai tahun basisnya. Secara teknis, untuk mendapatkan pengeluaran konsumsi per kapita riil, angka saat ini atau nominal pengeluaran konsumsi per kapita untuk provinsi tertentu pada periode mana pun dikalikan dengan garis kemiskinan di DKI Jakarta pada 2007 dan dibagi dengan garis kemiskinan di provinsi tersebut untuk periode terkait. (Indonesia menggunakan 65 garis kemiskinan, yakni satu garis kemiskinan perkotaan untuk DKI Jakarta, serta garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan masing-masing untuk 32 provinsi sisanya)

MENGAPA PENDAPATAN ORANG KAYA NAIK LEBIH CEPAT DARIPADA PENDAPATAN ORANG MISKIN DAN KELAS MENENGAH?

Untuk memahami mengapa pendapatan orang kaya naik lebih cepat daripada orang miskin dan kelas menengah, kita harus meneliti berbagai faktor di balik pendapatan.

SETIAP RUMAH TANGGA MENGHASILKAN PENDAPATAN DARI SUMBER DAYA YANG DIMILIKI. Setiap rumah tangga berpotensi memiliki akses pada sejumlah sumber daya atau aset. Termasuk di antaranya tanah, investasi keuangan, dan tenaga kerja. Masing-masing aset ini dapat menghasilkan pendapatan (imbal hasil). Hasil kerja dari sumber daya manusia menghasilkan upah; aset fisik dan keuangan memberikan imbal hasil (sewa tanah dan rumah, bunga atau dividen investasi); dan aset fisik dan keuangan juga bisa meningkatkan pendapatan dengan pertambahan nilai.

KETIMPANGAN DISEBABKAN ADANYA PERBEDAAN TERHADAP SIAPA YANG MEMILIKI SUMBER DAYA TERSEBUT DAN BERAPA JUMLAH YANG DIHASILKAN. Ketimpangan pendapatan bisa muncul karena tidak semua orang memiliki akses yang sama pada sumber daya. Keluarga kaya mungkin lebih berpendidikan daripada keluarga miskin, maka hasil kerja mereka lebih bernilai. Mereka juga lebih mungkin memiliki akses ke pekerjaan yang baik. Rumah tangga miskin seringkali tidak punya investasi fisik atau keuangan, atau nilai investasi mereka lebih kecil daripada rumah tangga kaya (misalnya tanah dan rumah tanpa kepemilikan resmi). Ketimpangan pendapatan juga bisa terjadi karena tidak semua orang menerima penghasilan yang sama dari tiap aset. Rumah tangga miskin yang menabung dalam bentuk tunai tidak mendapatkan bunga, sementara rumah tangga kaya yang punya akses pada pasar finansial memperoleh bunga dan barangkali juga dividen. Keluarga miskin yang tenaga kerjanya tidak terampil mendapat upah lebih rendah daripada tenaga kerja dari keluarga kaya yang lebih berpendidikan dan lebih terampil.

PERBEDAAN DALAM MENGGUNAKAN PENDAPATAN TERSEBUT—SEBERAPA BANYAK YANG DIKONSUMSI DAN OLEH BERAPA ORANG, DAN SEBERAPA BANYAK YANG DITABUNG DEMI MASA DEPAN—JUGA MEMENGARUHI KETIMPANGAN. Saat penghasilan sudah didapat, ketimpangan juga dipengaruhi berapa banyak anggota keluarga yang harus dibiayai. Keluarga miskin cenderung punya lebih banyak anak daripada keluarga kaya, yang berarti pendapatan mereka yang sudah kecil itu harus dibagi-bagi lagi. Namun, saat suatu negara berkembang dan menjadi lebih mapan, angka kelahiran cenderung turun. Ini dapat memengaruhi bagaimana ketimpangan berubah seiring waktu. Jika jumlah anggota keluarga miskin turun lebih cepat daripada keluarga kaya, tanpa ada perubahan pendapatan, maka ketimpangan juga akan turun, dan sebaliknya. Terakhir, kesenjangan pendapatan saat ini dapat memicu kesenjangan pendapatan yang makin besar di masa mendatang melalui dua siklus umpan balik yang memperkuat. Rumah tangga kaya lebih banyak menabung pendapatan mereka yang lebih besar, sehingga tabungan mereka semakin besar dan pendapatan lebih banyak lagi di masa depan, atau mereka berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, sehingga menaikkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan.[20] Bagan 2.2 menjelaskan proses ini.

[20] Yang memperburuk kesenjangan investasi adalah pertukaran antara investasi modal manusia dan waktu untuk rumah tangga miskin. Orang kaya di Indonesia bisa membayar untuk mendapat layanan kesehatan swasta dan tidak perlu mengantri layanan publik. Orang miskin tidak mampu membayar biaya tersebut, harus menghabiskan lebih banyak waktu, meskipun akibatnya kehilangan peluang kerja yang substansial. Contohnya, perempuan miskin yang sedang mengandung harus mengambil cuti kerja satu hari untuk memeriksakan kehamilan, termasuk pergi ke Puskesmas sebelum jam buka, mengantri selama beberapa jam, dan baru pulang sekitar pukul 3:00 sore—total waktu yang dihabiskan sekitar enam jam. Tapi perempuan yang lebih mampu bisa membayar sendiri dan membuat janji konsultasi setelah jam kerja (peluang kerja yang hilang lebih kecil) dan hanya menghabiskan kurang lebih satu jam. Waktu yang dihabiskan saat tidak bekerja memengaruhi akumulasi modal manusia dan juga upah.

Memahami ketimpangan melalui kerangka aset yang menghasilkan pendapatan dengan siklus umpan balik yang memperkuat (bag.2.2)

Studi kasus yang menerapkan kerangka pada distribusi konsumsi yang berbeda

SUMBER DAYA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA JUGA RENTAN TERHADAP GUNCANGAN. Semua rumah tangga menghadapi risiko dalam kehidupan. Rumah tangga kaya mungkin punya kesempatan lebih baik untuk menghindari risiko (contohnya, mengambil langkah pencegahan penyakit) dan bisa mengatasinya dengan lebih baik. Guncangan dapat mengurangi pendapatan rumah tangga pada semua tahap dalam proses menghasilkan pendapatan (Bagan 2.2). Guncangan dapat memengaruhi aset mendasar yang menghasilkan pendapatan. Bencana alam, misalnya, dapat menimbulkan kerugian ternak atau kerusakan peralatan yang dipakai untuk mencari nafkah. Guncangan juga bisa mengurangi pendapatan yang berasal dari aset tersebut, contohnya kekeringan yang dapat mengurangi hasil panen. Bisa pula mengurangi pendapatan masa depan dengan menguras aset masa kini (contohnya menjual mesin jahit untuk membayar biaya rumah sakit) atau mencegah pengumpulan aset untuk masa depan (contohnya tidak mendapatkan penghasilan karena kehilangan pekerjaan). Ada pula guncangan yang meningkatkan biaya hidup, seperti perubahan harga pangan, sehingga mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang bisa dibeli dengan pendapatan tetap.

EMPAT STUDI KASUS BERIKUT MENGGAMBARKAN BAGAIMANA KERANGKA DI ATAS DAPAT DITERAPKAN PADA DISTRIBUSI KONSUMSI YANG BERBEDA. Pada tahun 2014, sekitar 38 persen rakyat Indonesia adalah orang miskin atau rentan (Bagan 1.6). Kasus Putri adalah contoh yang menggambarkan jenis aset yang dimiliki warga miskin dan rentan, pendapatan yang mereka hasilkan, dan bagaimana guncangan dapat memengaruhi mereka.[21] Sementara kasus Fitri, seperti halnya 44 persen populasi Indonesia, telah keluar dari kerentanan tapi posisinya masih belum aman secara ekonomi. Ia adalah bagian dari kelas konsumen berkembang yang masih bisa kembali menjadi rentan, tapi mulai menghasilkan pendapatan yang siap dibelanjakan. Dewi mewakili 18 persen warga Indonesia yang kini sudah aman dari kemiskinan dan kerentanan serta membentuk kelas menengah baru, dan Siti adalah bagian dari kelas atas Indonesia, yang jumlahnya masih belum terlalu jelas.[22]

WARGA MISKIN PUNYA SUMBER DAYA TERBATAS, MENGHASILKAN PENDAPATAN YANG RENDAH DARI SUMBER DAYA TERSEBUT, HANYA BISA MENABUNG SEDIKIT UNTUK MASA DEPAN, DAN PALING RENTAN TERHADAP GUNCANGAN. Putri (Boks 2.2)

[21] Kasus-kasus berikut hanya merupakan ilustrasi dan bukan studi kasus sebenarnya.
[22] Namun, lihat Bank Dunia (akan datang (c)) untuk perkiraan awal jumlah ini.

hanya lulusan SD. Karena pendidikannya rendah, ia bekerja paruh waktu di sebuah warung makan di pinggir jalan dan mendapatkan upah informal yang rendah. Ia punya sebidang kecil tanah yang dijadikan sawah oleh tetangganya. Tetangganya mengambil separuh beras dari sawah tersebut, sementara separuhnya lagi dikonsumsi oleh rumah tangga Putri. Karena Putri punya empat anak, beras dari sawah tidak cukup dan mereka harus membeli tambahan di pasar, maka kenaikan harga beras baru-baru ini, menyulitkan mereka. Seiring waktu nilai tanah milik Putri mulai naik, tapi karena ia tidak punya kepemilikan resmi, nilai tanah itu terbatas dan tidak bisa dijadikan jaminan untuk kredit usaha kecil. Putri menyimpan sedikit tabungan di rumah untuk keadaan darurat. Karena inflasi dan tidak adanya bunga, nilai tabungan ini semakin lama semakin menyusut. Dan karena Putri sering mengambil uang dari tabungannya, jumlahnya tidak berkembang.

PUTRI JUGA MEMILIKI KONEKSI SOSIAL, YAITU TEMAN DAN SAUDARA DI SEKITAR TEMPAT TINGGALNYA. Ia pernah meminjam uang dari mereka untuk biaya sekolah anak-anaknya. Kegiatan sosial berkelanjutan memperkuat jaringan sosial ini. Putri mendapat asuransi kesehatan gratis dari Pemerintah tapi tidak tahu apa saja yang dijamin oleh asuransi tersebut, lagi pula tidak ada Puskesmas di dekat rumahnya. Jika ia atau salah satu anaknya sakit, ia harus meminjam dari kerabat atau menjual tanah untuk membayar biaya perawatan.

KELAS KONSUMEN YANG BERKEMBANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN LEBIH BAIK DAN MEMILIKI SEDIKIT TABUNGAN. Fitri (Boks 2.3) adalah bagian dari kelas sosial terbesar Indonesia, yaitu kelas konsumen berkembang, yang berada di atas garis kerentanan tapi belum aman secara ekonomi dan punya kesempatan lebih dari 10 persen untuk kembali rentan di tahun berikutnya. Fitri adalah lulusan SMP. Ia menggunakan koneksi sosialnya untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik kecil di daerahnya. Karena merupakan usaha kecil, pabrik itu tidak mengikuti aturan upah minimum. Fitri punya sedikit tabungan yang ia simpan di rekening biasa di bank untuk keadaan darurat. Tabungan ini bertambah sedikit demi sedikit seiring waktu, karena ia bisa menyisihkan sebagian dari gajinya. Fitri tidak punya asuransi kesehatan, karena ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan gratis dari Pemerintah untuk warga miskin. Karena pekerjaannya di sektor informal, ia juga tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dari tempat kerja.

KELAS MENENGAH MEMILIKI ASET YANG MENINGKAT, PENDAPATAN YANG LEBIH TINGGI DAN TABUNGAN LEBIH BESAR. Dewi adalah bagian dari kelas menengah Indonesia (Boks 2.4). Ia lulusan sekolah menengah atas dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji dan tunjangan memadai. Ia juga mendapatkan pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi keterampilan lewat tempat kerjanya. Ia tidak punya tanah atau rumah, tapi punya tabungan yang diinvestasikan di bank dan mendapatkan bunga. Seiring waktu tabungannya semakin bertambah dan ia juga mendapatkan tunjangan pensiun. Seperti Putri, ia memiliki jaringan teman dan kerabat di Jakarta yang membantunya mendapatkan pekerjaannya yang sekarang. Dewi dan suaminya punya dua anak, yang berarti mereka bisa mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk pendidikan anak dibandingkan jika keluarga mereka lebih besar. Dewi punya asuransi kesehatan untuk digunakan saat sakit, tapi jika kehilangan pekerjaan ia harus mengambil uang dari tabungannya.

ORANG KAYA INDONESIA MEMILIKI SUMBER DAYA YANG BAIK DAN MENGHASILKAN PENDAPATAN TINGGI DARI SUMBER DAYA TERSEBUT. Mereka juga menggunakan pendapatan ini untuk ditabung, sehingga pendapatan mereka di masa depan lebih tinggi lagi. Siti adalah bagian dari kelas atas Indonesia (Boks 2.5). Ia lulusan universitas dan akan mengambil gelar MBA di Amerika Serikat. Ia mendapatkan gaji tinggi karena mengelola perusahaannya sendiri, yang memperoleh laba cukup besar. Ia juga berinvestasi di reksa dana dan pasar saham, yang memberikan imbal hasil tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menginvestasikan kembali laba perusahaan untuk mengembangkan usahanya dan terus mengumpulkan modal finansial seiring waktu, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak pendapatan lagi pada tahun berikutnya. Siti memiliki koneksi kuat dengan elite bisnis dan politik, dan ia menggunakan koneksi ini untuk mendapatkan lisensi dan kontrak yang menguntungkan bagi perusahaannya. Siti dan suaminya punya satu anak, yang sekarang sedang kuliah di Eropa. Karena memiliki investasi dan asuransi serta melakukan tindakan pencegahan, Siti paling bisa bertahan menghadapi guncangan sosial.

BOX.2.2

Putri adalah warga miskin dengan aset terbatas & imbal hasil rendah

Aset	Intensitas Penggunaan	Imbal Hasil	Akumulasi
MODAL MANUSIA **Pendidikan SD**	Bekerja paruh waktu di warung	Mendapat upah informal yang rendah	Tidak ada
MODAL FISIK sebidang kecil tanah	Tetangga menggarapnya menjadi sawah; Putri tidak bisa menggunakannya sebagai jaminan (tidak punya kepemilikan resmi)	Tetangganya mengambil separuh beras dari sawah, keluarga Fitri mengonsumsi sisanya	Nilai tanah sedikit meningkat, tapi keuntungannya marginal karena tidak ada kepemilikan dan pengembangan
MODAL FINANSIAL sedikit tabungan yang disimpan di rumah	Tidak dimanfaatkan; disimpan untuk dikonsumsi jika terjadi guncangan	Negatif karena inflasi	Tidak ada. Tabungan habis setiap tahun & dikumpulkan dari awal lagi
MODAL SOSIAL jaringan kerabat dan teman di sekitar tempat tinggal	Dimanfaatkan untuk meminjam uang saat harus membayar uang sekolah anak	Bisa sedikit berinvestasi pada pendidikan anak laki-laki	Kegiatan sosial berkelanjutan memperkuat jaringan

BOX.2.3

Fitri adalah konsumen berkembang dengan sedikit akumulasi aset

Aset	Intensitas Penggunaan	Imbal Hasil	Akumulasi
MODAL MANUSIA **Pendidikan SMP**	Bekerja pada manufaktur di pabrik berskala kecil	Mendapat gaji tetap di bawah upah minimum karena tidak termasuk serikat pekerja	Tidak ada, karena pabrik tidak menyediakan pelatihan
MODAL FISIK Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
MODAL FINANSIAL sedikit tabungan, tidak ada dana pensiun	Tidak dimanfaatkan; disimpan untuk dikonsumsi jika terjadi guncangan	Bunga dalam jumlah kecil dari rekening biasa di bank	Tabungan dari gaji
MODAL SOSIAL jaringan kerabat dan teman di sekitar tempat tinggal, serikat pekerja pabrik	Memanfaatkan jaringan pertemanan untuk mendapat pekerjaan di pabrik	Pekerjaan di pabrik memberikan pendapatan lebih besar daripada alternatifnya di sektor informal	Kegiatan sosial berkelanjutan dan partisipasi dalam kegiatan pekerja memperkuat jaringan

BOX.2.4

Dewi adalah bagian dari kelas menengah yang aman secara ekonomi dengan aset meningkat

Aset	Intensitas Penggunaan	Imbal Hasil	Akumulasi
MODAL MANUSIA SMA	Bekerja sebagai pegawai negeri sipil	Mendapat gaji dan tunjangan memadai	Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi
MODAL FISIK Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
MODAL FINANSIAL tabungan; tunjangan pensiun	Diinvestasikan di bank	Mendapatkan bunga dari tabungan	Menabung dari gaji
MODAL SOSIAL jaringan kerabat dan teman di Jakarta	Dimanfaatkan untuk mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil	Mendapatkan upah sektor formal dengan tunjangan, bila dibandingkan sektor informal	Kegiatan sosial dan kerja yang berkelanjutan memperkuat jaringan

BOX.2.5

Siti adalah warga kelas atas yang punya banyak aset & imbal hasil tinggi

Aset	Intensitas Penggunaan	Imbal Hasil	Akumulasi
MODAL MANUSIA pendidikan tinggi	Mengelola perusahaan sendiri	Mendapat gaji tinggi	Akan mengambil gelar MBA di AS
MODAL FISIK punya beberapa apartemen dan rumah	Tinggal di satu rumah dan menyewakan yang lainnya	Mendapat untung dari biaya sewa yang tinggi	Nilai apartemen dan rumah naik pesat
MODAL FINANSIAL tabungan; reksa dana; saham; kepemilikan di perusahaan	Diinvestasikan di sektor keuangan dan perusahaan sendiri	Bunga dari tabungan, imbal hasil tinggi dari reksa dana dan saham; laba dari perusahaan	Dividen dan keuntungan modal diinvestasikan kembali; laba perusahaan diinvestasikan kembali untuk pengembangan bisnis
MODAL SOSIAL koneksi kuat dengan elite bisnis dan politik	Menggunakan koneksi untuk mendapatkan lisensi dan kontrak yang menguntungkan bagi perusahaan	Perusahaan meraup laba tinggi dari lisensi dan kontrak	Memperluas dan memperkuat jaringan elite melalui kontrak perusahaan

2.2 MENGAPA AWAL YANG TIDAK SETARA DALAM HIDUP MEMBUAT KAUM MISKIN TIDAK BISA BERKEMBANG

2.2.1 Sebagian besar ketimpangan keseluruhan disebabkan oleh keadaan saat lahir

MANUSIA ADALAH SUMBER DAYA TERPENTING SUATU RUMAH TANGGA. Semua rumah tangga terdiri dari manusia, dan mayoritas rumah tangga menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dengan bekerja. Perbedaan kualitas sumber daya dan hasil pendapatan, menyebabkan sebagian besar ketimpangan di Indonesia.

NAMUN, FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KENDALI SESEORANG—YAITU KEADAAN HIDUP MEREKA SAAT LAHIR—BISA MEMENGARUHI BAGAIMANA MEREKA MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA. Perbedaan keadaan hidup orang saat lahir dan semasa kecil berpengaruh besar pada bagaimana mereka mampu mengembangkan kemampuan dan pendapatan di masa depan. Dan ketika perbedaan ini disebabkan awal yang tidak adil dalam hidup, yaitu tidak setaranya akses pada pelayanan publik dan peluang, maka akan sulit bagi orang miskin dan rentan untuk mengejar ketertinggalan mereka.

FAKTANYA, SEPERTIGA DARI SELURUH KETIMPANGAN DISEBABKAN OLEH EMPAT KEADAAN SAAT LAHIR. Perbedaan konsumsi rumah tangga di Indonesia dapat disebabkan oleh perbedaan antarkelompok, misalnya antara konsumsi perkotaan dan pedesaan, dan perbedaan di dalam kelompok yang sama, atau antara rumah tangga berbeda di perkotaan, atau antara rumah tangga berbeda di pedesaan. Bagan 2.3 menelaah bagaimana ketimpangan konsumsi rumah tangga dapat dijelaskan oleh perbedaan rata-rata antarkelompok berdasarkan empat keadaan saat lahir: provinsi tempat lahir mereka, apakah mereka lahir di wilayah perkotaan atau pedesaan, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan indikator pendidikan orang tua mereka.[23] Sekitar sepertiga dari seluruh ketimpangan disebabkan oleh perbedaan keadaan saat lahir, khususnya pendidikan orang tua dan, pada taraf yang lebih rendah, di mana mereka lahir. Jenis kelamin tidak terlalu berpengaruh.[24]

KONTRIBUSI KETIMPANGAN PELUANG TERHADAP KETIMPANGAN SECARA KESELURUHAN, TIDAK LAGI MENURUN. Saat meneliti perbedaan ketimpangan konsumsi karena empat keadaan saat lahir terhadap orang-orang yang lahir di dasawarsa berbeda, maka terlihat jelas peran yang dimainkan keadaan ini seiring waktu. Peran keadaan saat lahir untuk mereka yang lahir pada era 1950an, menyebabkan 39 persen perbedaan ketimpangan konsumsi saat ini. Namun angka ini turun ke 37 persen bagi mereka yang lahir di tahun 1960an dan masih anak-anak ketika ekonomi Indonesia mulai berkembang dalam jangka panjang. Berkurang lagi menjadi 34 persen untuk mereka yang lahir di tahun 1970an, dan yang pertama kali meraup keuntungan dari perluasan pendidikan sekolah dasar pada dekade tersebut (Duflo 2001). Namun ternyata untuk mereka yang lahir pada era 1980an dan seterusnya, meskipun akses pelayanan publik meningkat, peran keadaan saat lahir terhadap ketimpangan secara keseluruhan tidak lagi menurun dan bahkan mulai naik (Bagan 2.4).

[23] Pendidikan individu diambil sebagai indikator, meskipun tidak sempurna, untuk memperkirakan pendidikan orang tua, yang tidak ada dalam data. Namun, analisis Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan orang tua adalah penentu yang sangat penting terhadap pendidikan anak mereka nantinya, selain juga ketersediaan sekolah, yang kesemuanya termasuk keadaan saat lahir.

[24] Hasil dekomposisi Indeks Theil L (GE(0)) (semua individu) pada perbedaan dalam dan antarkelompok, di mana kelompoknya adalah jenis kelamin kepala rumah tangga, indikator pendidikan orang tua, provinsi tempat lahir dan apakah tempat lahir murni perkotaan (entah kotamadya atau kabupaten). Pendidikan individu diambil sebagai indikator untuk memperkirakan pendidikan orang tua, yang tidak ada dalam data. Analisis data SAKERTI menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan orang tua adalah penentu penting pendidikan anak mereka nantinya, selain juga ketersediaan sekolah, yang kesemuanya termasuk keadaan saat lahir. Dalam dekomposisi terpisah, kontribusi antarkelompok sebesar 26 persen untuk pendidikan, 8 persen untuk provinsi tempat lahir, 9 persen untuk kelahiran murni perkotaan, dan 0,03 persen untuk jenis kelamin.

Persentase ketimpangan konsumsi karena perbedaan antar dan dalam kelompok dengan keadaan berbeda saat lahir (bag. 2.3)

Persentase ketimpangan konsumsi karena perbedaan antar dan dalam kelompok dengan keadaan berbeda saat lahir, berdasarkan kelompok usia lahir (bag. 2.4)

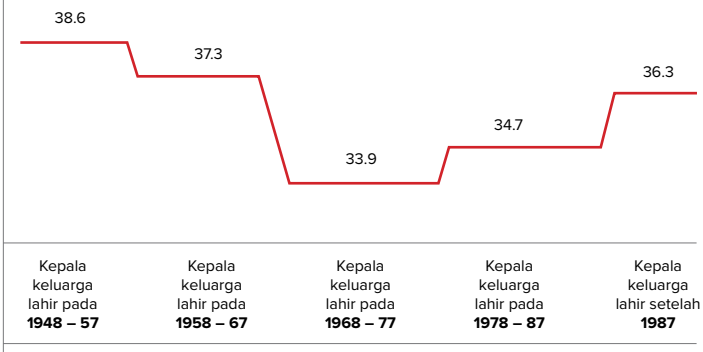

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia. Catatan: Dekomposisi Indeks Theil L (GE(0)) (semua individu) pada perbedaan dalam dan antarkelompok. Keadaan saat lahir mencakup studi jenis kelamin kepala rumah tangga, pendidikan orang tua*, provinsi tempat lahir dan apakah tempat lahir murni perkotaan (entah kotamadya atau kabupaten). *Pendidikan individu diambil sebagai indikator untuk memperkirakan pendidikan orang tua, yang tidak ada dalam data. Namun, analisis data SAKERTI menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan orang tua adalah penentu penting pendidikan anak mereka nantinya, selain juga ketersediaan sekolah, yang kesemuanya termasuk keadaan saat lahir. Keadaan yang tidak terjadi saat lahir termasuk usaha setiap anak.

2.2.2

Awal yang tidak adil dimulai dengan perbedaan kesehatan anak

ANAK-ANAK HARUS MENGAWALI HIDUP DENGAN BAIK UNTUK BISA MENDAPATKAN PENGHASILAN YANG CUKUP SAAT DEWASA. Awal hidup yang sehat adalah salah satu faktor terpenting agar dapat sukses nantinya. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi cukup saat dalam kandungan dan sampai usia dua tahun, mencapai tinggi badan yang tepat sesuai usia mereka. Mereka lebih mungkin mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih baik, mencapai tingkat pendidikan lebih tinggi, mendapatkan penghasilan lebih tinggi, dan menjadi individu lebih sehat saat dewasa, dibandingkan anak-anak yang mengalami kekerdilan atau tumbuh tanpa mencapai tinggi badan yang tepat (Alderman dan Behrman 2004; Victora et al. 2008).

UNTUK MENDAPATKAN AWAL HIDUP YANG BAIK SEMUA ANAK HARUS MENDAPAT PELUANG YANG SAMA, TAK PEDULI DI MANA MEREKA LAHIR ATAU SIAPA ORANG TUA MEREKA. Kesehatan anak dapat ditingkatkan melalui pemeriksaan prakelahiran dan pascakelahiran oleh para ibu, pemantauan tumbuh kembang anak dan penyuluhan tentang nutrisi, imunisasi, akses ke air bersih dan sanitasi memadai (khususnya terkait pembuatan makanan), akses pada dan penerapan perawatan memadai untuk diare, serta hidup di rumah yang bersih dan berkondisi baik (Bank Dunia 2015b).

NAMUN, ANGKA KEMATIAN ANAK DAN GIZI BURUK DI INDONESIA RELATIF TINGGI, KHUSUSNYA DI KALANGAN RAKYAT MISKIN DAN MEREKA YANG TINGGAL DI PEDESAAN. Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi angka kematian bayi dan anak, tapi jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga (Bagan 2.5). Risiko kematian paling tinggi terdapat pada anak yang tinggal di pedesaan, miskin dan pendidikan ibunya rendah. Terlebih lagi, contoh terpenting gizi buruk yaitu kekerdilan masih terbilang tinggi di Indonesia (Bagan 2.6), dan lebih tinggi lagi pada anak-anak yang orang tuanya berpendidikan rendah (Bagan 2.7).

Tidak semua anak mendapatkan awal yang sehat

AWAL YANG SEHAT BAGI BAYI DIMULAI DENGAN PERAWATAN PRAKELAHIRAN DAN PASCAKELAHIRAN UNTUK IBU, TAPI TIDAK SEMUA ORANG BERUNTUNG MENDAPATKANNYA.[25] Perawatan kesehatan yang tepat selama dan setelah kehamilan tidak hanya dapat menjaga kesehatan ibu, tapi juga si anak. Perawatan kesehatan dan nutrisi yang tepat untuk ibu juga berarti nutrisi yang tepat untuk bayi yang belum lahir. Selain itu, pemeriksaan pascakelahiran juga dapat mendorong perilaku yang baik saat menyusui dan kemungkinan dapat mendeteksi risiko pada bayi yang baru lahir. Namun, penggunaan perawatan prakelahiran dan khususnya pascakelahiran cukup rendah di rumah tangga miskin (Bagan 2.8), sehingga para bayi dalam keluarga semacam ini berisiko mendapatkan awal hidup yang buruk. Salah satu alasannya adalah kecilnya kemungkinan rumah tangga di pedesaan menggunakan bidan terampil (Bagan 2.9 dan Bagan 2.10) atau melahirkan di fasilitas kesehatan resmi yang meningkatkan kemungkinan mereka menerima perawatan pascakelahiran (tercatat 96 persen ibu yang melahirkan di fasilitas resmi juga menerima perawatan pascakelahiran; Bank Dunia 2014d).

KEBANYAKAN ANAK MEMULAI PROSES IMUNISASI TAPI TIDAK MENYELESAIKANNYA, KHUSUSNYA ANAK DARI KELUARGA MISKIN. Setelah lahir dengan sehat, anak masih membutuhkan perlindungan dari penyakit. Namun, meski sebagian besar anak memulai proses imunisasi, sekitar sepertiga dari mereka tidak menyelesaikannya sehingga tetap rentan terhadap penyakit. Anak miskin pada khususnya memiliki risiko tinggi (Bagan 2.11).

Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran) (bag. 2.5)

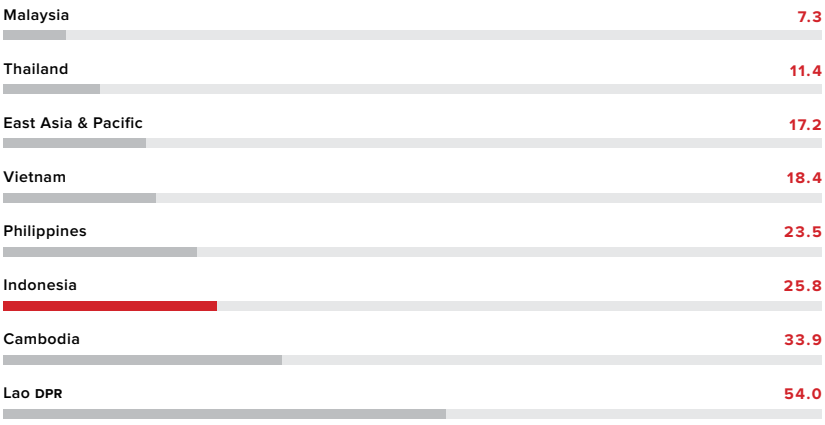

SUMBER WDI 2012.
CATATAN Yang termasuk kematian bayi adalah kematian pada usia 0-1 tahun.

Kekerdilan berdasarkan negara (persen) (bag. 2.6)

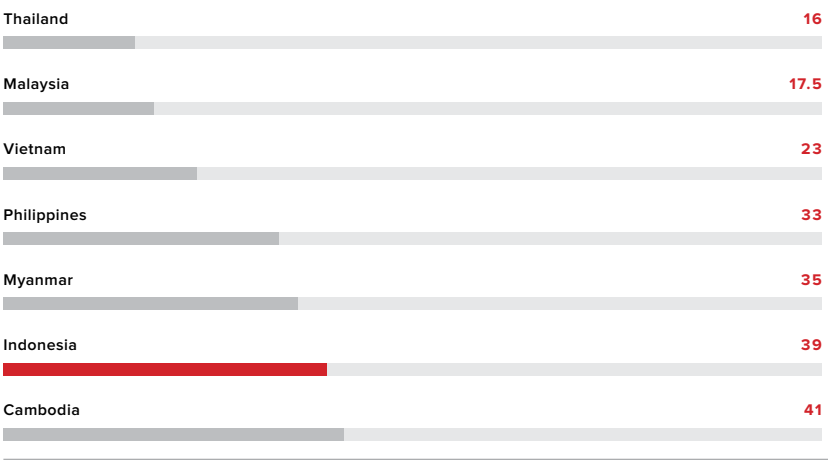

SUMBER Indikator Nutrisi Anak WHO

Kemungkinan kekerdilan berdasarkan pendidikan orangtua (persen) (bag. 2.7)

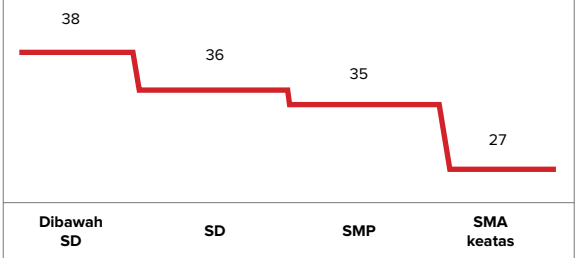

SUMBER SAKERTI dan kalkulasi Bank Dunia.
CATATAN Kekerdilan ekstrim berarti standar deviasi z-score tinggi badan berdasarkan usia <-2 menggunakan standar WHO 2006, anak usia 0-5 tahun.

Penggunaan perawatan prakelahiran dan pascakelahiran terampil (persen) (bag. 2.8)

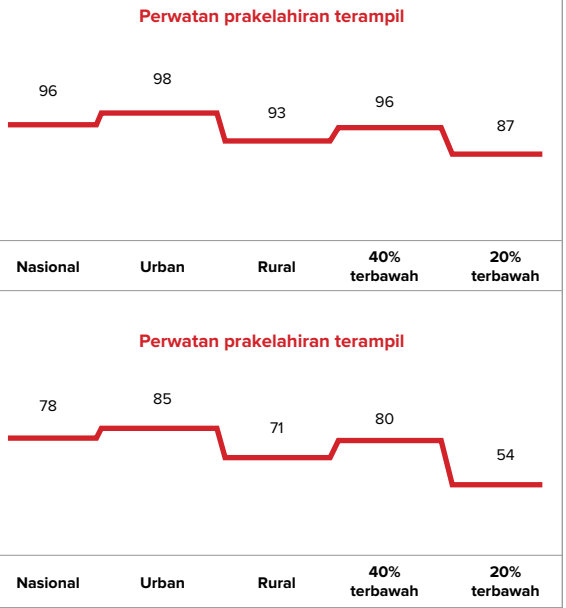

SUMBER Susenas 2012, Bank Dunia 2014d.

[25] Pembahasan mengenai akses pada layanan kesehatan & masalah kualitas merujuk pada Bank Dunia (2014a)

Kelahiran tanpa menggunakan bidan berdasarkan daerah (persen) (bag. 2.9)

SUMBER Susenas 2011.
CATATAN Usia 0 – 1 tahun

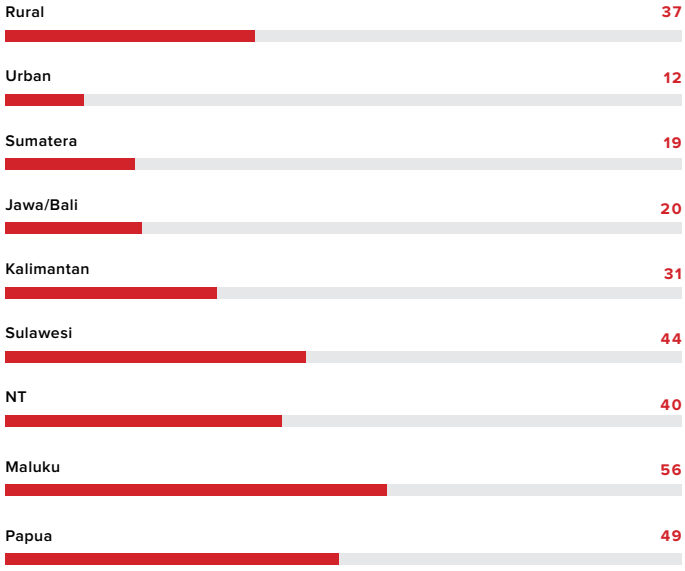

Kelahiran tanpa menggunakan bidan berdasarkan desil konsumsi per kapita (persen) (bag. 2.10)

SUMBER Susenas 2011.

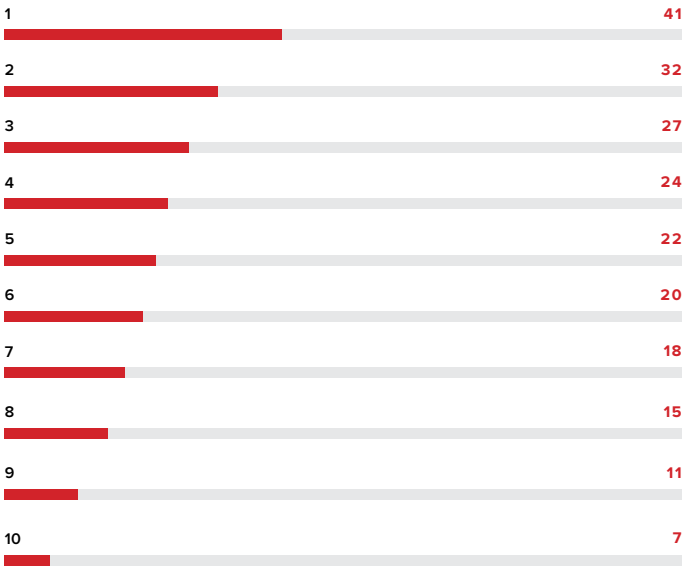

Tingkat imunisasi penuh berdasarkan populasi (persen) (bag. 2.11)

SUMBER SDKI 2012.
CATATAN Imunisasi penuh berdasarkan pedoman WHO adalah vaksin BCG satu dosis, vaksin DPT dan polio masing-masing tiga dosis, dan vaksin campak satu dosis. Pada tahun 1997 Indonesia menambahkan empat dosis vaksin Hepatitis B.

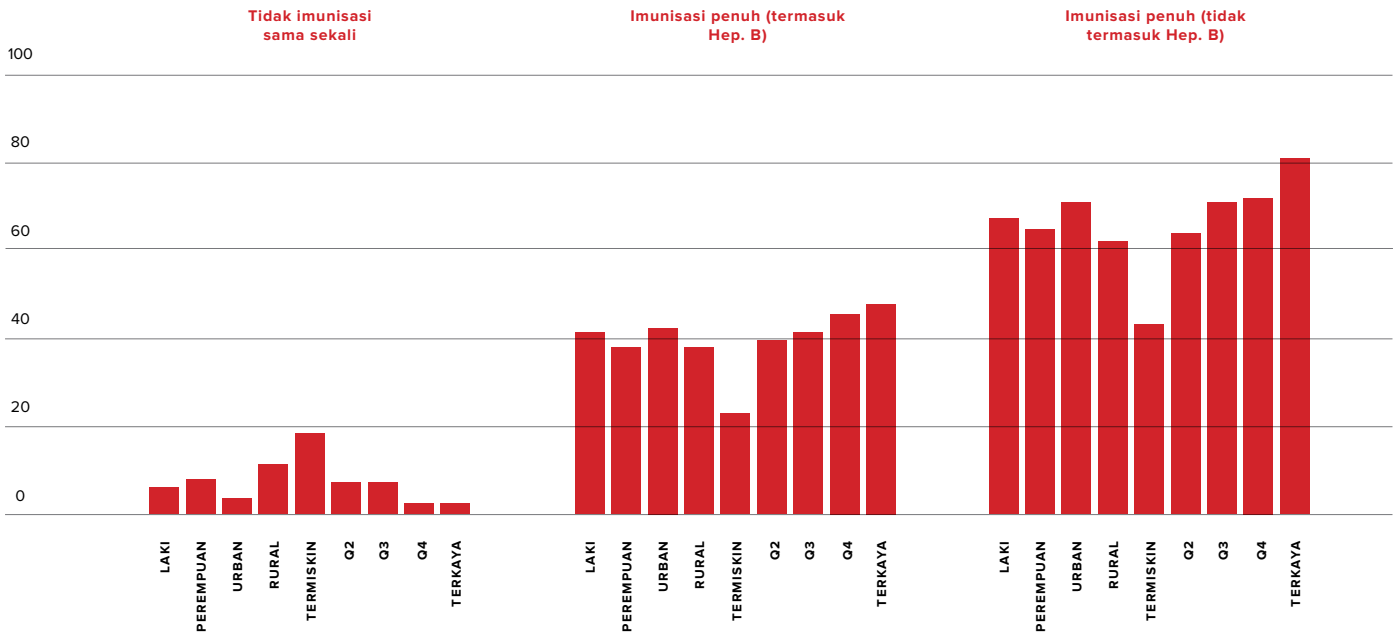

BANYAK BAYI DAN ANAK KECIL YANG TIDAK DIBERI MAKAN DENGAN LAYAK, DAN ANAK MISKIN PALING BERISIKO DALAM HAL INI. Pemberian ASI pada usia yang sesuai sangat penting untuk pertumbuhan anak yang sehat. Namun, kurang dari separuh jumlah bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI dengan tepat, tidak diberi ASI eksklusif melainkan makanan lain.

Banyak bayi di atas usia 6 bulan yang seharusnya mendapatkan makanan pendamping dan ASI, tidak lagi diberi ASI (Bagan 2.12). Tambahan lagi, banyak anak tidak diberi mikronutrisi dan obat cacing, sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan mereka. Tingkat perawatan ini paling rendah di kalangan warga miskin (Bagan 2.13).

Pemberian ASI pada usia yang tepat berdasarkan usia (persen) (bag. 2.12)

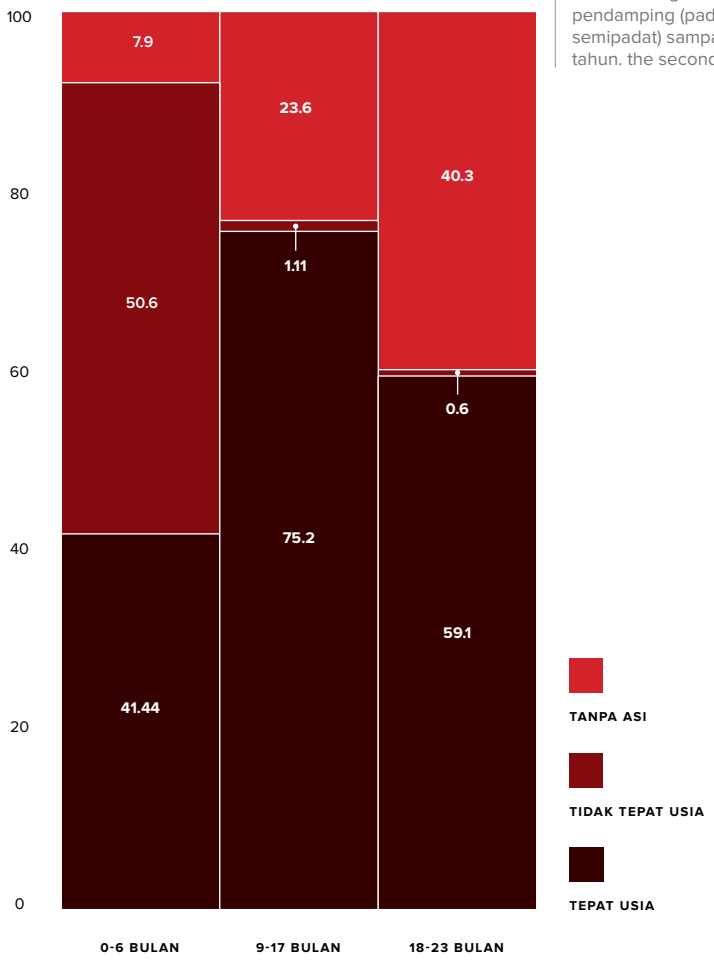

SUMBER Susenas 2012 untuk 0-6 bulan; SDKI 2012 untuk lainnya.
CATATAN Pemberian ASI pada usia yang tepat adalah ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, lalu ASI dengan makanan pendamping (padat dan semipadat) sampai umur 2 tahun. the second year of life.

NUTRISI YANG CUKUP SERINGKALI TIDAK DISERTAI KEBERSIHAN DAN SANITASI MEMADAI SERTA PERAWATAN YANG TEPAT UNTUK DIARE. Walaupun anak diberi cukup makan dengan cara yang tepat, pertumbuhan dan perkembangan mereka akan terganggu jika lingkungan mereka tidak bersih dan sanitasinya kurang baik, sehingga meningkatkan risiko diare. Kesenjangan akses pada air bersih dan sanitasi memadai antara orang kaya dan miskin telah berkurang seiring waktu (Bagan 2.14). Meski demikian, sekitar 1 dari 6 anak usia 0-5 tahun terkena diare dalam dua minggu terakhir. Banyak di antara mereka yang menderita diare tidak diberi oralit, dengan risiko lebih tinggi pada anak perempuan (Bagan 2.15).

AKSES PADA FASILITAS KESEHATAN SEMAKIN BAIK NAMUN MASIH MENJADI TANTANGAN SERIUS DI SEJUMLAH DAERAH (BANK DUNIA 2014A). Akses pada fasilitas kesehatan telah meningkat secara signifikan selama satu dasawarsa terakhir, dengan jumlah rumah sakit naik hampir dua kali lipat dan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) naik nyaris 30 persen. Namun, jumlah tempat tidur pasien rawat inap per kapita hanya separuh dari rekomendasi WHO yaitu 25 tempat tidur per 10.000 orang, dengan variasi signifikan di provinsi berbeda. Di tahun 2011, tercatat jarak median ke fasilitas kesehatan secara nasional hanya 5 km, namun di provinsi seperti Papua Barat, Papua dan Maluku jaraknya lebih dari 30 km (Bagan 2.16).

Asupan mikronutrisi dan obat cacing berdasarkan populasi (persen) (bag. 2.13)

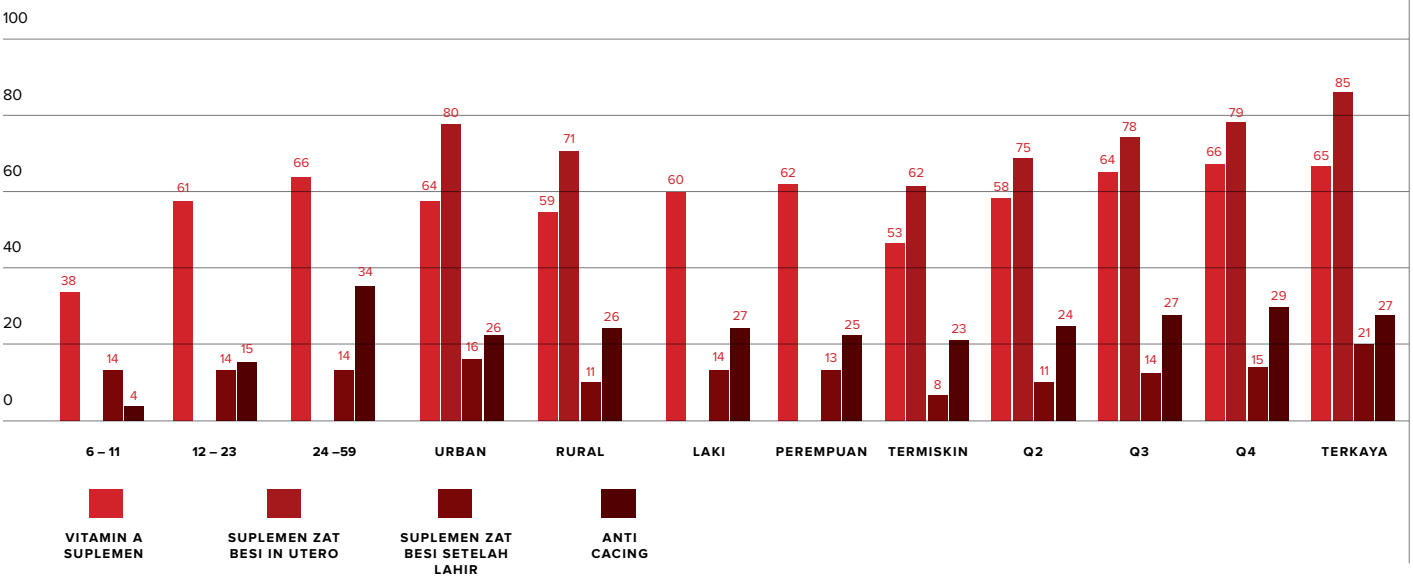

SUMBER SDKI 2012.
CATATAN Obat cacing penting untuk penyerapan gizi. Indikator suplemen zat besi in utero menunjukkan apakah ibu mendapatkan suplemen zat besi selama kehamilan.

Kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi memadai berdasarkan desil konsumsi per kapita rumah tangga (persen) (bag. 2.14)

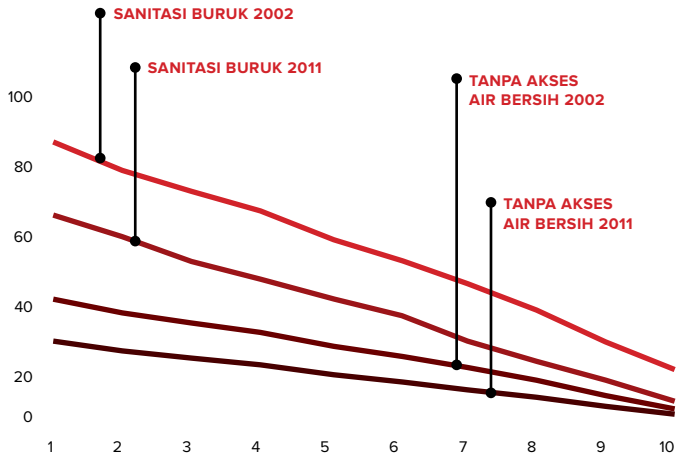

SUMBER Susenas

Kasus diare dan perawatannya (persen) (bag. 2.15)

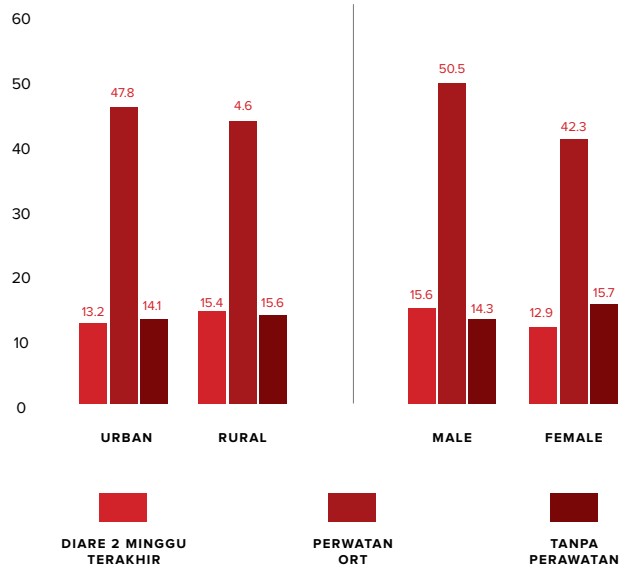

SUMBER SDKI 2012.
CATATAN Kasus diare dalam dua minggu terakhir dari semua anak usia 0-59 bulan. Indikator perawatan dari semua anak yang menderita diare.

Sementara itu lebih dari 40 persen masyarakat di Sulawesi Barat, Maluku dan Kalimantan Barat menghabiskan lebih dari satu jam perjalanan ke rumah sakit umum daerah, dibandingkan angka nasional sebesar 18 persen.

FASILITAS KESEHATAN TIDAK DILENGKAPI SARANA YANG TEPAT UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR SEBAGAIMANA DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG, TERMASUK PELAYANAN YANG MEMENGARUHI KESEHATAN ANAK USIA DINI, KHUSUSNYA DI INDONESIA TIMUR (BANK DUNIA 2014A). Kesiapan fasilitas kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar minimum bervariasi di tiap provinsi, khususnya di Indonesia timur (Bagan 2.17). Kesiapan ini diukur dengan 38 indikator yang mencakup fasilitas dasar, perlengkapan dasar, proses standar pencegahan infeksi, kapasitas diagnostik dan obat-obatan penting. Tidak satu pun Puskesmas yang siap pada seluruh indikator, dan hanya separuh Puskesmas di Papua dan Maluku yang melaporkan kesiapan 80 persen. Yang cukup mengkhawatirkan, ada kekurangan signifikan pada layanan-layanan utama yang memengaruhi apakah seorang anak mendapatkan awal yang sehat, seperti: keluarga berencana (lihat bagian berikut), perawatan prakelahiran, pelayanan kebidanan dasar dan imunisasi rutin.[26]

Ketersediaan Puskesmas (persentase pemukiman dengan Puskesmas) dan jarak ke Puskesmas jika tidak ada di pemukiman (km) (bag. 2.16)

SUMBER Survei Infrastruktur Potensi Desa (Podes) 2011, dilaporkan dalam Bank Dunia 2014d.

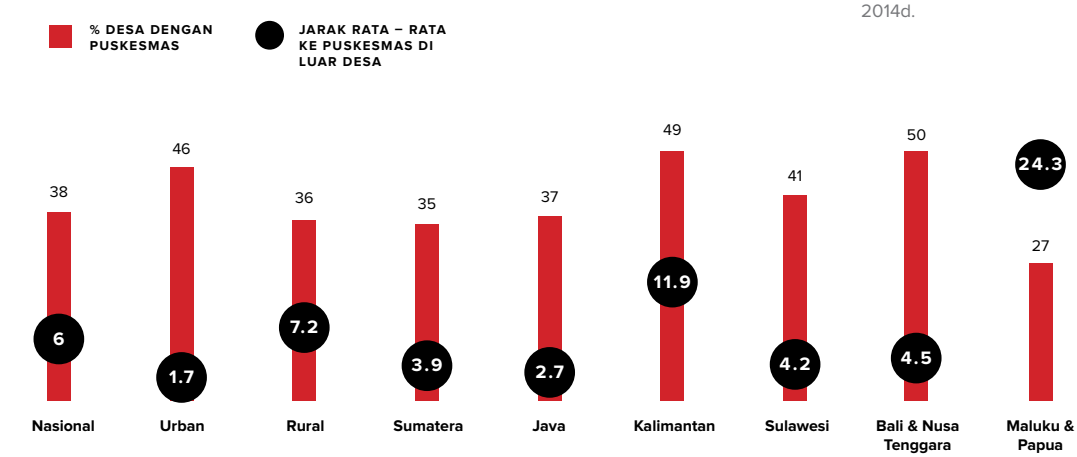

[26] Lihat Bagan 40 dan Tabel 8, Bank Dunia (2014a).

Skor indikator pelayanan terpilih dan indeks kesiapan pelayanan umum untuk Puskesmas berdasarkan provinsi, 2011 (bag. 2.17)

SUMBER Kementrian kesehatan, sensus fasilitas kesehatan 2011, diaporkan di World Bank (2014a).

	Basic Amenities	Basic Equipment	Standard Precaution	Diagnostic Capacity	Essential Medicine	Overall index
DI Aceh	70.9	80.3	65.2	64.2	63.0	67.9
Utara Sumatera	68.5	79.6	60.3	37.3	64.8	61.2
Barat Sumatera	76.8	81.5	69.9	77.6	74.7	75.9
Riau	69.0	81.8	64.2	69.7	71.1	71.0
Jambi	70.5	83.2	62.4	71.5	71.2	71.6
Sumatera Selatan	68.6	84.5	65.6	59.0	72.3	69.7
Bengkulu	66.5	83.9	59.4	49.3	65.1	64.0
Lampung	71.9	81.7	67.9	62.9	72.5	71.0
Bangka Belitung	77.3	84.5	76.7	75.7	67.5	75.4
Kepulauan Riau	76.7	84.9	69.7	75.0	78.2	76.8
DKI Jakarta	87.0	84.1	76.4	20.2	69.7	65.7
Jawa Barat	76.3	85.9	79.1	58.4	74.0	74.0
Jawa Tengah	84.5	86.4	84.8	80.0	77.9	82.2
DI Yogyakarta	88.1	87.3	95.0	96.5	74.5	87.4
Jawa Timur	83.6	87.7	85.7	78.0	77.9	82.0
Banten	76.4	86.7	78.0	55.6	69.0	72.1
Bali	83.6	88.3	85.5	68.3	72.1	78.5
Nusa Tenggara Barat	76.2	87.8	74.9	84.3	76.9	79.7
Nusa Tenggara Timur	63.6	86.2	65.0	53.6	63.5	65.3
Kalimantan Barat	66.8	84.9	65.9	71.8	68.0	70.9
Kalimantan Tengah	73.4	85.3	64.0	56.1	70.7	69.2
Kalimantan Selatan	77.2	86.3	75.6	84.3	75.6	79.5
Kalimantan Timur	76.2	82.9	71.2	68.7	69.5	73.0
Sulawesi Utara	69.7	81.5	61.5	35.8	60.1	60.4
Sulawesi Tengah	66.2	82.0	52.2	54.9	57.1	61.4
Sulawesi Selatan	72.4	82.5	67.3	65.6	66.1	70.1
Sulawesi Tenggara	65.7	80.8	58.3	35.3	65.5	60.3
Gorontalo	71.2	84.2	68.2	39.4	61.2	63.3
Sulawesi Barat	55.3	81.1	49.5	55.3	47.1	56.4
Maluku	62.4	71.2	46.6	35.6	53.3	52.7
Maluku Utara	58.9	81.5	56.7	44.9	60.8	59.9
Papua Barat	55.1	75.4	49.2	34.8	63.9	55.3
Papua	53.5	72.0	41.6	29.3	56.8	50.0
Indonesia	73.9	83.7	70.7	60.6	69.9	71.1

SELAIN ITU, MESKIPUN JUMLAH TENAGA KESEHATAN TELAH MENINGKAT PESAT HINGGA HAMPIR MENCAPAI STANDAR INTERNASIONAL, NAMUN PENYEBARANNYA SANGAT TIDAK MERATA DAN KURANG KOMPETENSI SEHINGGA MASIH MENJADI MASALAH SERIUS (BANK DUNIA 2014A). Rasio tenaga kesehatan inti terhadap populasi sebesar 2,2 per 1.000 orang kini makin dekat dengan angka 2,3 yang direkomendasikan WHO. Namun, banyak Puskesmas khususnya di Indonesia timur tidak memiliki dokter, hanya tiga provinsi yang memiliki satu dokter per 1.000 orang sesuai rekomendasi WHO, dan ketersediaan dokter spesialis hanya terpusat di Jawa. Indonesia juga masih sangat kekurangan tenaga kesehatan penting di sektor publik meskipun banyak lulusan sekolah keperawatan. Terlebih lagi, kualitas tenaga kesehatan masih menjadi masalah. Rokx et al. (2010) menemukan kurangnya akurasi pengetahuan tentang perawatan prakelahiran dan pengobatan anak pada banyak dokter, perawat dan bidan.

PENGGUNAAN PELAYANAN KESEHATAN JUGA DIPENGARUHI PENDIDIKAN DAN PERILAKU IBU. Ibu yang berpendidikan lebih mungkin untuk memastikan anaknya diimunisasi penuh (Bagan 2.18). Mereka juga punya kemungkinan lebih besar mengetahui manfaat oralit dalam pengobatan diare, memberikan mikronutrisi dan obat cacing kepada anak, dan mengonsumsi suplemen zat besi saat hamil. Selain itu, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya penggunaan pelayanan kesehatan tidak hanya disebabkan kurangnya pengetahuan atau pelayanan yang tersedia, tapi juga kurangnya motivasi. Tingkat imunisasi turun drastis untuk anak keempat dan seterusnya dalam suatu keluarga (Bagan 2.19).

Tingkat imunisasi penuh untuk anak usia 12-23 bulan berdasarkan pendidikan ibu (persen) (bag. 2.18)

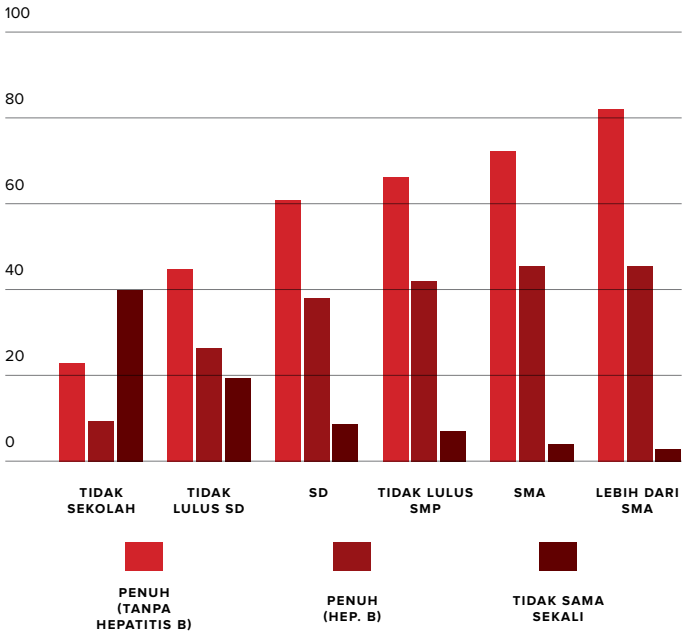

Tingkat imunisasi untuk anak berdasarkan urutan lahir (persen) (bag. 2.19)

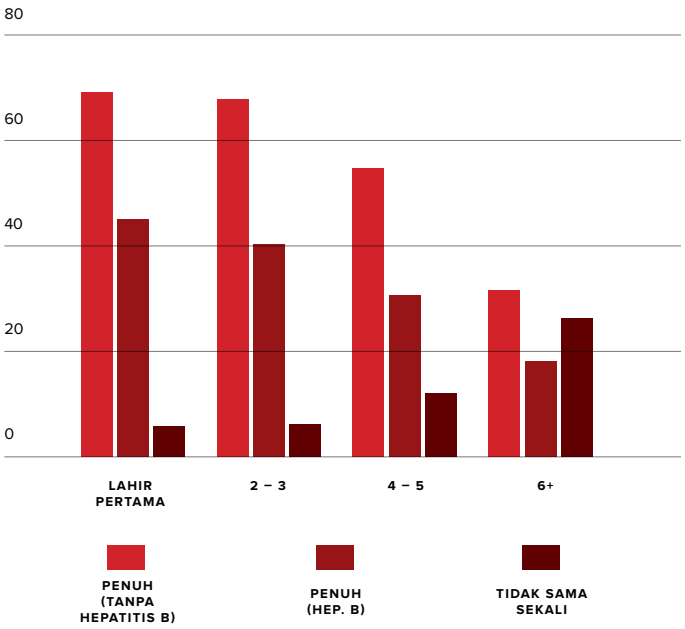

SUMBER SDKI 2012.
CATATAN Imunisasi penuh berdasarkan pedoman WHO adalah vaksin BCG satu dosis, vaksin DPT dan polio masing-masing tiga dosis, dan vaksin campak satu dosis. Pada tahun 1997, Indonesia menambahkan empat dosis vaksin Hepatitis B.

TAMBAHAN LAGI, ANAK-ANAK ADALAH YANG PALING RENTAN KEHILANGAN BEBERAPA PELUANG SEKALIGUS. Penting untuk tidak hanya melihat jumlah anak yang tidak punya akses pada peluang penting dalam setiap aspek, tapi juga memahami apakah anak yang sama mengalami kekurangan dalam beberapa aspek sekaligus. Contohnya, jika anak-anak tinggal di suatu daerah di mana tidak ada sekolah atau transportasi memadai, membangun sekolah saja mungkin takkan cukup untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Kurangnya akses pada sanitasi maupun pelayanan kesehatan yang memadai meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Anak-anak di wilayah pedesaan dan Indonesia timur seringkali mengalami kekurangan dalam beberapa aspek terkait (Bank Dunia 2015b). Misalnya, saat banyak anak miskin di kota kekurangan salah satu dari air, sanitasi atau kondisi tempat tinggal yang baik (Bagan 2.20), anak miskin di desa umumnya kekurangan dua dari ketiga hal di atas atau malah ketiga-tiganya (Bagan 2.21).[27]

[27] Hasil ini diperoleh dari Hadiwidjaja, Paladines dan Wai-Poi (2013), dengan menerapkan metodologi yang pertama diusulkan dalam Ferreira dan Lugo (2012).

Kemiskinan kota dalam hal tempat tinggal, air dan sanitasi (bag. 2.20)

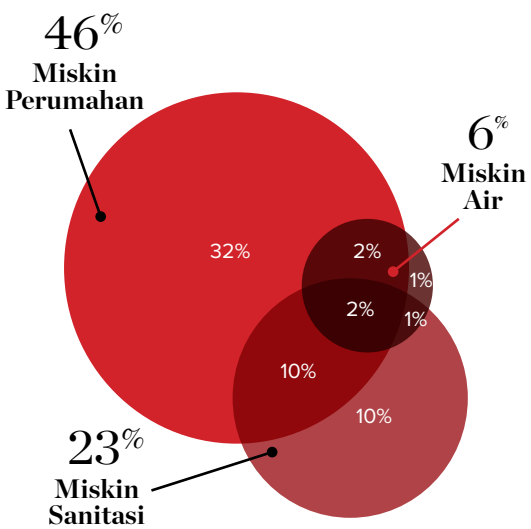

SUMBER Susenas dan Podes, di Hadiwidjaja, Paladines and Wai-Poi (2013).

Kemiskinan desa dalam hal tempat tinggal, air dan sanitasi (bag. 2.21)

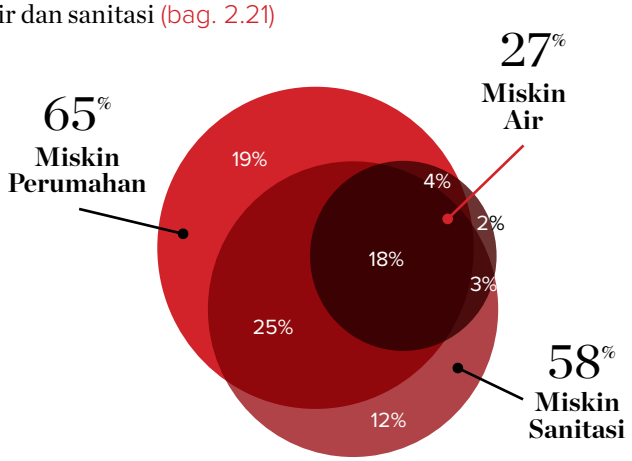

Berkurangnya jumlah anggota keluarga miskin pernah membantu mengurangi ketimpangan nasional

2.2.3

Perubahan pola kelahiran juga memengaruhi ketimpangan, baik kini maupun di masa depan

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA MISKIN TURUN LEBIH PESAT DARIPADA KELUARGA KAYA PADA ERA 1990AN. Jumlah anggota keluarga dan total angka kelahiran telah menurun di Indonesia selama belasan tahun berkat program keluarga berencana nasional yang efektif (Jones dan Adioetomo 2014; Hull, akan datang). Tren ini berlanjut hingga era 1990an untuk semua rumah tangga. Jumlah anggota 10 persen keluarga termiskin berkurang dari rata-rata 5,6 ke 4,8 orang antara 1993 dan 2002, sementara untuk 50 persen keluarga termiskin berkurang dari 4,9 ke 4,3 orang. Pada saat yang sama, jumlah anggota keluarga kaya juga menurun tapi dalam taraf yang lebih rendah. Jumlah anggota 50 persen keluarga terkaya turun dari rata-rata 3,8 ke 3,6 orang, sementara 10 persen keluarga terkaya jumlah anggotanya tetap rata-rata 3,3 orang (Tabel 2.1).

INI BERARTI KETIMPANGAN SAAT ITU LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN JIKA TIDAK ADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA. Karena rumah tangga miskin kala itu memiliki lebih sedikit anak untuk berbagi pendapatan keluarga, konsumsi mereka per orang naik lebih cepat. Bagan 2.22 menunjukkan rasio Gini aktual sebesar 34 poin pada tahun 1993 maupun 2002 (yang mencakup masa krisis keuangan Asia dan pemulihannya). Bagan tersebut juga menunjukkan bahwa rasio Gini akan 2,5 poin lebih tinggi jika jumlah anggota keluarga pada 2002 tetap sama seperti pada 1993, dan tidak turun signifikan seperti yang terjadi pada keluarga miskin.

NAMUN, SAAT JUMLAH ANGGOTA KELUARGA KAYA TERUS MENGECIL PADA ERA 2000AN, TIDAK DEMIKIAN DENGAN RUMAH TANGGA MISKIN SEHINGGA MEMBUAT KETIMPANGAN SEMAKIN TINGGI. Antara tahun 2002 dan 2014, angka rata-rata jumlah anggota keluarga dari separuh populasi yang lebih miskin tidak lagi menurun dan relatif stabil di 4,3, sementara untuk separuh populasi yang lebih kaya angkanya terus turun, meskipun lebih lambat, dari 3,6 ke 3,4 (Tabel 2.2). Hal ini turut menyebabkan peningkatan ketimpangan selama periode tersebut. Rasio Gini mencapai 1,3 poin lebih tinggi pada 2014 dibandingkan jika struktur rumah tangga tetap sama seperti pada 2002 (Bagan 2.23). Apalagi jika perubahan jumlah anggota dalam keluarga yang

Rata-rata jumlah anggota keluarga berdasarkan desil konsumsi per kapita, 2002 dan 2014 (Tab. 2.1)

Desil	1993	2002	Perubahan(%)
1	5.6	4.8	–13.7
2	5.1	4.4	–13.1
3	4.8	4.3	–10.8
4	4.6	4.1	–10.8
5	4.4	3.9	–11.2
6	4.2	3.9	–8.8
7	4.1	3.7	–9.9
8	3.8	3.6	–7.4
9	3.6	3.4	–6.8
10	3.3	3.3	1.1

SUMBER Susenas

Perbandingan rasio Gini 2002 aktual dan konseptual jika jumlah anggota keluarga pada 2002 tetap sama seperti 1993 (bag. 2.22)

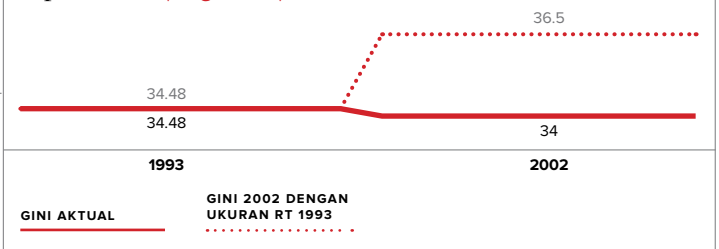

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia.
CATATAN Jumlah rata-rata anggota keluarga diperkirakan untuk setiap persentil konsumsi per kapita pada 1993 dan 2002. Rasio Gini dasar diperkirakan untuk tahun 1993 dan 2002 berdasarkan total pengeluaran rumah tangga dibagi rata-rata jumlah anggota keluarga untuk persentil yang relevan (bukan jumlah anggota keluarga sesungguhnya). Rasio Gini konseptual untuk 2002 diperkirakan berdasarkan total pengeluaran rumah tangga dibagi rata-rata jumlah anggota keluarga untuk persentil yang relevan pada 1993 (yaitu angka yang akan tercapai jika demografi penduduk tetap konstan). Perbedaan antara angka dasar dan konseptual kemudian diterapkan pada rasio Gini nominal 2002 yang resmi.

berbeda tidak hanya berbalik tapi terus menurun lebih cepat untuk rumah tangga miskin dan tidak untuk keluarga kaya, seperti yang terjadi antara tahun 1993 dan 2002, rasio Gini akan menurun jauh sebanyak 4 poin ke angka 36,5 pada 2014.

Mengapa tren demografi dan kelahiran di Indonesia berubah [28]

PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN PENTING BUKAN HANYA UNTUK KETIMPANGAN TAPI JUGA DAPAT MEMBANTU PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN LAINNYA. Namun, penurunan angka kelahiran yang pernah terjadi di Indonesia tidak berhasil dipertahankan. Dengan memiliki lebih banyak anak berarti warga miskin tidak berhasil mencapai jumlah anggota keluarga yang diinginkan dan malah menaikkan ketimpangan per orang. Hal ini menimbulkan dampak penting lain pada pembangunan. Naiknya populasi anak usia sekolah memicu tantangan lebih besar untuk mencapai pendidikan dasar 9 tahun seperti yang sekarang diwajibkan dan 12 tahun yang tengah didiskusikan. Namun, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate atau TFR) Indonesia yang jauh lebih rendah daripada Malaysia, India, Bangladesh dan Vietnam pada tahun 1985, sekarang malah lebih tinggi daripada negara-negara tetangga tersebut. Jelas bahwa penurunan angka kelahiran pada paruh kedua abad yang lalu tidak berlanjut ke abad sekarang ini, dan bahkan mulai meningkat.[29]

SALAH SATU ALASAN KARENA PERNIKAHAN TERJADI LEBIH DINI, KHUSUSNYA PADA KAUM MISKIN, DAN INI MEMENGARUHI ANGKA KELAHIRAN. Peningkatan partisipasi sekolah, terutama untuk anak perempuan, dan urbanisasi yang lebih tinggi seperti halnya di Indonesia, biasanya dikaitkan dengan pernikahan pada usia yang lebih matang dan penurunan angka kelahiran. Namun, ini tidak terjadi di Indonesia. Sejak 2005, tren yang ada cenderung pada pernikahan dini (Hull, akan datang). Alasannya tidak begitu jelas, tapi banyak yang berpendapat disebabkan religiositas yang lebih tinggi di kalangan muda (Jones dan Adioetomo 2014). Fenomena ini paling terlihat pada perempuan miskin. Sebanyak 16,7 persen perempuan dari kuintil termiskin dan 13,7 persen dari kuintil termiskin kedua sudah melahirkan atau mengandung pada usia 15-19 tahun, dibandingkan dengan 2,6 dan 6,6 persen masing-masing untuk kuintil tertinggi dan tertinggi kedua. Tentunya, kasus ini hanya memperburuk masalah yang dihadapi kaum miskin.[30]

Rata-rata jumlah anggota keluarga berdasarkan desil konsumsi per kapita, 2002 dan 2014 (Tab. 2.2)

Desil	2002	2014	Perubahan(%)
1	4.8	4.8	–0.3%
2	4.4	4.4	–0.8%
3	4.3	4.3	0.0%
4	4.1	4.1	–1.4%
5	3.9	3.9	–1.0%
6	3.9	3.8	–2.6%
7	3.7	3.6	–2.1%
8	3.6	3.4	–4.3%
9	3.4	3.3	–2.1%
10	3.3	3.0	–8.6%

SUMBER Susenas

Perbandingan rasio Gini 2014 aktual dan konseptual jika jumlah anggota keluarga pada 2014 tetap sama seperti 2002, dan jika jumlahnya terus menurun pada taraf yang sama seperti pada 1993-2002 (bag. 2.23)

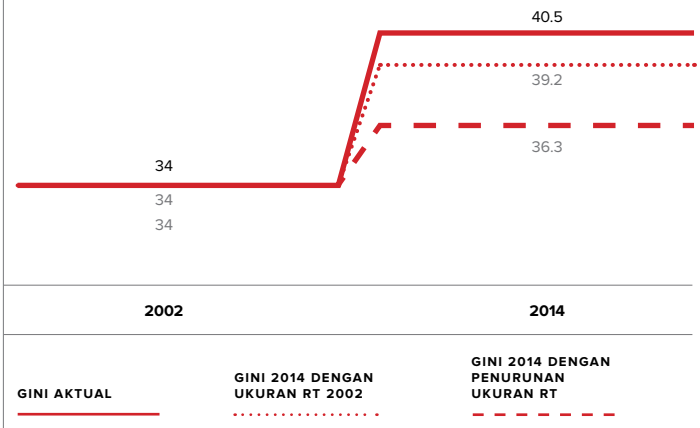

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia.
CATATAN Angka dasar dan konseptual diperkirakan dengan menggunakan metode persentil jumlah anggota keluarga seperti pada Bagan 2.22. Angka konseptual dengan penurunan terus-menerus menggunakan persentil jumlah anggota keluarga dari tahun 2002 dan menguranginya dengan penurunan untuk tiap persentil seperti yang terjadi pada 1993-2002.

[28] Bagian ini merangkum materi yang disajikan dalam Jones dan Adioetomo (2014).
[29] Lihat Hull (akan datang) untuk pembahasan mendalam tentang masalah mengenai data.
[30] Tingginya angka pernikahan dini menjadi masalah bukan hanya karena angka kelahiran yang semakin tinggi. Fenomena ini juga terkait isu hak asasi manusia (apakah gadis remaja bisa memilih sendiri suaminya), legalitas usia pernikahan (16 tahun di Indonesia), dan kesehatan reproduksi (kehamilan lebih dini dan kurangnya jarak antarkelahiran dapat mengakibatkan kesehatan ibu dan anak yang lebih buruk, yang memberi kontribusi pada awal hidup yang tidak adil untuk banyak anak (lihat bagian berikut).

ALASAN UTAMA LAINNYA ADALAH EFEKTIVITAS KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA MENURUN SELAMA DASAWARSA TERAKHIR, KHUSUSNYA BAGI KAUM MISKIN. Angka penggunaan kontrasepsi sekarang ini kurang lebih sama dengan satu dasawarsa yang lalu: 60 persen dengan metode apa pun pada 2002, 57 persen dengan metode modern; 62 persen dengan metode apa pun pada 2012, 58 persen dengan metode modern (Jones dan Adioetomo 2014; SDKI). Meskipun kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi tidak terlalu tinggi dibandingkan negara lain, ini tetap merupakan masalah besar dalam kesehatan reproduksi dan selama beberapa tahun belakangan tidak menunjukkan penurunan signifikan, dari 13 persen pada 2002 ke 11 persen pada 2012 (Jones dan Adioetomo 2014). Ini mencerminkan tidak meratanya akses program keluarga berencana yang efektif. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD atau spiral, sterilisasi pada perempuan dan implan) pada masyarakat di kuintil terkaya tercatat sebesar dua kali lipat (30 persen) daripada kuintil termiskin (15 persen), meskipun "sulit membayangkan bahwa orang miskin benar-benar ingin mengandalkan metode jangka pendek dibandingkan orang kaya" (Jones dan Adioetomo 2014, 10).

DESENTRALISASI, KURANGNYA DUKUNGAN POLITIK DI TINGKAT DAERAH, DAN LEMAHNYA PERATURAN TURUT MEMPERLEMAH KELUARGA BERENCANA. Jones dan Adioetomo (2014) menyatakan terdapat tiga faktor yang menghambat penggunaan kontrasepsi di Indonesia. Pertama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dahulu merupakan lembaga kuat di bawah kendali pemerintah pusat, kesulitan mempertahankan efektivitasnya setelah Indonesia menerapkan desentralisasi, dengan tanggung jawab signifikan untuk penerapan dan pengawasan dialihkan ke pemerintah kabupaten. Terlebih lagi, pembagian peran antara BKKBN dan Kementerian Kesehatan di tingkat akar rumput masih tidak jelas. Kedua, kurangnya komitmen pemerintah daerah pada keluarga berencana muncul setelah adanya desentralisasi, terlihat dari dukungan anggaran yang tidak mencukupi untuk keluarga berencana. Terakhir, Undang-Undang No. 52/2009 tentang Keluarga Berencana tidak didukung dengan baik melalui peraturan-peraturan penerapan. Lihat Boks 2.6 untuk uraian lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi keluarga berencana.

BOKS 2.6

Isu strategis & berkembang mengenai keluarga berencana di Indonesia

Masih ada beberapa isu strategis dan berkembang yang dihadapi keluarga berencana. Jones dan Adioetomo juga menggarisbawahi isu-isu strategis penting untuk merevitalisasi keluarga berencana di Indonesia

01

Pencampuran pembiayaan dan metode

Sekitar 73 persen pengguna program keluarga berencana dilayani oleh sektor swasta. Namun, penyedia dari sektor swasta menekankan metode jangka pendek yang justru merugikan mereka yang lebih memilih untuk tidak punya anak daripada menundanya, khususnya orang miskin yang tidak mampu terus-menerus membeli alat kontrasepsi.

02

Peningkatan kemerataan akses

Kesenjangan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana terjadi antara provinsi dan kabupaten yang berbeda, serta antara masyarakat umum dan kelompok yang termarginalkan. Karena sejumlah kelompok tidak ekonomis untuk dijangkau karena berbagai alasan, kecil kemungkinan sektor swasta akan mengatasi masalah akses dan kualitas tersebut, maka sektor publik harus memegang peranan.

03

Dukungan perencanaan dan anggaran daerah

Keluarga berencana mendapat jatah anggaran yang sangat kecil dari pemerintah daerah (antara 0,04 dan 0,2 persen) karena pejabat keluarga berencana daerah tidak diikutsertakan dalam penyusunan anggaran, ada 27 pos anggaran lain yang harus dibiayai sesuai amanat undang-undang, dan

kurangnya perencanaan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, kebanyakan daerah tidak menyediakan 30 persen kontrasepsi dan persediaan lainnya sesuai standar pelayanan minimum, yang berarti kantor BKKBN pusat lah yang mesti turun tangan. Namun, pendanaan tidak diberikan untuk biaya pemberian layanan, sehingga dibebankan oleh penyedia daerah kepada pengguna (66 persen pengguna program keluarga berencana pemerintah membayar untuk mendapatkan pelayanan). Terakhir, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk prioritas strategis nasional dibatasi untuk infrastruktur, sehingga tidak bisa menjadi alternatif pendanaan di tingkat daerah.

04

Kapasitas sumber daya manusia BKKBN

Berbagai evaluasi terhadap kebutuhan revitalisasi program keluarga berencana menemukan kekurangan dalam kapasitas staf BKKBN di tingkat daerah,[31] khususnya terkait perencanaan dasar, implementasi program, serta pemantauan dan pengawasan; sosialisasi tentang pentingnya keluarga berencana kepada pihak eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten; dan komunikasi dengan sektor-sektor lain.

05

Pelayanan keluarga berencana

Pelayanan sektor swasta terutama diberikan oleh bidan. Dari 135.000 bidan yang terdaftar, hanya 40.000 yang menyediakan pelayanan keluarga berencana. Jumlah ini terlalu kecil dibandingkan skala kebutuhan keluarga berencana. Terlebih lagi, relatif sedikit bidan terlatih dalam metode KB jangka panjang (hanya 44 persen untuk IUD dan 37 persen untuk implan), yang merupakan metode paling dibutuhkan bagi warga miskin yang ingin membatasi jumlah anggota keluarga.

06

Masalah penciptaan kebutuhan

Kesuksesan program keluarga berencana di masa lalu amat mengandalkan peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), yang bertugas memberi penyuluhan kepada pasangan suami istri tentang manfaat memiliki keluarga kecil dan menggunakan kontrasepsi. Setelah desentralisasi, PLKB berada di bawah pemerintah daerah dan jumlahnya berkurang drastis. Sosialisasi keluarga berencana kini sering diabaikan di tingkat daerah.

07

Masalah pengelolaan rantai pasokan kontrasepsi

Mengelola logistik dan penyediaan kontrasepsi adalah sumber masalah lainnya (Brandt dan Benarto 2013). Tingkat persediaan daerah didasarkan pada target pengguna baru, bukan pada data kebutuhan yang ada. Data di sistem pelaporan juga tidak memadai. Akibatnya, banyak klinik yang dipasok oleh BKKBN sering kehabisan stok jenis kontrasepsi tertentu. Tambahan lagi, sistem pergudangan sentral yang dipakai BKKBN malah membuat rantai pasokan semakin panjang bila dibandingkan Kementerian Kesehatan yang langsung mengirimkan obat-obatan ke tingkat provinsi dan kabupaten. Pendanaan untuk pengiriman pasokan dari kabupaten ke tingkat desa juga tidak ada. Selain itu, suhu di fasilitas penyimpanan pusat dan daerah jauh lebih tinggi dari suhu maksimal yang disarankan yaitu 25 derajat Celsius, sehingga mengurangi kualitas persediaan kontrasepsi.

08

Keluarga berencana di bawah JKN

Pelayanan keluarga berencana termasuk ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru diberlakukan, walaupun Peraturan Presiden tahun 2013 tentang JKN mengandung pasal-pasal yang saling bertentangan mengenai keluarga berencana. Ada tiga masalah utama terkait dimasukkannya keluarga berencana di bawah JKN. Pertama, JKN adalah sistem jaminan sosial berdasarkan konsep pengumpulan risiko melalui pungutan dari anggotanya. Maka pungutan untuk penyedia layanan jumlahnya tetap (kapitasi). Namun, fokus keluarga berencana adalah mendapatkan sebanyak mungkin pengguna dari kalangan yang kebutuhan kontrasepsinya belum terpenuhi, yang berarti semakin banyak pelayanan keluarga berencana, semakin tidak menguntungkan. Sudah ada indikasi bahwa sejumlah Puskesmas enggan memberikan pelayanan tersebut. Kedua, peraturan baru mewajibkan BKKBN untuk menjamin kontrasepsi bagi semua pengguna, dibandingkan situasi saat ini di mana sebagian besar pengguna membayar sendiri. Perlu dibedakan antara orang yang mampu membayar sendiri dan mereka yang berhak mendapatkan pelayanan baru. Terakhir, bidan yang bekerja di klinik tidak bisa dikontrak langsung oleh BPJS (badan pengelola JKN) di bawah peraturan saat ini meskipun mereka terdaftar dan terakreditasi.

[31] Contohnya, Lewis dan Haripurnomo (2009), Thomas dan Adioetomo (2010) dan Febriani (2012).

2.2.4

Awal hidup yang tidak setara berlanjut dengan perbedaan dalam pengembangan keterampilan dan pendidikan

SETELAH AWAL YANG SEHAT, SESEORANG HARUS MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENDAPAT PEKERJAAN YANG BAIK NANTINYA. Kunci untuk mendapat pekerjaan yang baik di masa depan adalah bersekolah dan mengembangkan keterampilan. Ketika tidak semua anak bisa bersekolah atau mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang mereka butuhkan di sekolah, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik saat dewasa jauh lebih kecil daripada anak yang memperolehnya.

LANGKAH PERTAMA ADALAH MEMASTIKAN LEBIH BANYAK ANAK MELANJUTKAN SEKOLAH KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI. Angka putus sekolah jauh lebih tinggi saat transisi ke jenjang pendidikan berikutnya, dibandingkan selama jenjang yang sama. Ini terjadi pada semua anak, terutama anak miskin. Contohnya, angka partisipasi sekolah pada kelas enam SD hampir 100 persen untuk anak-anak dari kuintil terkaya dan nyaris 90 persen untuk kuintil termiskin (Bagan 2.24). Saat transisi ke kelas satu SMP (tahun ketujuh sekolah), angka partisipasi turun 5 poin persentase ke 94 persen untuk kuintil terkaya. Namun, penurunannya lebih drastis untuk kuintil termiskin yakni 17 poin persentase ke 73 persen. Pola serupa tampak antara tahun kesembilan dan kesepuluh yaitu transisi dari SMP ke SMA (Bagan 2.25). Angka partisipasi sekolah anak dari kuintil terkaya turun dari 89 ke 76 persen, tapi angka untuk kuintil termiskin anjlok tiga kali lipatnya dari 59 ke 33 persen.

KADANG TIDAK ADA CUKUP SEKOLAH PADA JENJANG YANG LEBIH TINGGI, TAPI SECARA UMUM SEKOLAH DI INDONESIA MUDAH DIAKSES DAN MASIH BISA MENERIMA LEBIH BANYAK MURID. Akses pada SMA atau SMK negeri masih menjadi masalah di beberapa kecamatan, khususnya di Papua dan Maluku, juga di Nusa Tenggara Timur (akses kurang dari 70 persen), Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan

Lama bersekolah, usia 16-18 tahun (persen) (bag. 2.24)

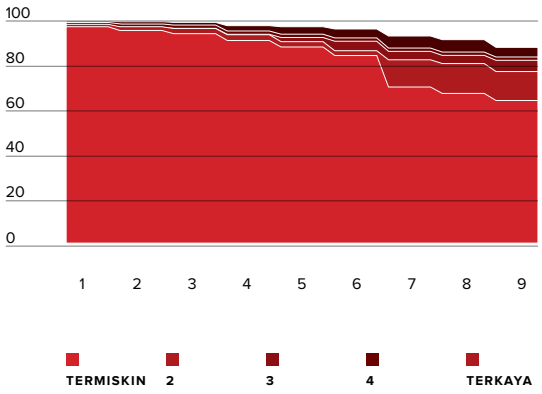

SUMBER Susenas 2012.

Lama tahun bersekolah, usia 19-21 tahun (persen) (bag. 2.25)

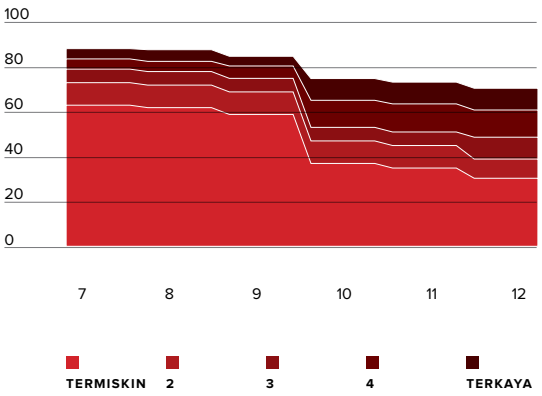

SUMBER Susenas 2012.

Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (semuanya kurang dari 80 persen).[32] SMP dan SMA secara umum banyak tersedia dan biasanya tidak terlalu penuh, masih bisa menerima murid tambahan. Menurut Susenas, hampir separuh dari semua SMP dan SMA memiliki kurang dari 180 siswa, dengan jumlah siswa per kelas rata-rata di bawah 25.[33]

SEBAGIAN ANAK TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH KARENA BIAYA PENDIDIKAN MELONJAK TAJAM PADA JENJANG YANG LEBIH TINGGI, DAN HANYA SEDIKIT ANAK MISKIN YANG MENDAPATKAN BEASISWA MESKIPUN MEREKA MEMENUHI SYARAT. Salah satu penyebab putus sekolah adalah kenaikan signifikan biaya sekolah saat naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Uang sekolah naik dari rata-rata Rp 500.000 per tahun untuk SD ke Rp 800.000 pada tingkat SMP dan Rp 1,6 juta pada tingkat SMA (Bagan 2.26). Ini membuat banyak rumah tangga miskin tidak mampu membiayai pendidikan. Dengan kata lain, biaya sekolah tahunan untuk siswa SMP mencapai 25 persen dari garis kemiskinan per kapita, dan untuk siswa SMA biayanya naik hingga 50 persen dari garis kemiskinan. Sementara itu, anak miskin dan rentan relatif sedikit yang menerima beasiswa (Bagan 2.27) meskipun cakupan beasiswa telah diperluas dan pemilihan sasarannya diperbaiki, namun besaran manfaat beasiswa tidak cukup untuk menutupi semua biaya pendidikan (Bank Dunia 2012a dan 2012c).

[32] Analisis data Sensus Potensi Desa (Podes).
[33] Modul pendidikan Susenas 2012.

Biaya sekolah tahunan berdasarkan jenjang sekolah (juta Rp) (bag. 2.26)

SUMBER Susenas 2014 dan World Bank kalkulasi dari World Bank (2015e).

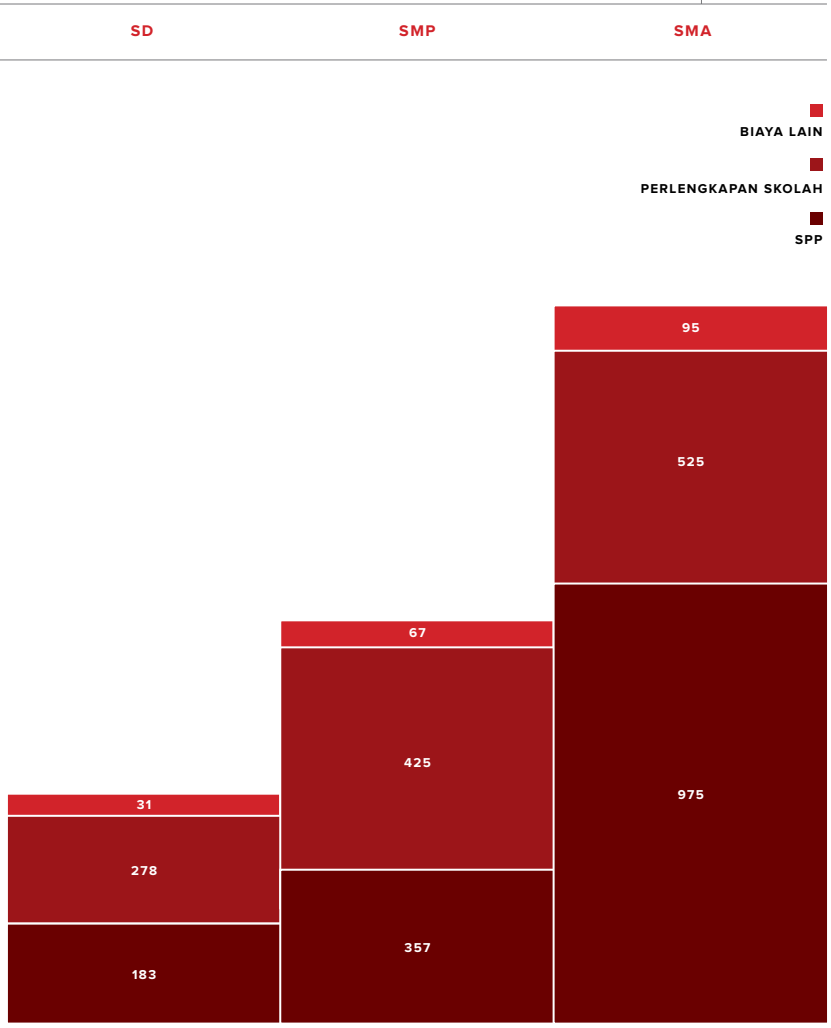

Persentase rumah tangga dengan anak usia sekolah yang mendapat beasiswa berdasarkan desil pengeluaran per kapita rumah tangga (persen) (bag. 2.27)

SUMBER Susenas 2014 and World Bank calculations from World Bank (2015e).

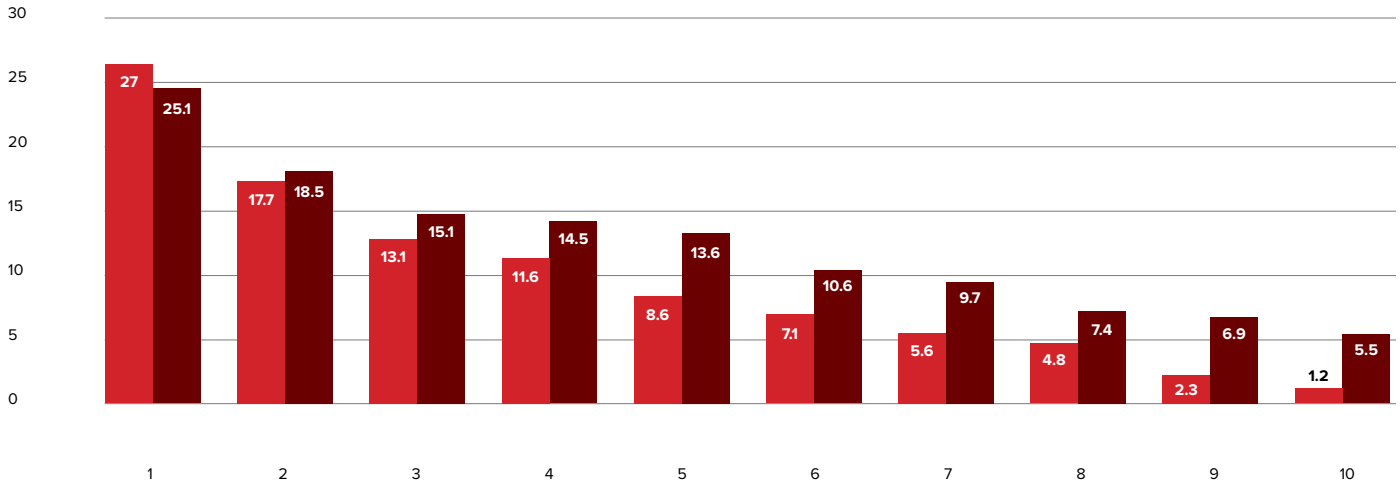

SEBAGIAN ANAK LAINNYA PUTUS SEKOLAH KARENA MEREKA MEMILIH BEKERJA UNTUK MEMBANTU PENGHASILAN RUMAH TANGGA. Meski tidak banyak data tentang upah pekerja anak di bawah usia 15 tahun, data survei anak usia 15 sampai 18 tahun mengindikasikan bahwa penghasilan bulanan mereka nyaris tiga kali lebih tinggi dari garis kemiskinan bulanan. Inilah mengapa bekerja menjadi pilihan menarik bagi anak yang kurang mampu (Bagan 2.28).

NAMUN MESKIPUN KETIMPANGAN TERUS TERJADI, INDONESIA TELAH CUKUP BERHASIL MENGURANGI KESENJANGAN PARTISIPASI SEKOLAH ANTARA WARGA KOTA DAN DESA, ORANG KAYA DAN MISKIN, SERTA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN. Secara historis, anak laki-laki yang tinggal di kota dengan orang tua lebih berpendidikan dan berasal dari keluarga mampu, memiliki kemungkinan lebih besar masuk sekolah daripada anak perempuan yang kurang mampu, tinggal di desa, dengan orangtua yang kurang berpendidikan. Namun, kesenjangan berdasarkan jenis kelamin, antara kota dan desa, kaya dan miskin, serta tingkat pendidikan orang tua mulai berkurang. Contohnya, kesenjangan tingkat masuk SMP antara anak yang orang tuanya tidak berpendidikan dengan yang orang tuanya berpendidikan tinggi, atau antara kuintil termiskin dan terkaya, berkurang separuhnya dalam satu dasawarsa terakhir (Bagan 2.29 dan Bagan 2.30).

WALAUPUN DEMIKIAN, LAMANYA SESEORANG MENGENYAM PENDIDIKAN TIDAK SELALU SEJALAN DENGAN PENDAPATAN YANG LEBIH TINGGI. Tren jangka panjang menunjukkan perbaikan dalam hal pendidikan. Anak yang lahir pada tahun 1960an dan 1970an dari orang tua yang tidak berpendidikan jauh lebih mungkin memperoleh pendidikan lebih banyak dari orang tua mereka dibandingkan anak yang lahir pada tahun 1950an. Contohnya, anak-anak yang orang tuanya tidak lulus SD, anak yang lahir di era 1960an dan 1970an lebih kecil kemungkinannya untuk tidak memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang lahir tahun 1950an (kemungkinannya masing-masing lebih kecil 11 dan 37 persen), dan lebih besar kemungkinannya untuk lebih lama mengenyam pendidikan daripada orang tua mereka (Bagan 2.31 dan Bank Dunia 2015b). Tapi sebagai orang dewasa, kesempatan mereka untuk meraih pendapatan lebih tinggi tidak jauh berbeda dengan orang lain yang lebih tua dan berpendidikan lebih rendah (Bagan 2.32).

SUMBER Sakernas 2013

Median pendapatan bulanan anak usia 15-18 tahun (rupiah) (bag. 2.28)

Angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun berdasarkan kuintil konsumsi orang tua (bag. 2.29)

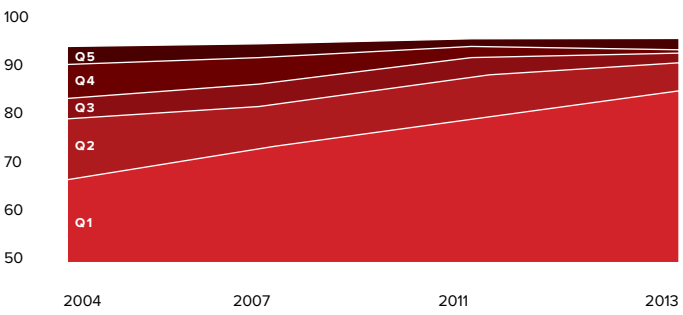

Angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun berdasarkan pendidikan orang tua (bag. 2.30)

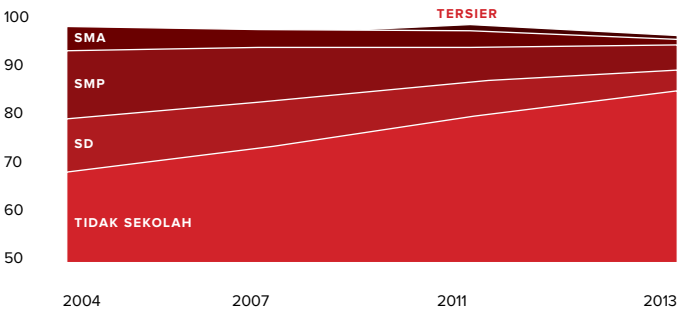

SUMBER Susenas.
CATATAN Yang tertinggi dari pendidikan kedua orang tua; kuintil konsumsi rumah tangga per kapita orang tua.

SALAH SATU ALASANNYA ADALAH TIDAK SEMUA ANAK MENIKMATI MANFAAT YANG SAMA DARI BERSEKOLAH KARENA SEBELUMNYA MEREKA TIDAK MENDAPAT AWAL YANG SEHAT DAN CERDAS. Ketertinggalan pada usia dini membatasi manfaat pendidikan dari bersekolah nantinya. Kita sudah melihat bahwa anak yang orang tuanya kurang berpendidikan dan rendah pendapatannya lebih mungkin mengalami kekerdilan (Bagan 2.7 di atas dan Bank Dunia 2015b). Mereka juga berkemungkinan lebih kecil mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD), seperti halnya anak di Indonesia timur (Bagan 2.33). Sebagai akibat dari hal ini dan faktor-faktor lainnya, mereka lebih mungkin berada di kuintil terbawah secara kognitif daripada kuintil teratas (Bagan 2.34).

AKSES TERBATAS PADA LEMBAGA PAUD TURUT BERPERAN, DEMIKIAN PULA LATAR BELAKANG ORANG TUA. Hanya di wilayah perkotaan dan Jawa kita dapat menemukan lembaga PAUD dalam pemukiman penduduk (sekitar 90 persen) atau berjarak kurang 10 km dari pemukiman (Bagan 2.35). Hanya sekitar separuh pemukiman di pedesaan memiliki lembaga PAUD, sedangkan separuhnya rata-rata berjarak 20 km dari PAUD terdekat. Sementara di Papua dan Maluku hanya 10 persen pemukiman memiliki lembaga PAUD, sedangkan sisanya berjarak sangat jauh dari PAUD di mana yang terdekat berjarak 50 km, artinya anak yang masuk PAUD bisa dikatakan tidak ada. Bahkan ketika lembaga PAUD mudah diakses, tidak semua anak memasukinya. Contohnya, anak usia 4 tahun di wilayah perkotaan umumnya punya peluang 30 persen untuk masuk PAUD, sementara anak usia 4 tahun di pedesaan hanya berpeluang 21 persen. Namun, untuk anak kota dengan ibu berpendidikan tinggi kemungkinan ini naik dari 30 ke 36 persen, sementara untuk anak desa dengan ibu berpendidikan rendah kemungkinannya turun dari 21 ke 9 persen saja (Hasan et al. 2013). Demikian pula dengan anak dari 20 persen keluarga terkaya yang punya peluang 40 persen untuk masuk PAUD, dibandingkan anak dari 20 persen keluarga termiskin yang kesempatannya hanya 16 persen.

Probabilitas perolehan pendidikan untuk anak yang lahir pada tahun 1960an dan 1970an dengan orang tua yang tidak lulus SD, dibandingkan anak yang lahir tahun 1950an (persen) (bag. 2.31)

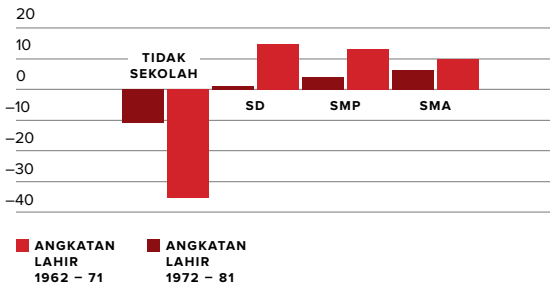

Probabilitas kuintil pendapatan saat dewasa untuk anak yang lahir pada tahun 1960an dan 1970an dengan orang tua yang tidak lulus SD, dibandingkan anak yang lahir tahun 1950an (persen) (bag. 2.32)

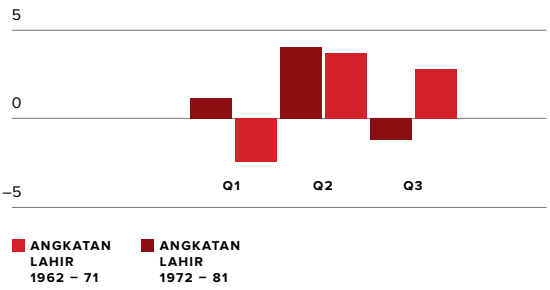

SUMBER Susenas.
CATATAN: Highest of both parents' education; parents' per capita household consumption quintile.

Angka partisipasi PAUD untuk anak usia 5-6 tahun berdasarkan daerah, jenis kelamin dan pendapatan (persen) (bag. 2.33)

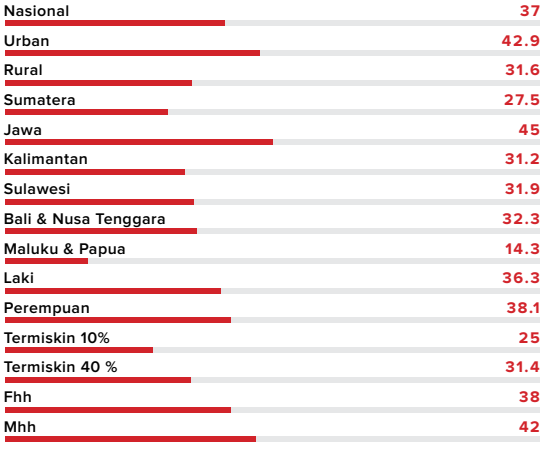

SUMBER Susenas.

Probabilitas anak usia 7-14 tahun berada di kuintil teratas atau terbawah dalam skor kemampuan kognitif berdasarkan pendidikan orang tua (persen) (bag. 2.34)

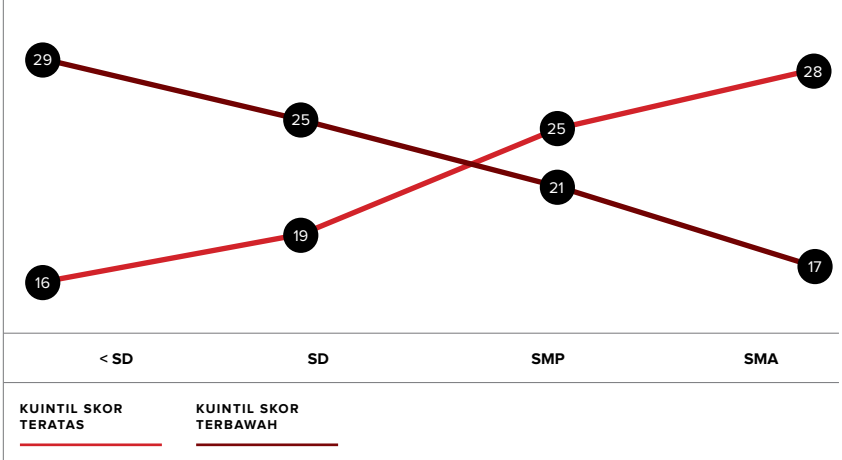

SUMBER SAKERTI dan kalkulasi Bank Dunia.

SALAH SATU ALASAN MENGAPA PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI TIDAK MEMICU PENDAPATAN YANG LEBIH TINGGI KARENA PERBEDAAN MUTU PENDIDIKAN ITU SENDIRI. Saat ini anak miskin lebih mungkin masuk sekolah dibandingkan masa sebelumnya, namun mutu pengembangan keterampilan mereka terhambat oleh mutu pendidikan. Ini berdampak buruk pada hasil pembelajaran murid-murid miskin dan di daerah terpencil. Contohnya, anak kelas tiga SD di Jawa membaca 26 kata lebih cepat per menit dibandingkan anak di Nusa Tenggara, Maluku atau Papua, dan 10-12 kata lebih cepat daripada anak di daerah mana pun (Tabel 2.3). Anak dari keluarga berpendapatan menengah membaca 6-12 kata lebih cepat daripada anak miskin, dan anak kaya membaca 18 kata lebih cepat, sementara anak yang pernah mengikuti PAUD mampu membaca 11 kata lebih cepat.

Ketersediaan PAUD di pemukiman (persen) dan jarak ke PAUD terdekat jika letaknya tidak di pemukiman (km) berdasarkan daerah (bag. 2.35)

SUMBER Survei Infrastruktur Potensi Desa (Podes) 2011.

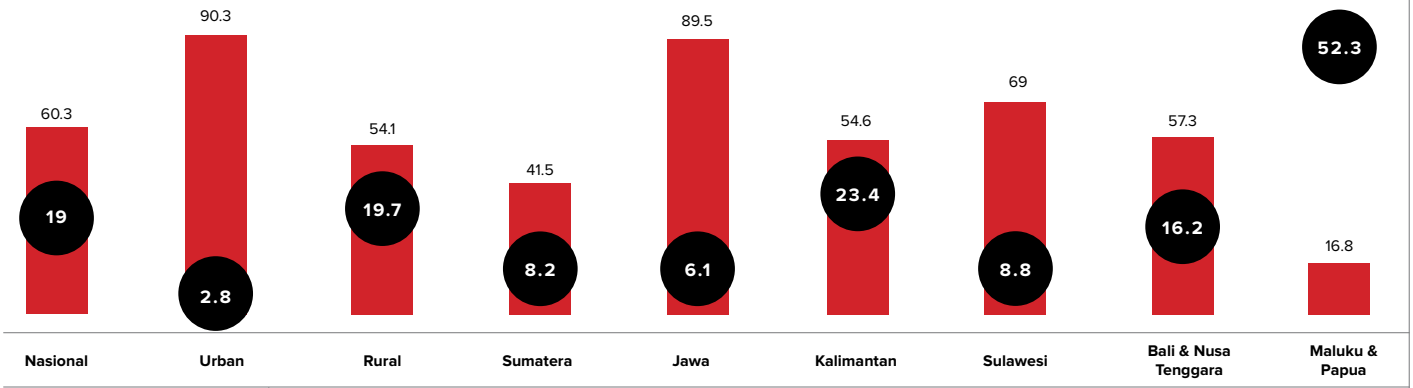

SUMBER USAID (2014)

Keunggulan kefasihan membaca lisan berdasarkan partisipasi PAUD, lokasi dan pendapatan (kata per menit lebih cepat dari rujukan) (Tab. 2.3)

Keunggulan berdasarkan lokasi: kata per menit lebih cepat dari anak dari Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	Keunggulan berdasarkan pendapatan: kata permenit lebih cepat dari anak dari kuartil termiskin	Keunggulan berdasarkan PAUD: kata per menit lebih cepat dari anak yang tidak masuk PAUD
12.2 Kalimantan-Sulawesi	**5.8** Menengah bawah	**11.5** Masuk PAUD
15.5 Sumatra	**11.8** Menengah atas	
26.5 Jawa-Bali	**18.0** Teratas	

Kualitas fasilitas pendidikan dan guru (persen) (bag. 2.36)

SUMBER Survei Infrastruktur Potensi Desa (Podes) 2011.

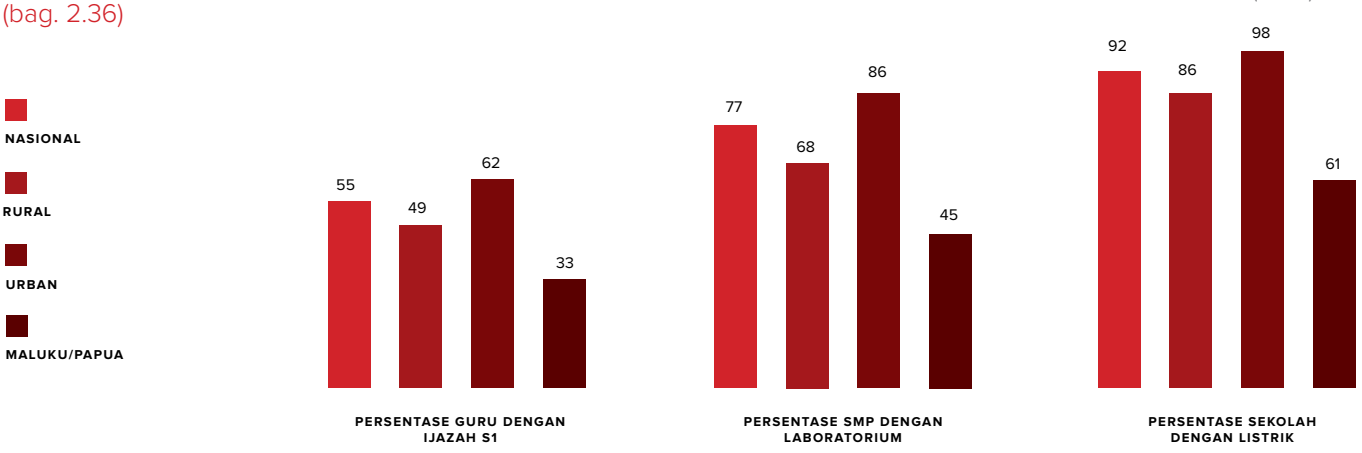

SALAH SATU PENGHAMBAT KEMAJUAN ANAK ADALAH KUALITAS FASILITAS PENDIDIKAN MAUPUN GURU. Fakta juga menunjukkan bahwa anak miskin lebih kecil kemungkinannya untuk belajar. Salah satu kendala kualitas pendidikan yang dihadapi banyak anak Indonesia adalah mutu fasilitas pendidikan dan guru. Masalah ini lebih besar lagi bagi anak di pedesaan, khususnya di Indonesia timur (Bagan 2.36). Sebelas persen siswa SMP di Papua dan Maluku mengatakan guru mereka sering atau selalu terlambat atau absen, dibandingkan hanya 1 persen di tingkat nasional.[34] Sementara, akses ke pendidikan berkualitas tidak cukup untuk mengembangkan kemampuan yang tepat bagi semua anak. Selain lebih kecil kemungkinan anak miskin untuk tinggal di dekat sekolah dengan guru berkualitas, kemungkinan mereka untuk belajar juga lebih kecil (Bagan 2.37 dan Bagan 2.38).

SEBAGAI AKIBAT DARI TIDAK MERATANYA AKSES PADA PENDIDIKAN BERKUALITAS UNTUK BANYAK ANAK, NYARIS TIGA PEREMPAT ANAK INDONESIA KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN MENDASAR DI BIDANG MATEMATIKA DAN SAINS. Hasil tes kependidikan internasional OECD (Program Penilaian Siswa Internasional atau PISA), anak usia 15 tahun harus memperoleh nilai 420 atau lebih untuk dianggap memiliki kemampuan dasar di bidang matematika dan sains. Dengan 74 persen anak usia 15 tahun memperoleh nilai di bawah 420, Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai kelima terburuk dari 83 negara yang termasuk dalam data (Bagan 2.39, OECD 2015).

[34] Modul pendidikan Susenas, 2012.

Anak yang mengaku membaca buku teks dalam seminggu terakhir (persen) (bag. 2.37)

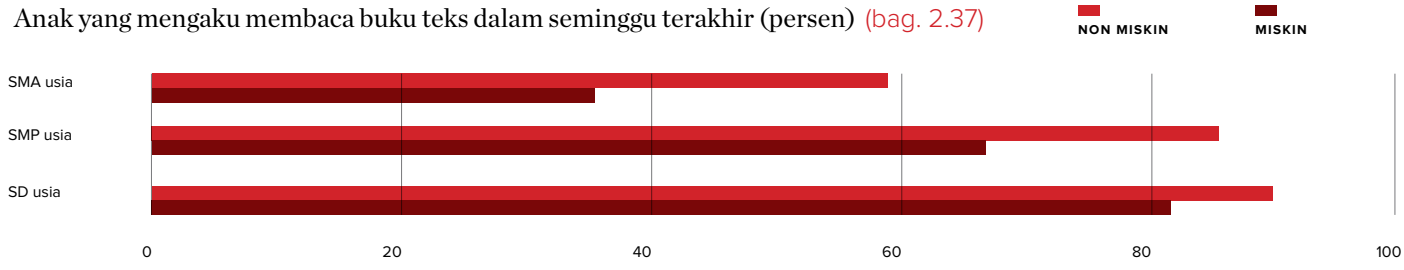

Anak yang mengaku membaca buku sains dalam seminggu terakhir (persen) (bag. 2.38)

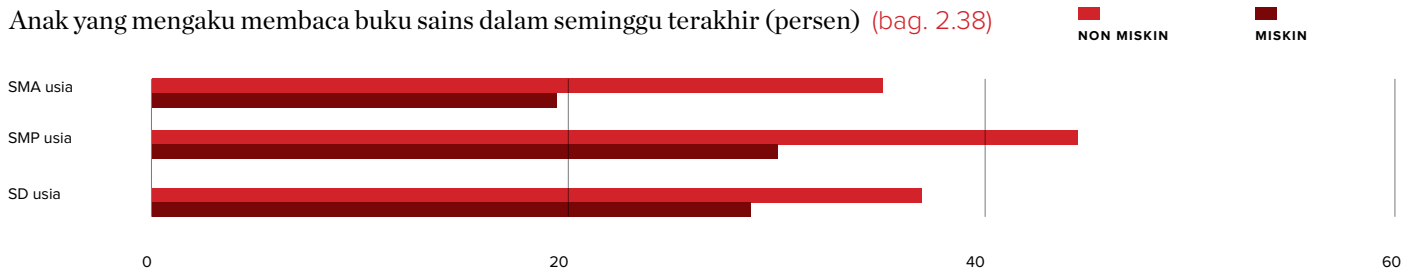

SUMBER Susenas modul pendidikan 2012.

Proporsi anak umur 15 tahun dengan nilai PISA matematika dan sains di bawah Level 2 (kemampuan dasar, 420 poin) (bag. 2.39)

SUMBER OECD 2015

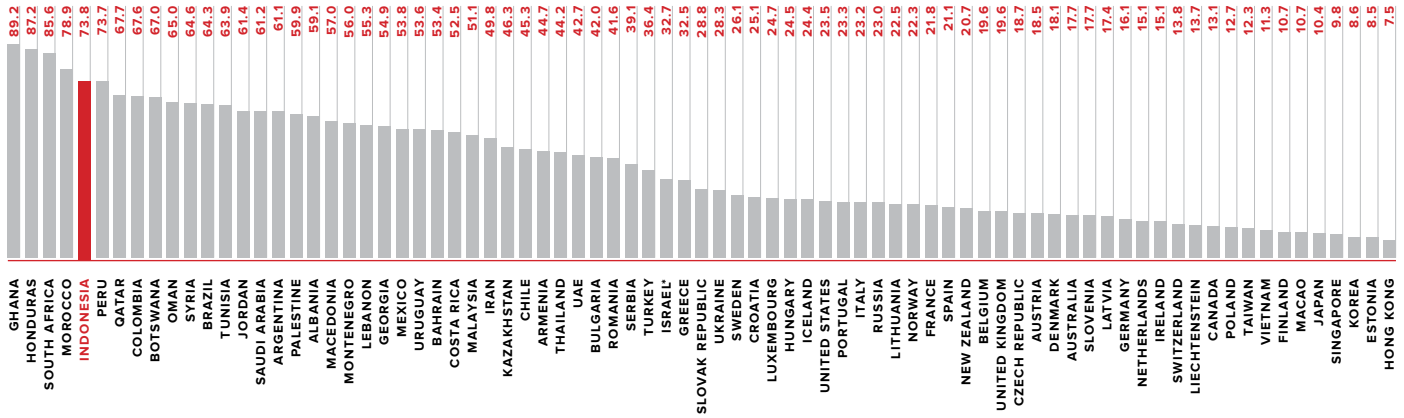

2.3 MENGAPA PENINGKATAN KESENJANGAN ANTARA TENAGA KERJA TERAMPIL DAN TENAGA KERJA TIDAK TERAMPIL MENINGKATKAN KETIMPANGAN

2.3.1

Peningkatan permintaan dan kekurangan tenaga kerja terampil akan meningkatkan upah mereka lebih tinggi, ini akan menguntungkan anak-anak yang mendapatkan permulaan yang tepat dalam hidup

KETERAMPILAN MENJADI SANGAT PENTING DI ERA EKONOMI MODERN, DINAMIS, GLOBAL SERTA MUKTAHIR KHUSUSNYA DI SEKTOR INFORMASI DAN TEKNOLOGI. Kemajuan teknologi telah membawa keuntungan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yaitu dengan tersedianya transportasi, harga barang-barang yang murah, akses lebih besar ke pasar bagi mereka di area terpencil, peningkatan komunikasi dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Teknologi baru yang membawa berbagai kemajuan, membutuhkan keterampilan lebih tinggi untuk digunakan dan ditingkatkan Konsekuensinya, permintaan terhadap tenaga kerja terampil di berbagai sektor telah meningkat di di seluruh dunia. Profil para pekerja terampil ini kebanyakan berasal dari mereka yang menyelesaikan pendidikan dan memperoleh keuntungan dari pendidikan berkualitas tinggi. Ini menjelaskan konsekuensi dari ketimpangan kesempatan yang diawali dari kelahiran.

DI INDONESIA, PEMBERI KERJA MENUNTUT LEBIH BANYAK TENAGA KERJA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN, TETAPI MEREKA SANGAT SULIT DIDAPAT. Para pemilik lapangan pekerjaaan di Indonesia mencari pekerja terampil yang lebih baik. Perbandingan kebutuhan tenaga kerja yang berpendidikan SMA dan di atasnya telah meningkat di dekade terakhir dari 22 persen di tahun 2002 menjadi 35 persen di tahun 2013 (Bagan 2.40). Walau demikian, terlepas dari peningkatan keberhasilan pendidikan, setengah dari seluruh pekerja tidak memiliki tingkat pendidikan lebih dari pendidikan primer. Hanya 6,3 persen yang memiliki tingkat pendidikan universitas atau diploma (Bagan 2.41). Bagaimanapun, tingkat pendidikan tidaklah sama dengan terampil. Survei di tahun 2011 menunjukkan pemilik pekerjaan menempatkan kemampuan dasar sebagai hal yang paling penting, selanjutnya diikuti terampil berpikir dan kemampuan tingkah laku (Bank Dunia 2011). Namun, 35 sampai 40 persen pemilik pekerjaan

yang disurvei mengindentifikasikan "kesenjangan kemampuan pekerjaan" sebagai kemampuan berpikir dan tingkah laku, dan sekitar 13 persen menyatakan kemampuan dasar sebagai hal yang kurang dimiliki pekerja (bagan 2.42).

PEKERJA DENGAN LATAR BELAKANG MISKIN MEMILIKI KEMAMPUAN TERBATAS UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN LEBIH BAIK, YANG UMUMNYA MENGANDALKAN KONEKSI SOSIAL. Terdapat banyak cara bagi tenaga kerja muda dan pemilik pekerjaan untuk bertemu, bisa melalui iklan, pameran pekerjaan, layanan karir di universitas, dan strategi perekrutan tertentu oleh perusahaan perekrut tenaga kerja. Kebanyakan orang Indonesia, khususnya anak muda, sangat tergantung pada koneksi keluarga dan teman untuk memperoleh pekerjaan (Bagan 2.43 dan Bagan 2.44). Hal ini berarti para pekerja muda dari rumah tangga kaya dengan koneksi sosial lebih bagus cenderung mendapatkan pekerjaan lebih baik. Artinya, meninggalkan para pekerja muda dari rumah tangga miskin di posisi kurang beruntung karena sedikitnya koneksi sosial yang dimiliki.

SEMENTARA, HANYA ADA ADA SEDIKIT PELUANG PELATIHAN BAGI PEKERJA DENGAN TINGKAT KETERAMPILAN TERBATAS SEHINGGA MEREKA AKAN MENGALAMI KESULITAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN LEBIH BAIK. Kebanyakan dari tenaga kerja Indonesia meninggalkan pendidikan tidak terampil dasar yang disebabkan oleh buruknya kualitas pendidikan. Hanya terdapat kesempatan terbatas bagi pekerja ini untuk mengembangkan kemampuannya. Hanya ada kurang dari satu persen anak-anak muda usia 19 sampai 24 tahun yang telah mendapatkan pelatihan di bidang teknik, teknologi dan informasi, atau bahasa karena terbatasnya ketersediaan pelatihan (Bagan 2.45). Sebagai tambahan, perusahaan perekrutan tenaga kerja di Indonesia hanya sedikit yang menawarkan kesempatan pelatihan dibandingkan negara lain di Asia Timur ataupun seluruh dunia (Bagan 2.46). Biasanya perusahaan lebih besar yang melakukan hal ini dibandingkan perusahaan kecil, tetapi perbandingannya pun masih kurang dari setengah. Perusahaan ekspor dan asing juga cenderung menyediakan pelatihan dibanding perusahaan non-ekspor dan domestik, tetapi jumlahnya masih rendah. Dengan jumlah pekerja yang semakin banyak, perusahaan ekspor maupun asing yang sudah memiliki tenaga kerja terampil, melakukan pelatihan hanya untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dan upah.

Tingkat pendidikan Pekerja, 2002-13 (persen) (bag. 2.40)

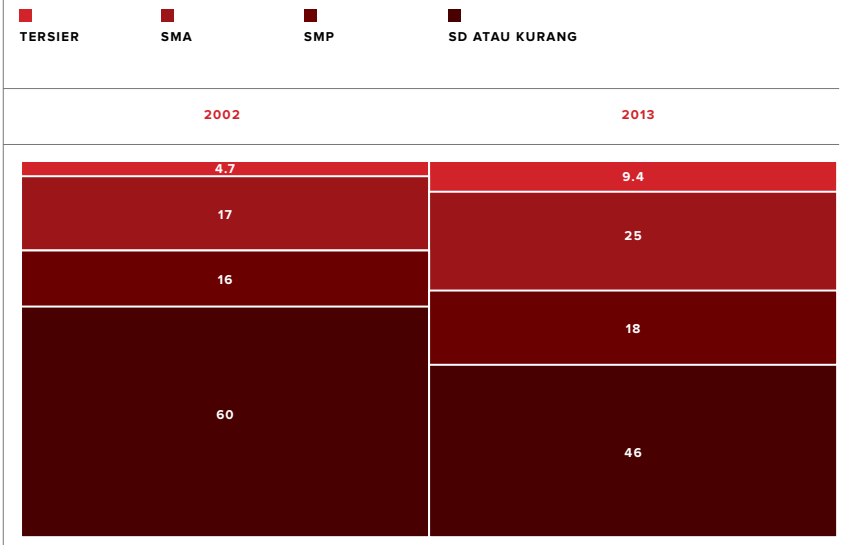

Dekomposisi pendidikan angkatan kerja (persen) (bag. 2.41)

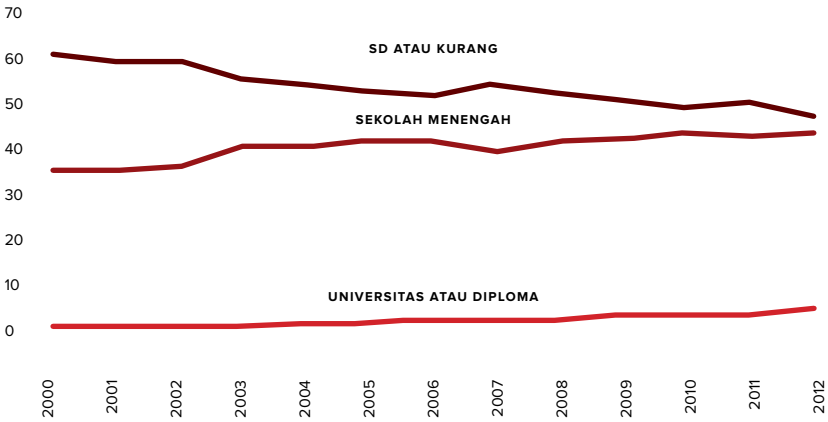

Kemampuan-kemampuan penting yang diidentifikasi oleh pemilik pekerjaan dan kesenjangan keterampilan (bag. 2.42)

SUMBER World Bank (2011)

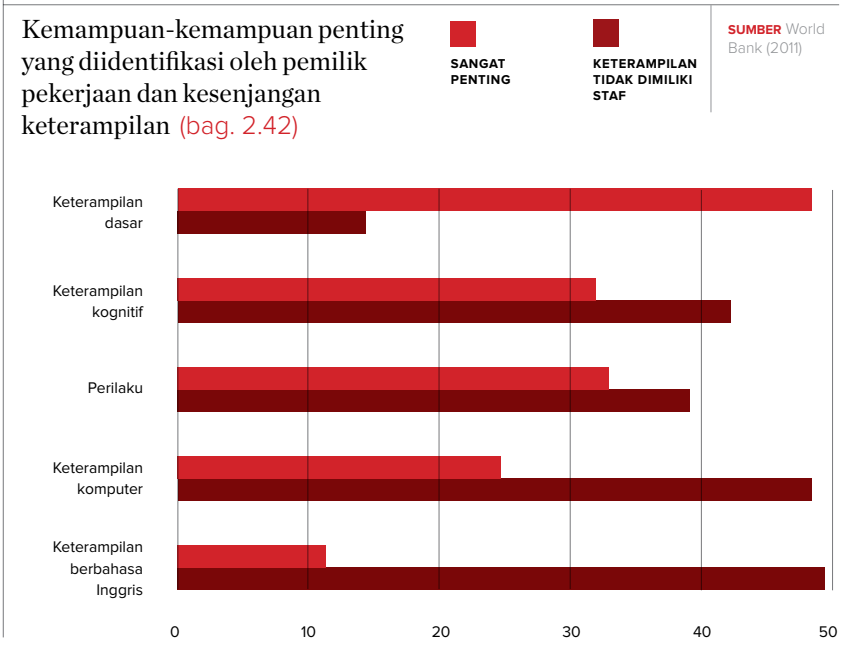

Metode untuk mendapatkan pekerjaan, usia anak muda 15-24 tahun (persen) (bag. 2.43)

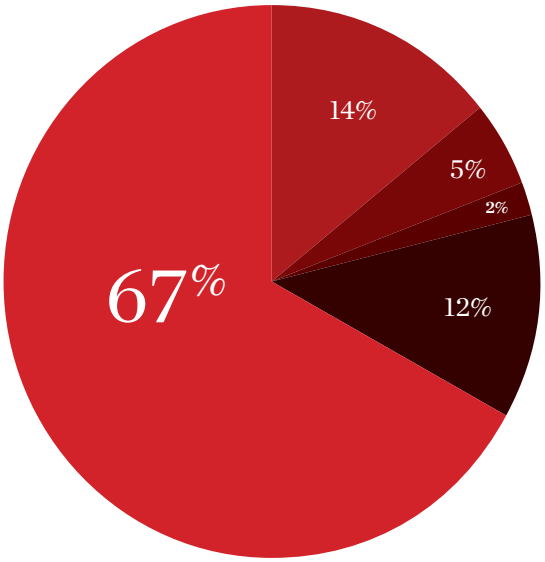

Metode untuk mendapatkan pekerjaan, seluruh pekerja berusia 25 tahun keatas (persen) (bag. 2.44)

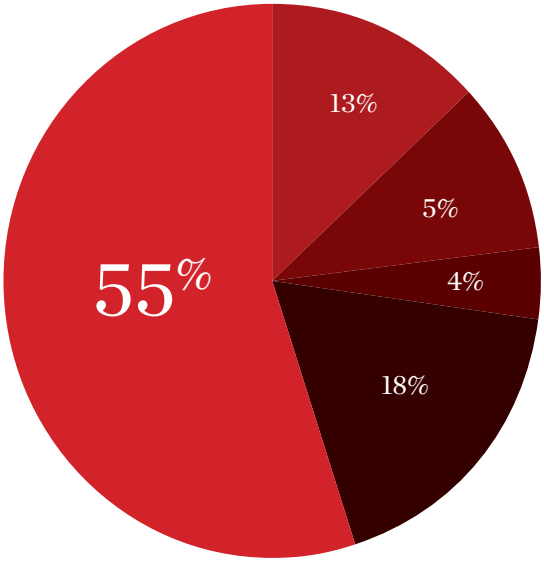

TEMAN DAN SAUDARA | DIKONTAK PERUSAHAAN | BURSA KERJA | MENGONTAK PERUSAHAAN | IKLAN LOWONGAN

SUMBER IFLS and World Bank calculations.

Anak-anak Muda berusia 19-24 tahun yang mendatangi atau menyelesaikan pelatihan (persen) (bag. 2.45)

RURAL | URBAN | NASIONAL

SUMBER Modul Pendidikan Susenas 2012.

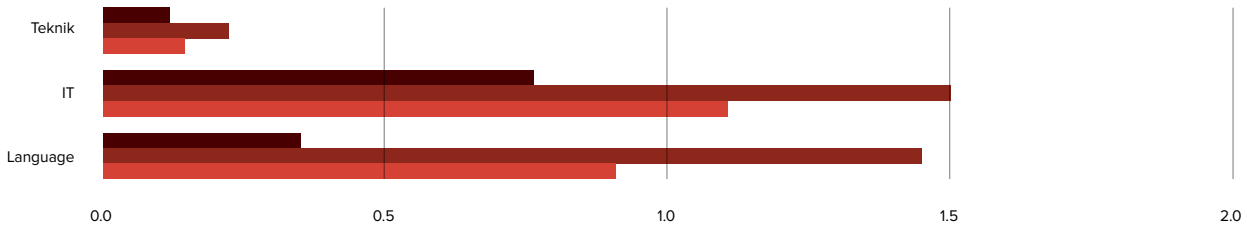

Pembaguan Perusahaan yang menyediakan pelatihan formal (persen) (bag. 2.46)

SUMBER Bank Dunia 2011.

INDONESIA | ASIA PASIFIK | WORLD

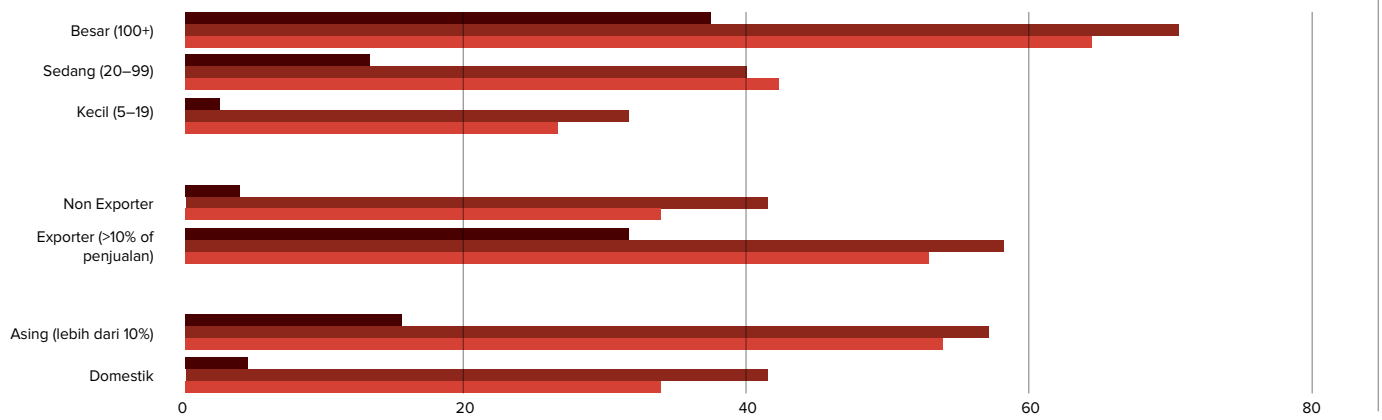

Pertumbuhan upah tahunan 2001-2014 terhadap produktivitas sektoral (nilai tahunan 2012 yang ditambahkan kepada setiap pekerja, Juta Rupiah). (bag. 2.47)

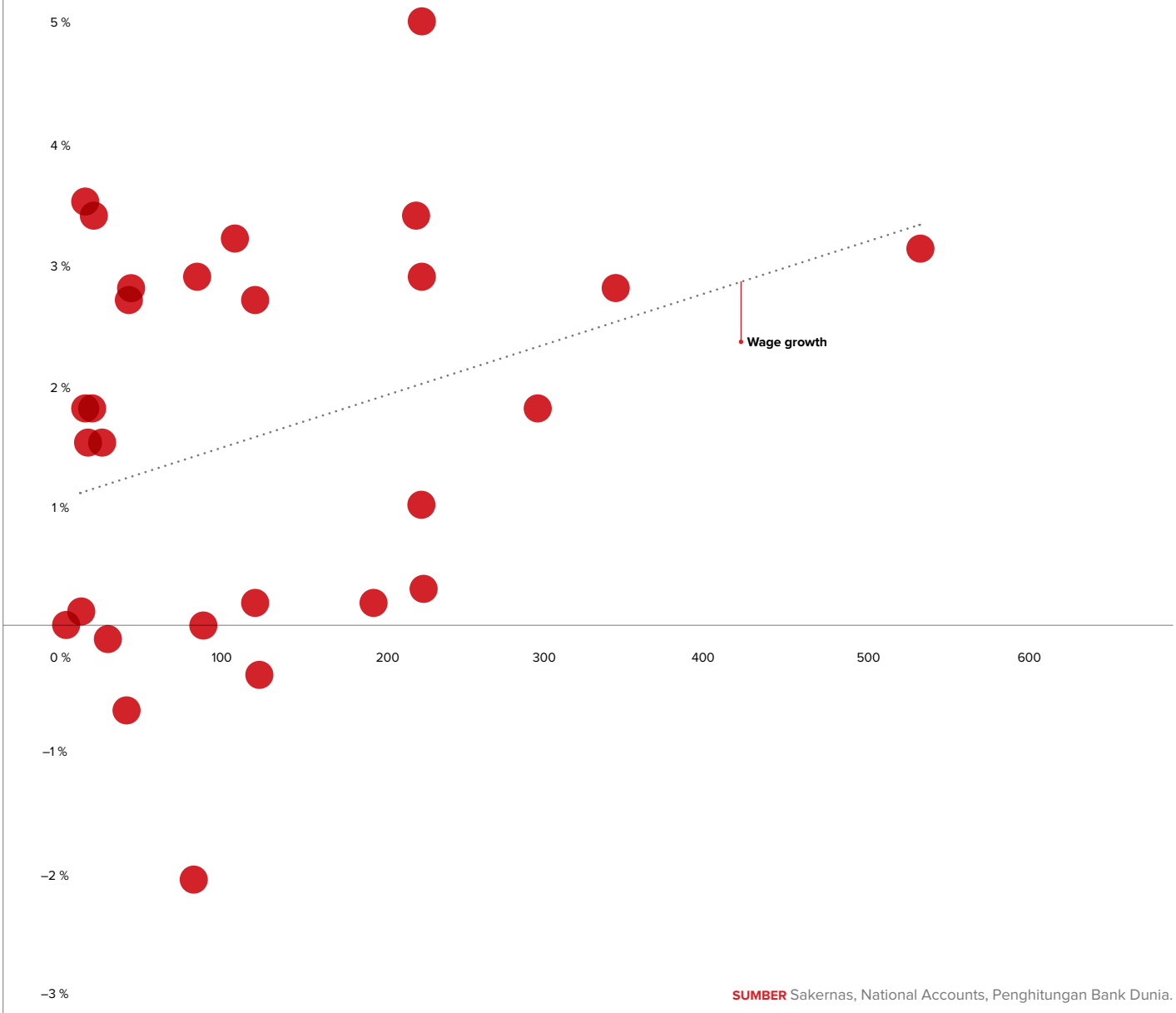

SUMBER Sakernas, National Accounts, Penghitungan Bank Dunia.

SEBAGAI KONSEKUENSI, UPAH BAGI PEKERJA TERAMPIL – MEREKA YANG MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI AWAL PENDIDIKAN YANG BAIK – TELAH MENINGKAT SECARA LEBIH CEPAT DIBANDING DENGAN PEKERJA TIDAK TERAMPIL. Terdapat peningkatan kesenjangan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil. Keterampilan, dibandingkan dengan pendidikan, sangat sulit untuk diidentifikasi dalam survei tenaga kerja. Bagaimanapun, secara keseluruhan, upah di sektor pekerjaan yang lebih produktif, dan juga menuntut keterampilan lebih seperti layanan keuangan, telekomunikasi, dan beberapa sektor manufaktur, telah meningkat lebih cepat dibanding sektor yang memiliki produktivitas lebih rendah. Secara rata-rata, setiap tambahan sekitar Rp. 200 juta dari produktivitas buruh tahunan dinikmati oleh sektor terkait sebanyak 1 persen peningkatan upah lebih tinggi setiap tahun antara tahun 2001 dan 2014 (Bagan 2.71)[35] Di sektor pasar buruh, pekerja dari rumah tangga kaya yang memiliki pendidikan lebih baik dan keterampilan lebih tinggi akan mendapatkan upah yang tinggi.

[35] Produktivitas tenaga kerja yang diukur di dalam laporan ini sebagai nilai dari output GDP dibagi dengan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja memiliki cakupan sekitar Rp. 20 juta Rupiah dari GDP yang merupakan sektor dengan produktivitas rendah seperti pertanian, hingga Rp 100-200 juta di sektor dengan produktivitas lebih tinggi seperti manufaktur dan layanan keuangan, hingga di atas 500 juta di sektor non-minyak dan pertambangan gas.

2.3.2

Pada saat yang bersamaan, kebanyakan pekerja terjebak di dalam pekerjaan dengan penghasilan rendah

KEBANYAKAN PEKERJAAN BARU MAUPUN YANG SUDAH ADA BERADA DI SEKTOR DENGAN PRODUKTIVITAS RENDAH. Kebanyakan lapangan pekerjaan yang sudah tersedia berada di sektor berproduktivitas rendah. Faktanya, di tahun 2014, 60 persen dari jumlah pekerjaan keseluruhan berasal dari tiga sektor yang memiliki produktivitas sangat rendah (Bagan 2.48). Pertanian dan perburuan (32 persen dari pekerjaan, rata-rata nilai tambah untuk pekerja adalah Rp 21 juta per tahun), perdagangan grosir dan retail (18 persen dari pekerjaan, dengan nilai tambah rata-rata Rp 19 juta per tahun), layanan masayarakat, sosial, dan personal (10 persen dari pekerjaan, rata-rata nilai tambah Rp 5 Juta per tahun). Selanjutnya, sekitar 20 juta pekerjaan baru yang dibentuk antara tahun 2001 dan 2012 terkonsentrasi di sektor dengan produktivitas rendah dan sektor yang tidak mengutamakan keterampilan (Bagan 2.49). Dari keseluruhan pertumbuhan pekerjaan, 30 persen terjadi di layanan masyarakat, sosial, dan personal, dan sekitar 28 persen berada di sektor perdagangan grosir dan retail, sedangkan manufaktur hanya berkontribusi sekitar 16 persen dari total pertumbuhan (3,3 Juta pekerjaan).

Pembagian dari jumlah total pekerjaan, 2014 (persen) (bag.2.48)

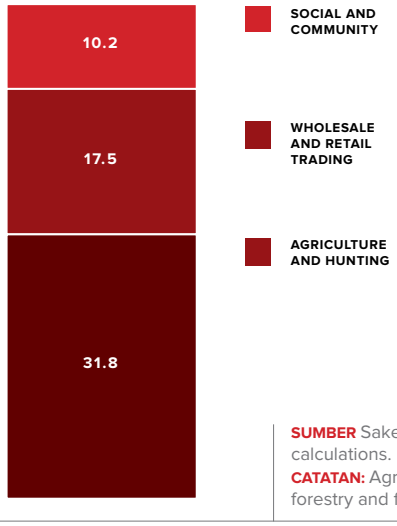

SUMBER Sakernas, World Bank calculations.
CATATAN: Agriculture excludes forestry and fisheries.

Pertumbuhan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja per sektor, 2001-2012 (persen) (bag.2.49)

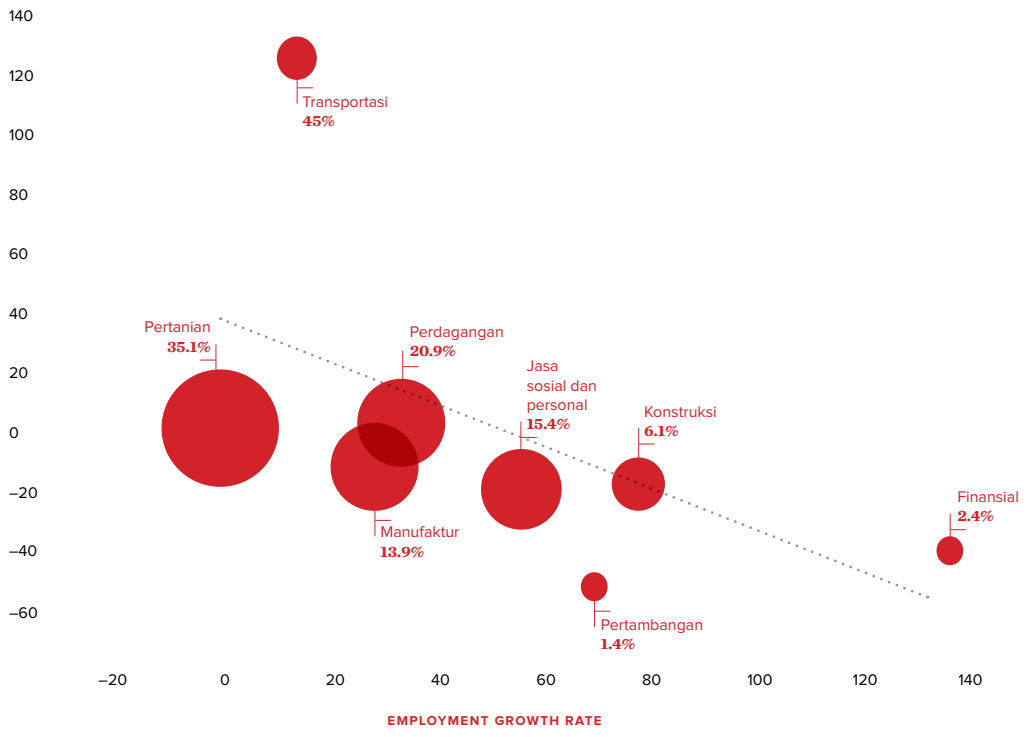

SEBAGAI KONSEKUENSI, BANYAK TENAGA KERJA KURANG TERAMPIL DAN BERASAL DARI RUMAH TANGGA MISKIN TERJEBAK DI SEKTOR PEKERJAAN INFORMAL DENGAN PRODUKTIVITAS RENDAH. Sektor informal yang besar masih mempekerjakan lebih 50 persen dari total pekerja (70 persen di area pedesaan), dan tetap menjadi tantangan serius bagi pasar tenaga kerja di Indonesia. Walaupun pembagian "pekerjaan baik" (pekerjaan dependen formal) secara total meningkat dari 27,7 persen menjadi 36,4 persen

ANTARA AGUSTUS 2001 DAN AGUSTUS 2012 (BAGAN 2.50), NAMUN PORSI PEMBAGIAN PEKERJA MASIH BERSIFAT SANGAT RENTAN, DENGAN HAMPIR 18 JUTA PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR DAN SEKITAR 11,5 JUTA PEKERJA LEPAS (16 PERSEN DAN 10 PERSEN DARI TOTAL). Kebanyakan pekerja ini terkonsentrasi di area berketerampilan rendah, sektor yang kurang produktif dan informal, serta berupah rendah seperti pertanian, konstruksi, transportasi, perdagangan grosir, dan layanan (bagan 2.51). Sebagai tambahan, pengurangan jumlah pekerja lepas di sektor pertanian telah menjadi awal dari peningkatan pekerja lepas di sektor non-pertanian dan walaupun jumlah lapangan pekerjaan dengan pekerja permanen meningkat, lapangan pekerjaan dengan pekerja paruh waktu masih merepresentasikan 8 persen dari total pekerja. Sementara pekerja mandiri (self employed) yang cenderung lebih rentan dan kurang produktif, walaupun jumlahnya berkurang, masih meningkat sekitar 18,5 juta (16,6 persen dari total pekerjaan).

BEBERAPA FAKTOR MEMBATASI PEMBENTUKAN PEKERJAAN YANG LEBIH PRODUKTIF DENGAN UPAH YANG LEBIH BAIK. Berkenaan dengan kurangnya produktivitas dari ketersediaan pekerja, seperti yang telah dibahas, terdapat dua hambatan utama terkait dengan generasi yang lebih baik dan pekerjaan lebih produktif di Indonesia. Hal pertama adalah cakupan hambatan terhadap tingkat kompetisi dan produktivitas, termasuk kurangnya investasi di sektor infrastruktur; rumit dan panjangnya proses untuk mendirikan bisnis baru; kurangnya akses finansial bagi perusahaan yang lebih produktif dan peningkatan produktivitas sektor pertanian; serta revitalisasi sektor manufaktur (lihat World Bank 2014c untuk pembahasan lebih rinci). Hal kedua adalah berbagai peraturan pasar tenaga kerja yang kaku menghambat pembentukan pekerjaan yang lebih baik dan mencegah pekerja berpindah dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas lebih tinggi.

Komposisi pekerjaan berdasarkan status (persen) (bag.2.50)

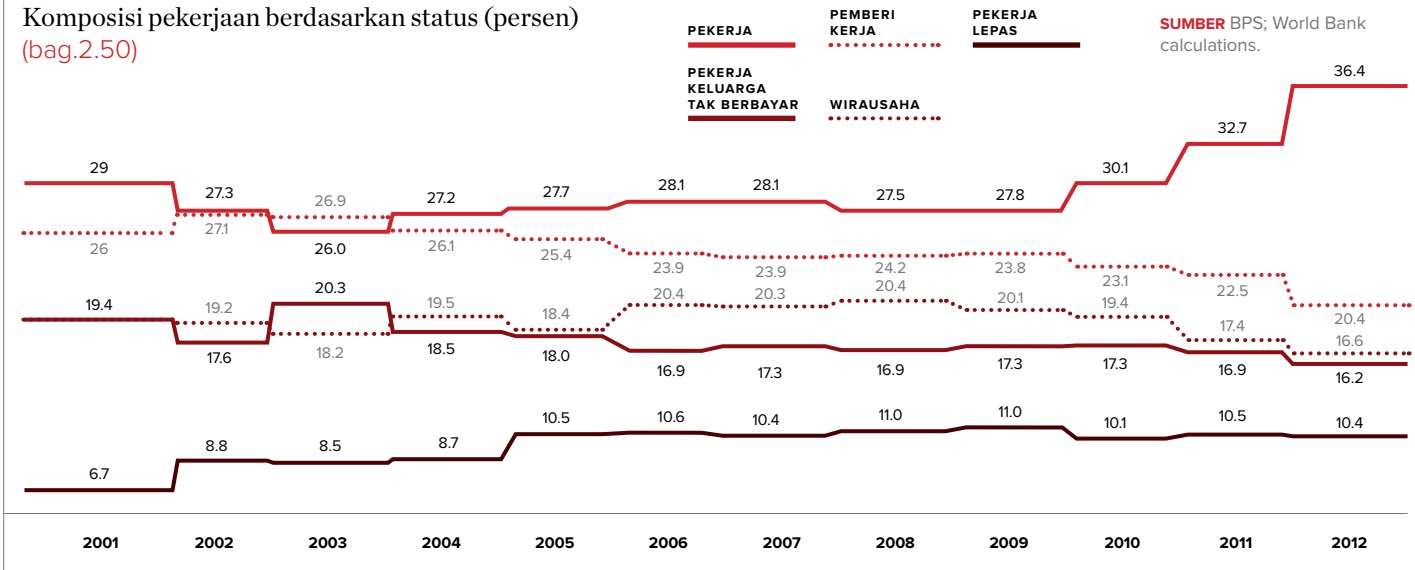

SUMBER BPS; World Bank calculations.

Pekerja informal per sektor, 2012 (persen) (bag.2.51)

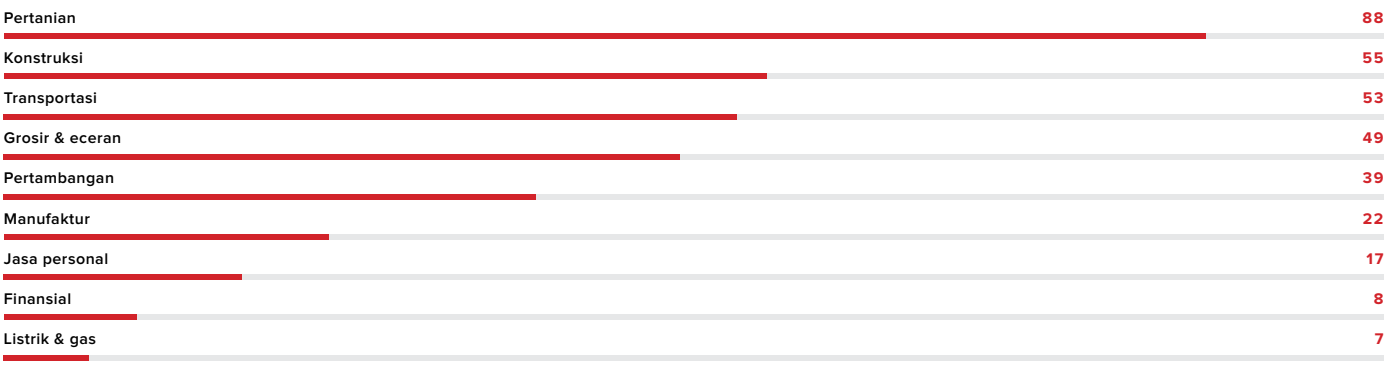

SUMBER BPS

KURANGNYA INVESTASI DI SEKTOR INFRASTRUKTUR MERUPAKAN PERMASALAHAN KHUSUS BAGI PERUSAHAAN DAN PRODUKTIVITAS PEKERJA SERTA TINGKAT KOMPETISI SECARA UMUM DI INDONESIA. Investasi di sektor infrastruktur di Indonesia jatuh ketika dihantam Krisi Keuangan Asia, dan tidak seperti sektor lainnya, sektor infrastruktur belum pulih hingga kini. Investasi tahunan di sektor infrastruktur menurun dari rata-rata 7 persen pada tahun 1995-1997 menjadi sekitar 3-4 persen dari GDP di beberapa tahun terakhir, bila dibandingkan lebih dari 7 persen di Thailand dan Vietnam, dan 10 persen di Cina dalam satu dekade terakhir. Terlepas dari peningkatan pembelanjaan pemerintah di beberapa tahun terakhir, khusunya pembelanjaan inti untuk ketersediaan infrastruktur di Indonesia seperti jaringan jalan, pelabuhan, listrik, fasilitas telekomunikasi, namun upaya tersebut telah gagal menjaga pertumbuhan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari 1 poin persentase pertumbuhan tambahan GDP karena kurangnya investasi di sektor infrastruktur, secara khusus transportasi (World Bank 2014c). Masalah trasnportasi merupakan salah satu hambatan buruk bagi bisnis manufaktur karena meningkatkan biaya dan menghambat tingkat kompetisi. Penghasil barang mentah tidak mampu mencapai kesempatan tumbuh lebih baik dan memenuhi permintaan konsumennya. Lebih murah mengimpor jeruk dari Tiongkok dbanding mengirimnya dari Kalimantan.[36]

PERMASALAHAN BESAR LAINNYA YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP BURUKNYA IKLIM INVESTASI ADALAH (KURANGNYA) KEMUDAHAN BERBISNIS DI INDONESIA. Mendapatkan izin berbisnis merupakan hal yang sangat rumit, tambahan beban, dan menghabiskan waktu. Indonesia berada di ranking 114 dari 189 negara dalam indeks kemudahan melakukan bisnis (Tabel 2.4; World Bank 2014e), lebih buruk ketimbang Malaysia (peringkat 18), Thailand (peringkat 26), Vietnam (peringkat 78), Cina (peringkat 90), dan Filipina (peringkat 95). Sebagai contoh, untuk mendapatkan izin membuka bisnis di sektor manufaktur membutuhkan waktu resmi 794 hari, namun implementasi riilnya dapat lebih lambat. Di sektor energi, pertumbuhan yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah sebagai kebijakan prioritas, investor melaporkan bahwa untuk mendapatkan berbagai izin mendirikan pembangkit energi dapat menghabiskan lebih dari 4 tahun dan 101 hari untuk mendapatkan jaringan listrik, dibanding hanya 35 hari di Thailand.

PERATURAN PASAR TENAGA KERJA DI INDONESIA MERUPAKAN YANG PALING KAKU DI SKALA REGIONAL. (UU No. 13/2003) secara signifikan memperluas hak-hak tenaga kerja, tetapi sekaligus menjadi masalah apabila dilanggar, dengan biaya denda minimum 100 minggu upah kerja. Konsekuensinya, perusahaan cenderung tidak merekrut pekerja formal, khususnya anak-anak muda yang berpendidikan. Hal ini menjadikan peraturan pasar tenaga kerja di Indonesia sebagai yang paling kaku di regional (Bagan 2.52). Kebanyakan perusahaan menanggapi dengan tidak menggunakan kontrak formal atau menggunakan kontrak jangka pendek. Perusahaan yang menggunakan kontrak formal akan menghadapi risiko biaya pekerja yang lebih tinggi, karena mereka butuh menyimpan jaminan untuk pembayaran denda di rekening yang terjamin.

[36] Bab IV dari World Bank (2014c) didedikasikan untuk analisis mendalam dan pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi sektor infrastruktur di Indonesia.

Indeks peraturan pasar tenaga kerja di berbagai negara (bag.2.52)

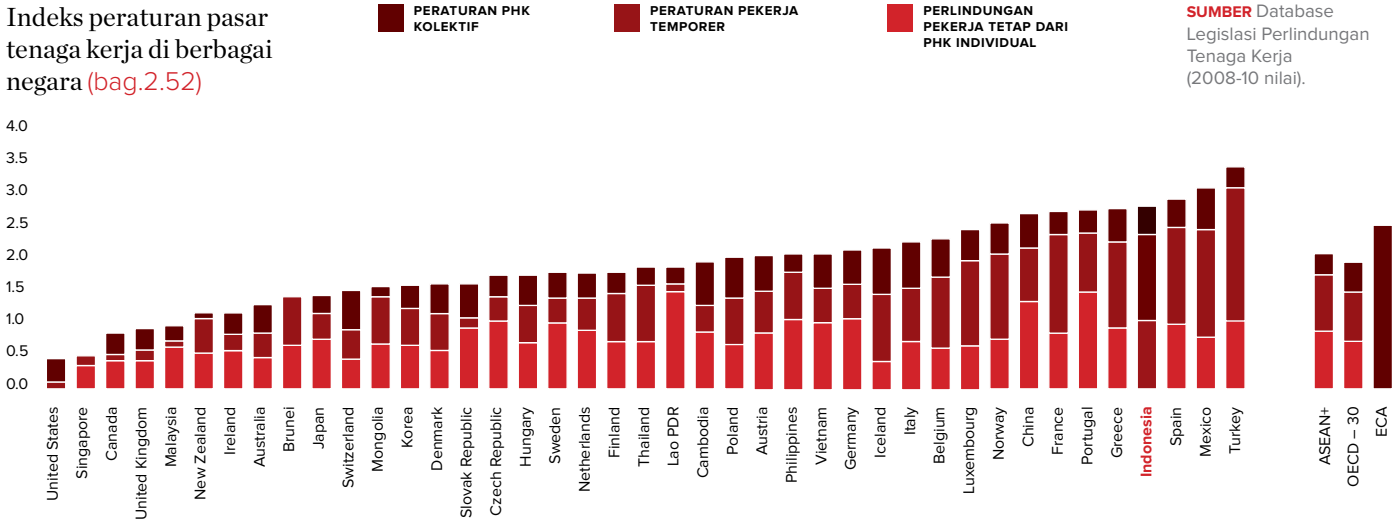

SUMBER Database Legislasi Perlindungan Tenaga Kerja (2008-10 nilai).

OLEH KARENANYA MEREKRUT TENAGA KERJA FORMAL TIDAK DISARANKAN KETIKA KEBANYAKAN PEKERJA MASIH TIDAK TERLINDUNGI. Peraturan ini hanya melindungi sejumlah kecil pekerja. Kebanyakan pekerja tidak menerima biaya kompensasi sama sekali (66 persen), dan lainnya menerima bayaran kurang dari yang diwajibkan (27 persen); hanya 7 persen pekerja yang dipecat menerima pembayaran penuh (World Bank 2010c).

Kemudahan berbisnis di Asia Timur (Tab. 2.4)

SUMBER World Bank (2014e)

			PERINGKAT REGIONAL								
Ekonomi	Peringkat Dunia	Memulai Bisnis	Izin Pembangunan	Koneksi Listrik	Registrasi Properti	Mendapat pinjaman	Melindungi Investor Minoritas	Membayar Pajak	Perdagangan Internasional	Penegakan Kontrak	Resolving Insolvency
Singapore	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2
Hong Kong SAR, China	3	2	1	4	14	3	1	1	2	2	3
Malaysia	18	3	8	9	10	3	3	5	3	5	4
Taiwan, China	19	4	5	1	7	8	6	6	4	14	1
Thailand	26	9	3	3	3	17	5	10	5	4	5
Samoa	67	5	12	7	8	21	8	14	12	13	16
Tonga	69	7	6	11	22	5	20	11	11	8	17
Mongolia	72	6	16	24	4	9	4	12	25	3	11
Vanuatu	76	17	17	18	13	5	17	7	20	12	13
Vietnam	78	14	7	22	5	5	15	25	10	7	14
Fiji	81	21	15	15	9	11	13	15	21	10	12
Solomon Islands	87	10	9	13	20	11	9	9	14	19	18
China *	90	15	24	20	6	11	16	19	16	6	7
Philippines	95	22	20	6	16	19	18	20	8	16	6
Brunei Darussalam	101	23	11	12	21	17	13	4	6	18	10
Palau	113	12	14	17	1	11	23	23	18	17	21
Indonesia *	114	20	23	16	17	11	7	24	7	21	8
Papua New Guinea	133	16	22	8	12	24	11	16	23	23	19
Kiribati	134	13	13	25	18	22	18	3	13	11	23
Cambodia	135	24	25	23	15	1	9	13	22	22	9
Marshall Islands	139	8	4	14	23	11	23	21	9	9	22
Micronesia, Fed. Sts.	145	18	10	10	23	9	25	17	19	20	15
Lao PDR	148	19	18	21	11	20	21	22	24	15	23
Timor-Leste	172	11	19	5	23	22	12	8	15	25	23
Myanmar	177	25	21	19	19	25	21	18	17	24	20

PROSES PENGATURAN UPAH MINIMUM JUGA MENJADI PERMASALAHAN YANG MENGHAMBAT PEMBENTUKAN PEKERJAAN FORMAL DAN GAGAL MENGUNTUNGKAN KEBANYAKAN PEKERJA. Setelah satu dekade terjadi peningkatan moderat terhadap upah minimum, peningkatan telah bertambah signikan sejak tahun 2010. Pada tahun 2013, 25 provinsi telah menaikkan upah minimumnya rata-rata 30 persen dan Jakarta meningkatkannya menjadi 44 persen[37], jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam, tetapi juga sedikit di atas Cina dan Filipina. Upah minimum Jakarta menjadi yang tertinggi kedua di tingkat regional setelah Malaysia. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat produktivitas pekerja yang rendah (Bagan 2.77 dan World Bank 2014c). Sebagai konsekuensi, muncul biaya ketidakpastian yang cukup besar dari waktu ke waktu untuk pekerja intensif di sektor manufaktur dan layanan. Sementara, peraturan hanya berlaku bagi sebagian kecil pekerja (Bank Dunia 2014c) karena kebanyakan pekerja merupakan pekerja mandiri (self employed) (61 persen di tahun 2011), informal (54 persen), atau yang tidak memiliki kontrak (lebih dari 80 persen), bahkan jika pekerja tersebut formal, kapasitas pemerintah untuk menegakkan peraturan masih terbatas[38]. Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78/2015, yang memperkenalkan formula baru untuk penyesuaian upah minimum per tahun yang dikaitkan dengan inflasi dan pertumbuhan GDP. Selagi ini berjalan, masih terdapat beberapa ketidakpastian yang membutuhkan penyesuaian kebijakan oleh gubernur dan uji coba efektivitas dari implmentasinya.

[37] Lihat catatan kaki World Bank (2014c) untuk kesimpulan proses penentapan upah minimum.
[38] Tingkat ketidakpatuhan berfluktuasi antara 30-40 persen (World Bank 2014c).

Upah minimum di beberapa negara Asia Timur (US$ per bulan) (bag.2.53)

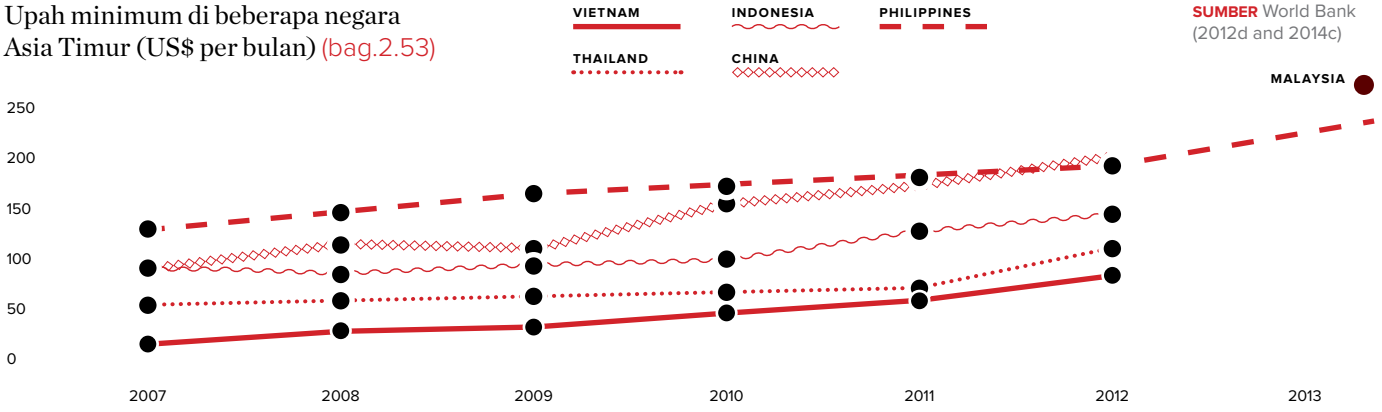

SUMBER World Bank (2012d and 2014c)

2.3.3

Kesenjangan yang melebar antara sedikit pekerja terampil dan mayoritas pekerja tidak terampil merupakan faktor pemicu peningkatan ketimpangan pada dekade lalu.

PEKERJA DARI RUMAH TANGGA KAYA YANG CENDERUNG MEMILIKI KETERAMPILAN LEBIH BAIK DAN LEBIH BERPENDIDIKAN, DIUNTUNGKAN DARI PENINGKATAN UPAH MINIMUM. Pekerja dengan pendidikan yang lebih baik selalu menerima upah lebih baik dibandingkan mereka yang pendidikannya kurang (pendidikan digunakan sebagai kemampuan perantara; kembali ke premis bahwa keterampilan cenderung menjadi lebih tinggi karena adanya variasi keterampilan yang lebih luas di setiap level pendidikan). Bagaimanapun, upah dan konsumsi premium bagi mereka yang berpendidikan telah meningkat (Bagan 2.54 dan Bagan 2.55). Di sisi lain, masih banyak pekerja terjebak di pekerjaan dengan produkitivitas rendah, informal, tidak memiliki perlindungan terhadap risiko dan guncangan, serta pekerjaan dengan upah rendah. Pada bulan Agustus 2012, pekerja lepas dan pekerja mandiri memiliki jumlah rata-rata pendapatan 48 persen dan 65 persen dari upah rata-rata pekerja, dibanding dengan 45 persen dan 75 persen di tahun 2001. Hal ini dapat menjelaskan sebagian dari peningkatan ketimpangan.

Upah pekerja premium yang berpendidikan primer atau dibawahnya, 2003-10 (persen) (bag.2.54)

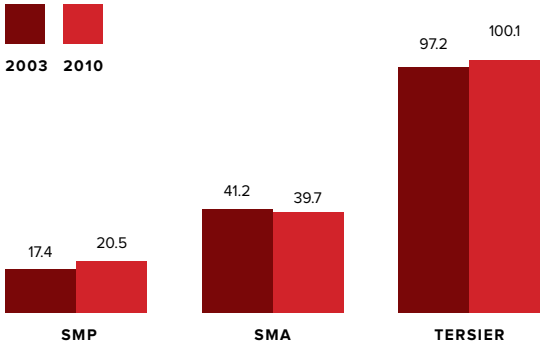

Premi konsumsi RT per kapita terhadap RT dengan KRT berpendidikan SD, 2003-2010 (persen) (bag.2.55)

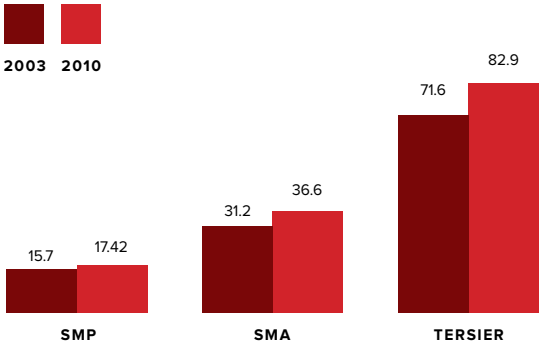

SUMBER Sakernas, Susenas and World Bank calculations.
Worker wage premium represents how much higher wages workers at each level of education receive compared with workers with primary or less education, controlling for experience, gender, work status, location and other factors. Household consumption premium represents the same thing for per capita consumption and head of household's education.

PENINGKATAN KESENJANGAN UPAH KETERAMPILAN TERCERMIN PADA KETIDAKSETARAAN UPAH YANG LEBIH TINGGI DAN AKHIRNYA TERUS MENINGKATKAN KETIMPANGAN[39]. Koefisien Gini terkait upah primer meningkat sekitar 5 poin di tahun 2000-an, berkontribusi terhadap tingginya ketimpangan (bagan 2.56). Faktanya, sekitar 28 persen peningkatan konsumsi ketimpangan di tahun 2000-an dapat dijelaskan dengan peningkatan pendidikan sebagai satu indikator keterampilan pekerja (tabel 2.5). Bagaimanapun, menyamakan tren upah dan koefisien Gini di 5 tahun terakhir dibandingkan dengan peningkatan konsumsi Gini, menunjukkan adanya faktor eksternal yang berperan penting di luar faktor ketidaksetaraan upah, atau bisa juga data konsumsi terakhir telah dipengaruhi oleh perubahan metodologi, walaupun metodologi upah masih belum berubah (Boks 3.1).

[39] Kesenjangan upah gender juga memiliki peran, tetapi tidak terlalu besar

Koefisien Gini Upah Primer, 2000-13 (bag.2.56)

SUMBER Sakernas and World Bank calculations.

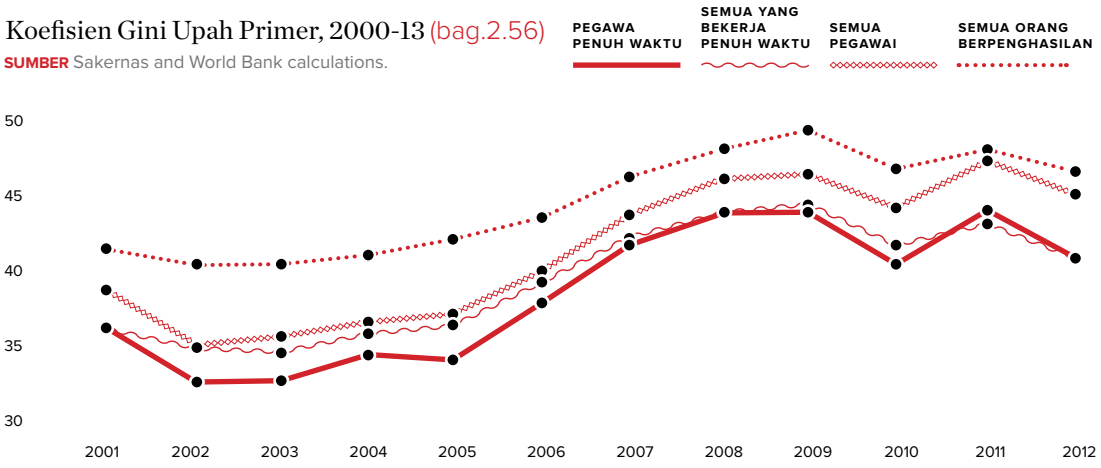

Perubahan Konsumsi Gini 2003-2010 dikurangi, jumlah persentase yang berubah dapat dijelaskan (Tab. 2.5)

PERUBAHAN KUNCI UNTUK PENDIDIKAN LEBIH TINGGI		PERUBAHAN KUNCI YANG MENGARAH KEPADA KETIMPANGAN YANG RENDAH	
Perubahan Konsumsi Gini 2003-2010	% dari Jumlah yang diungkap	Perubahan Konsumsi Gini 2003-2010	% dari Jumlah yang diungkap
Meningkatkan pengembalian dari pendidikan	**28**	**Peningkatan program dukungan (contoh, migrasi, pendidikan, pekerjaan formal)**	**-28**
Perubahan pengembalian ke sektor kerja	**12**	**Mengurangi kesenjangan kota-desa**	**-23**
		Mengurangi kesenjangan dalam satu provinsi	**-16**
		Mengurangi bentuk pekerjaan & kesenjangannya	**-8**

2.4 MENGAPA KEUANGAN & ASET FISIK MEMBANTU ORANG KAYA MENINGGALKAN KELOMPOK LAINNYA

Sebagai tambahan, sejumlah kecil masyarakat Indonesia mendapatkan keuntungan dari pengembalian keuangan dan aset fisik saat ini, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan di masa mendatang

SECARA GLOBAL, PENDAPATAN DARI MODAL MENJADI LEBIH PENTING KETIMBANG PENDAPATAN DARI PEKERJA DAN HAL INI JUGA MERUPAKAN KASUS YANG TERJADI DI INDONESIA. Pembagian pendapatan dari pekerja telah menurun di banyak negara, dan modal menjadi lebih penting (Bagan 2.57). Hal ini juga terjadi di sektor manufaktur di Indonesia (Bagan 2.58) dan dalam lingkup ekonomi yang lebih luas.

PENGEMBALIAN BEBERAPA BENTUK PENYIMPANAN DAN INVESTASI BERADA PADA TITIK YANG TINGGI. Sejak tahun 2003, pasar modal Indonesia telah meningkat hampir 900 persen (Bagan 2.59), dan kepemilikan apartemen mewah di Jakarta meningkat 2 kali lipat pada 6 tahun terakhir (Bagan 2.60). Terlepas dari fakta bahwa orang kaya merupakan segmen yang terkena dampak paling parah ketika Krisis Keuangan Asia dan proses pemulihannya sangat lambat.

Pembagian pendapatan buruhh, perubahan 10 tahun (poin persentase) (bag.2.57)

SUMBER Karabarbounis dan Neiman (2014).

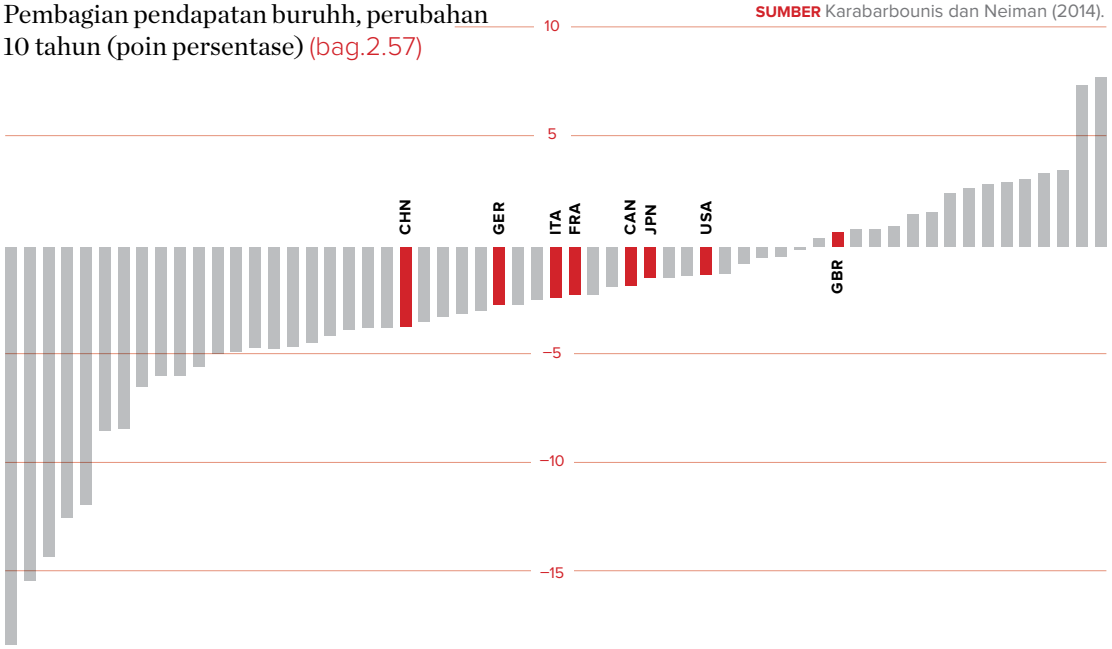

Pembaguan pendapatan pekerja di sektor manufaktur (persen) (bag.2.58)

SUMBER OECD 2012, dilaporkan di Zhuang, et al.Rhee (2014).

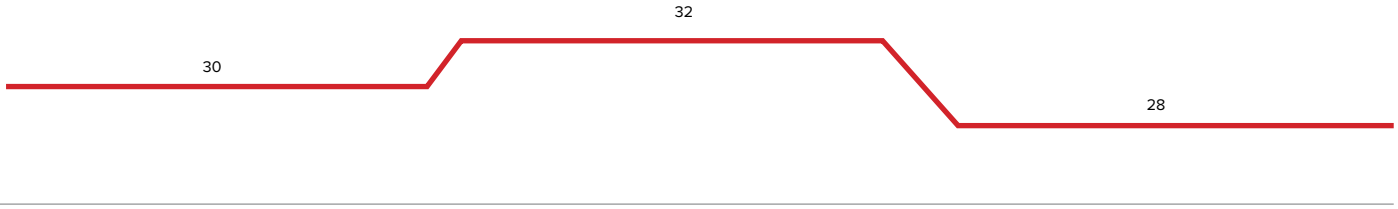

Jakarta Composite Index, 1997-2014 (bag.2.59)

SUMBER JCI.

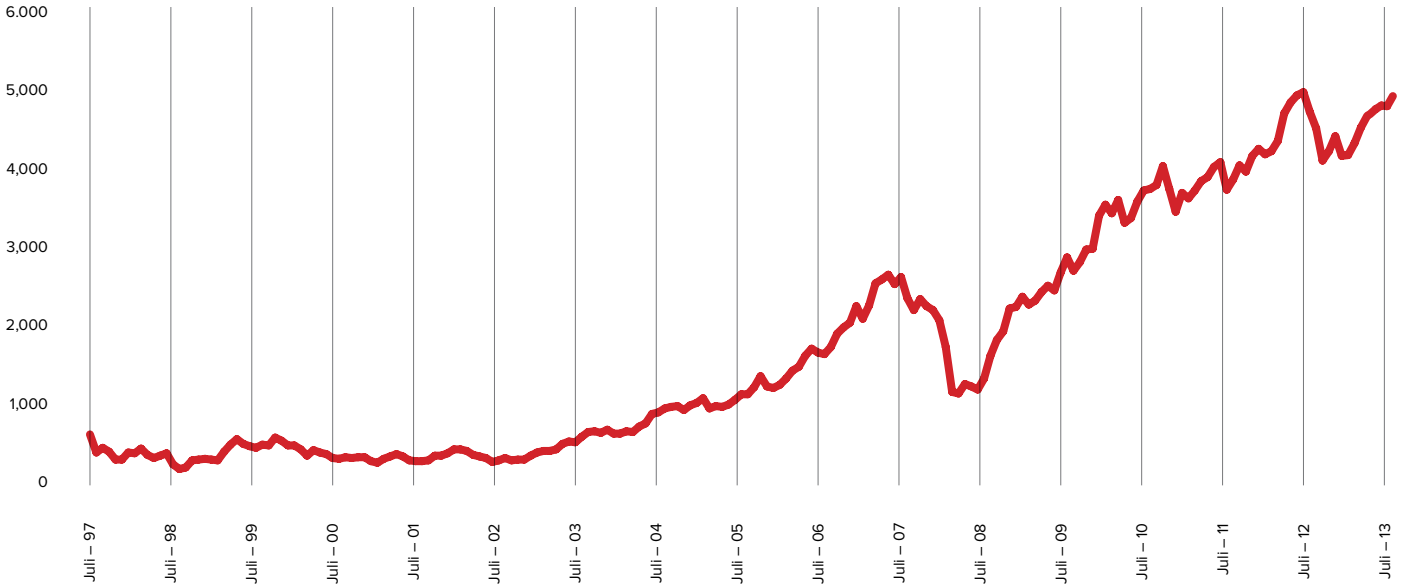

Pasar Perumahan dan Kondominium di Jakarta (bag.2.60)

SUMBER Jones Lang LaSalle.

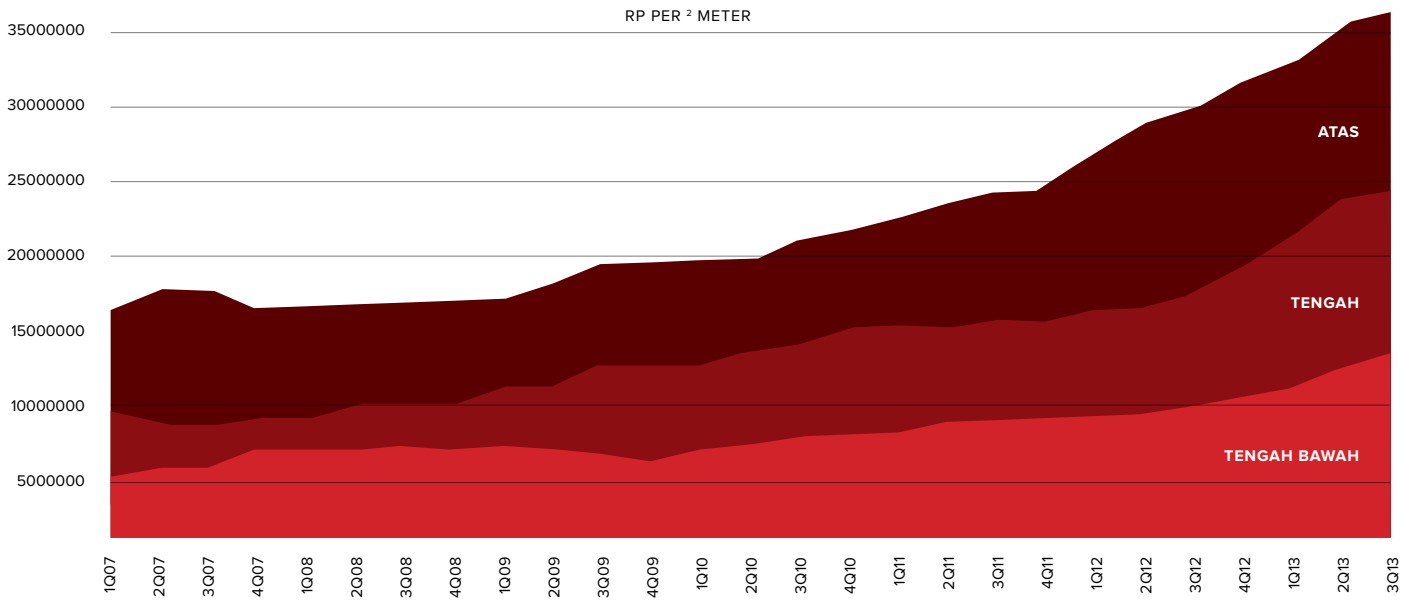

TETAPI, HANYA ORANG-ORANG PALING KAYA DI INDONESIA YANG MEMILIKI ASET-ASET TERSEBUT. Sekitar 4,5 juta orang Indonesia memiliki investasi langsung maupun tidak langsung pada saham dan surat-surat berharga. Sekitar 439.000 orang Indonesia memiliki rekening surat-surat berharga, 170.000 orang Indonesia berinvestasi di perusahaan investasi dan 3,6 juta orang Indonesia memiliki dana pensiun yang mungkin termasuk investasi surat-surat berharga.[40] Hanya 1 persen penduduk Indonesia memiliki hipotek, ini menunjukkan bahwa hanya sekelompok kecil yang mendapatkan manfaat dari ledakan sektor perumahan saat ini (Bank Dunia forthcoming (c)).

LEBIH LANJUT, PENINGKATAN PAJAK DARI PENDAPATAN MODAL LEBIH RENDAH DIBANDING PENDAPATAN PEKERJA, WALAUPUN KEDUANYA MEMILIKI MASALAH TERKAIT DENGAN KEPATUHAN. Beberapa pendapatan modal mendapatkan keuntungan dari pajak pendapatan yang rendah dibanding dengan pendapatan pekerja. Sebagai contoh pajak dividen hanya 10 persen (dan pajak bunganya hanya 20 persen), lebih rendah dibanding pendapatan pajak pekerja dan secara signifikan lebih rendah dari 30 persen margin pajak tertinggi yang dibayar oleh pemiliki deviden. Di sisi lain, pendapatan modal yang signifikan berasal dari properti dan pasar modal yang secara teori merupakan subjek dari pajak pendapatan personal, tetapi tidak masuk dalam pajak pendapatan. Dengan pengawasan dan kepatuhan yang rendah terhadap pajak pendapatan personal, tingkat pajak pendapatan yang rendah seringkali menghasilkan jumlah pendapatan pajak yang sedikit. Sementara, bagi banyak pekerja, pajak pendapatan yang dibebankan terhadap gaji dan upah seringkali ditahan oleh pemilik pekerjaan untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap pendapatan buruh. Akibatnya, sekitar 95 persen pajak pendapatan personal (sekitar 20 persen dari total pajak pendapatan) dikumpulkan melalui pajak pendapatan yang didominasi oleh gaji dan hanya sekitar 5 persen berasal dari pendapatan.[41]

PEMASUKAN RUMAH TANGGA TIDAK HANYA DARI PENDAPATAN MELALUI PEKERJAAN, TETAPI JUGA MELALUI ASET KEUANGAN DAN FISIK YANG TERKONSENTRASI PADA RUMAH TANGGA KAYA. Pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja telah menurun dan pembagian yang dihasilkan oleh modal seperti keuangan dan aset properti telah meningkat di Indonesia dan negara lainnya di dunia. Di Indonesia, hal ini mencerminkan kekuatan nilai pengembalian dari aset-aset ini dalam satu dekade terakhir dan didominasi oleh rumah tangga kaya yang memiliki akses terhadap sumber daya.

[40] Bagaimanapun, dana pensiun masyarakat tidak didasarkan pada akun investasi individu, tetapi lebih kepada 'bayar ketika menggunakan' yang berarti dana pensiun masyarakat tidak memiliki dampak dari pasar modal.
[41] Kementerian Keuangan, Realisasi APBN, Rincican Penerimaan Perpajakan, Walau bagaimanapun, porsi signifikan dari pajak pendapatan pekerja tidak menjadi subjek dari pajak pendapatan, sebagai contoh, pekerja mandiri seperti pengacara dokter, akuntan, dan lainnya yang secara signifikan mengurangi kepatuhan terhadap pajak pekerja.

Seperti yang telah dibahas di dalam executive summary, satu persen orang terkaya memiliki setengah dari seluruh kekayaan di Indonesia (Bagan xiii), yang merupakan tertinggi kedua (bersama Thailand) dan setelah Rusia dari total 38 negara. Adalah kenyataan, 10 orang paling kaya di Indonesia memiliki sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan dan menduduki urutan tertinggi kedua (bersama Turki dan Hong Kong) setelah Rusia dari total 46 negara (bagan 2.61). Artinya, pendapatan dari sektor keuangan dan aset fisik menguntungkan sebagian kecil rumah tangga di Indonesia dibandingkan negara lain di seluruh dunia.

LEBIH LANJUT, AKUMULASI KEKAYAAN MENGHASILKAN PENDAPATAN YANG LEBIH TINGGI DI MASA DEPAN DAN MEMICU TINGKAT KETIMPANGAN YANG SEMAKIN TINGGI. Aset keuangan dan finansial menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi sebagian kecil rumah tangga di Indonesia dan rumah tangga ini kemudian menyimpan pendapatannya sehingga mendorong peningkatan kekayaan lebih tinggi lagi. Pembagian kekayaan yang dimiliki 10 persen orang terkaya di Indonesia meningkat sebanyak 7 poin persentase antara tahun 2007 dan 2014, peringkat 10 teratas dari 46 negara di periode yang sama (Bagan 2.62). Peningkatan aset keuangan dan fisik hari ini menghasilkan pendapatan yang lebih banyak kelak.

Pembagian dari total kekayaan yang dimiliki oleh 10 rumah tangga terkaya (persen) (bag.2.61)

SUMBER Credit Suisse (2014)

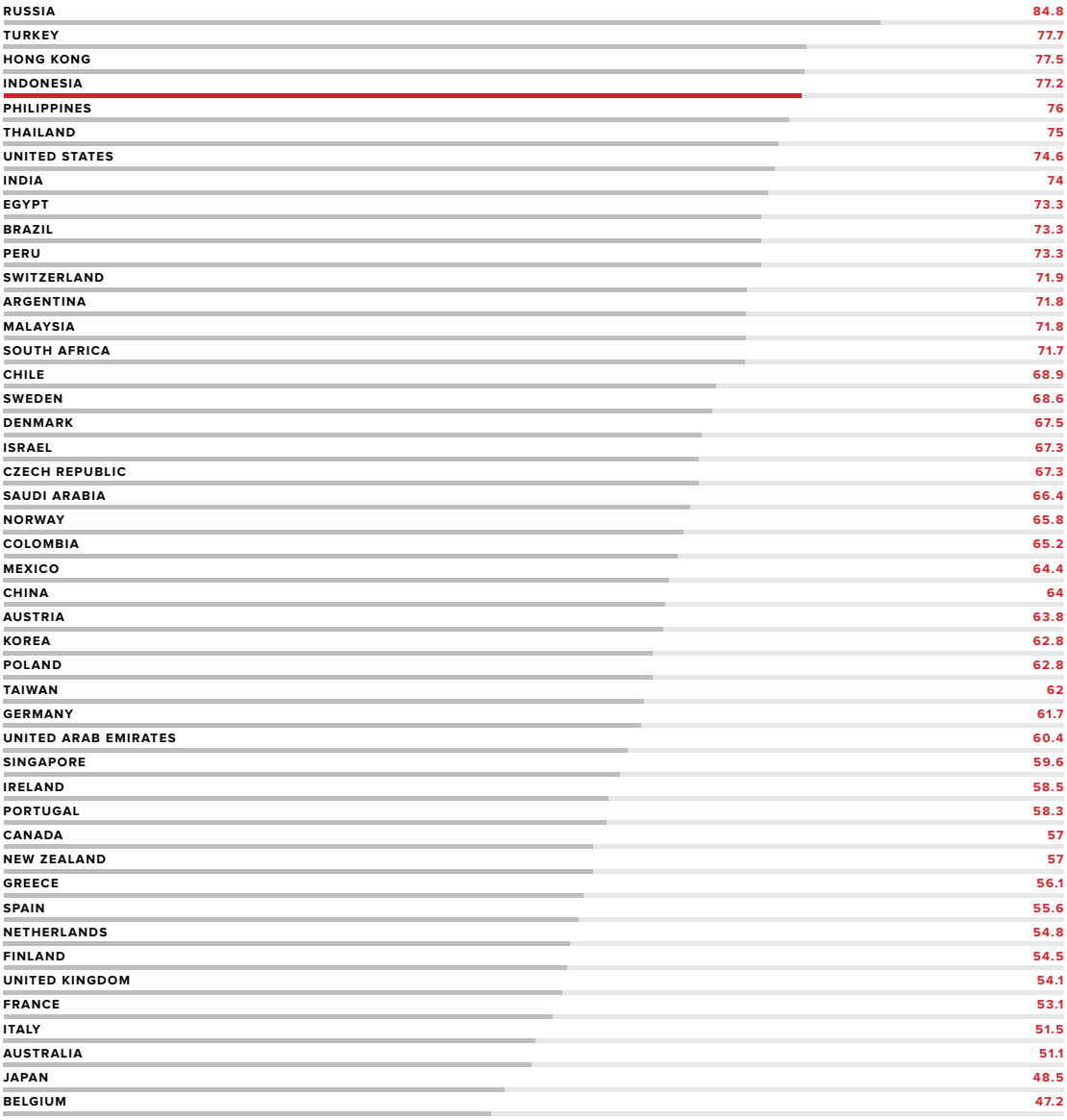

Perubahan pembagian total kekayaan yang dimiliki 10 rumah tangga terkaya (poin persentase) (bag.2.62)

SUMBER Credit Suisse (2014)

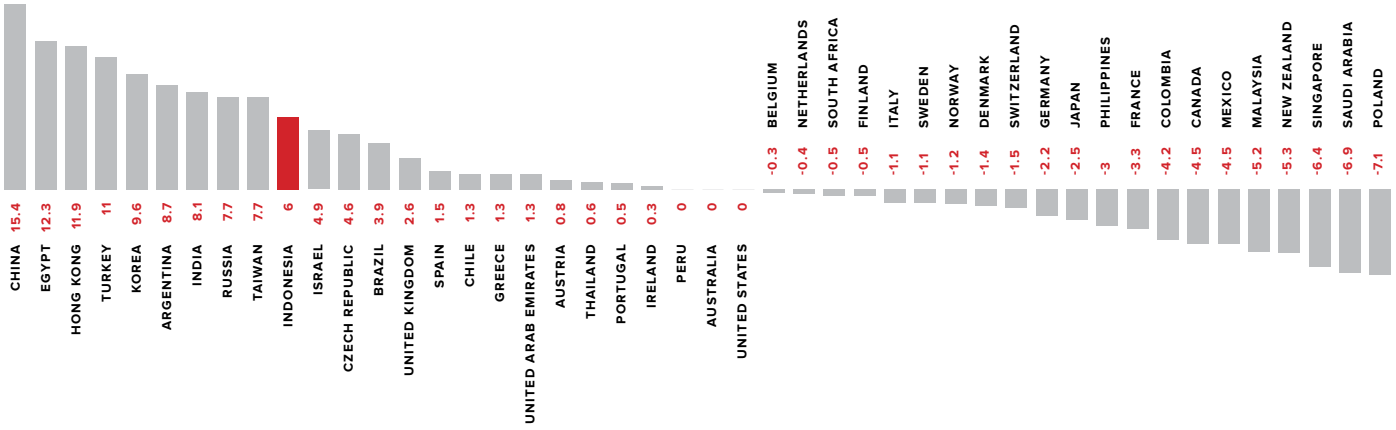

BEBERAPA AKUMULASI KEKAYAAN INI DIHASILKAN DARI BERBAGAI BENTUK KORUPSI. Bagi sebagian, aset keuangan diperoleh melalui hubungan personal dan praktik korupsi. Di tahun 2014, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yang mengukur korupsi di sektor publik di seluruh dunia, berada di poin 34 dari 100 (0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih), menempatkan Indonesia di peringkat 107 dari 175 negara. Praktik korupsi dapat berbentuk seperti korupsi legal berupa pemberian kontrak pekerjaan pelayanan pengadaan publik atau kontrak jasa kepada lingkar sosial mereka, penunjukkan teman dan keluarga di posisi sektor publik yang strategis atau bentuk korupsi ilegal seperti menyuap jaksa untuk mengubah keputusan atau menyuap pejabat untuk pemberian pelayanan tertentu.

TINGGINYA KONSENTRASI KEKAYAAN, WALAUPUN BERSIFAT ADIL, DAPAT BERDAMPAK BURUK TERHADAP KETIMPANGAN, DALAM HAL BERKURANGNYA INVESTASI DI SEKTOR SUMBER DAYA MANUSIA, ELIT POLITIK DAN INSTITUSI EKONOMI. Bahkan tanpa akumulasi ilegal maupun tindak ketidakadilan, konsentrasi yang tinggi terhadap kekayaan tetap memberikan dampak buruk karena dua alasan. Pertama, akan menularkan ketimpangan kesempatan lintas generasi, dalam hal sumber daya keuangan yang besar dan juga kemampuan untuk memperoleh hal tersebut, serta memfasilitasi investasi yang lebih besar pada sumber daya manusia (anak-anak dari keluarga yang lebih kaya). Kedua, kekayaan yang tinggi akan dapat memengaruhi perolehan kebijakan dan lembaga. Sebagai contoh, kekayaan dapat digunakan untuk memberikan pengaruh keuangan dan politik sehingga pajak yang dibebankan terhadap modal menjadi lebih rendah dibanding pekerja, atau membatalkan proses hukum demi menghindari proses peradilan terkait korupsi. North, Wallis, dan Weingast (2009) sebagai contoh, menggambarkan "Keterbatasan akses" sebagai penawaran yang diberikan para elit dan diperoleh ketika penyewaan ekonomi dibagi sebagai upaya memelihara kestabilan dan mengurangi kekerasan. Untuk melindungi sewa tersebut, elit harus membatasi akses kelompok non-elit terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Acemoglu dan Robinson (2012) yang menggambarkan ekonomi "ekstraksi" dan institusi politik yang berfungsi memusatkan sewa ekonomi kepada sekelompok kecil elit dan meningkatkan hambatan bagi kompetitor ekonomi untuk bersaing, sehingga mengurangi kemungkinan "penghancuran kreatif" di sektor ekonomi. Melihat tingginya konsentrasi kekayaan di Indonesia dan kinerja yang buruk di sektor pemberantasan korupsi, analisis ini menjadi relevan. Walau demikian, isu ini masih membutuhkan banyak penelitian.

LONJAKAN KOMODITAS MUNGKIN TELAH BERKONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN KETIMPANGAN DI TAHUN 2000-AN TETAPI TIDAK MENJELASKAN PENINGKATAN KETIMPANGAN SECARA MENYELURUH. Jika lonjakan komoditas telah menjadi faktor pendorong utama peningkatan ketimpangan di Indonesia, maka melihat lonjakan tersebut sudah berhenti, kekhawatiran bahwa ketimpangan akan terus meningkat mungkin bisa dikurangi. Bagaimanapun, ketimpangan hanya meningkat secara moderat di tahun 1970-an, walaupun terdapat lonjakan komoditas, khususnya di sektor minyak dan gas (sehingga konsentrasi keuntungan hanya pada sekelompok kecil). Dengan adanya lonjakan komoditas akhir-akhir ini, yang memiliki konsentrasi rendah dibanding minyak dan gas, serta terjadi di dalam konteks desentralisasi dan pemisahan sistem alokasi sewa, terdapat dua alasan untuk memercayai bahwa dampak lonjakan komoditas di tahun 2000-an terhadap ketimpangan tidak akan lebih besar dibanding tahun 1970-an. Ini terbukti dari Indeks Gini yang hanya 4 poin lebih tinggi dibandingkan lonjakan di tahun 1978 (Hill 2000). Walaupun kebanyakan kegiatan ekstratif mineral adalah sektor beorientasi modal daripada tenaga kerja, namun banyak juga lonjakan di tahun 2000-an berada di sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan kokoa, dan batu bara yang merupakan industri berorentasi pekerja. Ketidaksetaraan mulai meningkat di pertengahan tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, sebelum terjadi lonjakan kedua pada tahun 2003 (Lihat Boks 2.9 untuk pembahasan lebih lanjut).

BOKS 2.7

Peningkatan Ketimpangan: Tidak hanya terkait dengan lonjakan komoditas

Peningkatan ketimpangan berawal sebelum lonjakan komoditas di tahun 2000-an dan cenderung terus berlanjut walaupun mungkin akan berakhir. Koefisien Gini telah mulai meningkat antara tahun 1993 dan 1996 setelah periode stabil yang panjang. Hal ini mencerminkan adanya pola peningkatan signifikan (keberpihakan terhadap orang kaya) terkait konsumsi rumah tangga di tingkat nasional selama periode ini (Bagan 2.63), ketika orang kaya menikmati pertumbuhan yang lebih baik dibanding orang miskin yang berada di tengah, yang juga dapat dilihat di periode antara tahun 1999 dan 2003 selama masa pemulihan dari Krisis Keuangan Asia, tetapi sebelum adanya lonjakan komoditas (setiap orang terkena dampak krisis, tetapi orang kaya terkena dampak lebih besar dibanding orang miskin, tercermin dari adanya penurunan GIC). Terdapat tekanan besar terhadap ketimpangan sebelum terjadi lonjakan komoditas; bila faktor pendorongnya masih aktif, maka ketimpangan akan cenderung terus meningkat.

Kurva pertumbuhan, 1993-2014 (pertumbuhan konsumsi ril per kapita tahunan dari rumah tangga (kuantil)) (bag.2.61)

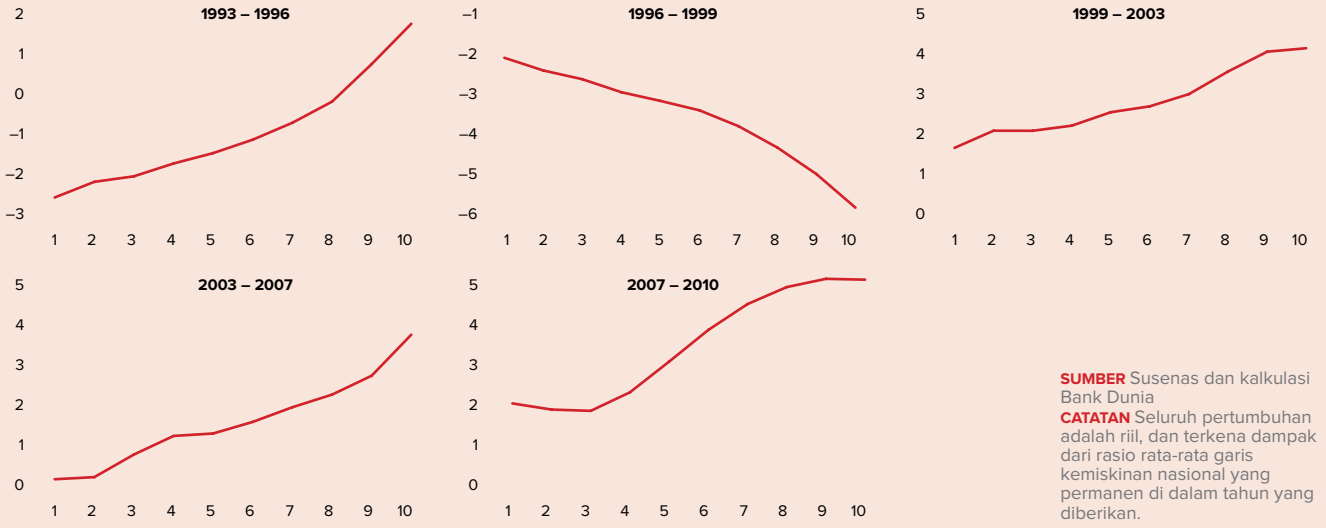

SUMBER Susenas dan kalkulasi Bank Dunia
CATATAN Seluruh pertumbuhan adalah riil, dan terkena dampak dari rasio rata-rata garis kemiskinan nasional yang permanen di dalam tahun yang diberikan.

Namun terdapat perbedaan utama antara konteks lonjakan minyak dan gas di tahun 1970-an dan lonjakan komoditas yang lebih beraneka ragam di tahun 2000-an yang perlu dipertimbangkan jika kita berbicara tentang ketimpangan. Hill (2000) mengindentifikasi sejumlah faktor yang melatarbelakangi hasil distribusi komoditas yang baik di tahun 1970-an dan 1980-an. Jumlah ini tidak dapat diaplikasikan di Indonesia pada saat sekarang. Pertama, banyak dari pertumbuhan di Orde Baru dihasilkan dari sektor peningkatan kesetaraan. Sektor beras memiliki performa yang sangat kuat; sektor perkebunan juga cenderung diasosiasikan dengan distribusi yang lebih adil terhadap pendapatan dan kekayaan karena penggunaan teknologi, dan proses penanaman serta kepemilikan yang lebih dominan oleh kelompok kecil. Sebagai tambahan, pertumbuhan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor dan padat karya juga cenderung mempromosikan kesetaraan pertumbuhan (World Bank 1993). Kedua, penurunan sektor minyak dan gas dikembalikan menjadi proyek pembangunan dan penghasilan lapangan kerja di area pedesaan dan juga pendorong terhadap pendidikan. Investasi besar di sektor inrastruktur membantu petani-petani miskin dan meningkatkan pergerakan personal yang berkontribusi terhadap kesempatan kerja.

2.5 MENGAPA GUNCANGAN MEMBUAT KEBANYAKAN ORANG SEMAKIN SULIT MENGEJAR KETERTINGGALAN

Pengaruh guncangan lebih besar pada rumah tangga miskin & rentan sehingga dapat menghambat mereka menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.

ADA BANYAK GUNCANGAN YANG DAPAT MEMENGARUHI SUMBER DAYA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA. Ada banyak risiko di dalam kehidupan dan dapat berdampak kepada siapapun, dari individu maupun rumah tangga, hingga ke masyarakat, tingkat nasional dan internasional. Rumah tangga dapat terpengaruh oleh guncangan ekonomi, sosial politik, serta guncangan akibat bencana alam. Terlebih lagi bagi populasi yang lebih tua, mereka akan lebih rentan terhadap penyakit yang bersifat tidak menular (non-communicable disease/NCD), artinya frekuensi dari guncangan kesehatan akan cenderung meningkat (World Bank 2014a). Guncangan-guncangan ini dapat mengurangi pendapatan rumah tangga melalui berbagai cara. Guncangan dapat memengaruhi aset yang digunakan untuk memperoleh penghasilan; bencana alam mungkin akan menghancurkan peternakan atau peralatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut; kekeringan memberikan kendala panen. Dapat juga mengurangi kemampuan beli apabila terjadi kenaikan harga makanan yang tiba-tiba. Mengurangi pendapatan di masa mendatang dengan berkurangnya nilai aset yang ada saat ini (sebagai contoh, menjual mesin jahit untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit) atau dengan menghambat akumulasi aset untuk masa depan (sebagai contoh, kekurangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan).

TETAPI, KEBANYAKAN ORANG INDONESIA KEKURANGAN MEKANISME FORMAL UNTUK MENGHADAPI GUNCANGAN INI. Kebanyakan orang Indonesia tidak memiliki asuransi kesehatan (Bagan 2.64) dan hanya sedikit yang memiliki dana pensiun. Pegawai Negeri Sipil dan kelompok orang kaya memiliki akses terhadap dua hal tersebut. Pemerintah telah menjalankan program bantuan sosial yang bertujuan mengurangi biaya kesehatan bagi rumah tangga dan individu miskin (Jamkesmas) pada tahun 2014, dan cakupan jaminan kesehatan menyeluruh mulai diimplementasikan di bawah Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Premi bagi sekitar 90 juta orang miskin dan rentan dibayarkan oleh pemerintah sebagai bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun masih terdapat puluhan juta orang Indonesia,mayoritas adalah pekerja informal yang tidak terjangkau. Perlindungan asuransi yang diberikan bergantung dari pembayaran kontribusi, perluasan cakupan untuk menjangkau kelompok rumah tangga tersebut sehingga mungkin masih jauh menjadi kenyataan. Terlepas dari fakta yang menyatakan setiap tahun 1 dari 20 orang Indonesia menghadapi masalah kesehatan yang sangat berbahaya dan biayanya merepresentasikan 5 persen dari total konsumsi, 1 dari 10 orang memiliki biaya yang setara dengan 10 persen total konsumsi mereka (Bredenkamp, et al, 2011).

Akses terhadap Asuransi Kesehatan (persen) (bag.2.64)

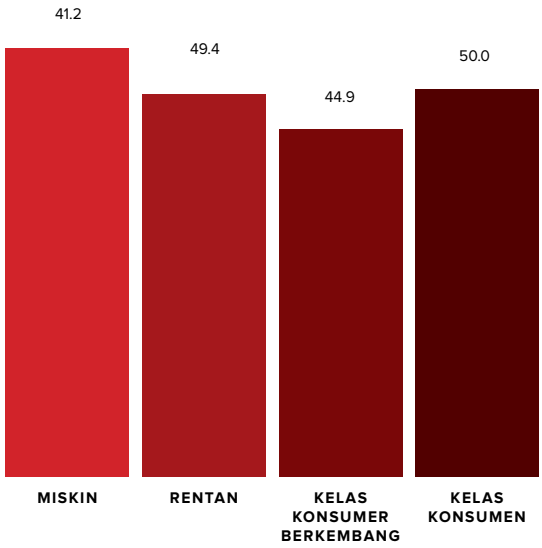

Akses terhadap Pensiun (persen) (bag.2.65)

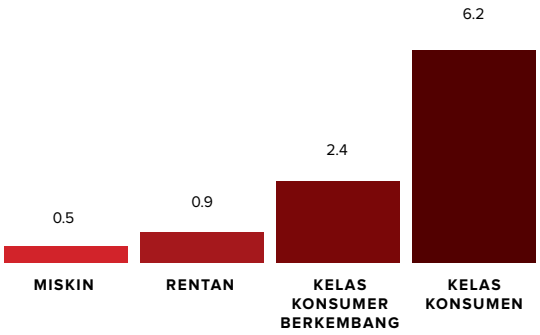

SUMBER Susenas dan Bank Dunia (forthcoming (a)).
CATATAN Golongan miskin terdata di bawah garis kemiskinan nasional, sekitar PPP US$ 1,30; golongan rentan miskin 1,5 kali di bawah garis kemiskinan, sekitar US$ 1,90; kelas konsumen baru terdaftar 3,5 kali di bawah garis kemiskinan, sekitar US$ 4,50; sedangkan, kelas konsumen berada di atas garis kemiskinan. Lihat Bank Dunia (forthcoming (a)) untuk rincian.

BAHKAN KETIKA ORANG MISKIN DAN RENTAN SECARA TEKNIS TERJANGKAU OLEH JAMINAN SOSIAL, MEREKA BELUM TENTU MENDAPATKAN MANFAAT. Jutaan orang Indonesia bukan hanya belum terjangkau oleh JKN, tetapi mereka yang terjangkau pun belum tentu menerima tingkat perlindungan yang sama seperti kelompok rumah tangga kaya. Cakupan jangkauan kesehatan universal tidak hanya terhadap populasi, tetapi juga layanan kesehatan yang memadai dan biaya pelayanan yang terjangkau (Bagan 2.66).

Walaupun masih terlalu dini untuk mengevaluasi JKN, jika kita belajar dari Jamkesmas yang sekarang terintegrasi dengan JKN sebagai komponen non-kontribusi untuk orang miskin dan rentan, maka hal ini menjadi relevan. Alasannya adalah "keseimbangan dampak program untuk melindungi orang miskin, baik dalam rangka mempromosikan kesehatan dan pemanfaatan perawatan maupun dalam rangka mengurangi dampak dari biaya yang dikeluarkan, paket manfaatnya tidaklah sebesar yang diperkirakan" (Bredenkamp, et al. 2011). Pertama,

Tiga dimensi dari jangkauan kesehatan universal (bag.2.66)

WORLD Laporan kesehatan WHO 2010.

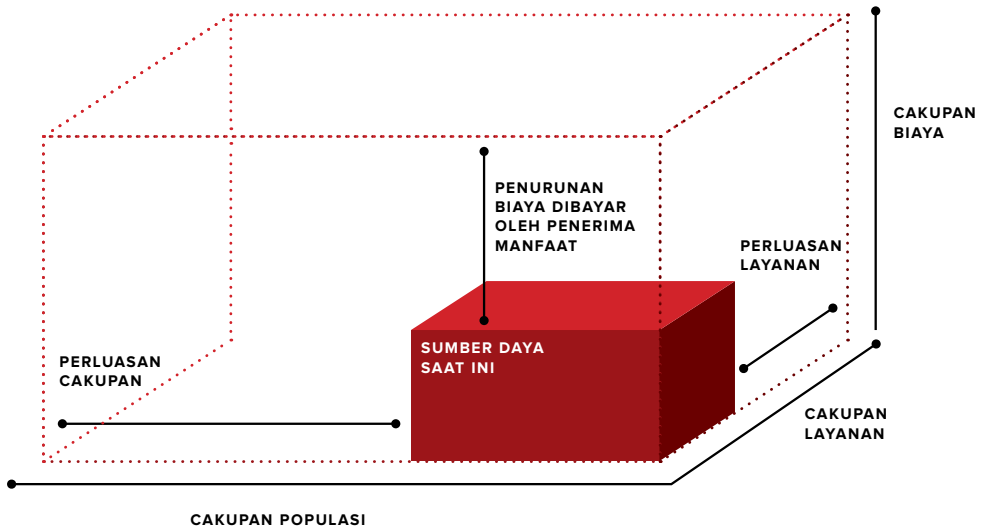

banyak dari orang miskin tidak mengetahui layanan asuransi kesehatan apa yang mereka terima dan mereka cenderung untuk tidak menggunakannya (World Bank 2012a dan 2012d). Kedua, pembatasan untuk mengakses layanan yang tersedia, khususnya di area-area miskin, yang berarti mereka tidak selalu dapat menggunakan asuransinya (World Bank 2012a, 2012d, dan 2014a). Sebagai konsekuensinya, orang-orang miskin dan rumah tangga di sekor informal tidak akan memiliki akses terhadap nutrisi dan investasi kesehatan manusia yang sama (tingkat pemanfaatan layanan kesehatan lebih tinggi di antara pengguna Jamkesmas dibanding mereka yang tidak terlindungi, biaya kesehatan sendiri memiliki tingkat per kapita yang sama sebagai pembagian dari total konsumsi Harimurti, et al, 2013). Jangkauan Kesehatan Universal merupakan langkah kebijakan penting untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, tetapi tingkat efektivitasnya akan bergantung pada penerapan.

MASYARAKAT LEBIH SERING BERGANTUNG PADA TEMAN ATAU KELUARGA YANG CENDERUNG TIDAK MEMADAI, ATAU MENGAMBIL LANGKAH YANG DAPAT MENGURANGI PENDAPATAN DI MASA DEPAN. Ketika masyarakat tidak memiliki akses ke mekanisme penyelesaian formal saat menghadapi guncangan, maka mereka akan menggunakan cara-cara informal. Biasanya, bergantung kepada keluarga dan teman-teman. Bagaimanapun, langkah ini tidak memberikan dukungan penuh untuk mengatasi permasalahan dan bahkan menjadi tidak bermanfaat sama sekali ketika seluruh komunitas terkena guncangan di saat bersamaan, seperti ketika terkena bencana alam. Ketika bantuan informal tidak cukup, rumah tangga mungkin berusaha untuk mengurangi pendapatan di masa depan seperti menjual aset produktif atau mengeluarkan anak dari sekolah.[42]

SEBAGAI TAMBAHAN, BERBAGAI HARGA MENGALAMI KENAIKAN LEBIH CEPAT BAGI ORANG MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN DIBANDINGKAN DENGAN KELOMPOK RUMAH TANGGA LAINNYA, YANG BERARTI STANDAR KEHIDUPAN MEREKA AKAN JATUH LEBIH RENDAH LAGI. Antara bulan Oktober 2007 dan Desember 2013, harga bagi rata-rata konsumen meningkat sebesar 144 persen (Bagan 2.67). Walaupun demikian, harga untuk barang dan jasa yang digunakan oleh orang miskin meningkat sebesar 161 persen dalam periode yang sama. Hal ini terutama didorong oleh inflasi yang tinggi pada bahan makanan yang menjadi bagian besar konsumsi rumah tangga keluarga miskin. Harga-harga bahan makanan yang dinikmati oleh orang miskin meningkat sebesar 175 persen dalam periode ini, sedangkan harga barang-barang non-makanan yang dinikmati oleh orang miskin hanya meningkat sebesar 138 persen (Bagan 2.68).

[42] Untuk pembahasan yang rinci mengenai risiko yang dihadapi rumah tangga dan mekanisme yang mereka gunakan, lihat World Bank (2015c) Risk and Informal Risk Managemet among the Rural Poor in Indonesia.

CPI dan CPI untuk orang miskin, 2002-13 (bag.2.67)

SUMBER BPS dan Bank Dunia

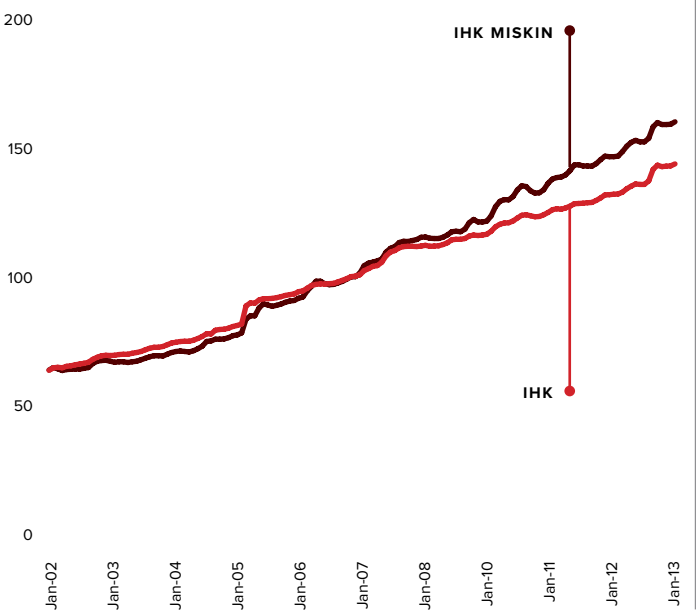

CPI orang miskin (makanan) dan CPI orang miskin (non-makanan), 2002-13 (bag.2.68)

SUMBER BPS dan Bank Dunia

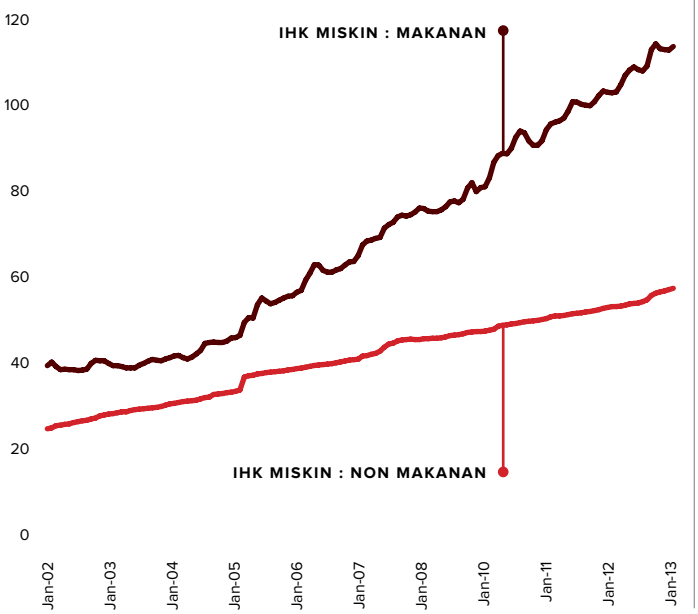

Laju kemiskinan dan kerentanan di Indonesia, 2014 (persen) (bag. 2.69)

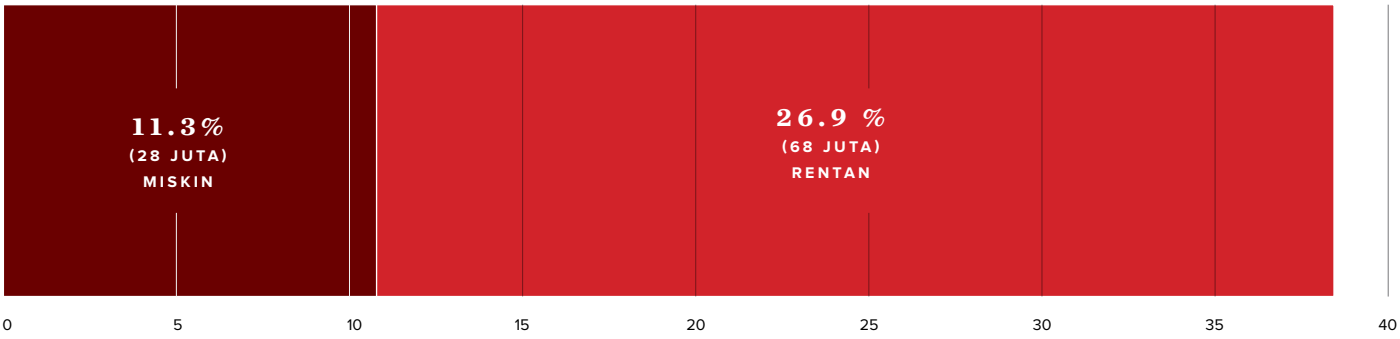

SUMBER Susenas and World Bank calculations.

DENGAN TINGKAT KERENTANAN YANG TINGGI, GUNCANGAN KECIL DAPAT DENGAN MUDAH MENGURANGI PENDAPATAN. Walaupun sebanyak 28 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi ada lebih dari 68 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari 50% di atas garis kemiskinan tersebut (Bagan 2.69). Sebagai konsekuensinya, guncangan kecil sekalipun dapat dengan mudah menjatuhkan kelompok rentan ke dalam kemiskinan. Faktanya, setiap tahun sekitar setengah dari masyarakat miskin, bukanlah orang miskin di tahun sebelumnya (Bagan 2.70).

SEMENTARA ITU, RUMAH TANGGA YANG LEBIH KAYA DAPAT BERTAHAN DENGAN BAIK DARI GUNCANGAN DAN CENDERUNG TETAP KAYA. Memang banyak masyarakat Indonesia yang dapat keluar dari kemiskinan dan kerentanan, tetapi lebih banyak lagi yang yang jatuh ke jurang kemiskinan. Dua puluh persen rumah tangga yang berpenghasilan paling miskin di Indonesia pada tahun 1993, dua per tiganya termasuk dalam kelompok yang berpenghasilan lebih besar 14 tahun kemudian di tahun 2007 (Tabel 2.6). Tiga puluh enam persen merangkak naik ke kuantil kedua, 19 persen naik ke kuantil ketiga, dan sebagian kecil di antaranya berhasil naik ke dua kuantil teratas. Untuk rumah tangga yang berada pada tiga kelompok kuantil tengah (Q2-Q4), banyak di antara kelompok rumah tangga tersebut naik ke kelompok kuantil pendapatan yang lebih tinggi (41, 21, dan 21 persen). Pada saat yang bersamaan, banyak pula yang jatuh ke kuantil pendapatan terkecil (31,50, dan 52 persen). Hanya 20 persen kelompok rumah tangga paling kaya di tahun 1993 yang memiliki kesempatan lebih baik untuk tetap berada di kelompok kuantil yang sama; seluruh kuantil lainnya memiliki 26 hingga 37 persen peluang untuk tetap berada di posisi yang sama seperti 14 tahun sebelumnya; sementara kuantil teratas memiliki peluang 56 persen. Faktor pendorong utama dari hasil ini adalah kelompok kaya memiliki kemampuan untuk melindungi aset dan penghasilan mereka dari guncangan, baik penghasilan saat ini dan juga masa mendatang, sehingga memperlebar ketidaksetaraan di masa depan.

Proporsi kelompok miskin yang telah miskin pada tahun sebelumnya (bag. 2.70)

SUMBER Panel Susenas dan kalkulasi Bank Dunia

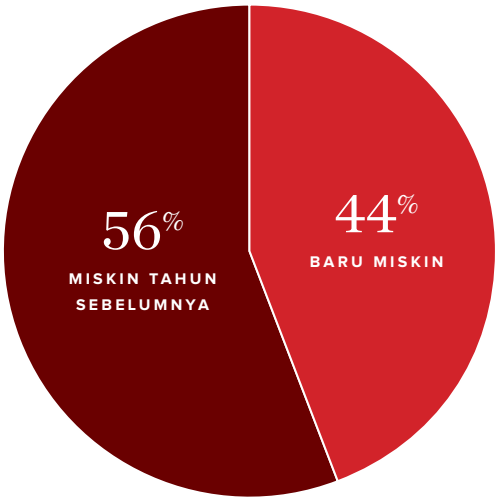

Matrix pendapatan mobilitas rumah tangga 1993-2007 (tab. 2.6)

1993 INCOME QUINTILE	2007 INCOME QUINTILE Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1	37%	36%	19%	6%	2%
Q2	31%	28%	19%	14%	8%
Q3	23%	27%	28%	13%	10%
Q4	12%	18%	22%	26%	21%
Q5	8%	8%	11%	18%	56%

SUMBER Indonesian Family Life Survey and World Bank calculations.

BAGAIMANA KETIMPANGAN DAPAT DIATASI

Ketimpangan di Indonesia bergantung terhadap anggota rumah tangga dan sumber keuangan serta banyaknya penghasilan dari tiap sumber daya. Berdasarkan model simulasi pendapatan yang digunakan di dalam laporan ini, kita dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai faktor pemicu peningkatan ketimpangan seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya (Tabel 3.1).

3.1 Peningkatan kualitas pelayanan lokal 97

3.2 peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penyediaan pekerjaan produktif 107

3.3 Perlindungan efektif dari guncangan 111

3.4 Penyelarasan Pajak dan Belanja Pemerintah untuk Penurunan Ketimpangan 117

3.5 Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Menangani Ketimpangan 125

Faktor pemicu ketimpangan berdasarkan model simulasi pendapatan (tab. 3.1)

	Sumber Daya Manusia	Sumber daya fisik dan finansial
Sumber daya rumah tangga	PENGURANGAN KETIMPANGAN **Akses kesenjangan antara kaya dan miskin telah berkurang** **Kesenjangan kualitas tetap, mengurangi dampak mengecilnya akses kesenjangan**	PENINGKATAN KETIMPANGAN **Kekayaan semakin terpusat di antara 10 persen orang terkaya**
Pendapatan dari sumber daya rumah tangga	PENINGKATAN KETIMPANGAN **Kesenjangan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil melebar**	PENINGKATAN KETIMPANGAN **Pengembalian modal yang besar, hanya dapat diakses oleh sekelompok kecil.**
Dampak guncangan	PENINGKATAN KETIMPANGAN **Rumah tangga yang kaya memiliki kemampuan lebih baik untuk mencegah guncangan (sebagai contoh: pencegahan penyakit, jumlah pekerja manual yang sedikit) dan memiliki berbagai aset atau asuransi untuk menghadapi goncangan jika terjadi. Rumah tangga yang miskin lebih rentan terhadap goncangan dan cenderung mengurangi berbagai pengeluaran utama (pendidikan, kesehatan) atau mengeluarkan anak-anak dari sekolah untuk bekerja.**	NETRAL **Rumah tangga kaya lebih mudah terdampak oleh krisis keuangan karena mereka memiliki paling banyak aset (sebagai contoh krisis keuangan Asia). Tetapi, rumah tangga yang tidak kaya mungkin memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk menghadapi bencana alam dan lebih cenderung menjual aset-aset produktif jika menghadapi permasalahan kesehatan ataupun pengangguran**

NAMUN, KETIMPANGAN YANG TINGGI DAN TERUS MENINGKAT BUKANLAH HAL YANG TAK DAPAT DIHINDARI; BUKTINYA EKONOMI NEGARA TETANGGA TETAP TUMBUH TANPA MENINGKATKAN KESENJANGAN ANTARA SI KAYA DAN MISKIN. Ketika ketimpangan telah meningkat secara cepat di Indonesia, level pertumbuhan ekonomi di Thailand dan Vietnam tetap sama di antara masyarakat kaya, miskin, dan kelas menengah pada periode tahun 2000-an (Bagan 3.1, Bagan 3.2, Bagan 3.3). Hal ini mengindikasikan peningkatan ketimpangan dapat dihindari dengan pertumbuhan produksi yang cepat. Faktanya, beberapa negara seperti Brazil, telah mampu untuk memperlambat dan selanjutnya membalikkan peningkatan ketimpangan melalui pendekatan kebijakan yang terencana (lihat kota 3.1). Pertumbuhan konsumsi dari 40 persen masyarakat paling miskin di Brazil selama tahun 2000-an adalah empat kali lipat lebih tinggi dari 10 persen orang paling kaya (Bagan 3.4).

Growth incidence curve, Thailand 2000-06 (bag. 3.1)

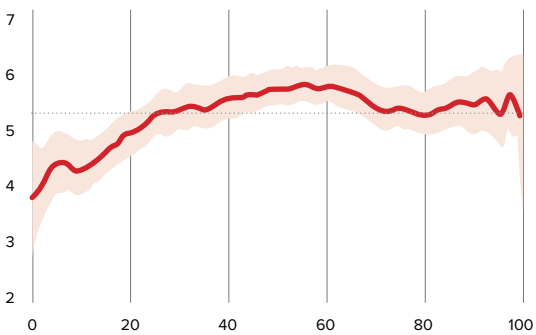

Growth incidence curve, Thailand 2006-10 (bag. 3.2)

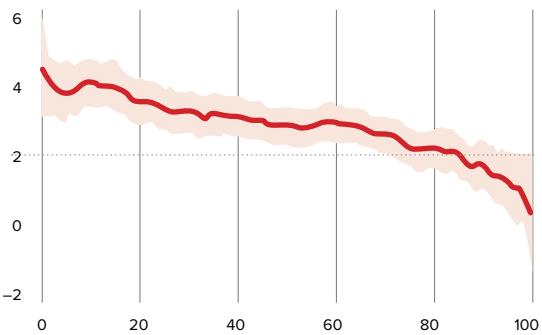

SUMBER Bank Dunia menggunakan data survei sosial-ekonomi rumah tangga.

Growth incidence curve, Vietnam 2004-12 (bag.3.3)

SUMBER Penrhitungan Bank Dunia menggunakan data survei sosial-ekonomi rumah tangga (World Bank 2014g)

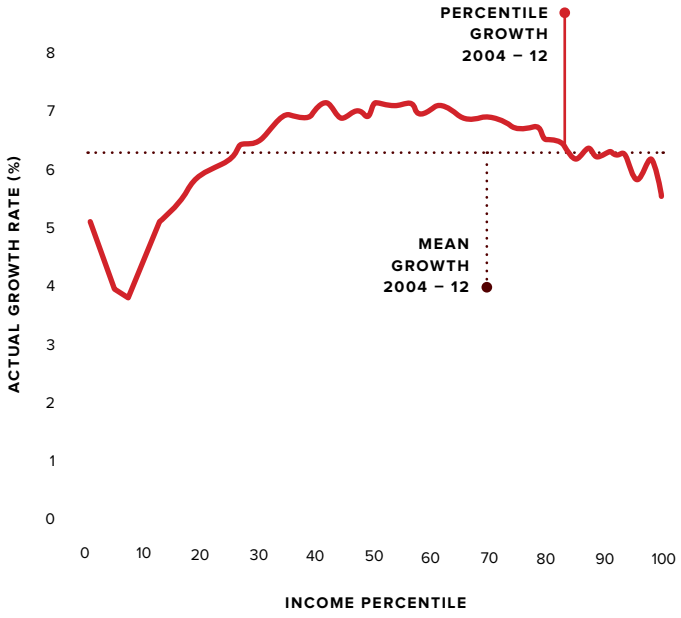

Growth incidence curve, Brazil 2001-09 (bag.3.4)

SUMBER Bank Dunia (2012e).

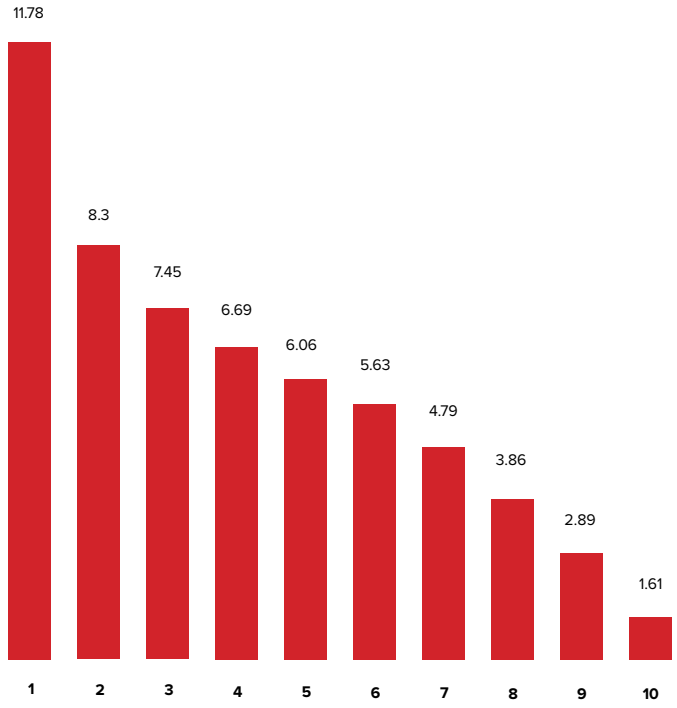

KETIMPANGAN DAPAT DIATASI MELALUI BERBAGAI KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI DAMPAK DARI FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KENDALI INDVIDU YANG DAPAT MEMENGARUHI PENGHASILAN MEREKA. Tidak semua ketimpangan perlu diatasi; Pemerintah seharusnya fokus terhadap peningkatan ketimpangan akibat berbagai faktor di luar kendali individu dan mengabaikan ketimpangan yang memberikan penghargaan kepada individu sebagai hasil kerja kerasnya, keberanian mengambil risiko, dan inovasi. Untuk melakukan hal ini, pembuat kebijakan memiliki berbagai instrumen yang sangat luas di bawah kendalinya. Mereka harus menggunakan peralatan tersebut untuk menghadapi faktor utama peningkatan ketimpangan yang sudah teridentifikasi sebelumnya dan juga yang dikerjakan (Tabel 3.2). Bagian berikut dari laporan ini menggarisbawahi berbagai kebijakan utama yang dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan, baik di masa sekarang maupun mendatang.

- **Bagian 3.1** Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat daerah: Kunci untuk mendapatkan awal yang baik bagi generasi selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan di daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas kesehatan, pendidikan, dan peluang keluarga berencana untuk semua.

- **Bagian 3.2** Mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan keterampilan yang lebih baik: Pekerja saat ini yang mengalami awal karir yang kurang baik dapat meningkatkan keterampilan mereka melalui berbagai bentuk pelatihan. Selanjutnya, Pemerintah dapat membantu dengan memastikan ketersedian pekerjaan yang lebih baik melalui iklim investasi yang lebih kondusif dan pendekatan peraturan yang lebih fleksibel.

- **Bagian 3.3** Memastikan perlindungan dari guncangan: Kebijakan pemerintah dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keterpurukan dari goncangan, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian untuk memastikan seluruh rumah tangga mendapatkan akses perlindungan yang cukup dari guncangan ketika terjadi.

- **Baglan 3.4** Kebijakan fiskal yang tepat: Kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran yang tepat dari Pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih baik saat ini dan peluang yang adil kelak. Penggunaan anggaran dapat memengaruhi ketimpangan sekarang, sekaligus mengurangi potensi pemusatan kekayaan di masa mendatang.

- **Bagian 3.5** Mengimplementasikan berbagai kebijakan yang didukung luas oleh publik dan mengomunikasikan pentingnya kebijakan yang tidak banyak dukungan. Kebanyakan dari berbagai rekomendasi kebijakan di bagian 3 memiliki basis dukungan publik yang luas sebagai upaya untuk menyelesaikan kemiskinan. Pemerintah tidak perlu takut melakukan berbagai kebijakan ini. Selain itu, strategi komunikasi efektif akan dibutuhkan untuk beberapa kebijakan yang tidak memiliki banyak dukungan.

Faktor pemicu ketimpangan dan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menghadapinya (tab. 3.2)

Pemicu Ketimpangan	Instrumen yang mungkin digunakan
Kesenjangan peluang mengakses kesehatan dan pendidikan	• **Kebijakan fiskal yang tepat (penggunaan angaran di sektor layanan)** • **Meningkatkan penyajian pelayanan daerah (kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana)** • **Meningkatkan investasi di sektor infrastruktur**
Kesenjangan pengupahan dan akses terhadap pekerjaan yang membutuhkan kemampuan (skill)	• **Kebijakan fiskal yang tepat** • **Mempromosikan pekerjaan dan kemampuan yang lebih baik** • **Meningkatkan investasi di sektor infrastruktur**
Guncangan	• **Memastikan perlindungan dari guncangan** • **Meningkatkan investasi di sektor infrastruktur**
Kesenjangan akses dan pengembalian aset-aset keuangan	• **Kebijakan fiskal yang tepat (reformasi dan pengekan aturan perpajakkan)** • **Kebijakan-kebijakan yang mendukung (mengurangi korupsi)**

BOKS 3.1

Bagaimana Brazil Mengurangi Ketimpangan[43]

Brazil mengurangi ketimpangan di tahun 2000-an, walaupun berangkat dari posisi awal yang tidak sama. Antara tahun 2001 dan 2009, Koefisien Gini Brazil turun 5 poin dari 58,8 menjadi 53.7.[44] Ini merupakan penurunan yang sangat besar dibandingkan rata-rata di regional Amerika Latin yang juga menunjukkan penurunan ketimpangan di tahun 2000-an

Brazil dan Indonesia memiliki banyak konteks kemiripan, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran untuk mengurangi ketimpangan. Brazil menyerupai Indonesia dalam berbagai hal: keduanya sama-sama memiliki ekonomi berbasiskan sumber daya alam yang besar, menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat di periode tahun 2000—an; memiliki sistem politik terdesentralisasi yang telah membuat Brazil naik peringkat menjadi negara dengan pendapatan kelas menengah atas, dan Indonesia kini sedang berproses ke sana. Berdasarkan konteks tersebut, terdapat empat faktor pendorong di balik penurunan ketimpangan di Brazil yang dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia: (I) stabilitas makroekonomi; (ii) ekspansi

Koefisien Gini di Brazil dan Amerika Latin (bag.3.5)

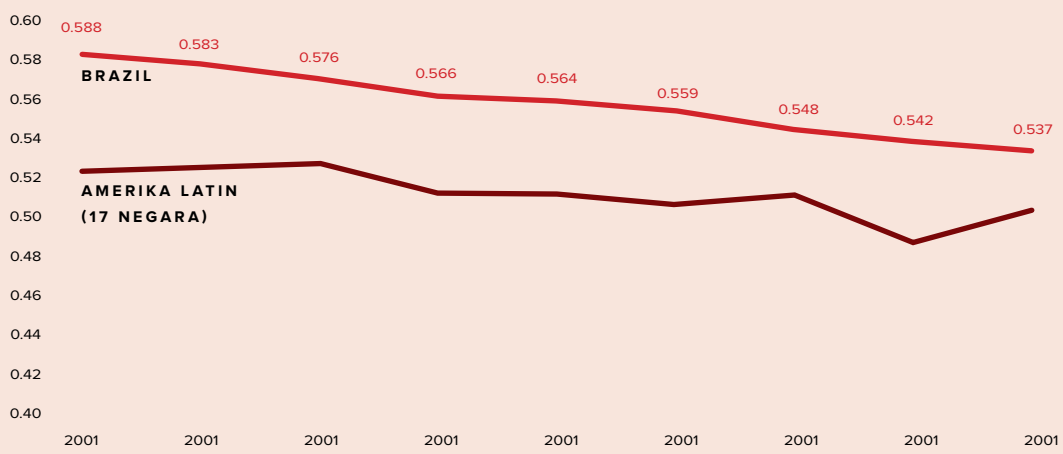

SUMBER World Bank (2012e).

[43] Boks ini berdasarkan World Bank (2012c), Inequality in Focus.
[44] Gini pendapatan lebih tinggi dari Gini konsumsi karena rumah tangga kaya lebih banyak menabung, sehingga konsumsi terlihat lebih merata daripada pendapatan. Gini pendapatan Indonesia berkisar 6.4 poin lebih tinggi daripada Gini konsumsi, berdasarkan selisih rata-rata pada saat kedua Gini dihitung di Indonesia (1984, 1990, dan 1993).

pendidikan primer dan sekunder; (iii) penggunaan anggaran sosial yang berpihak pada orang miskin; dan (iv) ekspansi dari bantuan sosial.

Brazil dan Indonesia memiliki banyak konteks kemiripan, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran untuk mengurangi ketimpangan. Brazil menyerupai Indonesia dalam berbagai hal: keduanya sama-sama memiliki ekonomi berbasiskan sumber daya alam yang besar, menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat di periode tahun 2000—an; memiliki sistem politik terdesentralisasi yang telah membuat Brazil naik peringkat menjadi negara dengan pendapatan kelas menengah atas, dan Indonesia kini sedang berproses ke sana. Berdasarkan konteks tersebut, terdapat empat faktor pendorong di balik penurunan ketimpangan di Brazil yang dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia: (I) stabilitas makroekonomi; (ii) ekspansi pendidikan primer dan sekunder; (iii) penggunaan anggaran sosial yang berpihak pada orang miskin; dan (iv) ekspansi dari bantuan sosial.

Stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah menguntungkan orang miskin. Ketika orang miskin tidak punya akses terhadap instrumen keuangan untuk melindungi mereka dari inflasi, maka stabilitas lingkungan makroekonomi yang menjaga harga-harga kebutuhan tetap terjangkau telah menguntungkan orang miskin dan masyarakat rentan di Brazil. Di saat yang bersamaan, ekspansi ekonomi yang kuat telah memicu pembentukan lapangan pekerjaan, sehingga rumah tangga miskin dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Ekspansi pendidikan primer dan sekunder telah mengubah profil buruh. Ketimpangan pendapatan buruh di Brazil sebagian besar dipicu oleh ketimpangan pendidikan. Brazil kemudian membuat kebijakan untuk memperluas pendidikan bagi rumah tangga miskin. Ekspansi ini terbukti sangat berhasil. Di tahun 1993, seorang anak dari ayah yang tidak memiliki pendidikan formal, bisa menyelesaikan sekolah selama empat tahun, dibandingkan pelajar-pelajar sekarang yang perlu waktu 9-11 tahun untuk menyelesaikan sekolah, terlepas dari pendidikan orangtuanya. Jumlah pekerja terampil pun meningkat dan upah mereka lebih tinggi. Artinya pula, hanya terdapat sedikit pekerja yang tidak terampil (unskilled). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka meningkat pula permintaan untuk pekerja kasar (tidak terampil), upah mereka juga meningkat. Diperkirakan penurunan perbedaan upah antara pekerja terampil dengan yang tidak, ikut berperan menurunkan dua per tiga ketimpangan.

Gerakan anggaran sosial yang berpihak pada orang miskin dan ekspansi yang signifikan terhadap bantuan sosial, juga berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan. Hampir setengah dari anggaran pemerintah digunakan untuk pos dana sosial, termasuk transfer dana, pendidikan, dan kesehatan. Upaya penting lain untuk mengurangi ketimpangan adalah ekspansi di sektor bantuan sosial. Peningkatan kontribusi dan non-kontribusi transfer pemerintah ikut mempengaruhi pengurangan indeks Gini sekitar 30 persen di antara tahun 2001 dan 2009. Hal yang lebih penting adalah ekspansi dari Bolsa Familia, program transfer dana bersyarat, mirip dengan PKH di Indonesia. Tidak seperti PKH, yang menjangkau hanya sekitar 5 persen dari rumah tangga Indonesia, Bolsa Familia mampu menjangkau 25 persen rumah tangga Brazil dan dipandang sebagai kontribusi yang efektif untuk menjangkau orang miskin dan mengurangi ketimpangan. Program lainnya adalah Beneficio de Presracao (non-kontribusi dana pensiun) yang menyediakan keuntungan lebih tinggi daripada Bolsa Familia, tetapi memiliki peran yang lebih kecil untuk mengurangi ketimpangan, ketika sektor formal dan sektor publik dari program jaminan sosial sudah tidak ada.

Berkat berbagai kebijakan ini, orang miskin di Brazil mengalami peningkatan pendapatan dalam satu periode. Rata-rata pertumbuhan pendapatan untuk setengah orang miskin dari total populasi masyarakat Brazil berada di atas level rata-rata nasional dan secara khusus menguntungkan orang miskin dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapitanya hampir 12 persen, meningkat dua kali lipat dari rata-rata nasional dan 10 kali lipat dari 10 persen orang paling kaya.

Jelas bahwa Indonesia dapat melakukan lebih dari sekedar menghambat peningkatan ketimpangan dan dapat sesegera mungkin mengurangi ketimpangan jika: (I) hal ini menjadi prioritas pemerintah; (ii) strategi yang jelas dan koheren dikembangkan; (iii) keterbukaan untuk mengawasi dan mengimplementasikan strategi di bawah tanggung jawab utama menteri senior yang mendapat mandat dari Presiden; (iv) pengajuan kebijakan baru di seluruh kementerian, dan lembaga negara diminta untuk mengawasi dampaknya terhadap ketimpangan; dan (v) semua kebijakan utama dan program yang menargetkan pengurangan ketimpangan dirancang dengan baik, didanai, dan diimplementasikan.

Growth incidence curve, Brazil 2001-2009 (bag.3.6)

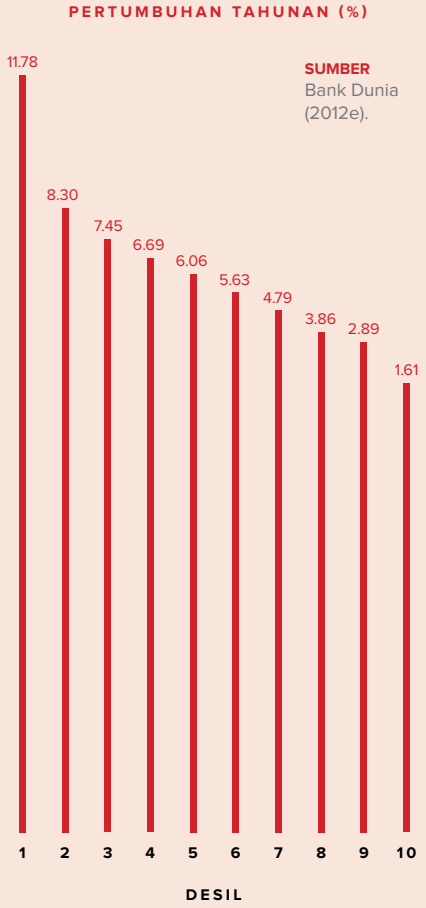

RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN PENDAPATAN PER KAPITA

5.91%

Sumber : Bank Dunia (2012e).
Kasus Brazil mengilustrasikan bahwa pengurangan ketimpangan secara signifikan merupakan hal yang mungkin dilakukan.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN LOKAL, KHUSUSNYA BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN & KELUARGA BERENCANA

3.1.

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEMBUTUHKAN PEREMAJAAN SISTEM YANG BERFUNGSI BAIK SEHINGGA PELAYANAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMERINTAH DAERAH. Layanan dan infrastruktur di dalam suatu negara yang sangat besar dan tersebar seperti Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Namun kenyataannya, lebih dari satu dekade setelah desentralisasi diterapkan, terlepas dari adanya peningkatan signifikan penggunaan anggaran untuk desentralisasi (sekitar setengah dari total penggunaan anggaran nasional), kualitas dari layanan masih rendah dan tidak terdistribusi secara merata ke seluruh daerah. Permasalahannya adalah kebanyakan dari pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan pelayanan dan tidak memiliki keterbukaan terkait hasil yang diperoleh terhadap pemerintah pusat dan masyarakat.

PENERAPAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UTAMA DAPAT MENDUKUNG PENINGKATAN DI SELURUH AREA PELAYANAN DAERAH. Pelayanan di daerah dapat ditingkatkan dengan membangun kapasitas pemerintah daerah dalam menyajikan layanan secara progresif lewat sistem transfer berbasiskan performa dan menyediakan instrumen bagi masyarakat untuk mengawasi praktik pelayanan tersebut. Beberapa prioritas untuk meningkatkan pelayanan daerah yang bersifat antar sektor termasuk: mengubah mekanisme alokasi anggaran; mengubah insentif anggaran daerah; memberikan insentif untuk pencapaian standar daerah dari setiap layanan daerah; dan meningkatkan pengawasan publik terhadap layanan daerah. Secara khusus, kita dapat melihat proses pencapaian hal ini di sektor kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana.

3.1.1

Memastikan semua anak mendapatkan permulaan yang adil dalam hidup melalui perawatan kesehatan yang berkualitas

Langkah paling penting untuk mengatasi ketimpangan kesempatan berawal dari kesehatan bagi seluruh anak.

MEMASTIKAN KESEHATAN BAGI SELURUH ANAK BERARTI MEMBUTUHKAN PERLENGKAPAN, FASILITAS, DAN STAF YANG LEBIH BAIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH SEMUA DAN PELAYANAN PRIMA BAGI SIAPAPUN YANG MEMBUTUHKAN. Tiga aksi utama tersebut membutuhkan kepastian agar seluruh anak memiliki kesehatan yang baik, caranya dengan:

I. Mengatasi kebutuhan keuangan untuk fasilitas kesehatan sehingga memastikan akses dan perlengkapan yang memadai;

II. Memastikan kecukupan suplai dan kompetensi tenaga kesehatan dengan distribusi yang lebih bagi kelompok yang kurang beruntung; dan

III. Peningkatan layanan kesehatan bagi mereka yang sangat membutuhkan.

PENGELUARAN ANGGARAN KESEHATAN DI INDONESIA ADALAH SALAH SATU YANG TERENDAH DI DUNIA[45]. Kondisi ini membutuhkan peningkatan secara substansial, seperti rencana anggaran tahun 2016, tetapi dengan penekanan yang lebih terkait pelayanan kesehatan primer. Sampai dengan akhir-akhir ini, Indonesia merupakan negara terendah kelima di sektor penggunaan anggaran kesehatan terhadap rasio GDP dari 188 negara, dengan 1,2 persen GDP dan penggunaan anggaran saku yang besar dari total penggunaan anggaran kesehatan. Kebanyakan negara memiliki anggaran saku untuk kesehatan sesuai rekomendasi WHO yaitu 15-20 persen dan hal yang sama juga berlaku bagi anggaran kesehatan yang hanya 5 persen dari GDP (Bagan 3.7). Penggunaan anggaran saku yang besar di Indonesia mengindikasikan dampak goncangan ketimpangan yang bersifat tidak langsung akibat kurangnya akses terhadap kesehatan dan terpuruknya rumah tangga ke dalam kemiskinan ketika jatuh sakit. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang telah meningkatkan anggaran kesehatan pada tahun 2016 di angka 5 persen dari total APBN. Namun kebanyakan dari peningkatan ini ditujukan kepada sistem asuransi kesehatan nasional (Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN). Hal ini sebenarnya mengalihkan penggunaan anggaran ke rumah sakit besar di berbagai kota besar yang cenderung menguntungkan rumah tangga kaya, padahal seharusnya lebih dialokasikan ke sektor kesehatan primer yang lebih memihak kelompok miskin.

Belanja Kesehatan Publik (persen PDB) dan Pengeluaran Kesehatan Pribadi (persen total pengeluaran kesehatan) secara internasional (bag.3.7)

SUMBER Indikator Perkembangan Dunia dan Bank Dunia (2014a).

[45] Bagian ini mengandung berbagai rekomendasi penting untuk meningkatkan sektor finansial di bidang kesehatan dan pelayanan dari Bank Dunia (2014a).

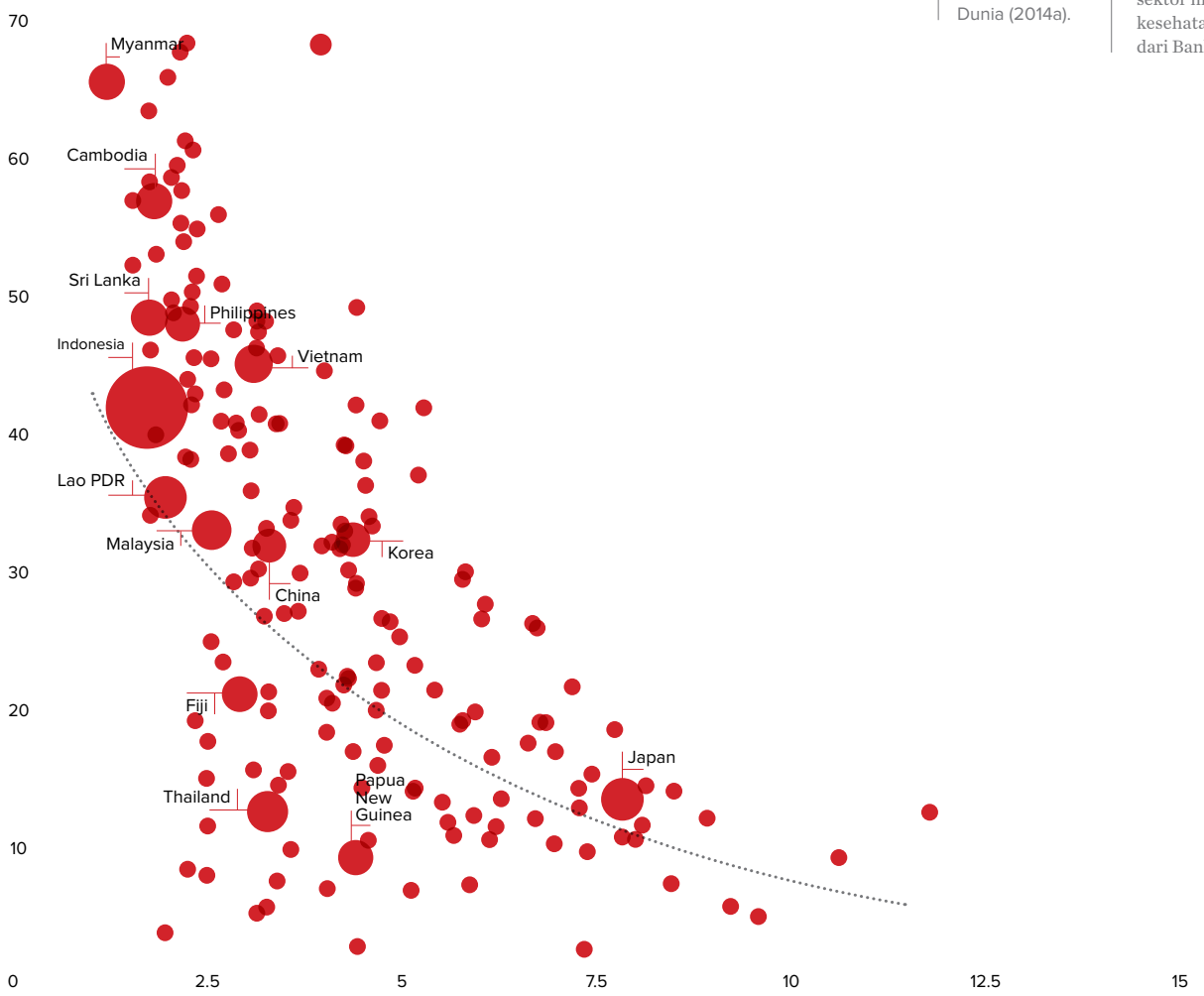

Memberikan kepastian kecukupan suplai dan kualitas fasilitas kesehatan akan membutuhkan anggaran yang lebih besar, namun penggunaan anggaran ini disesuaikan dengan skala prioritas serta pemberian insentif untuk kinerja baik

ANGGARAN BELANJA KESEHATAN MASYARAKAT JUGA HARUS DIPERBAIKI DENGAN MEMBUAT PEMERINTAH DAERAH LEBIH BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN DI LAPANGAN. Pemerintah daerah telah menjadi penanggung jawab utama pemberian layanan kesehatan sejak tahun 2001. Diasumsikan bahwa desentralisasi akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menitikberatkan peran para pembuat keputusan di tingkat daerah (terutama bagi sebuah negara besar dan heterogen seperti Indonesia). Namun, ternyata tidak terdapat hubungan antara perubahan penggunaan anggaran kesehatan pemerintah daerah terhadap pencapaian standar di bidang kesehatan (Bagan 3.8 dan Bagan 3.9, Bank Dunia 2014a).

Perubahan Belanja Kesehatan riil (%, 2003-11) & perubahan proses kelahiran oleh tenaga kesehatan terampil (persen 2003-11) (bag.3.8)

SUMBER Ministry of Finance and BPS, as reported in World Bank 2014a.
CATATAN Sample of 147 districts for which data are available in both years.

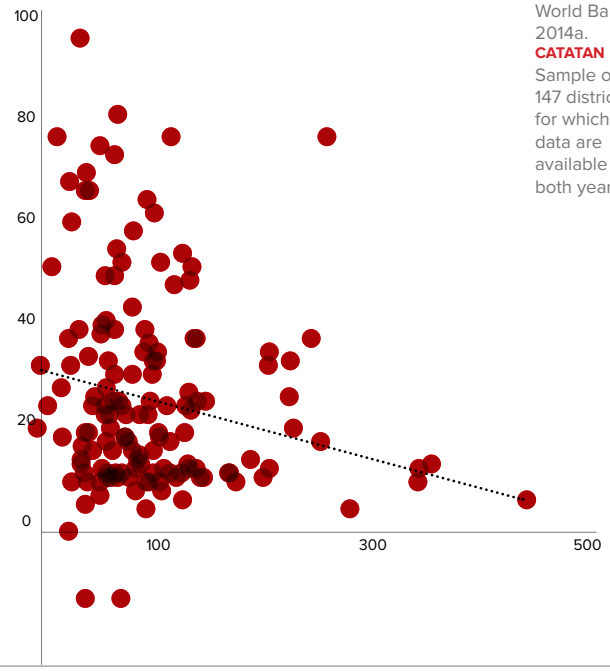

Perubahan belanja kesehatan riil (%, 2003-11) & perubahan jangkauan imunisasi (persen 2003-11) (bag.3.9)

SUMBER Ministry of Finance and BPS, as reported in World Bank 2014a).
CATATAN Sample of 154 districts for which data are available in both years.

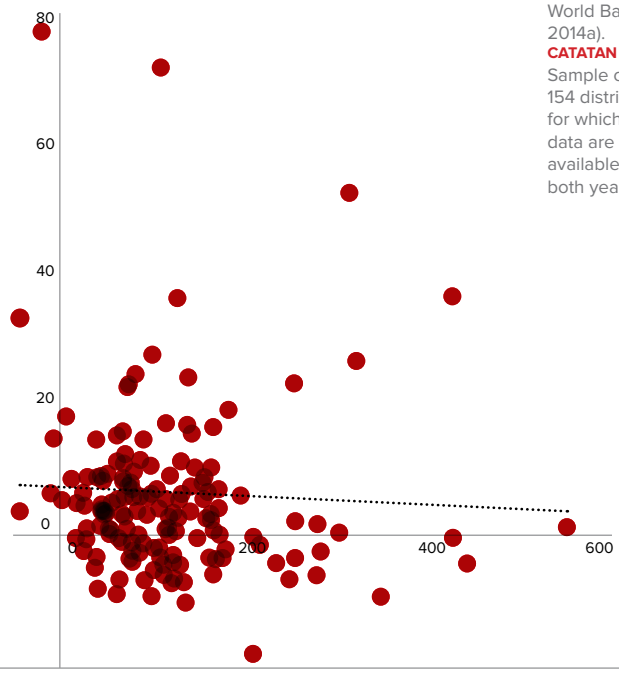

SALAH SATU PENDEKATAN ADALAH MENGGUNAKAN INVESTASI BERTARGET DENGAN INSENTIF. Peningkatan transfer tahun jamak dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada distrik dapat dikaitkan dengan kesenjangan yang diukur melalui penyediaan standar dasar layanan kesehatan, seperti yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Kontribusi distrik/daerah kepada DAK akan dikembalikan dengan syarat distrik memperlihatkan adanya ketersediaan layanan ini. Cara seperti ini telah dibuktikan berhasil di sejumlah provinsi lewat transfer DAK untuk infrastruktur.

DISTRIK BERKINERJA RENDAH DAPAT DIBERI BANTUAN ASALKAN MASALAHNYA BERKAITAN DENGAN LEMAHNYA KAPASITAS PELAKSANAAN. Jika diperlukan, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan mengambil alih layanan sementara waktu, seperti yang telah berhasil dilakukan di beberapa negara seperti Kolombia. Transfer selanjutnya juga dapat dikaitkan dengan proses penutupan kesenjangan.

PENDEKATAN LAINNYA ADALAH DENGAN MERANCANG PENYEDIA LAYANAN PEMBAYARAN YANG DAPAT MENDUKUNG PELAYANAN SECARA EFEKTIF. Penyedia sistem layanan pembayaran yang sebelumnya disebut Program Jamkesmas saat ini sedang diadaptasi oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS. Analisis potensi efisiensi yang diperoleh dari penguatan sistem pembayaran ini dititikberatkan pada layanan primer dan pembatasan penggunaan yang berlebihan seperti: (I) analisis pembagian pembayaran asuransi untuk layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier yang bisa menjadi informasi tolok ukur peningkatan alokasi layanan kesehatan primer; (ii) analisis tarif rawat inap rumah sakit yang tidak dapat dihindari untuk kasus primer dan kondisi tertentu; (iii) Analisis harga obat-obatan dan pengembalian terkait dengan tolok ukur internasional maupun dari negara-negara tetangga.

REFORMASI AKAN MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DATA BERKUALITAS TINGGI. Keberhasilan dari skema yang ditawarkan bergantung kepada kemampuan untuk mengumpulkan data-data reguler dan tingkatan fasilitas yang relevan (berdasarkan sampel dari keterwakilan fasilitas di tingkat distrik, termasuk fasilitas privat) dan memastikan data-data yang terkumpul mencerminkan pedoman dan norma-norma nasional. Data ini akan membantu menemukan tidak hanya tempat yang mengalami kekurangan, tetapi juga asal kekurangan tersebut. Pengumpulan data harus bersifat independen, dan idealnya terpisah dari adminsitrasi dan pengawasan data yang rutin.

Jika memungkinkan, data juga harus dikumpulkan dari sampel (pasien) yang memperoleh manfaat layanan untuk memastikan penyediaan layanan berlangsung sesuai yang diharapkan dan pasien menerima layanan yang pantas. Terdapat berbagai dimensi terkait dengan penyajian layanan, termasuk kemampuan dan usaha dari penyedianya—pengukuran dimensi ini lebih kompleks terkait penyediaan layanan yang dapat dinilai dan ditingkatkan secara sistematis dan reguler. Hal ini termasuk usaha untuk memastikan bahwa perlengkapan dasar di sebuah fasilitas tidak hanya tersedia, tetapi juga dikalibrasi dan dimanfaatkan dengan baik dan penilaian dibuat untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kemampuan dan motivasi untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi.

SOSIALISASI JANGKAUAN KESEHATAN UNIVERSAL (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE/UHC) YANG LEBIH BAIK KEPADA PEMERINTAH DAERAH, PENERIMA MANFAAT, DAN PENYEDIA LAYANAN. Dalam beberapa kasus tertentu, permasalahan ini bukan terkait dengan sumber daya tambahan, tetapi lebih kepada pengetahuan dan persiapan yang diperlukan untuk pengenalan UHC di antara pemerintah daerah, penerima manfaat, dan berbagai penyedia. Pemerintah dapat memastikan adanya dampak penyediaan yang jelas serta spesifik berdasarkan paket keuntungan JKN, kemudian informasi ini secara efektif disebarkan dan diterima sebagai prioritas operasional. Hal ini akan menutup biaya perlengkapan, pelatihan, diagnosis kemampuan, dan penyediaan obat-obatan di berbagai level pelayanan. Dampak selanjutnya, keterbukaaan dalam penyediaan dan penyerahan uang ketika dibutuhkan. Dalam hal ini, BPJS dapat mempertimbangkan implementasi proses akreditasi yang reguler dan independen untuk fasilitas publik dan swasta.

Meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan kompetensi untuk tenaga kesehatan

SEJUMLAH CARA TELAH DIIDENTIFIKASI UNTUK MENGHADAPI BERAGAM PERMASALAHAN KECUKUPAN DAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN DI MANAPUN[46]. Permasalahan terkait ketidakcukupan tenaga kesehatan berkompetensi , terutama di area yang tidak menguntungkan, telah lama didiskusikan. Bank Dunia (2009) telah menyoroti sembilan langkah untuk meningkatkan hal ini. Hal yang paling penting untuk memastikan kecukupan tenaga kesehatan berkualitas di daerah yang tidak menguntungkan, adalah:

I. Menyediakan informasi yang baik mengenai perubahan tenaga kesehatan di tingkat nasional dan sub-nasional;

II. Membatasi perekrutan dokter yang didanai publik di area perkotaan;

III. Melakukan modernisasi kebijakan mengenai tenaga kesehatan dengan menggunakan evaluasi berbasiskan bukti dari kebijakan sebelumnya; dan

IV. Memperkuat tidak hanya kemampuan klinis dari perawat dan bidan, namun juga kompensasi untuk menyediakan layanan klinik di area-area terpencil.

MENYEDIAKAN INFORMASI YANG BAIK MENGENAI PERUBAHAN TENAGA KESEHATAN DI TINGKAT NASIONAL DAN SUB-NASIONAL. Terdapat sekitar 5.500 lulusan dokter, 34.000 perawat, dan 10.000 bidan setiap tahunnya. Data dari penyedia tenaga kesehatan melaporkan adanya peningkatan kecil setiap tahunnya. Hal ini secara jelas mengindikasikan bahwa informasi saat ini tidak menelusuri secara akurat lokasi bekerja tenaga medis; apakah di sektor publik atau swasta, pedesaan atau perkotaan, siapa yang mereka layani; dan apakah mereka memelihara kemampuan mereka setelah lulus. Sebagai tambahan, informasi yang lebih baik diperlukan untuk kebutuhan administrasi tenaga kesehatan dan kebutuhan ini harus dijadikan prioritas utama bagi agenda penelitan pengembangan Informasi Sumber Daya Manusia di masa mendatang. Saat ini hanya sedikit informasi mengenai gaji dan pendapatan dari tenaga kesehatan, padahal informasi ini dibutuhkan untuk memberikan pemahaman struktur insentif. Perbaikan data merupakan kunci untuk mengetahui seberapa baik pelayanan di area yang sangat membutuhkan, mencocokkan kebutuhan tersebut dengan lulusan baru, serta tingkatan tambahan insentif yang diperlukan.

MEMBATASI PEREKRUTAN DOKTER YANG DIDANAI PUBLIK DI AREA PERKOTAAN. Fakta memperlihatkan lebih banyak dokter yang bekerja di perkotaan karena adanya kesempatan praktik pribadi. Hal yang logis bagi sektor publik bila menekankan penempatan dokter di daerah pedesaan yang belum terlayani untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uang rakyat.

MELAKUKAN MODERNISASI KEBIJAKAN MENGENAI TENAGA KESEHATAN MENGGUNAKAN EVALUASI BERBASISKAN FAKTA DARI KEBIJAKAN SEBELUMNYA. Izin untuk praktik ganda, dampak desentralisasi, skema dokter kontrak (Pegawai Tidak Tetap/PTT), yang merupakan praktik untuk mengontrak dokter dengan paket bayaran tinggi untuk ditempatkan di lokasi terpencil, adalah kebijakan yang tidak memberikan dampak jelas apapun alasannya. Kebijakan ini mencoba berbagai insiatif untuk memotivasi tenaga kesehatan bekerja di daerah terpencil. Negara-negara lain menggunakan sistem poin, seperti Bangladesh dengan pemberian poin lebih tinggi terhadap penempatan di lokasi-lokasi yang lebih menantang. Australia mengusung sistem mengabdi di pedesaan atau daerah terpencil sebagai bagian dari akreditasi dokter nasional (Australia). Di Amerika Serikat, yang memiliki biaya pendidikan kedokteran sangat mahal, subsidi pendidikan kedokteran disediakan dengan syarat harus bekerja di daerah terpencil. Namun walaupun dapat menempatkan tenaga kesehatan di lokasi terpencil, bahkan dengan gaji besar, bukan

[46] Bagian ini mengadung rekomendasi kunci untuk meningkatkan penyediaan tenaga kesehatan dari Bank Dunia (2009).

jaminan bahwa mereka menyediakan pelayanan berkualitas (kecuali bila budaya mementingkan orang lain sangat kuat). Saran untuk menerapkan kompetisi dikemukakan oleh Hammer dan Jack (2001). Namun, hal ini dapat dilakukan jika pasar memungkinkan, dan inipun masih menjadi tanda tanya bagi dokter yang ditempatkan di pedesaan.

MEMPERKUAT TIDAK HANYA KEMAMPUAN KLINIS DARI PERAWAT DAN BIDAN, NAMUN JUGA KOMPENSASI DENGAN MENYEDIAKAN LAYANAN KLINIK DI AREA-AREA TERPENCIL. Pentingnya perawat dan bidan sebagai layanan dasar di masayarakat pedesaan sangat jelas. Berbagai penelitian menunjukkan, di area-area tersebut, perawat dan bidan memiliki tanggung jawab sangat besar bahkan kadang berada di luar cakupan kemampuan mereka tanpa adanya dukungan secara hukum. Meningkatkan kemampuan mereka dan memberikan pengakuan legal praktik mereka akan meningkatkan penyediaan layanan kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil.

SANGAT DIBUTUHKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN TENAGA PERSALINAN TERAMPIL DI TEMPAT YANG MEMADAI, LAYANAN SEBELUM DAN SESUDAH PERSALINAN, IMUNISASI, ASUPAN MIKRONUTRISI BAGI IBU DAN ANAK, SERTA PELAYANAN EFEKTIF TERHADAP DIARE BAGI ORANG MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN. Berikut adalah aktivitas yang harus dilakukan bagi kelompok ini melalui pendidikan, dorongan dan tekanan sosial, atau pemberian insentif

I. Sosialisasi yang lebih baik tentang pentingnya perilaku sehat, termasuk pengajaran terhadap ibu-ibu miskin yang seharusnya didapatkan melalui posyandu dan puskesmas;
II. Memperkuat dan memberdayakan Posyandu;
III. Menjangkau karyawan Puskesmas;
IV. Menjangkau tokoh-tokoh kepercayaan masyarakat, yang dapat menyampaikan pesan tertentu;
V. Menjangkau LSM;
VI. Menjajaki kelompok komunitas dan forum yang mampu mendorong atau memberikan motivasi untuk meningkatkan pemanfaatan kemampuan orang miskin seperti melalui PNPM-Generasi or PNPM-Rural;
VII. Mempertimbangkan insentif melalui PKH atau program bantuan sosial;
VIII. "Perilaku vital" dibutuhkan sebagai persyaratan dari PKH; dan
IX. Rencana perluasan PKH secara bertahap untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan bagi perempuan dari kelompok miskin.

SECARA KHUSUS, DIBUTUHKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME KADER-KADER POSYANDU, MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELATIHAN, INSENTIF BERBASISKAN KINERJA, DAN PENGAWASAN KETAT DARI PUSKESMAS. Kader-kader ini mengunjungi setiap komunitas untuk memastikan ibu hamil menerima layanan pra-kelahiran, mendorong ibu-ibu untuk membawa anaknya imunisasi, memastikan anak-anak yang terjangkit demam mendapatkan diagnosis terkait malaria dan tindakan lain yang dapat mengurangi ancaman penyakit dan biaya tinggi dari perawatan. Untuk kasus kerdil (cebol) dan kurang gizi, kader Posyandu dapat memainkan peran penting melalui Perubahan Komunikasi Tingkah laku/ Behavioral Change Communication (BCC) yang efektif, khususnya lewat konseling personal yang berfokus pada perbaikan perilaku pola asuh ibu serta pola makan bayi dan anak-anak kecil. Seperti yang ditunjukkan di negara-negara lain, kunjungan rumah yang reguler sebagai bentuk dukungan khusus dari penyedia layanan kesehatan, merupakan kunci utama keberhasilan. Rintisan pelatihan untuk Posyandu di bawah PNPM-Generasi juga dapat ditingkatkan lebih jauh lagi.

Peningkatan layanan kesehatan bagi mereka yang sangat membutuhkan

3.1.2

Memastikan seluruh anak mendapatkan awal yang adil melalui pendidikan yang berkualitas

Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua akan memberikan dampak sangat besar terhadap pertumbuhan dan ketimpangan

MEMPERKECIL KESENJANGAN KUALITAS PENDIDIKAN MERUPAKAN HAL YANG LEBIH PENTING UNTUK MENGURANGI KETIMPANGAN DIBANDING TERUS MELANJUTKAN PENINGKATAN AKSES PADA FAKTOR KESENJANGAN. Untuk memastikan seluruh anak mendapatkan awal yang adil di dalam kehidupan melalui pendidikan berkualitas maka akses terhadap pengembangan awal dunia anak-anak (Early Childhood Development/ECD) harus ditingkatkan bagi semua; peningkatan transisi jenjang pendidikan bagi anak-anak miskin yang ada di setiap tingkatan sekolah; dan memperkecil kesenjangan kualitas, meskipun kini kesenjangan terkait akses sudah mengecil. Pengembangan kualitas sekolah hampir pasti mengurangi ketimpangan. Kesenjangan pendaftaran sekolah antara pelajar dari keluarga kaya dan miskin semakin mengecil seiring waktu, tetapi hal ini tidak mencerminkan kontribusi terhadap ketimpangan kesempatan secara keseluruhan karena masih terjadi kesenjangan kualitas. Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan akan membutuhkan pengurangan kesenjangan kualitas.

MENINGKATKAN KUALITAS DARIPADA MENINGKATKAN PENDAFTARAN SEKOLAH JUGA MERUPAKAN FAKTOR PENTING PERTUMBUHAN EKONOMI. OECD 2015 menganalisis dua skenario berbeda: memastikan seluruh pelajar meraih kemampuan dasar pada tahun 2030 (menutup kesenjangan kualitas) dan partisipasi penuh di sekolah sekunder dengan tingkat kualitas pendidikan saat ini (menutup kesenjangan akses). Untuk Indonesia, mereka memperkirakan keuntungan dalam hal pertumbuhan ekonomi akan tujuh kali lebih tinggi apabila kesenjangan kualitas ditutup dibanding dengan menutup kesenjangan akses. Menutup Kesenjangan Akses: membawa seluruh pelajar menuju kemampuan dasar di tahun 2030 (level 2 atau 420 poin) akan menghasilkan GDP akan 62 persen lebih tinggi di tahun 2095, pertumbuhan jangka panjang yang 0,92 persen lebih tinggi dan GDP masa depan terdiskonto yang 14,5 persen lebih tinggi. Menutup kesenjangan akses: partisipasi penuh di sekolah sekunder dengan kualitas saat ini, berarti GDP akan naik 7 persen di tahun 2095, pertumbuhan jangka panjang 0,13 persen lebih tinggi dan GDP masa depan terdiskonto 1,8 persen lebih tinggi. Mendekatkan kedua kesenjangan: 84 persen GDP lebih tinggi di tahun 2095, pertumbuhan jangka panjang 1,16 persen lebih tinggi dan GDP masa depan terdiskonto 19 persen lebih tinggi.

SAMA SEPERTI KUALITAS LAYANAN KESEHATAN, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN UNTUK SEMUA BERARTI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAERAH. Terdapat tiga aksi utama yang dibutuhkan untuk memastikan seluruh anak memiliki awal yang baik:

I. Memastikan mekanisme keuangan yang baik dari pusat dan daerah untuk memberikan sekolah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan;
II. Meningkatkan kompetensi guru di manapun dan memastikan distribusi yang cukup untuk daerah tertinggal; dan
III. Meningkatkan akuntabilitas orang tua melalui informasi yang lebih baik tentang kualitas pendidikan

MEMASTIKAN SELURUH SEKOLAH MEMILIKI KECUKUPAN SUMBER DAYA KEUANGAN BERARTI MENGKAJI ULANG MEKANISME PEMBIAYAAN MELALUI BOS[47]. Mekanisme utama untuk pendanaan setiap tingkatan sekolah di Indonesia dilakukan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tujuan program ini adalah mengurangi beban pembiayaan masyarakat terhadap pendidikan dalam kerangka menyediakan pendidikan wajib sembilan tahun berkualitas baik dan mendukung reformasi manajemen berbasis sekolah (School Based Manajement/SBM). Berbagai tujuan ini dirancang untuk meningkatkan hasil keseluruhan pendidikan melalui tiga kanal kunci: meningkatkan pembiayaan negara terhadap sekolah dan mengurangi beban rumah tangga; dukungan keuangan langsung kepada pelajar miskin; dan menguatkan SBM melalui penetapan aturan dan tanggung jawab sekolah serta masyarakat daerah dalam mengelola BOS.

PENINGKATAN PENDANAAN BOS DIASOSIASIKAN DENGAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA RUMAH TANGGA DAN PENINGKATAN PENDAFTARAN SEKOLAH, KHUSUSNYA BAGI RUMAH TANGGA MISKIN, WALAUPUN TIDAK SEPADAN TERHADAP TINGKATAN PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN. (Bank Dunia 2015g). Nilai riil alokasi dana setiap pelajar telah meningkat sebanyak dua kali lipat sejak pengenalan program ini di tahun 2005. Pada tahun 2014, Program BOS menyediakan dana untuk rata-rata pendidikan primer (SMP) sekitar US$ 10.000 (US$ 20.000). Pendanaan ini terlihat telah mengurangi biaya pendidikan yang harus dihadapi oleh setiap rumah tangga dan meningkatkan laju pendaftaran sekolah. Selanjutnya, pengurangan biaya pendidikan di rumah tangga yang langsung

Meningkatkan kualitas dengan menangani faktor keuangan di daerah tertinggal

[47] Diskusi dan rekomendasi BPS berasal dari Bank Dunia (2014f dan 2015g).

dilakukan begitu Program BOS diluncurkan, relatif berperan lebih besar khususnya bagi 20% keluarga miskin di Indonesia. Walau demikian, pengurangan biaya pendidikan yang dihadapi oleh rumah tangga terlihat relatif kecil dibandingkan dengan jumlah bantuan per pelajar yang diberikan ke sekolah. Analisis ini memang hanya sebagai indikator, namun menunjukkan bahwa kalaupun ada pengurangan biaya pendidikan di rumah tangga secara keseluruhan, angkanya masih relatif kecil dan terjadi hanya di pendidikan primer, dibandingkan dengan bantuan per pelajar yang diberikan kepada sekolah melalui BOS. Pengurangan belanja untuk rumah tangga miskin ekuivalen dengan sekitar 5 persen bantuan BOS di level pendidikan primer dan sekitar 30 persen di level sekunder (SMP). Penggunaan terbatas dana BOS untuk mengurangi biaya yang dihadapi tiap rumah tangga, selanjutnya didukung oleh peningkatan signifikan kebijakan sumber daya yang dimiliki sekolah setelah pengenalan BOS, dana ini seringkali digunakan untuk menyewa guru tambahan.

BANK DUNIA (2014F) MEREOMENDASIKAN BEBERAPA PERBAIKAN UNTUK BOS. Sejumlah rekomendasi, seperti mengaitkan pendanaan BOS secara langsung ke standar pendidikan dan mengkaji hal-hal yang diperbolehkan ketika menggunakan dana BOS sehingga sekolah punya fleksibilitas untuk investasi input demi peningkatan kualitas. Semua ditujukan untuk menajamkan fokus peningkatan kualitas pendidikan. Tiga sasaran untuk memperkuat fokus dana BOS untuk topik kesetaraan dan kemiskinan:

I. Menyesuaikan nilai BOS secara berkala untuk mengakomodasi perbedaan harga di tiap daerah dan inflasi sehingga memastikan semua sekolah bisa memenuhi standar operasional;

II. Menggunakan formula BOS untuk menyediakan tambahan pendanaan untuk sekolah yang melayani anak-anak dari kelompok miskin dan rentan; serta

III. Secara bertahap meninggalkan penggunaan dana BOS untuk membantu ‘pengeluaran langsung’ siswa kelompok miskin dan membantu program yang sudah ada.

MENYESUAIKAN NILAI BOS SECARA BERKALA UNTUK MENGAKOMODASI PERBEDAAN HARGA DI TIAP DAERAH DAN INFLASI SEHINGGA MEMASTIKAN SEMUA SEKOLAH BISA MEMENUHI STANDAR OPERASIONAL. Indonesia merupakan negara yang luas dengan diversifikasi tinggi dan menyediakan nilai pembiayaan yang sama untuk tiap pelajar di area dengan biaya lebih tinggi sangatlah tidak adil. Setidaknya, pertimbangan harus diberikan untuk mengatur formula pembiayaan BOS terkait perbedaan lokasi dan inflasi.

PENGGUNAAN FORMULA BOS DAN DAK UNTUK MENYEDIAKAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN BAGI SEKOLAH YANG MELAYANI ANAK-ANAK KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN. Sekolah yang melayani siswa dari kelompok miskin dan tertinggal membutuhkan dukungan tambahan untuk memastikan sekolah dapat menyedikan kualitas pendidikan yang sama dengan sekolah di daerah lebih baik di Indonesia.

Sebagai tambahan, target dan investasi DAK berbasiskan kinerja yang diterapkan di sektor kesehatan juga dapat diadopsi untuk sektor pendidikan berbasiskan tingkatan tiap daerah dan kesenjangan pendidikan.

SECARA BERTAHAP MENINGGALKAN PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK MEMBANTU ‘PENGELUARAN LANGSUNG’ PELAJAR MISKIN DAN MEMBANTU PROGRAM YANG SUDAH ADA. Panduan yang sekarang ada mengenai BOS mengizinkan sekolah-sekolah untuk menutupi biaya pendidikan bagi rumah tangga miskin. Bagaimanapun, program transfer dana langsung skala besar (seperti Kartu Indonesia Pintar) telah tersedia dan mungkin lebih efektif untuk mendukung pembiayaan ini. Meskipun program-program ini membutuhkan penguatan, seharusnya ada langkah penting untuk mengurangi biaya pendidikan langsung.

PADA SAAT YANG BERSAMAAN, BOSDA DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PELENGKAP BOS DENGAN TUJUAN UNTUK MENCAPAI STANDAR KUALITAS YANG LEBIH TINGGI, SEKALIGUS MENDUKUNG KOMPONEN KESETARAAN DAN KINERJA. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) digunakan sebagai pelengkap dari BOS, bukan sebagai pengganti. Pembiayaan BOS dirancang agar sekolah bisa mencapai standar nasional minimum. Bagaimanapun, sekolah harus berusaha untuk mencapai standar nasional yang lebih tinggi, dan pemerintah daerah dapat menggunakan BOSDA untuk membantu sekolah meraih kualitas yang lebih tinggi. Sebagai tambahan, BOSDA dapat memasukkan komponen kesetaraan dan kinerja. Kesetaraan berfokus untuk meningkatkan pembiayaan di lokasi terpencil dan tertinggal, yang mencerminkan tingginya biaya pelayanan pendidikan. Komponen kinerja harus menyediakan insentif bagi sekolah demi meningkatkan kinerja pelajar. Reformasi pendidikan baru-baru ini di Jakarta berpotensi menjadi contoh pendekatan yang dapat diterapkan.

BOKS 3.2

Reformasi Pendidikan terakhir di DKI Jakarta menunjukkan BOSDA dapat berperan sebagai pelengkap BOS untuk membantu sekolah mencapai standar kualitas yang lebih tinggi, mendukung sekolah di daerah tertinggal, dan mendorong kinerja yang lebih tinggi

Reformasi pendidikan baru-baru ini di Jakarta berpotensi menjadi contoh pendekatan yang dapat diterapkan, mengombinasikan komponen kesetaraan (daripada menggunakan skema pembiayaan yang sama per orang, sekolah di Kepulauan Seribu menerima pendanaan yang lebih karena biaya pendidikannya lebih tinggi) dan komponen insentif (sekolah di posisi empat teratas terkait dengan level dan peningkatan dalam nilai ujian nasional menerima alokasi tambahan di tahun selanjutnya). Sebagai tambahan, dana BOSDA (dikenal sebagai BOP Di Jakarta) digunakan untuk membantu DKI Jakarta meraih standar pendidikan nasional. Pemerintah provinsi menjalankan penelitian terkait sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimum dan standar pendidikan nasional. Ditemukan bahwa kombinasi dana BOS dan BOP hanya tertinggal sedikit dari standar pendidikan nasional (Tabel 3.3), dan sekarang pendanaan BOP diatur agar memastikan sekolah mendapatkan dana yang cukup untuk mencapai standar pendidikan nasional.

Biaya dan pendanaan di DKI Jakarta untuk mencapai berbagai standar pendidikann yang berbeda (IDR '000) (tab. 3.3)

SUMBER Bank Dunia (2014f).

	Perkiraan kebutuhan per-pelajar untuk standar yang berbeda (Rp '000)		Alokasi per-pelajar saat ini (Rp '000)		
	MSS	NES	BOS	BOP	TOTAL
Pendidikan dasar	1,084	1,783	580	720	1,300
Sekolah Menengah Pertama	1,261	2,142	710	1,320	2,030

Meningkatkan kualitas melalui kompetensi tenaga pengajar di manapun, tetapi juga memastikan mereka menjangkau area-area miskin

KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR DI INDONESIA SECARA UMUM MEMBUTUHKAN PENGUATAN SECARA SIGNIFIKAN; DATA DARI INDONESIA DAN DUNIA MENUNJUKKAN TERDAPAT BEBERAPA PILIHAN UNTUK MEMBANGUN TENAGA PENGAJAR YANG EFEKTIF DI INDONESIA. Lebih dari setengah tenaga pengajar di Indonesia tidak mencapai 60 persen tingkat kompetensi di berbagai kemampuan yang dibutuhkan sebagai kompetensi dasar. Sebagai tambahan, terdapat variasi kompetensi tenaga pengajar yang signifikan di berbagai daerah. Bukti dari Indonesia dan secara global memperlihatkan ada beberapa pilihan untuk membangun tenaga pengajar yang efektif di Indonesia yaitu

I. Pra-masa bakti dan penataran: Mungkin sebagian tertarik dengan peningkatan gaji guru, saat ini terdapat 1 juta mahasiswa di akademi pengajaran, sepertiga dari total pendaftaran di universitas, lebih besar dari kebutuhan saat ini. Seleksi yang lebih baik untuk masuk dan keluar (melalui ujian kompetensi) dan akreditasi lembaga dapat membantu memastikan kecukupan ketersediaan guru-guru yang kompeten.

II. Rekrutmen dan penyebaran komponen pengajar, khususnya di daerah tertinggal: Melakukan rekrutmen guru untuk sekolah dengan sistem yang transparan dan berdasarkan kemampuan (merit-based); penguatan program perekrutan dan penyebaran guru-guru yang kompeten di daerah tertinggal dengan mengombinasikan insentif keuangan, skema pengikatan serta penempatan berbasis kelompok.

III. Dukungan dan pengembangan profesional—bayaran yang besar untuk jangka pendek dan menengah. Menguatkan peran dari Kepala Sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan melalui penilaian tahunan; mengembangkan modul ujian pelatihan dan

rencana belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengajar; memberikan dukungan melalui pokja guru bekerjasama dengan kader ahli dari masing-masing wilayah (terbukti berhasil untuk geometri di studi Bank Dunia (yang akan datang b)) dan teknologi komunikasi dan informasi (ICT).

IV. Akuntabilitas para pengajar: Menggunakan penilaian tahunan dan ujian kompetensi untuk menentukan jenjang karir; menggunakan kontrak baru bagi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ditujukan kepada guru baru (termasuk guru honorer yang telah ada); dan mengaitkan perpanjangan kontrak berbasis kinerja.

3.1.3

Revitalisasi keluarga berencana untuk membantu rumah tangga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang diinginkan

RUMAH TANGGA YANG KECIL DAN SEHAT AKAN MEMBANTU MENGURANGI KETIMPANGAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG. Kita telah melihat bahwa pendapatan rumah tangga yang lebih tersebar di keluarga kecil dan rumah tangga miskin akan membantu mengurangi ketidaksetaraan di Indonesia. Namun, ini juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak. Peningkatan jarak kelahiran memberikan kesempatan tubuh sang ibu untuk pulih dan menghasilkan nutrisi, membantu bayi yang lahir mendapatkan berat badan yang sehat. Ini juga berarti perhatian yang lebih dapat diberikan kepada setiap anak, membantu menyiapkan mereka untuk berada pada kondisi yang lebih baik ketika memasuki PAUD. Pengurangan tingkat kehamilan remaja dapat mengurangi tingkat kematian ibu dan anak serta kelahiran bayi dengan berat badan kurang. Anak-anak sehat dari keluarga miskin selanjutnya dapat mengurangi ketimpangan karena mereka memiliki awal yang baik dalam kehidupan.

SEJUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN TELAH DIIDENTIFIKASI UNTUK MEREVITALISASI KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA. Jones dan Adioetomo (2014) mengidentifikasi beberapa strategi untuk merevitalisasi keluarga berencana yaitu: membantu sektor swasta memenuhi kebutuhan penggunanya, yang merupakan 73 persen dari populasi; menguatkan ketersediaan rantai jaringan kontrasepsi; membantu BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk melayani keluarga miskin dengan lebih baik ketika biaya alat kontrasepsi menjadi sebuah hambatan; menghidupkan kembali program Post-Partum BKKBN, pasca-aborsi, dan perencanaan tempat kerja berbasis keluarga; memfasilitasi kerjasama antara BKKBN, lembaga kesehatan daerah, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program keluarga berencana; menerapkan strategi yang berfokus kepada tenaga persalinan (bidan) untuk memastikan ketersediaan layanan keluarga berencana yang efektif dan berkualitas; menggalakkan program

komunikasi melalui BKKBN dengan dukungan dari institusi pemerintah daerah, tempat kerja, dan sekolah untuk membantu menyebarkan pesan pernikahan pada usia yang lebih dewasa; dan meningkatkan kesehatan reproduksi bagi mereka yang belum menikah melalui program komunikasi dan penyediaan layanan.

DARI HAL-HAL TERSEBUT, PEMFOKUSAN TERHADAP RUMAH TANGGA KECIL DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN SERTA TINGKAT KESUBURAN PADA KELOMPOK MISKIN AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI PALING BESAR UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN. Kebijakan-kebijakan terpenting untuk melindungi rumah tangga miskin yang memiliki anak-anak sehat dan jumlah yang lebih kecil, adalah:

I. Menciptakan permintaan di keluarga miskin terkait dengan berbagai program BKKBN;
II. BKKBN lebih memusatkan perhatian terhadap kebutuhan keluarga berencana bagi kelompok rumah tangga miskin;
III. Mendukung penundaan pernikahan; dan
IV. Pembiayaan untuk program keluarga berencana.

PERMINTAAN YANG LEBIH BESAR TERKAIT KELUARGA BERENCANA DI ANTARA KELOMPOK ORANG MISKIN DAPAT DICAPAI MELALUI REVITALISASI PROGRAM KOMUNIKASI BKKBN[48]. Hal ini termasuk program Perubahan Tingkah Laku Komunikasi (Behavior Communication Change /BCC) dan Informasi tentang Pendidikan dan Komunikasi (Information Education and Communication/IEC) yang akan membantu kelompok rumah tangga miskin memahami keuntungan memiliki keluarga kecil, melalui pesan-pesan kunci seperti: tingkat kesehatan yang lebih baik bagi ibu dan anak; kemampuan finansial yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dan investasi yang lebih besar bagi pendidikan mereka; kesejahteraan antar-generasi; serta pengurangan kemiskinan dan kerentanan.

USAHA YANG LEBIH BESAR DIBUTUHKAN UNTUK MENGATASI KEBUTUHAN ALAT KONTRASEPSI YANG BELUM TERPENUHI BAGI PASANGAN DARI EKONOMI LEMAH. Sebagai tambahan untuk mengomunikasikan kegunaan alat kontrasepsi dilakukan pendekatan siklus kehidupan (jarak dan pembatasan), termasuk: memastikan seluruh informasi dan layanan terkait dengan tersedianya akses terhadap layanan metode jangka panjang (khusunya untuk pembatasan); menyediakan jumlah bidan yang memenuhi kualifikasi untuk memasukkan IUD dan implan; mengurangi efek samping dari masalah kesehatan terkait dampak dari alat kontrasepsi melalui konseling efektif dan meningkatkan ketersediaan konselor terlatih.

MENDUKUNG PENUNDAAN PERNIKAHAN JUGA MENGUNTUNGKAN RUMAH TANGGA MISKIN SECARA DISPROPORSIONAL. Karena pernikahan dini lebih cenderung terjadi di rumah tangga miskin, mengurangi pola ini merupakan langkah penting. Terdapat empat aksi terkait hal ini yaitu: dukungan politisi, pegawai, tokoh agama dan pemimpin komunitas mengenai manfaat dari penundaan pernikahan, serta mendorong komitmen pemerintah daerah untuk melawan pernikahan bawah umur; menegakkan usia minimum pernikahan pada angka 16 tahun untuk perempuan; menegakkan peraturan masa sekolah anak (saat ini 9 tahun dan sedang dipertimbangkan untuk ditingkatkan menjadi 12 tahun), memfasilitasi rumah tangga miskin melalui pemberian beasiswa yang terencana; sosialisasi program IEC bagi orangtua dan anak-anak mengenai manfaat penundaan pernikahan.

TERAKHIR, KARENA RUMAH TANGGA MISKIN KURANG DAPAT MENGAKSES LAYANAN SEKTOR SWASTA, MAKA PEMBIAYAAN YANG CUKUP UNTUK PROGRAM KELUARGA BERENCANA MENJADI PENTING. Dengan anggaran keluarga berencana yang sekarang menjadi hak prerogatif pemerintah daerah, persetujuan antara BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembiayaan sangat diperlukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPD-KB) membutuhkan bantuan teknis dan rencana program untuk diterapkan lebih banyak wilayah daerah melalui peraturan yang telah ada. DAK keluarga berencana (Dana Alokasi Khusus, untuk program prioritas nasional) harus mengurangi pembangunan infrastruktur dan lebih fokus pada upaya pengurangan beban operasional, seperti pelatihan bidan dan ketersediaan alat kontrasepsi.

EFEKTIVITAS DARI KEBIJAKAN INI AKAN BERGANTUNG KEPADA IMPLEMENTASI. Banyak dari rekomendasi kunci yang diutarakan Jones dan Adioetomo telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dari Bappenas. Sekarang dibutuhkan ketegasan mengimplementasikannya secara efektif untuk memastikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan berhasil mengurangi setengah dari jumlah anggota keluarga miskin di Indonesia.

[48] Setiap rekomendasi dikutip dari Jones dan Adioetomo (2014).

PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA DAN PENYEDIAAN PEKERJAAN PRODUKTIF

Dampak peningkatan pelayanan publik akan dirasakan dalam jangka panjang. Di jangka pendek, masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja saat ini dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih produktif dan perlindungan lebih baik.

3.2 Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan

3.2.1

MEMBUAT LAPANGAN PEKERJAAN YANG LEBIH FORMAL BAGI PEMULA DAN PEKERJAAN SEMI-TERAMPIL BAGI BANYAK PEKERJA DI SEKTOR KURANG PRODUKTIF DAPAT MEMBANTU MENGATASI KETIMPANGAN MELALUI PENDAPATAN YANG LEBIH TINGGI. Kebanyakan tenaga kerja sekarang ini tidak mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi (serta mendapatkan bayaran tinggi), bahkan dengan pelatihan pasca-sekolah dan ketika bekerja (on-the-job). Namun, tidak seharusnya mereka menghabiskan seluruh waktu di area yang kurang produktif dengan bayaran rendah. Jika ada lebih banyak pekerjaan semi-terampil, untuk pemula dan sektor formal, maka jutaan pekerja informal dan lepas bisa menjadi lebih produktif. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pekerja pun mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi sehingga mengurangi ketimpangan.

TERDAPAT LIMA FAKTOR UTAMA UNTUK MENGHILANGKAN HAMBATAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA SEPERTI KURANGNYA INVESTASI DI SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN DALAM BERBISNIS. Lima faktor utama tersebut adalah: (I) meningkatkan infrastruktur, konektivitas, logistik, transportasi yang efisien; (ii) mengurangi waktu dan prosedur untuk memulai dan menjalankan bisnis; (iii) meningkatkan akses terhadap keuangan untuk menghasilkan bisnis yang produktif dan kuat; (iv) merevitalisasi sektor manufaktur; dan (v) memodernisasi sektor pertanian. Infrastruktur sebagai area yang penting, akan dibahas di bagian kebijakan fiskal, sedangkan akses terkait dengan keuangan, revitalisasi sektor manufaktur, dan modernisasi sektor pertanian, didiskusikan di Bank Dunia (2014c). Berdasarkan kesimpulan Bank Dunia (2015d), bagian berikut ini akan fokus pada pengurangan waktu dan kompleksitas dalam memulai bisnis.

Mempermudah pembukaan bisnis baru & mendapatkan izin

USAHA-USAHA SEBELUMNYA UNTUK MEMPERBAIKI PROSES LISENSI BISNIS DAN MENGEMBANGKAN LAYANAN SATU PINTU GUNA MENDAPATKAN LISENSI, BELUM MEMBERIKAN HASIL. Namun dengan adanya pemerintahan baru, lisensi bisnis kembali menjadi salah satu agenda utama yang akan direformasi. Pada pemerintahan sebelumnya, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan dan memudahkan proses aplikasi lisensi di tingkat nasional dan daerah, tetapi hasil yang diberikan tidak memuaskan (lihat Bank Dunia 2015d). Kunci kegagalan ini adalah lambatnya proses pembentukan layanan satu pintu bagi investor yang ingin mengajukan izin, pembentukan organisasi yang lebih sederhana dan antar lembaga, atau menyederhanakan proses pengajuan lisensi menjadi lebih mudah dan menarik: Layanan Satu Pintu (One Stop Service/OSS) di tingkat nasional dengan proses aplikasi lisensi dan prosedur sedehana untuk mempercepat

pengeluaran lisensi. Pemerintahan yang baru berkomitmen meningkatkan iklim bisnis, mempermudah segala perizinan dengan biaya yang lebih murah sehingga perusahaan dapat memperoleh lisensi dengan cepat, termasuk layanan satu pintu (OSS). Tujuannya agar mempermudah investor dalam memperoleh izin, hanya dengan mengunjungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membuat aplikasi pengajuan izin bisnis di level nasional, ketimbang mengunjungi berbagai kementerian untuk mengajukan hal yang sama. Hasil yang diinginkan adalah kecepatan dan kesederhanaan dalam mendapatkan izin serta proses yang transparan dan terintegrasi. Presiden juga telah mengumumkan bahwa Ia bermaksud untuk menekan gubernur dan kepala daerah dalam mengimplementasikan layanan satu pintu yang efektif di tingkat daerah, dan akan terdapat 'hukuman' dari segi transfer anggaran bagi mereka yang gagal mengimplementasikannya (Bank Dunia 2015d).

MOMENTUM REFORMASI SAAT INI SUDAH CUKUP KUAT. BKPM telah memulai mereformasi layanannya untuk mencapai berbagai target ambisius. Pemetaan awal prosedur pengajuan lisensi bisnis untuk beberapa sektor dan identifikasi terhadap area yang berpotensi untuk direformasi telah dilakukan, dan aplikasi secara online juga telah diterapkan, walaupun hanya melalui beberapa kali uji coba (pilot project) sehingga sektor swasta dapat lebih familier dengan proses baru ini. Untuk mempersiapkan peluncuran Layanan Satu Pintu di tahun 2015, BKPM bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai empat tujuan utama: (i) pengembangan dan penerbitan keputusan menteri mengenai delegasi kewenangan untuk BKPM dan penugasan staf dari kementerian dan lembaga ke dalam Layanan Satu Pintu (OSS); (ii) pengembangan dan penerbitan peraturan menteri mengenai standar operasional prosedur untuk seluruh proses lisensi yang ada di bawah Layanan Satu Pintu; (iii) pembentukan organisasi dari Layanan Satu Pintu; dan (iv) pendekatan kepada sektor swasta terkait dengan proses reformasi lisensi bisnis. Sebagai hasilnya, BKPM sekarang menyediakan satu lokasi yang dapat didatangi investor untuk mengajukan berbagai izin di tingkat nasional. Walapun ini merupakan langkah maju yang signifikan, berbagai hambatan masih ada dan harus diselesaikan sebelum tujuan utamanya dapat tercapai yaitu proses linsensi bisnis yang terintegrasi.

NAMUN, TERDAPAT PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI DARI APLIKASI LISENSI BISNIS SECARA ONLINE. Setelah peluncuran Layanan Satu Pintu, beberapa permasalahan terkait implementasi ini telah berhasil diidentifikasi. Investor menyatakan sistem aplikasi online masih belum bisa diandalkan dan tidak cukup mudah digunakan, sehingga kebanyakan dari mereka tetap mengunjungi kantor Layanan Satu Pintu untuk berkonsultasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan sistem ICT serta kapasitas BKPM untuk mendukung secara penuh proses perizinan yang terintegrasi. Sebagai tambahan, pengajuan izin yang diproses oleh kementerian dan lembaga terkait sudah dihilangkan setelah adanya Layanan Satu Pintu di bulan Januari. Tetapi, faktanya, banyak dari investor tetap terus mengajukan aplikasi izinnya langsung kepada kementerian dan lembaga terkait, atau menunda pengajuan perizinannya, karena masih kurang familier dengan sistem dan cara kerja Layanan Satu Pintu.

MENCAPAI PROSES LISENSI YANG TERINTEGRASI AKAN MEMBUTUHKAN RENCANA REFORMASI YANG KREDIBEL DAN SUMBER DAYA YANG CUKUP. Layanan Satu Pintu saat ini sesungguhnya belum terintegrasi. Sebagai contoh, investor masih harus mengunjungi satu per satu meja di BKPM untuk mendapatkan setiap perizinan dan mengajukan izin lainnya, dan BKPM hanya memproses sekitar 300 perizinan bisnis dari sekitar 1.2000 perizinan yang diajukan. Rancangan dan implementasi dari reformasi lisensi bisnis akan membutuhkan sumber daya yang besar dan koordinasi yang kuat antar berbagai lembaga di level nasional dan daerah. Satuan tugas khusus telah dibentuk untuk melaksanakan program ini dan telah mengidentifikasi berbagai area yang membutuhkan perbaikan (seperti izin terkait perhutanan dan penggunaan lahan, serta kebutuhan lingkungan). BKPM merencanakan simplifikasi pengajuan perizinan untuk mengurangi berbagai tahapan dan efisiensi waktu di semua perizinan, khususnya sektor-sektor prioritas, seperti kelistrikan, manufaktur padat karya, pertanian dan sektor kelautan. Fase kedua dari implementasi sistem Layanan Satu Pintu akan masuk ke dalam sektor-sektor lainnya yang berada di tingkat nasional dan daerah yang akan dimulai tahun ini.

BKPM AKAN MEMBUTUHKAN TAMBAHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN RANCANGAN REFORMASI ORGANISASI, HAL TERPENTING LAINNYA KOMITMEN TINGKAT TINGGI SERTA PENGELOLAAN RISIKO SAAT IMPLEMENTASI. Proses pengajuan lisensi bisnis baru akan membutuhkan perubahan organisasi yang signifikan. Saat ini beberapa staf dari kementerian terkait dan lembaga hanya ditugaskan temporer di kantor OSS pusat di BKPM, rancangan organisasi BKPM dan isu sumber daya manusia membutuhkan perhatian serius agar bisa keberlanjutan. Pencapaian target ambisius dan implementasi proses peraturan yang baru secara sistematis dan berkelanjutan di BKPM maupun lintas kementerian dan lembaga, akan sangat menantang. Kesulitan dalam melakukan implementasi dan penundaan akan dapat terlihat secara cepat, sehingga pemerintah perlu memproyeksikan berbagai risiko terkait dengan rencana reformasi. Dukungan dari segenap jajaran di kementerian dan departemen terkait dapat dicapai dan dipertahankan melalui penerapan strategi reformasi serta perbaikan proses.

3.2.2

Meningkatkan perlindungan bagi pekerja berpendapatan rendah dan rentan[49]

SPERATURAN YANG KUAT MENGENAI BURUH HANYA MEMBERIKAN SEDIKIT PERLINDUNGAN BAGI PARA PEKERJA KARENA PERATURAN TERSEBUT TIDAK SEPENUHNYA DIPATUHI, DAN BERUJUNG PADA KERUGIAN BAGI SEMUA PIHAK. Dengan tingkat pembayaran pesangon penuh hanya berkisar 7 persen (Bagan 3.8) dan tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap upah minimum, bahkan bagi pekerja formal yang berpenghasilan lebih tinggi (Bagan 3.9), peraturan saat ini menghambat penciptaan lapangan pekerjaan dan perpindahan pekerjaan serta gagal memberikan perlindungan bagi kebanyakan pekerja.

PERUBAHAN BARU-BARU INI TERKAIT PENENTUAN UPAH MINIMUM MENJADIKAN PROSESNYA LEBIH MUDAH DAN LEBIH PASTI, TETAPI MEKANISMENYA TETAP PERLU DIUJI COBA. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan No. 78/2015 yang memperkenalkan formula baru untuk mengatur upah minimum setiap tahun yang dikaitkan dengan inflasi dan pertumbuhan GDP. Walaupun hal ini merupakan kemajuan karena membantu menyederhanakan penghitungan serta membuat mekanismenya lebih mudah diprediksi, namun masih terdapat ketidakpastian sehingga kemungkinan diperlukan pengaturan tertentu dari gubernur di berbagai provinsi. Proses baru ini masih belum diuji coba dan berpotensi menghasilkan konflik kepentingan dan skenario 'kalah-kalah' sehingga tidak kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Secara umum, negosiasi bipartit terlalu terpolarisasi terhadap upah minimum dan tidak mendiskusikan masalah pelatihan dan produktivitas, kesepakatan kolektif hasil tawar-menawar bukanlah hal yang umum, sementara upah bagi pekerja miskin sebenarnya masih tidak banyak berubah.

WALAUPUN PENENTUAN RANCANGAN UPAH MINIMUM TELAH MEREFORMASI SEMUA DIMENSI PERATURAN, NAMUN PERATURAN TENAGA KERJA YANG STRATEGIS SECARA POLITIK AKAN MEMBUTUHKAN "TAWAR-MENAWAR BESAR" ANTARA PEKERJA, SERIKAT BURUH, DAN PEMERINTAH. Reformasi yang bersifat individual tidak akan mendapatkan dukungan politik karena sensitif dan menghasilkan regulasi yang kurang menguntungkan. Oleh karenanya, reformasi yang efektif hanya bisa dilaksanakan dengan perubahan peraturan secara total yang menguntungkan semua pihak. Dialog sosial yang luas dan berdasarkan bukti harus dilakukan, sehingga 'tawaran-menawar besar' terkait peraturan perburuhan dan perlindungan pekerja dapat diimplementasikan dan situasinya berganti dari 'kalah-kalah' menjadi 'menang-menang'. Perlindungan dan peraturan harus diperbaiki bagi seluruh pekerja, bukan hanya sekelompok kecil pekerja formal.

Penerimaan pembayaran pesangon buruh yang dilaporkan oleh buruh (persen) (bag. 3.10)

SUMBER Sakernas

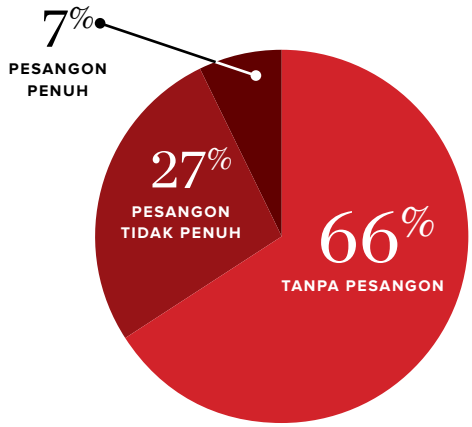

Pekerja yang menerima pembayaran kurang dari upah minimum berdasarkan kuantil konsumsi (persen) (bag. 3.11)

SUMBER Sakernas.
CATATAN Prediksi konsumsi kuintil perkapita

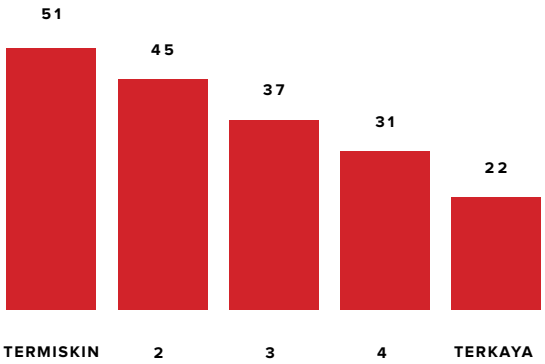

[49] Bank Dunia (2014c) menyediakan diskusi yang rinci (yang disarikan di dalam bagian ini) mengenai peraturan mengenai perburuhan Indonesia yang tegas, sehingga memberikan biaya besar terhadap perusahaan dan menghambat perekrutan formal dan pertumbuhan produktivitas (halaman 115-118)

3.2.3

Mereformasi sistem pelatihan keterampilan untuk mempermudah tenaga kerja mengakses lapangan pekerjaan

UNTUK MENDAPATKAN AKSES TERHADAP PEKERJAAN YANG PRODUKTIF, KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN HARUS MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEREKA. Sistem pelatihan keterampilan di Indonesia saat ini menjadi dasar dari sistem pengembangan kemampuan yang efektif: standar kompetensi, pelatihan berdasarkan kemampuan, sertifikasi, akreditasi, dan informasi mengenai pasar lapangan pekerjaan. Namun, sistem saat ini tidak berfungsi dengan baik karena berbagai elemennya tidak diimplementasikan dengan benar. Sebagai tambahan, seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, keterlibatan sektor swasta dalam program pelatihan sangatlah kecil, dan kebanyakan program dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan reformasi komprehensif dan bertahap untuk membangun elemen yang telah ada dan meningkatkan implementasi dari sistem pelatihan keterampilan.

SISTEM PELATIHAN KETERAMPILAN HARUS DIDORONG DARI KEINGINAN PARA PEMBERI KERJA SEHINGGA PERANAN SEKTOR SWASTA MENJADI LEBIH KUAT. Karena pemberi kerja adalah kelompok terbaik untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, dan akan mendapatkan manfaat paling besar dari sistem pelatihan yang ditujukan khusus untuk kebutuhan tersebut, mereka harus menjadi pendorong utama pengembangan standar kompetensi. Pemberi kerja juga harus menggunakan fasilitas dan keahlian mereka untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam persyaratan pelatihan dan sertifikasi profesi.

PEMERINTAH HARUS MEMAINKAN PERAN LEBIH KUAT UNTUK MENJAGA KUALITAS DAN PENENTUAN INSENTIF BAGI SEKTOR SWASTA. Walaupun para pemberi kerja harus memainkan peran yang kuat di dalam sistem, peran pemerintah juga sama pentingnya sebagai regulator dan fasilitator serta penyandang dana dari berbagai aktivitas pelatihan. Peran utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan seluruh elemen yang dibutuhkan untuk pelatihan yang efektif. Terdapat dua elemen utama untuk pasar lapangan kerja yaitu: (i) ketersediaan informasi (seperti sistem jaminan mutu); dan (ii) rancangan insentif yang tepat (seperti melalui pembiayaan dari pelatihan keterampilan).

PENINGKATAN ANGGARAN SEKTOR SWASTA DAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN PEMERINTAH MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA KEPADA KELOMPOK RENTAN. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kontribusi dari perusahaan terhadap keseluruhan biaya pelatihan, sama halnya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja terampil dan produktif. Jika hal ini terjadi, sumber daya pemerintah dapat digunakan secara strategis untuk memberikan subsidi dan insentif di sektor pelatihan kepada kelompok rentan, seperti orang miskin, perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas.

ELEMEN REFORMASI LAINNYA DAPAT DISESUAIKAN UNTUK LEBIH MEMBERIKAN PERHATIAN KEPADA KELOMPOK RENTAN. Sistem pelatihan harus mudah diakses oleh seluruh provinsi di Indonesia dan semua lapisan masyarakat. Sistem yang lebih besar dan menyeluruh memungkinkan penentuan target yang lebih baik untuk sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkan dan memastikan aktivitas ekonomi daerah didukung oleh sisterm pelatihan ini. Program pelatihan yang spesifik dapat juga dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pekerja yang spesifik, seperti penyandang disablitas. Ekspansi sistem pelatihan secara regional dan mengikutsertakan kelompok rentan dapat berkontribusi besar terhadap pengurangan ketimpangan.

3.3 PERLINDUNGAN EFEKTIF DARI GUNCANGAN

MELINDUNGI SELURUH RUMAH TANGGA DARI BERBAGAI GONCANGAN MEMBUTUHKAN TINDAKAN DARI BERBAGAI SEKTOR. Rumah tangga menghadapi goncangan dari berbagai sumber. Berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk menghadapi goncangan ini telah dibahas di mana-mana.[50] Selain memastikan layanan kesehatan yang cukup, khususnya di daerah-daerah miskin (seperti yang telah dibahas di bagian 3.1.1), dokumen ini akan memfokuskan kajian kebijakan yang berpotensi memberikan dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan melalui perlindungan rumah tangga miskin dan rentan:

I. Menangani harga beras yang tidak stabil;
II. Memperkuat perlindungan sosial; dan
III. Membangun sistem pengawasan dan respon krisis yang permanen.

3.3.1

Menangani harga beras yang tidak stabil

TERDAPAT BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG DAPAT MEMPROMOSIKAN STABILITAS UNTUK MENCEGAH TERJADINYA GONCANGAN[51]. Salah satu area penting yang memengaruhi kehidupan kelompok miskin adalah harga bahan makanan, khususnya beras.[52] Keluarga miskin dan rentan sangat terpengaruh oleh peningkatan harga beras, terlebih kebutuhan bahan makanan merupakan 65% dari pembelanjaan konsumsi keluarga miskin (Bank Dunia yang akan datang) (a). Mereka secara khusus rentan terhadap kenaikan harga beras. Rumah tangga miskin menghabiskan 25% pendapatan mereka hanya untuk beras, dan rumah tangga miskin lainnya yang memproduksi beras sendiri biasanya merupakan konsumen juga, yang berarti harga beras yang tinggi lebih menyulitkan mereka ketimbang membantu mereka. Perlambatan produksi beras dan larangan impor menjadikan harga beras domestik lebih tinggi dari harga internasional yang berdampak secara langsung terhadap orang miskin; ketika harga beras meningkat pada tahun 2005-2006, jumlah orang miskin meningkat sebesar 2 persen.

PRODUKSI BERAS NASIONAL TELAH MELAMBAT DALAM SATU DEKADE TERAKHIR KARENA BERBAGAI ALASAN, TERMASUK LAMBATNYA MEKANISASI, JUGA BURUKNYA JARINGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR. Jumlah total pertumbuhan produksi beras di Indonesia telah melambat dari kisaran 4,3 dan 5,4 persen per tahun di tahun 1960-an hingga 1980-an menjadi 2,5 persen di tahun 1990-an dan tahun 2000-an.[53] Faktor yang menghambat produktivitas, seperti teknologi informasi yang rendah (adopsi hal tersebut membutuhkan bibit berkualitas tinggi), minimnya penelitian pertanian dan pembelanjaan yang besar serta hambatan dalam administrasi lahan (menghambat proses kepemilikan tanah yang diperlukan sebagai jaminan pinjaman). Infrastruktur yang buruk (irgasi, sumber daya air, akses jalan ke pasar) dan biaya logistik yang tinggi akan semakin menambah beban pasar beras di Indonesia.

PENINGKATAN PEMBELANJAAN UMUM DI SEKTOR PERTANIAN TELAH GAGAL MENDORONG PRODUKSI. Pembelanjaan di

[50] Bank Dunia 2014c (mengatasi bencana alam; lihat juga Jha dan Stanton-Geddes 2012) dan Bank Dunia (2014a) Laporan Ekonomi Indonesia per Kuartal, Desember 2014 (Membangun Sistem Asuransi Sosial yang Efektif)
[51] Fokus yang terus berlangsung di sektor manajemen makro-fiskal merupakan kunci untuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi: keberlangsungan fiskal dan keseimbangan sektor eksternal; kebutuhan untuk menghindari ketidakstabilan siklus; dan memperkaya kepastian kebijakan dan kredibilitas untuk mendukung investasi. Ini juga dibutuhkan untuk membantu perlindungan orang miskin. Tanpa akses terhadap instrumen keuangan untuk mengatur risiko harga, inflasi berperan sebagai pajak bagi orang miskin. Pembahasan lebih rinci lihat (Bank Dunia (2014c).
[52] Untuk diskusi yang lebih rinci terkait harga beras di Indonesia, dampak terhadap orang miskin dan rentan (termasuk petani padi), dan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan ini dan hal-hal yang dapat dilakukan, lihat Bank Dunia (2015d) yang disarikan di dalam bagian ini.
[53] Namun, data yang terbatas terkait produksi dan konsumsi beras secara langsung berdampak pada analisis yang tepat serta kebjkan yang diputuskan. Lihat Bank Dunia (2015d).

sektor pertanian telah meningkat secara signifikan, tetapi alokasinya belum efektif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan domestik. Perbandingan dari pembelanjaan pertanian publik terhadap pertanian di GDP meningkat dari 9 persen di tahun 1970-1980 menjadi 35 persen di tahun 2009 dan bagi hasil pertanian dari anggaran juga meningkat dari 3 persen di 2001 menjadi 6 persen di 2008. Tetapi, peningkatan ini tidak menghasilkan peningkatan yang sama di produksi pertanian, hanya rata-rata 3 persen antara tahun 2001 dan 2009 (Armas, et al. 2010). Lemahnya dampak pembelanjaan terhadap produktivitas dapat dikaitkan dengan alokasi pembelanjaan yang kurang tepat; subsidi pertanian di sektor swasta seperti pupuk meningkat empat kali lipat antara tahun 2001 dan 2009, walaupun pembiayaan publik terhadap irigasi cenderung tetap. Penelitian di Indonesia telah memperlihatkan pembelanjaan barang publik seperti irigasi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan GDP per kapita di sektor pertanian, walaupun pembelanjaan untuk subsidi pupuk memiliki dampak negatif (Armas, et al. 2010).

DI SISI LAIN, KEBIJAKAN STABILISASI HARGA CENDERUNG TIDAK EFEKTIF, BAHKAN BERKONTRIBUSI DALAM MENCIPTAKAN MASALAH. Ketika produktivitas pertanian dan konektivitas merupakan faktor jangka panjang dari harga beras, pemerintah menggunakan berbagai mekanisme berjangka pendek untuk melakukan stabilisasi harga, termasuk Operasi Pasar (OP) dan impor beras, keduanya dikendalikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). OP merupakan mekanisme stabilisasi harga yang utama, selagi Bulog memiliki peraturan impor berbasis monopoli. Namun, kedua mekanisme tersebut tidak memiliki dampak signifikan untuk menstabilkan harga. OP, impor beras, dan Raskin (beras miskin/subsidi utama untuk beras sebagai program bantuan sosial) secara langsung hanya berdampak kecil terhadap total produksi beras. Jumlah OP yang kecil, kurang dari 1 persen total produksi beras, dapat menjelaskan mengapa mekanisme ini tidak memiliki dampak signifikan untuk mengurangi harga beras. (Kusumaningrum, et al. 2015). Sebaliknya, walaupun OP, Raskin, dan volume impor relatif kecil, ketiga hal ini akan berkontribusi terhadap volatilitas harga beras ketika jumlah cadangan diprediksikan rendah, seperti yang terjadi pada Februari 2015; penjual membatasi aktifitas penjualannya, menunggu mekanisme yang membuat harga beras kembali stabil. Informasi yang simpang-siur terkait produksi, konsumsi, dan persediaan, dikombinasikan dengan operasi pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap ketersediaan beras yang sebenarnya, sehingga cenderung membuat pasar mengeluarkan spekulasi jangka pendek.

KETAHANAN BERAS YANG EFEKTIF MEMBUTUHKAN INFORMASI LEBIH BAIK SEHINGGA SIAP UNTUK MENGHADAPI BERBAGAI HAMBATAN DARI PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS. Beras merupakan makanan utama di Indonesia dan pasar internasional untuk beras sangatlah kecil (hanya 6 sampai 7 persen dari total produksi beras global dijual secara internasional).[54] Berdasarkan konteks ini, fokus untuk mengamankan ketersediaan beras di Indonesia dan di manapun, merupakan hal yang tepat. Namun, berbagai pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait beras saat ini dan impelementasinya memiliki efektivitas yang terbatas untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu melindungi keluarga miskin dan petani. Berbagai kebijakan yang memiliki dampak menaikkan harga beras juga meningkatkan kemiskinan dan menghambat pasar beras nasional, termasuk mendorong impor ilegal yang menghasilkan tekanan inflasi luas. Ketika operasi pasar memiliki peran untuk menjaga volatilitas harga, intervensi harus dilakukan secara reguler, sesuai aturan, dan memiliki target yang tepat. Dibutuhkan sistem peringatan dini yang efektif dan informasi terbarukan mengenai harga, ketersediaan, dan arus beras. Untuk jangka panjang, pencapaian peningkatan yang berkelanjutan di sektor ketahanan beras akan meningkatkan produktivitas jangka panjang, dan perbaikan struktural di sektor pertanian.

[54] Bank Dunia 2012, "Using Trade Policy to Overcome Food Insecurity," in Food Prices, Nutrition, and the Millennium Development Goals, tersedia online, halaman.119.

3.3.2

Memperkuat perlindungan sosial

PERLINDUNGAN SOSIAL YANG LEBIH BAIK AKAN MEMBUTUHKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KUAT. Sistem perlindungan sosial tidak hanya mendorong transformasi ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan dengan mencegah kemiskinan di masa tua bagi pekerja yang sudah pensiun sekaligus melindungi lapangan pekerjaan dari guncangan bagi pekerja yang masih aktif. Hal ini juga akan memberikan akses universal terhadap kesehatan, membantu seluruh rumah tangga, mencegah atau mengatasi guncangan kesehatan, termasuk subsidi pemerintah untuk kelompok miskin dan rumah tangga rentan.

HAL INI BERARTI EKPANSI ASURANSI SOSIAL YANG AKAN DATANG HARUS DIRANCANG DAN DIIMPLEMENTASIKAN SECARA EFEKTIF DAN BERKELANJUTAN[55]. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) secara legal memiliki mandat terhadap kesehatan (2014) dan pekerja (2015) di bawah Undang-Undang SJSN.[56] Untuk dapat efektif dan berkelanjutan, sistem ini membutuhkan tingkat keuntungan yang sesuai, pengelolan risiko keuangan, dan pengembangan institusi serta manajemen yang baik, termasuk pemberian talangan untuk keluarga miskin dan rentan, sekaligus menarik biaya kontribusi dari kelompok keluarga yang mampu membayar. Karena kebanyakan orang miskin dan rentan bekerja sebagai tenaga kerja yang tidak menerima gaji tetap, maka penting untuk memperluas program SJSN terhadap kelompok ini. Untuk program kesehatan, program ini memiliki fokus jelas, karena orang miskin dibiayai oleh pemerintah. Hal ini termasuk juga fokus terhadap orang miskin yang tidak terjangkau karena kesalahan penentuan target. Untuk program pemberian kerja, Pemerintah harus secara penuh atau sebagian memberikan subsidi terhadap kontribusi dari empat program bagi mereka yang tidak mampu membayar. Hal ini diperbolehkan tetapi tidak diharuskan oleh UU SJSN. Terdapat juga permasalahan mengenai penyediaan ketahanan pendapatan terhadap pekerja yang tidak memiliki gaji tetap ketika mereka pensiun. Program pensiun dari SJSN hanya mencakup pekerja yang memiliki gaji tetap, namun bagaimana dengan yang lainnya? Hal ini dapat dijalankan melalui bantuan sosial atau program pendapatan minimum, lewat dana pensiun sosial dalam bentuk lebih umum dan telah diuji, atau bentuk lainnya. Bagaimanapun, SJSN merupakan komponen kunci untuk peningkatan kesetaraan masyarakat dengan menyediakan kepastian sebagai bentuk perlindungan terhadap guncangan finansial dan pendapatan ketika pekerja keluar dari pekerjaan, sekaligus juga perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi kematian. Permasalahan ini tidak hanya untuk orang miskin, tetapi juga bagi masyarakat yang berada di posisi lebih baik, yang dapat lebih rentan terdampak guncangan finansial, khususnya guncangan kesehatan di luar perkiraan.

KEPEMIMPINAN YANG KUAT DIBUTUHKAN UNTUK LANGKAH IMPLEMENTASI. Karena jumlah pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan beraneka ragam, maka terdapat dampak signifikan dari program-program ini terhadap struktur sosial dari sebuah negara, serta dampak potensial terhadap anggaran negara, pasar tenaga kerja, dan makro ekonomi. Program SJSN tingkat nasional akan berbeda baik di dalam rancangan dan cakupannya dari program-program yang sudah ada dan memasukkan program baru yaitu daftar manfaat baru untuk program pensiun.

BAGI MEREKA YANG TIDAK DAPAT MENGATASI GUNCANGAN ATAU TIDAK DAPAT MENGAKSES ASURANSI SOSIAL, DIBUTUHKAN BANTUAN SOSIAL YANG LEBIH KUAT. Bantuan sosial dalam bentuk program pemerintah non-kontribusi dapat membantu orang miskin dari guncangan, dan menginvestasikan modal sumber daya manusia untuk keluar dari kemiskian, selain asuransi sosial. Hal ini juga merupakan komponen penting dari kerangka perlindungan sosial yang komprehensif.

JARING PENGAMAN SOSIAL MEMILIKI DAMPAK LANGSUNG UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN. Jaring Pengaman Sosial memungkinkan rumah tangga untuk berinvestasi di masa mendatang dan

[55] Bagian ini merupakan rangkuman dari diskusi mengenai asuransi sosial dalam: Indonesia: Avoiding the Trap (World Bank 2014c).
[56] Dibawah UU SJSN tahun 2004 (UU No. 40/2004, mengenai SJSN, (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU No. 24/2011, mengenai BPJS/ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

membantu generasi selanjutnya keluar dari kemiskinan dan kerentanan. Juga melindungi orang untuk jatuh kembali ke dalam kemiskinan dan mengurangi ketergantungan mereka lewat cara penyelesaian yang buruk.[57]

INDONESIA TELAH MEMBANGUN DAN MEMPERLUAS KERANGKA BANTUAN SOSIAL SEJAK KRISIS FINANSIAL YANG TERJADI DI ASIA, TETAPI MASIH BELUM EFEKTIF UNTUK MELINDUNGI RUMAH TANGGA DARI GUNCANGAN EKONOMI. Program kunci ini termasuk Raskin (beras subsidi untuk keluarga miskin), Jamkesmas (sekarang JKN), program JKN yang mana pemerintah membayar premi atas nama orang miskin dan keluarga rentan, Indonesia Pintar (beasiswa untuk keluarga miskin) dan PLH (transfer uang bersyarat). Walaupun begitu masih terdapat beberapa masalah terkait dengan program-program tersebut (Bank Dunia 2012a, 2012b). Keuntungannya seringkali terlalu kecil, tidak menjangkau golongan masyarakat yang seharusnya terjangkau, atau tidak diterima tepat waktu. Beberapa kelompok yang rentan bahkan tidak terjangkau, dan mereka tidak terlindungi atas risiko yang mungkin terjadi. Program lainnya terlihat bekerja, walaupun terlalu kecil skalanya. Reformasi progresif sangat dibutuhkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial (lihat Bank Dunia 2012a, 2012b, dan 2014c). Diperlukan tambahan anggaran yang lebih banyak untuk dialokasikan ke sistem bantuan sosial yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Hal-hal yang termasuk penting dilakukan untuk menghadapi risiko dan guncangan adalah:

I. Perbaikan target agar dapat lebih menjangkau populasi yang menjadi target;

II. Reformasi Raskin untuk ketahanan pangan yang lebih baik; dan

III. Memulai program kerja publik untuk menyediakan pilihan lowongan pekerjaan ketika kehilangan pekerjaan atau kurangnya penyerapan tenaga kerja.

PERBAIKAN TARGET UNTUK EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN. Hasil dari jangkauan target telah meningkat sejak penyatuan database—sebuah daftar yang terdiri dari 40 persen populasi yang diidentifikasikan sebagai miskin dan rentan—digunakan untuk bantuan sosial dan identifikasi kelompok yang membutuhkan. Namun, peningkatan lebih lanjut masih dibutuhkan. Hal ini termasuk pemutakhiran database untuk

menghasilkan data terbaru mengenai keluarga miskin dan rentan dan pemindahan proses pemutakhiran sesuai permintaan (on-demand) ke pemutakhiran yang lebih dinamis.

MEREFORMASI PROGRAM RASKIN YANG BERBIAYA MAHAL DAN TIDAK MEMBERIKAN PROTEKSI YANG EFEKTIF. Raskin memiliki potensi positif: penyediaan yang konsisten terkait dengan paket bahan makanan dasar yang dapat melindungi keluarga miskin dari ketidakstabilan harga bahan makanan, kekurangan kalori, dan malnutrisi. Namun dalam operasinya, Raskin gagal mencapai hal yang fundamental dari tujuan bantuan sosial. Dilusi penerima manfaat, beras yang hilang, dan beban keuangan yang tidak terlihat semuanya mengurangi transfer nilai yang ditujukan kepada rumah tangga terkait. Jika reformasi yang fundamental gagal tercapai, Raskin harus didorong untuk fokus dalam mengimplementasikan kekuatan lembaga seperti stabilisasi harga.

UJI COBA PROGRAM PUBLIK UNTUK MENGHADAPI RISIKO LAPANGAN PEKERJAAN YANG BELUM TERJANGKAU OLEH PROGRAM YANG TELAH ADA. Program jangka pendek yaitu Padat Karya digunakan sebagai tanggapan atas krisis finansial di Asia. Walaupun demikian, kajian terakhir terkait program (contohnya Bank Dunia 2010c) memperlihatkan bahwa program ini gagal memberikan perlindungan terhadap pekerja yang sangat rentan karena rancangannya belum sempurna seperti fragmentasi di berbagai lembaga, upah yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan ketegangan sosial, dan lapangan pekerjaan yang tidak terlalu intensif sehingga mengurangi keuntungan bagi pekerja. Kotak 3.2 mendiskusikan program kerja publik yang mungkin dikembangkan di Indonesia. Sejumlah studi kasus internasional telah memberikan pelajaran berguna, termasuk kasus dari Afrika Selatan, India, Maroko, dan Etopia.

[57] See Indonesia: Avoiding the Trap (World Bank 2014c) for more details.

BOKS 3.3

A public works program for Indonesia

Program kerja publik secara khusus memiliki tiga tujuan utama:

1.Mitigasi dari berbagai Guncangan (Tidak terduga dan musiman). Sebagai contoh: Bank Dunia telah membantu 24 negara untuk memobilisasi program kerja publik sebagai tangapan atas krisis bahan makanan, keuangan, dan bahan bakar pada tahun 2007-2009. Jaring pengaman yang telah ada dan kapasitas administrasi telah mampu memberikan respon yang sesuai terhadap berbagai macam guncangan di berbagai negara. India kemudian memperluas program ini ketika menghadapi kekeringan besar pada tahun 1987 (Rao et al. 1988).

2.Mitigasi dari guncangan tertentu (Sebagai respon dari krisis pekerjaan struktural atau sementara). Di India, MGNREGS menjamin kepastian mendapat pekerjaan bagi siapapun yang membutuhkannya. Hal ini berfungsi sebagai program jaminan. Penerima manfaat program ini adalah kelompok miskin, walaupun programnya tidak secara spesifik menargetkan orang miskin (sebagai contoh, kemiskinan bukanlah kewajiban untuk ikut serta di program ini)

3.Transisi ke pekerjaan permanen. Di Bangladesh, program Pemeliharaan Rural mewajibkan partisipan wanita untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Selain itu, mereka diwajibkan untuk menabung setidaknya Tk 10 dari Tk 51 yang diberikan pada mereka sebagai insentif partisipasi. Tujuan program ini adalah menghasilkan wirausahawan mikro dengan kemampuan dan modal untuk berusaha di sektor informal (Hashemi and Rosenberg 2006).

Rekomendasi untuk Indonesia (World Bank 2010c)

1.Meningkatkan frekuensi dan kelengkapan data pekerja dapat membantu mendeteksi guncangan secara cepat dan akurat terhadap pekerja yang terkena dampak. Dibutuhkan informasi akurat untuk melindungi pekerja dari guncangan sebagai pendeteksian dini dan penentuan area serta rumah tangga yang paling terdampak. BPS dapat melakukan pemutakhiran data sekaligus mengurangi biaya dengan mengadopsi pendekatan survei tiap triwulan atau secara reguler menyediakan data pekerja setiap bulan maupun kuartal. Terdapat pula keperluan memperluas pertanyaan survei untuk pengawasan lebih baik terkait kerentanan yang terjadi di lingkungan kerja. Data ini dapat dimasukkan ke dalam sistem pengawasan permanen yang dapat mendeteksi guncangan di masa depan, termasuk guncangan pengupahan dan lapangan pekerjaan.

2.Salah satu kerangka sistem tanggapan terhadap guncangan nasional harus berupa program kerja publik. Kerangka ini harus mengatur kapan, di mana, dan bagaimana pekerjaan akan dilakukan sebagai antisipasi dari berbagai potensi guncangan. Hal ini dapat termasuk identifikasi pemicu proyek kerja publik atau meningkatkan alokasi untuk program pekerja intensif yang telah ada. Sebagai contoh, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandir (PNPM Mandiri) dapat menjadi kanal dana untuk mendukung pengembangan proyek pekerja intensif, dan berbasiskan di area pedesaan yang dapat menurunkan tingkat pengganguran. Proyek lainnya harus diidentifikasi untuk menyediakan bantuan sementara kepada pekerja ketika dibutuhkan di perkotaan. Sistem tanggapan juga dapat menyimpan daftar proyek infrastruktur yang berjalan atau sedang direncanakan yang dapat dengan cepat menyerap pekerja selama guncangan baik di desa maupun perkotaan.

3.Program kerja publik yang berhasil di Indonesia dapat mencakup pembangunan komponen keterampilan untuk membantu pekerja miskin berpindah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Program pelatihan keterampilan terbaru dapat membantu memperkuat keterampilan dari pekerja miskin yang seringkali tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal ataupun fasilitas pelatihan publik. Program pelatihan komperehensif yang baru dapat membentuk komponen kedua dari strategi nasional untuk melengkapi pekerja dengan keterampilan yang relevan. Program ini dapat mendukung kelompok rentan ataupun tertinggal, khususnya generasi muda, orang miskin dan pekerja informal sehingga mendapatkan manfaat dari kesempatan ini. Kementerian Tenaga Kerja harus menjadi pemimpin dalam perencanaan strategis dan pengawasan kinerja dari lembaga yang melakukan implementasi. Dukungan dari swasta-pemerintah akan membantu membangun jaringan dengan pekerja yang memiliki masa depan dan memastikan pelatihan menyediakan survei tentang pekerja daerah agar bisa memastikan kecocokan dengan pasar tenaga kerja.

4.Dalam jangka menengah, membentuk tim teknis untuk mengembangkan rencana strategis bagi pembentukan program kerja publik yang permanen. Termasuk di antaranya: tujuan, rancangan, mekanisme penyajian, manajemen lembaga, dan roadmap yang rinci.

5.Menunjuk satu institusi terpusat untuk bertanggung jawab atas strategi kepemimpinan secara keseluruhan dan mengawasi program kerja publik. Bentuk program lainnya dapat termasuk: penggunaan sektor geografi yang sistematis untuk menentukan lokasi program; upah yang ditentukan di bawah level pasar untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan (unskilled works) sehingga pekerja bisa memilih programnya sendiri; partisipasi perempuan yang didorong oleh program yang telah dimodifikasi; proyek buruh intensif yang telah diidentifikasi oleh berbagai komunitas atau program infrastruktur yang telah diidentifikasi oleh pengembang strategi/perencana untuk memastikan pekerjaan yang dibuat tepat guna dan produktif.

3.3.3

Pengawasan dan respon terhadap krisis: mengembangkan sistem yang permanen dan menyeluruh

BAHKAN DENGAN KETERSEDIAAN INSTRUMEN YANG TEPAT, INDONESIA TIDAK SELALU MENGETAHUI KAPAN, DI MANA, DAN BAGAIMANA HARUS MERESPON KETIKA TERKENA DAMPAK KRISIS. Di masa lalu, ketika Indonesia mengalami guncangan ekonomi dan harga, seperti pada tahun 2005/2006 saat krisis bahan makanan dan bahan bakar, kemudian krisis ekonomi dan keuangan di tahun 2008-2009, dan pada tahun 2010 terkena dampak krisis harga bahan makanan global, respon pemerintah terhambat karena tidak ada sistem pengawasan dan penanggulangan yang bersifat formal. Hal ini berarti pemerintah tidak mengetahui dampak dari krisis yang sedang terjadi, melalui apa, di mana, dan siapa saja yang terkena dampak. Sebagai konsekuensi, penyusunan respon yang yang tepat menjadi sulit. Walaupun apabila respon yang tepat sudah diketahui, karena ketiadaan protokol fiskal dan operasional untuk penerapan yang cepat dan efektif, maka segala bentuk respon menjadi terhambat.

MENGEMBANGKAN SISTEM PENGAWASAN TANGGAP DARURAT (CRISIS MONITORING RESPONSE SYSTEM/CMRS) MERUPAKAN HAL YANG PENTING UNTUK MENDETEKSI DAMPAK KRISIS DAN MERESPONNYA SECARA TEPAT [58]. Bahkan dengan perlindungan sosial yang tepat, CMRS masih dibutuhkan untuk memastikan sistem bekerja di saat krisis. Sistem tersebut akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengetahui apakah ada potensi guncangan yang terjadi, siapa saja yang terkena dampak, di mana dan bagaimana, serta bagaimana respon yang harus diberikan. Sistem tersebut memiliki tiga komponen: sistem pengawasan yang permanen dan selalu terbarukan (real-time) di tingkat nasional dan rumah tangga; protokol yang (hampir) disetujui terkait kapan, di mana, dan respon apa yang akan diberikan; pengaturan lembaga yang (hampir) disetujui terkait dengan perencanaan, koordinasi, pembiayaan, dan pengembalian, serta pengawasan dan evaluasi.

[58] Sebagai Contoh, lihat Bank Dunia (2010a dan 2010b) untuk diskusi lebih rinci terkait dampak dari krisis keuangan global di Indonesia dan keterbatasan respon pemerintah

PENYELARASAN PAJAK & BELANJA PEMERINTAH UNTUK PENURUNAN KETIMPANGAN

3.4

3.4.1

Kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk menghadapi ketimpangan saat ini dan masa yang akan datang

MENGHADAPI KETIMPANGAN KESEMPATAN DAN PEKERJAAN YANG LEBIH BAIK DALAM JANGKA PANJANG AKAN MEMBUTUHKAN ANGGARAN TAMBAHAN DARI PEMERINTAH. Berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk menghadapi ketimpangan akan memerlukan tambahan beban belanja pemerintah yang signifikan: peningkatan belanja kesehatan dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan, investasi di sektor infrastruktur, peningkatan jangkauan bantuan sosial dan manfaatnya, serta ketahanan sosial bagi semua. Pengalihan anggaran pemerintah terhadap berbagai prioritas ini merupakan peran kunci dari kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menghadapai ketimpangan jangka panjang karena faktor-faktor di luar kontrol individu.

BAGAIMANAPUN, KEBIJAKAN FISKAL DAPAT JUGA DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN DALAM JANGKA PENDEK. Berbagai kebijakan yang telah dibicarakan memiliki dampak terhadap penurunan ketimpangan jangka panjang, seperti peningkatan kesehatan anak dan nutrisi, kualitas pendidikan yang lebih baik, pengembangan keterampilan dan produktivitas pekerja, serta lingkungan yang ramah terhadap lapangan pekerjaan. Kebijakan fiskal secara keseluruhan dapat berdampak terhadap ketimpangan hampir secara langsung melalui berbagai sektor. Pendapatan rumah tangga yang diterima dari upah dan gaji, pendapatan dari transfer modal dan swasta,—pendapatan pasar—dapat dikurangi melalui pajak, cukai, dan kontribusi terhadap ketahanan sosial yang ditingkatkan secara langsung melalui pembayaran ketahanan sosial dan keuntungan bantuan sosial, atau ditingkatkan secara tidak langsung melalui konsumsi barang subsidi dan layanan seperti bahan bakar, makanan, kesehatan dan pendidikan. Efek netto dari berbagai langkah ini adalah pendapatan akhir (setelah seluruh pajak dibayar dan masyarakat menikmati pembelanjaan pajak) yang kurang lebih sama jika dibandingkan dengan pendapatan pasar.

SAAT INI, KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA TIDAK SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN ATAU MENGURANGI KETIMPANGAN. Penelitian terakhir (Afkar et al. 2015; Kementerian Keuangan dan Bank Dunia 2015) melihat dampak yang berbeda dari pembelanjaan pajak pemerintah dan pembelanjaan terkait ketimpangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, perubahan pendapatan rumah tangga bersih dari pajak dan transfer menempati koefisien Gini di titik yang sama (tidak berubah); termasuk belanja kesehatan, pendidikan, yang hanya berkurang 1 poin.

BAGAIMANAPUN, KEBIJAKAN FISKAL TELAH DIGUNAKAN DI BERBAGAI NEGARA UNTUK MENDISTRIBUSI ULANG KEKAYAAN SECARA SIGNIFIKAN DAN MENGURANGI KETIMPANGAN. Di Amerika Latin, yang tingkat ketimpangannya paling tinggi, banyak pemerintahan daerah mengambil langkah untuk menggunakan kebijakan fiskal dengan cara yang lebih adil. Bagan 3.12 menunjukkan bagaimana negara-negara tertentu mengurangi ketimpangan lewat berbagai kebijakan fiskal (diukur melalui indeks Gini) . Negara-negara ini mengurangi ketimpangan dengan cara yang berbeda, namun secara signifikan lebih banyak hasilnya dibandingkan kebijakan fiskal di Indonesia.

Pengurangan koefisien Gini melalui kebijakan Fiskal, beberapa negara (indeks Gini) (bag. 3.12)

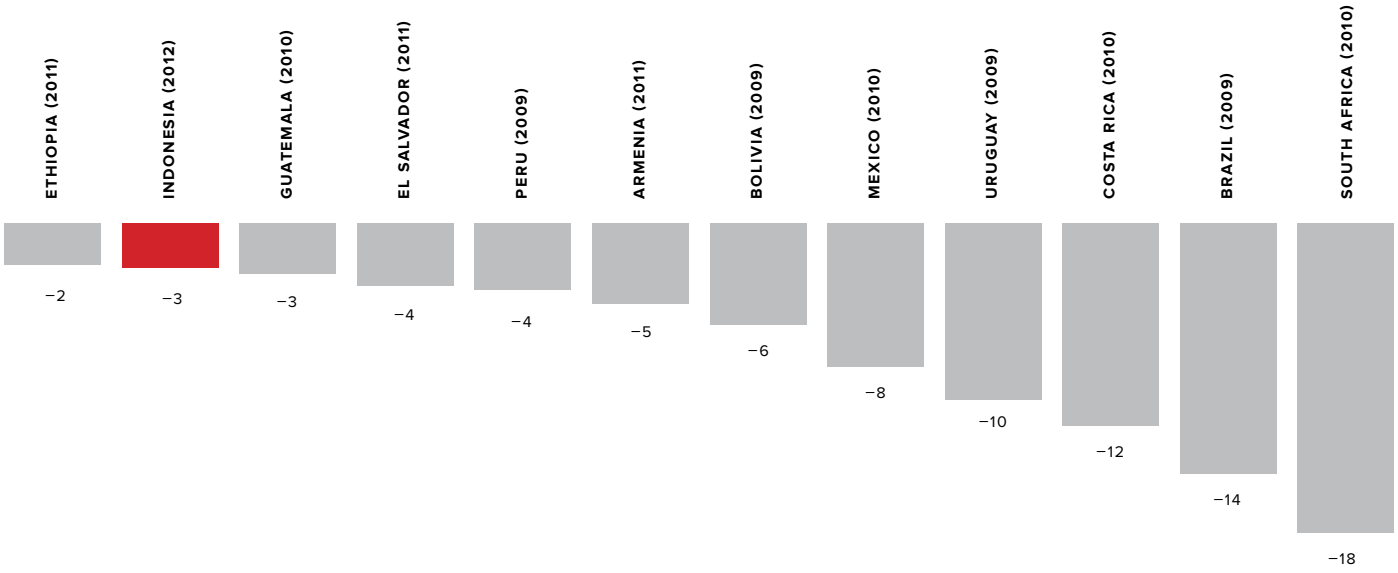

SUMBER Armenia (Younger and Khachatryan 2014); Bolivia (Paz et al. 2014); Brazil (Higgins and Pereira 2014); Ethiopia (Woldehanna et al. 2014); Mexico (Scott 2014); Peru (Jaramillo 2014); Uruguay (Bucheli et al. 2014); Lustig(2014) based on Costa Rica (Sauma et al. 2014), El Salvador (Beneke de Sanfeliu et al. 2014), and Guatemala (Cabrera et al. 2014); South Africa (Inchauste et al. 2014); and Afkar, et al. (2015) for Indonesia based on Susenas 2012.

3.4.2

Pilihan pembelanjaan memiliki pengaruh besar terhadap ketimpangan yang terjadi

INDONESIA SECARA HISTORIS MENGHABISKAN ANGGARAN DI BERBAGAI PROGRAM DAN KEBIJAKAN YANG HANYA BERDAMPAK KECIL TERHADAP KETIMPANGAN JANGKA PENDEK, DAN HANYA SEDIKIT BAGI PROGRAM DAN KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK BESAR. Bagan 3.13 membandingkan anggaran yang dihabiskan pemerintah di berbagai area seperti kesehatan, bantuan sosial, subsidi dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidakstabilan di setiap area. Sebagai contoh, di tahun 2012, Indonesia menghabiskan 3,7 persen dari GDP di sektor subsidi energi yang merupakan pembelanjaan terbesar di luar transfer ke pemerintah daerah. Bagan ini juga menunjukkan bagaimana ketimpangan langsung dapat dikurangi melalui setiap pembelanjaan yang bersifat relatif. Hal ini merupakan Indeks Efektivitas (Efectiveness Index/EI) yang ditandai dengan batang berwarna biru. EI merupakan ukuran ketidaksetaraaan yang mengurangi efektivitas biaya dalam setiap belanja. Batang yang lebih besar berarti indeks Gini dikurangi oleh jumlah persentase GDP yang dihabiskan di sektor tersebut dibandingkan di area yang memiliki batang yang pendek. Bagan ini mengindikasikan program-program untuk mengurangi ketimpangan per rupiah (PKH sejauh ini merupakan program yang efektif, diikuti oleh program bantuan sosial lainnya seperti Raskin dan BSM atau sekarang disebut Indonesia Pintar), termasuk kesehatan menerima pembelanjaan yang sedikit, Bantuan sosial yang merupakan program efektif untuk mengurangi ketimpangan, menerima pembelanjaan paling sedikit secara keseluruhan. Sementara, area yang mendapatkan pembelanjaan paling banyak (subisidi sebanyak 3,7 persen dari GDP dan pendidikan 2,6 persen dari GDP) tidak memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan.[59] Bahkan pembelanjaan yang paling banyak mengurangi ketimpangan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, ternyata tidak mendukung keluarga miskin seperti di negara-negara lainnya. (Afkar, et al. 2015).

[59] Rumah tangga yang kaya mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari subsidi energi, tetapi mereka juga memiliki pendapatan lebih tinggi, sehingga nilai dari subsidi sebagai presentasi dari pendapatan mereka (pengaruh pajak dan pembelanjaan terhadap indeks Gini) secara umum sama dengan rumah tangga miskin yang menggunakan dan mendapatkan sedikit subsidi. Untuk pendidikan, walaupun anak-anak kaya cenderung mendaftar di pendidikan tinggi dengan biaya mahal, rumah tangga miskin secara umum memiliki jumlah anak yang lebih banyak, sehingga mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan melalui kuantitas, yang secara umum berkurang di setiap level sampai dengan pendidikan tersier (kelompok miskin hampir tidak ada yang mendaftar)

Efektivitas pengurangan ketimpangan dan pembelanjaan pemerintah di berbagai perogram dan kebijakan, 2012 (bag. 3.13)

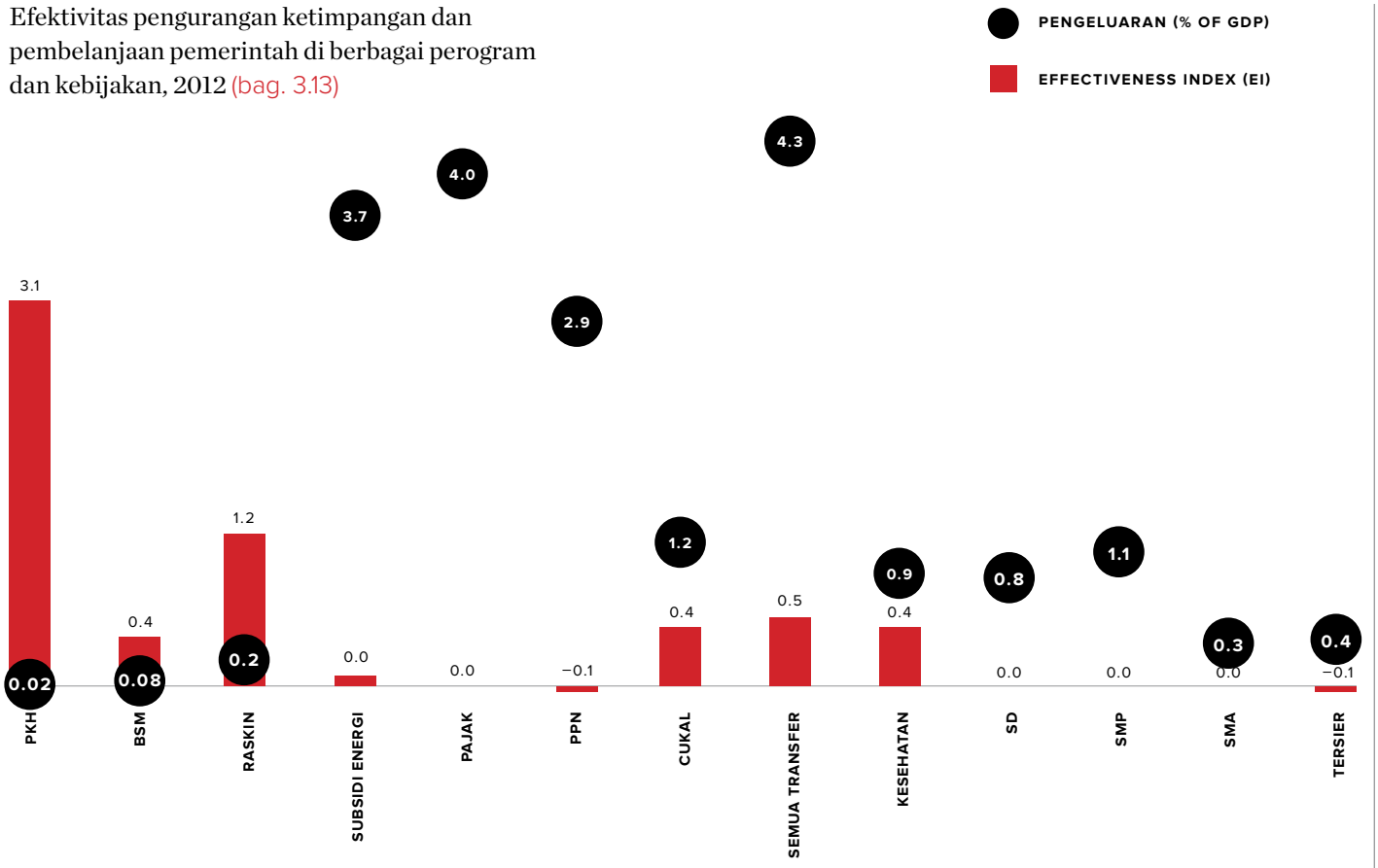

SUMBER Kementerian Keuangan dan Bank Dunia (2015).

LEBIH LANJUT, PENGELUARAN YANG MENGURANGI KETIMPANGAN SEKARANG, JUGA AKAN MENGHILANGKAN KETIMPANGAN DI MASA MENDATANG. Tidak hanya standar hidup rumah tangga miskin yang meningkat dari pembelanjaan bantuan sosial (pendapatan yang lebih tinggi), kesehatan dan pendidikan (mengurangi beban kantong), namun pembelanjaan yang sama juga dapat membantu anak-anak mereka untuk mendapatkan awal yang adil dan selanjutnya penghasilan yang lebih baik di masa mendatang. Bantuan sosial membantu ibu dan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan; pembelanjaan pendidikan dan kesehatan membantu memastikan kualitas dari layanan, kesempatan yang sama untuk anak-anak sehingga dapat meraih keberhasilan di kehidupan selanjutnya.

3.4.3

Menutup kesenjangan besar di sektor infrastruktur dapat mengurangi ketimpangan di Indonesia dengan menguatkan pertumbuhan, menstimulasi pekerjaan, meningkatkan akses terhadap layanan publik dan, menurunkan harga bahan makanan

INVESTASI INDONESIA DI SEKTOR INFRASTRUKTUR TELAH TERTINGGAL. Terlepas dari meningkatnya pembelanjaan pemerintah di beberapa tahun terakhir, pertumbuhan infrastruktur inti di Indonesia seperti jaringan jalan, pelabuhan, listrik, dan fasilitas telekomunikasi, tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam kenyataannya, infrastruktur di Indonesia hanya tumbuh 3 persen setiap tahun dari tahun 2001-2011, yang setara dengan 5,3 persen pertumbuhan GDP. Pertumbuhan yang lambat di sektor modal infrastruktur, berkonstribusi terhadap kesenjangan yang besar, permasalahan kemacetan, dan kinerja logistik yang rendah, serta menghambat pertumbuhan produktivitas, tingkat kompetitif dan usaha pengentasan kemiskinan. Investasi yang lebih besar dan tepat guna di sektor infrastruktur dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan berbagai cara.[60]

[60] Analisis di bagian 3.5 mengenai bentuk dari belanja pemerintah yang mengurangi ketimpangan kebanyakan dampak pengurangan ketimpangan dari pembelanjaan infrastruktur, yang secara analisis sulit untuk ditutup. Kebijakan usaha fiskal bersama Bank Dunia, walau bagaimanapun, telah berjalan dengan memasukkan belanja sektor infrastruktur di dalam analisis pembaharuan dampak fiskal. Lihat Kementerian Keuangan dan Bank Dunia (2015).62 Theoretically, augmenting the stock of public capital through investment in infrastructure directly raises the productivity of other factors (e.g., labor, land) and stimulates economic output. As shown by Barro (1990), it can increase the long-term growth trajectory of an economy under certain conditions, for example the presence of economies of scale. There are indirect effects as well. The availability of high-quality infrastructure may reduce the need for own-provision of certain inputs such as roads, water or electricity (Agenor and Moreno-Dodson 2006) and support the formation of human capital (Galaini et al. 2005).

MEMPERKECIL KESENJANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA AKAN MEMBANTU MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Keberlanjutan pertumbuhan merupakan hal yang penting untuk mengurangi ketimpangan. Hal ini memang sudah diprediksi, namun Indonesia telah kehilangan lebih dari 1 persen tambahan pertumbuhan GDP karena investasi yang kurang di sektor infrastruktur, khususnya transportasi. Memperkecil kesenjangan infrastruktur akan mendukung pertumbuhan melalui beberapa kanal. Selagi infrastruktur dibuat, dampak pembelanjaan akan mendukung pertumbuhan jangka pendek dan memberikan lapangan pekerjaan. Selagi investasi berubah menjadi bentuk infrastruktur, investasi swasta diramaikan dengan kapasitas yang produktif, produktivitas dan dukungan terhadap pertumbuhan jangka panjang.[61] Peningkatan pertumbuhan ini dapat berdampak positif pada pendapatan dan konsumsi rumah tangga serta sumber daya fiskal yang lebih banyak, Pemerintah dapa menggunakannya untuk membiayai berbagai program yang membantu semua pihak di lapangan.

INVESTASI DI SEKTOR INFRASTRUKTUR AKAN MEMBUKA BANYAK KESEMPATAN KERJA YANG LEBIH BAIK BAGI PEKERJA DENGAN KETERAMPILAN RENDAH. Ini akan mendukung pembentukan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ketimpangan. Survei menunjukkan bahwa permasalahan transportasi merupakan salah satu hambatan bisnis di sektor manufaktur yang merupakan sektor penting untuk menghasilkan lapangan pekerjaan, khususnya bagi pekerja dengan keterampilan dan penghasilan terbatas. Mengurangi hambatan ini akan meningkatkan produktivitas dan tingkat kompetisi di sektor infrastruktur. Jalan dan pelabuhan yang lebih baik juga akan memberikan petani akses yang lebih baik untuk pergi ke pasar, sehingga kelak meningkatkan produktivitas mereka dan keterampilan untuk membuat kesempatan kerja bagi pekerja di sektor pertanian.

INFRASTRUKTUR DAPAT MEMBANTU MENGHADAPI KETIMPANGAN KESEMPATAN DENGAN MENINGKATKAN AKSES TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH. Seperempat dari populasi kota dan lebih dari setengah masyarakat desa memiliki akses yang buruk terhadap sektor transportasi (Bank Dunia 2014c). Hal ini secara langsung memengaruhi orang miskin dan rumah tangga terpencil yang bergantung kepada infrastruktur jalan untuk mengakses layanan keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, serta sekolah. Jadi memang perlu meningkatkan pembelanjaan di sektor jalan untuk memastikan akses terhadap layanan-layanan ini. Alokasi anggaran untuk perawatan jalan juga perlu diperhatikan karena tidak menjadi prioritas dibanding pembangunan jalan baru. Perawatan jalan tingkat provinsi diperkirakan akan membutuhkan peningkatan jumlah anggaran (Bank Dunia 2012f).

INFRASTRUKTUR JUGA DAPAT MEMBANTU MENGURANGI HARGA BAHAN MAKANAN, YANG AKAN MEMBUAT PERBEDAAN BESAR DI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MISKIN. Investasi di sektor infrastruktur—secara khusus untuk jalan dan pelabuhan—juga akan membawa produsen material mentah lebih dekat ke pasar domestik. Saat ini lebih murah untuk mengimpor jeruk dari Cina dibanding mendatangkannya dari Kalimantan (Bank Dunia 2014c). Peningkatan konektivitas untuk area terpencil dan pengurangan biaya logistik secara umum akan membantu mengurangi harga beras dan bahan makanan lainnya yang tidak stabil dan memengaruhi kelompok miskin.

[61] Secara teori, meningkatkan jumlah modal publik melalui investasi di sektor infrastruktur secara langsung menaikkan produktivitas faktor lainnya (seperti buruh dan lahan) dan menstimulasi output ekonomi. Seperti telah diperlihatkan Barro (1990), ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di berbagai kondisi tertentu, sebagai contoh kehadiran skala ekonomi. Selain itu, terdapat juga dampak tidak langsung. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas akan mengurangi kebutuhan penyediaan dari input tertentu seperti jalan, listrik, dan air bersih (Agenor and Moreno-Dodson 2006) dan dukungan pembentukan modal sumber daya manusia (Galaini et al. 2005).

BANK DUNIA (2014C) MEMASUKKAN SELURUH BAGIAN FOKUS PENINGKATAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DAN CARA MENCAPAINYA;. Boks 3.3 merangkum rekomendasi tersebut.

BOKS 1.3

Meningkatkan Infrastruktur di Indonesia

Pemerintahan sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah merencanakan untuk memperkecil kesenjangan infrastruktur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berbagai kebijakan dan inisiatif telah diperkenalkan, termasuk peningkatan anggaran yang signifikan untuk pembelanjaan modal dan memperkuat kerangka peraturan dan lembaga untuk kerjasama sektor pemerintah dan swasta (Private-Public Partnership/PPP). Namun, kemajuan keseluruhan dari output dan layanan infrastruktur sangatlah rendah, karena adanya hambatan dalam implementasi dan koordinasi. Pada anggaran tahun 2015 dan 2016 di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah melakukan peningkatan secara signifikan untuk investasi di sektor infrastruktur, didanai oleh penghematan dari

reformasi subsidi bahan bakar tahun 2015. Akan tetapi, pengembalian dari pembelanjaan ini masih rendah.

MENGHASILKAN KEMAJUAN UNTUK MEMPERKECIL KESENJANGAN MEMERLUKAN TIGA AKSI UTAMA

a. Memobilisasi pembiayaan untuk pengembangan sektor infrastruktur. Beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat menghabiskan lebih sedikit anggaran untuk sektor infrastruktur (kurang dari 1 persen GDP) dibanding dengan subsidi bahan bakar (sekitar 2,6 persen dari GDP). Semua kebijakan yang mengeliminasi atau mengurangi subsidi penting untuk terus dilakukan. Terlebih peningkatan pengembalian akan dapat meningkatkan ruang fiskal lebih luas untuk membiayai sektor infrastruktur. Pemerintah memiliki ruang untuk mencari dana tambahan bagi sektor infrastruktur. Berkat tingkat hutang yang rendah (rasio utang terhadap GDP berada pada 24% di GDP tahun 2014) yang dapat ditambahkan bagi investasi pemerintah daerah dan pembiayaan sektor swasta.

b. Melanjutkan koordinasi dan kerjasama dengan partner regional di ASEAN. Negara-negara ini memiliki komitmen untuk mengimplementasikan cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/Asean Economic Community/AEC) pada akhir tahun 2015. Untuk mencapai tujuan ini, negara anggota akan mempersiapkan fasilitas perdagangan dengan mendirikan layanan satu pintu guna meningkatkan pertukaran data bea cukai, penggunaan teknologi dan informasi bagi petugas perbatasan, dan transparansi proses pemeriksaan di perbatasan. Terdapat juga master plan Konektivitas ASEAN yang akan mempercepat implementasi dari inisiatif kerja sama dan proyek investasi sehingga lebih menghubungkan negara-negara anggota melalui tiga bentuk konektivitas: fisik, lembaga, dan antar-individu.

Kejelasan peraturan dan panduan untuk akuisisi lahan. Masih terdapat ketidakjelasan peraturan akuisisi lahan dan kompensasi kepada pemilik lahan. Hal ini merupakan alasan utama penundaan proyek infrastruktur, khususnya jalan tol. Hal ini mungkin juga menjadi faktor penting mengapa sektor swasta enggan berinvestasi di sektor ini dengan skala besar. Revisi regulasi terkait dengan akuisisi lahan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 30/2015, diharapkan dapat memperbaiki kejelasan dan transparansi proses akuisisi lahan dan menguatkan kepercayaan publik tekait dengan usaha pemerintah untuk memajukan sektor infrastruktur.

3.4.4

Namun, kebijakan fiskal harus tetap berkelanjutan

KETIKA KEBIJAKAN FISKAL DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGHADAPI KETIMPANGAN, MAKA HARUS DILAKUKAN DENGAN CARA YANG BERKELANJUTAN. Kebanyakan negara Amerika Latin telah mengurangi ketimpangan secara signifikan melalui kebijakan fiskal. Pajak progresif dan penganggaran yang mengutamakan dan menguntungkan masyarakat miskin dan rentan menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan ketimpangan. Bagaimanapun, hal tersebut harus dapat berkelanjutan. Ketika anggaran terlalu banyak dihabiskan untuk redsitribusi dan pembiayaan sosial lainnya terkait dengan pemasukkan, maka kerangka fiskal dapat kehilangan faktor berkelanjutannya. Sebagi contoh di Brazil, transfer uang langsung saat ini sebesar 4 persen dari GDP. Sebagai tambahan, ketika transfer sosial terlalu besar, maka akan membuat para tenaga kerja kehilangan insentif untuk bekerja. Sebagai contoh, 70 persen dari pendapatan kelompok keluarga miskin di Argentina berasal dari transfer uang langsung (Lustig dan Pessino 2014).

INDONESIA DAPAT DAN HARUS MENGHABISKAN ANGGARANNYA UNTUK PEMBIAYAAN SEKTOR SOSIAL, TETAPI HARUS DIPASTIKAN BAHWA PENINGKATAN PEMBELANJAAN TIDAK BERDASARKAN PENINGKATAN KEUNTUNGAN YANG TIDAK REALISTIS. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan pengeluaran APBN yang signifikan , khususnya di sektor infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Berdasarkan argumentasi yang ada di laporan ini, peningkatan diperlukan di area vital untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Bagaimanapun, ketika beberapa pembelanjaan di area ini berasal dari realokasi dana subsidi bahan bakar, sebagian lainnya dibiayai melalui peningkatan signifikan dalam pendapatan anggaran. Jika target keuntungan yang ambisius ini tidak tercapai, Indonesia akan memiliki risiko melebihi batas defisit yang diizinkan yaitu 2,5 persen dari GDP.[62]

REFORMASI YANG SIGNIFIKAN DIBUTUHKAN UNTUK MENINGKATKAN KEUNTUNGAN. Jika

[62] Berdasarkan sejarah, Belanja riil Indonesia berada sekitar 8 persen lebih rendah dari yang dianggarkan, mengurangi risiko dari defisit yang meningkat, khususnya karena pencairan sektor infrastruktur lebih rendah dari rencana.

"business as usual" dijadikan asumsi skenario, tanpa reformasi yang signifikan terkait kebijakan pendapatan atau administrasi, pendapatan dasar untuk tahun 2015-2019 diproyeksikan berada di antara level 13,3 dan 13,5 persen dari GDP. Tanpa dihalangi oleh peraturan fiskal, defisit fiskal akan mencapai sekitar 4,6 persen dari GDP di tahun 2015 dan meningkat menjadi 3,5 persen dari GDP tahun 2019—sementara untuk mempertahankan kepatuhan pada peraturan, defisit fiskal maksimal pemerintah pusat harus berada di 2,5 persen. Tanpa membuat ruang fiskal tambahan, pemerintah harus memotong rencana peningkatan belanja di sektor pembangunan yang menjadi prioritas. Boks 3.4 menjelaskan berbagai kombinasi kebijakan yang mungkin dapat mencapai hal ini.

BOKS 1.4

Meningkatkan Keberlangsungan fiskal: Aksi Prioritas

Ruang fiskal tambahan akan berasal dari usaha besar-besaran untuk memobilisasi pendapatan—khususnya pajak non-migas dan pendapatan selain pajak dengan meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak serta mengoptimalisasi kebijakan pajak. Terkait dengan negara-negara di kawasan dan pasar berkembang lainnya, Indonesia memiliki salah satu rasio terendah pendapatan terhadap GDP (15,2 persen di 2014) dan pajak terhadap GDP (11,3 persen di tahun 2014). Hal ini bukan karena potensi pajak yang rendah; berdasarkan estimasi, Indonesia telah mengumpulkan kurang dari 50 persen total potensi keuntungan pajak (Fenochietto dan Pessino, 2013). Dengan harga minyak dan komoditas lainnya yang cenderung rendah, pendapatan terhadap GDP mungkin akan turun ke tingkat 13,5 persen di tahun 2015 dan akan berada pada titik tersebut untuk jangka menengah dalam skenario "business as usual" karena keuntungan dari minyak, gas dan komoditas lainnya juga rendah. Sebaliknya, seperti yang ditekankan oleh pemerintah, usaha berkelanjutan untuk memobilisasi keuntungan sangat penting. Reformasi kebijakan keuntungan untuk memperluas dasar pajak, menyederhanakan struktur pajak, merasionalisasi bentuk pajak dan merevisi secara selektif tarif tertentu agar sesuai dengan level internasional, dapat meningkatkan pendapatan, sekaligus mengurangi distorsi ekonomi dan meminimalkan biaya administrasi.

Sebagai tambahan, meningkatkan keuntungan dari pajak dan non-pajak, kepatuhan yang lebih strategis, pengelolaan kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko, serta usaha lainnya untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat sukarela, juga merupakan hal penting. Paket komprehensif terkait kebijakan pendapatan (termasuk optimalisasi pajak tembakau dan pajak kendaraan) dan administrasi (termasuk peningkatan pajak migas dan gas, kepatuhan terhadap PPN dan keuntungan non-pajak pertambangan) dapat meningkatkan keuntungan tambahan sekitar 1 persen dari GDP 2016 dan lebih dari 4 persen di tahun 2019.[63] Kedua, pertumbuhan dari rata-rata belanja pegawai dapat ditingkatkan sesuai dengan inflasi dibanding hanya 5 sampai 8 persen di atas GDP pada tahun 2014, menjadi 2,7 persen pada anggaran perubahan tahun 2015. Memelihara belanja pegawai tetap sama akan memberi ruang sebesar 0,5 persen dari GDP per tahun di tahun 2019. Secara keseluruhan, ukuran-ukuran ini memiliki potensi untuk meningkatkan ruang fiskal dari 1,1 persen GDP di tahun 2015 menjadi 4,7 persen di tahun 2019. Hal ini akan menghasilkan penurunan defisit fiskal selama satu periode pemerintahan, dan tetap sesuai dengan aturan defisit fiskal 2,5 persen dari GDP tahun 2018.

3.4.5

Kombinasi pendapatan ini digunakan untuk mencapai kondisi fiskal berkelanjutan dan dapat pula memengaruhi ketimpangan yang ada saat ini

PAJAK SECARA UMUM TERKAIT DENGAN PENGUMPULAN PENDAPATAN, TETAPI JUGA DAPAT MEMENGARUHI KETIMPANGAN SECARA LANGSUNG. Peran pajak dalam kerangka kebijakan fiskal dirancang untuk menghadapi ketimpangan dan membiayai pengeluaran di sektor peningkatan kesetaraan. Bahkan di negara-negara dengan pajak pendapatan progresif seperti Brazil, Mexico, dan Uruguay, dampak pajak terhadap ketimpangan masih lebih rendah daripada (atau kurang lebih sama) transfer tunai pengeluaran pendidikan dan kesehatan (lihat Afkar, et al. 2015). Walau bagaimanapun, berbagai pajak dikumpulkan dari rumah tangga sampai titik tertentu dan ini

[63] Sejalan dengan estimasi IMF terkait target pajak jangka menengah antara 13,4 dan 16,4 persen dari GDP. IMF, 2011a, "Revenue Mobilization in Developing Countries", IMF Policy Paper. IMF, 2011b, "IMF Country Report: Indonesia", No. 11/30.65

harus menjadi pertimbangan ketika pemerintah memikirkan kebijakan pajak.

BARANG DAN JASA YANG TERBEBAS DARI PPN MEMENGARUHI BAIK PENDAPATAN DAN KETIMPANGAN. Kondisi yang terjadi di Indonesia PPN dibayar oleh rumah tangga dan bersifat netral terhadap konsumsi dan distribusi. Sekitar 10 persen keluarga termiskin membayar 3,5 persen dari pendapatan pasar dalam bentuk PPN, yang kurang lebih sama dengan 10 persen orang terkaya dan kelompok di antaranya, walaupun cukai tembakau bersifat agak regresif (Afkar, et al. 2015).[64] Hal ini berbeda dengan beberapa negara; orang miskin membayar lebih besar untuk pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai sebagai persentasi dari pendapatan pasar dibanding pendapatan rumah tangga lainnya.[65] Dari Bagan 3.14 terlihat jelas terdapat dua kategori negara: negara yang netral atau bahkan memiliki pajak tidak langsung yang progresif, tetapi keuntungan yang berasal dari masyarakat bernilai rendah; dan mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah dari pajak tidak langsung (sebagai bagian dari GDP), tetapi orang miskin membayar lebih besar dibandingkan bagian pendapatan pasar mereka (sebesar 30 persen di Brazil). Perbedaan ini disebabkan karena beberapa pengecualian dari bahan makanan dan kebutuhan utama negara kelompok pertama.

PENINGKATAN PENDAPATAN DI INDONESIA LEWAT PAJAK TIDAK LANGSUNG DAPAT MENGHINDARI DAMPAK TERHADAP KETIMPANGAN SECARA SIGNIFIKAN ASALKAN BERFOKUS PADA BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKONSUMSI DALAM JUMLAH BESAR OLEH KELOMPOK MISKIN, misalnya perluasan pajak barang mewah dan properti luks (saat ini sedang diperdebatkan), sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap pajak yang sudah ada; memperkecil kesenjangan kepatuhan dengan mengatasi isu transfer harga akan meningkatkan potensi keuntungan sebesar 0,5 persen dari GPD dari aktual 0,2 GDP, sekaligus mengurangi ketimpangan, khususnya yang terjadi di rumah tangga dengan pendapatan lebih besar[66]. Ini juga berarti menghapuskan pengecualian PPN dari barang dan jasa yang tidak meningkatkan kesetaraan aset. Hal tersebut termasuk konsumsi listrik rumah tangga di atas batas normal seperti yang digunakan oleh orang miskin (sebagai contoh rumah tangga dengan daya listrik 450W sampai dengan 900W), air pipa (digunakan oleh sedikit orang miskin), pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan produk olahan hewan (kelompok miskin dan rentan adalah kelompok buruh tani yang bukan mengolah lahan pertaniannya sendiri).

[64] Walaupun rumah tangga yang lebih kaya membayar secara absolut karena pendapatan pasar mereka lebih tinggi.
[65] Perbandingan ini mencantumkan tidak hanya PPN, tetapi juga pajak tidak langsung lainnya seperti cukai. Data Indonesia ini memasukkan dampak dari cukai tembakau, yang memiliki dampak lebih besar terhadap orang miskin dan kelas menengah dibanding dengan orang kaya lihat Afkar, et al. (2015).
[66] Perkiraan Bank Dunia.

Dampak dari pajak tidak langsung di berbagai negara (persen dari pendapatan pasar) (bag. 3.14)

SUMBER For Latin America see: Lustig and Pessino 2014; Paz et al. 2014; Higgins and Pereira 2014; Scott 2014; Jaramillo 2014; Bucheli, et al. 2014; Lustig et al. 2013. For Armenia and Sri Lanka, results are preliminary by Arunatilake, et al. (2014) and Younger and Khachatryan (2014).

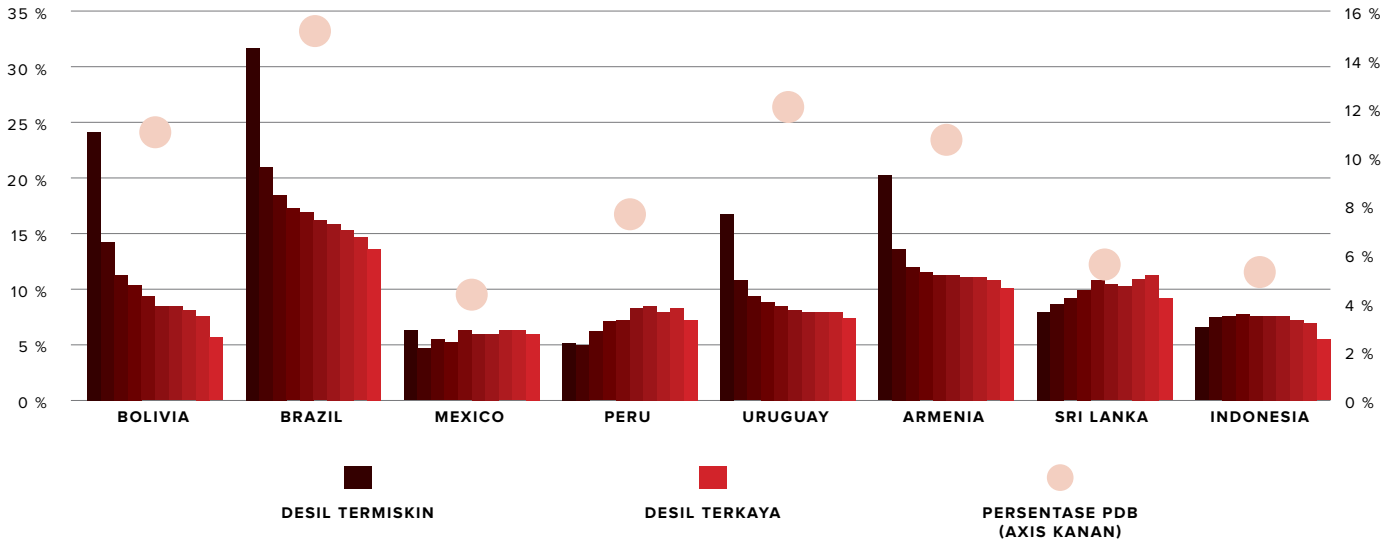

MENINGKATKAN PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN KEPATUHAN PEMBAGIAN SUMBER DAYA AKAN MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DAN MENGURANGI KETIMPANGAN. Sebagai tambahan, Indonesia saat ini menerima royalti tambang (diklasifikasikan sebagai keuntungan non-pajak/NTR) yang ditetapkan sebagai hasil bagi tetap dari keuntungan penjualan. Konsekuensi kenaikan harga komoditas, royalti sebagai bagi hasil dari keuntungan berkurang, berarti pemegang dana bagi hasil yang lebih kaya akan mendapatkan keuntungan, khusunya ketika dalam kondisi puncak. Keuntungan dapat ditingkatkan dari sektor ekstraktif (dan ketimpangan secara potensial dapat dikurangi) dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran NTR tambang, sekaligus membuat royalti menjadi lebih progresif (contoh, mengaitkan tingkat royalti terhadap harga), sehingga negara memperoleh lebih ketika pendapatan meningkat.

TERAKHIR, PAJAK PROPERTI MEMANG SULIT DIIMPLEMENTASIKAN TETAPI AKAN MEMBANTU MENGATASI TERPUSATNYA KEKAYAAN, MENINGKATKAN KEUNTUNGAN TAMBAHAN DAN MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI MASA YANG AKAN DATANG. Terpusatnya kekayaan di 10 persen rumah tangga terkaya (dan paling terkonsentrasi di beberapa orang Indonesia) adalah yang tertinggi di antara kumpulan data tersebut. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan ketimpangan di masa depan dengan memberikan keuntungan signfikan terhadap anak-anak dari rumah tangga kaya melalui pendidikan, kesehatan yang lebih baik dan koneksi sosial. Ini juga secara langsung meningkatkan ketimpangan di masa depan dengan memberikan kesempatan anak-anak dan orang tua yang kaya untuk menikmati pendapatan dari pajak properti yang diwariskan, sehingga kekayaan mereka makin terkonsentrasi. Pajak properti yang diwariskan dapat digunakan untuk penguatan antar generasi terkait dengan ketidaksetaraan, walaupun kemungkinan kurang didukung di Indonesia saat ini (Tabel 3.4) dan kepatuhan akan sulit ditegakkan, bahkan di negara berkembang sekalipun dengan kapasitas pajak administrasi yang tinggi.

DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN MENANGANI KETIMPANGAN

3.5

KEBANYAKAN ORANG INDONESIA BERPIKIR BAHWA HARUS ADA SESUATU YANG DILAKUKAN TERKAIT DENGAN KETIMPANGAN;[67] KEBIJAKAN APA YANG AKAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI MEREKA? Menggunakan data survei mengenai persepsi masyarakat Indonesia tentang ketimpangan yang dikumpulkan dari LSI,[68] Bank Dunia (2015a) memeriksa bagaimana masyarakat Indonesia berpikir bahwa orang kaya akan semakin kaya, dan orang miskin semakin miskin; apa yang mereka pikirkan tentang ketimpangan; dan apa yang mereka pikir harus dilakukan dengan ketimpangan tersebut.

KEBANYAKAN ORANG INDONESIA BERPIKIR BAHWA HARTA DIPEROLEH MELALUI KERJA KERAS, TETAPI MEREKA JUGA BERPIKIR BAHWA KEBERUNTUNGAN DAN LATAR BELAKANG KELUARGA MEMILIKI PERAN BESAR. Beberapa orang mengaitkan harta dengan korupsi. Sekitar 45 persen responden berpikir bahwa talenta dan kerja keras adalah faktor sangat penting untuk mejadi kaya. Jumlah responden survei yang hampir sama juga memercayai faktor eksternal seperti keberuntungan dan latar belakang keluarga serta pendidikan ditambah dengan koneksi juga sangat penting. Sisanya, sebanyak 10 persen berpikir bahwa korupsi adalah faktor utama.

PADA SAAT YANG SAMA, BANYAK DARI MEREKA PERCAYA BAHWA KERJA KERAS DAPAT MENARIK ORANG KELUAR DARI KEMISKINAN, KONDISI DI LUAR KENDALI (KETIDAKBERUNTUNGAN DAN LATAR BELAKANG KELUARGA MISKIN) JUGA SERINGKALI MENJADI PENYEBAB KEMISKINAN. Sekitar 50 persen memercayai bahwa hal yang mudah bagi setiap orang untuk meningkatkan status ekonominya adalah melalui kerja keras, dan sektiar 40 persen berpikir meskipun hal ini sulit, tetapi masih dapat dicapai.

PERSEPSI MENGENAI SUMBER HARTA DAN KEMISKINAN TERCERMIN DARI KEBIJAKAN YANG PALING POPULER UNTUK MENGATASI KEMISKINAN. Masyarakat diberikan pertanyaan untuk memilih 3 dari 15 pilihan kebijakan yang paling penting untuk mengurangi ketimpangan. Hasilnya dapat dilihat di Tabel 3.4.

KEBIJAKAN YANG DIPANDANG SANGAT PENTING UNTUK MENGURANGI KETIMPANGAN TERBAGI DALAM TIGA KELOMPOK BESAR: PENYEDIAAN KESEMPATAN KERJA, PENYEDIAAN PERLINDUNGAN DARI GUNCANGAN DAN KEADAAN DARURAT, SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI. Kebijakan yang paling sering dipilih sebagai prioritas teratas adalah perlindungan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, pendidikan gratis, kredit usaha, dan layanan kesehatan gratis (Tabel 3.4). Penciptaan lapangan pekerjaan, kredit usaha, dan pendidikan gratis untuk semua, adalah cara menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja keras dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Program perlindungan sosial dan layanan kesehatan gratis merupakan cara untuk melindungi masyarakat dari ketidakberuntungan, khususnya bagi keluarga miskin. Terakhir, prioritas utama pemberantasan korupsi menunjukkan adanya komitmen untuk mencegah kepemilikan harta dengan cara yang melanggar hukum.

[67] Lihat bagian pembukaan.
[68] Pada bulan Mei 2014, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei representatif nasional pada 3,080 individu di seluruh Indonesia untuk mengukur persepsi tentang kebijakan dalam mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan. Survei berisi lebih dari 70 pertanyaan tentang persepsi terhadap ketimpangan pendapatan. Untuk penjelasan rinci, lihat World Bank (2015a) dan LSI (2014).

Kebijakan yang dianggap prioritas dalam penurunan ketimpangan (tab. 3.4)

Pertanyaan: "Apa tiga kebijakan yang paling penting untuk mengurangi ketimpangan?"	
Kebijakan	**3 Prioritas teratas?**
Program perlindungan sosial (Raskin, BLT, BSM, asuransi kesehatan, dll.)	49%
Membuat lapangan pekerjaan	48%
Pemberantasan korupsi	37%
Pendidikan gratis untuk semua	30%
Kredit UKM	27%
Biaya kesehatan gratis untuk semua	17%
Meningkatkan upah minimum	17%
Peningkatan infrastruktur (jalan, listrik, dll)	14%
Penambahan subsidi (mis., untuk pertanian, bahan bakar, dsb.)	14%
Perbaikan sekolah	10%
Bantuan desa (seperti PNPM)	7%
Pinjaman kepada keluarga miskin (bukan pinjaman bisnis)	7%
Meningkatkan pajak bagi orang kaya	2%
Asuransi untuk pengangguran	2%
Kesetaraan pemilikan aset (seperti untuk lahan, hutan, tambang, dll)	2%

[69] Hasil survei menemukan bahwa ada 61 persen responden yang mengatakan mereka lebih memilih "pertumbuhan pendapatan yang rendah dan ketimpangan yang rendah" dibanding "pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan ketimpangan yang tinggi juga"

PREFERENSI INI SECARA UMUM BERSIFAT KONSTAN DI SELURUH SEGMEN PENDIDIKAN DAN KELOMPOK PENDAPATAN. Perlindungan sosial, lahan pekerjaan yang banyak, dan pemberantasan korupsi merupakan tiga prioritas teratas yang dipilih masyarakat dari semua segmen pendapatan dan pendidikan. Sedangkan responden yang berasal dari orang kaya dan berpendidikan tinggi lebih memilih perlindungan sosial. Responden dari kelompok miskin dan kurang berpendidikan memilih perlindungan sosial dibanding pekerjaan. Kedua kebijakan ini dipilih sebagai tiga prioritas teratas oleh 40 persen dari seluruh kelompok.

BERBAGAI KEBIJAKAN YANG CENDERUNG TIDAK MENGURANGI KETIMPANGAN SECARA SIGNIFIKAN HANYA MENDAPATKAN SEDIKIT DUKUNGAN, ARTINYA HANYA ADA SEDIKIT TEKANAN UNTUK MENERAPKAN KEBIJAKAN TERSEBUT. Terkait dengan hal ini, kebijakan yang cenderung tidak mengurangi ketimpangan menerima sedikit dukungan. Subsidi (termasuk di sektor pertanian dan bahan bakar) yang hanya menyia-nyiakan sumber daya dan tidak menguntungkan orang miskin dan rentan, hanya dipilih menjadi tiga prioritas teratas oleh 17 persen responden yang disurvei. Kebanyakan masyarakat Indonesia menginginkan bahan bakar yang murah sebagai prioritas yang lebih penting dalam pembelanjaan pemerintah. Upah minimum yang apabila dibuat terlalu tinggi akan berbahaya bagi penciptaan lahan pekerjaan yang lebih produktif, hanya dipilih oleh 14 persen responden. Kelompok vocal minority memilih upah yang tinggi, tetapi kebijakan ini tidak mendapatkan dukungan luas.

BAGAIMANAPUN, BEBERAPA KEBIJAKAN YANG MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMERINTAH ATAU YANG AKAN PALING EFEKTIF DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN JUGA TIDAK POPULER. Dua inisiatif penting dari pemerintah yakni investasi infrastruktur dan transfer tunai di tingkat desa, juga mendapatkan dukungan kecil; 14 persen memilih kebijakan yang pertama sebagai tiga kebijakan teratas, dan hanya 7 persen yang memilih kebijakan kedua. Kurangnya dukungan untuk infrastruktur secara khusus cukup mengkhawatirkan, padahal ini merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Belanja komunikasi pemerintah di sektor infrastruktur harus diperkuat dan diperjelas. Dengan dukungan yang kuat untuk pekerjaan dan kurangnya dukungan untuk pertumbuhan,[69] mengaitkan infrastruktur kepada pembentukan lapangan pekerjaan dibanding dengan pertumbuhan ekonomi, mungkin dapat lebih efektif. Selanjutnya, peningkatan pajak untuk orang kaya hanya menerima 2 persen dukungan, yang berarti berbagai usaha untuk memperluas pajak pendapatan perlu dipandang sebagai kepatuhan terhadap peraturan yang telah ada ("orang membayar bagiannya secara adil) dibandingkan melihatnya sebagai kenaikan pajak.

KESIMPULAN KAMI

MENGHADAPI KETIMPANGAN SECARA LUAS MERUPAKAN PERMASALAHAN JANGKA PANJANG. Ketimpangan secara umum berubah perlahan sepanjang waktu, perubahan yang sangat cepat dalam jangka pendek adalah tidak mungkin. Beberapa kebijakan kunci untuk menghadapi ketimpangan, seperti kesempatan yang sama di sektor kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak saat ini dikombinasikan dengan pekerjaan lebih baik di masa mendatang, akan membutuhkan satu generasi untuk merasakan manfaatnya.

MENJADI PENTING UNTUK MEMULAI DARI SEKARANG. Langkah perbaikan membutuhkan waktu, yang berarti harus dimulai dari sekarang. Memulai dari sekarang juga dapat menguntungkan secara politik untuk menyelesaikan ketidaksetaraan sebagai bentuk dukungan dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi, terdapat bahaya apabila ditunda. Dengan banyaknya orang Indonesia menolak program layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan layanan lainnya, maka terdapat potensi bahaya mereka tidak akan menjadi faktor pendorong yang kuat untuk pelayanan sosial yang lebih baik, tidak mendukung peningkatan dan pembelanjaan publik yang adil di sektor-sektor tersebut yang dibiayai oleh pajak.

DI BEBERAPA AREA, LEBIH BANYAK YANG HARUS DIKETAHUI; AGENDA PENELITIAN MASA DEPAN HARUS MENJADI PRIORITAS DI BEBERAPA AREA, KHUSUSNYA POLITIK-EKONOMI DARI LEMBAGA DI INDONESIA DAN SIFAT ALAMI DARI KORUPSI; TIDAK BANYAK YANG DIKETAHUI MENGENAI MASALAH MENDASAR DI INDONESIA DAN LANGKAH TERBAIK YANG HARUS DIAMBIL. Tidak banyak yang diketahui mengenai sifat alami dari korupsi di Indonesia dan kaitannya dengan ketimpangan. Persepsi publik memperlihatkan bahwa ini tersebar, dan kasus-kasus besar memberikan contoh yang jelas mengenai peraturan yang bias dan menguntungkan orang dalam atau pihak terkait tanpa ada konsekuensi hukum. Bentuk korupsi cenderung terkait dengan ketimpangan melalui pertumbuhan yang rendah, konsentrasi kekayaan yang tinggi, dan pembuat kebijakan yang memperburuk ketimpangan (sebagai contoh, pasar tenaga kerja yang kaku sehingga menghambat pembentukan lapangan kerja produktif, atau pembatasan impor yang membuat harga bahan makanan meningkat). Bagaimanapun, analisis poltik-ekonomi dan lembaga hukum harus mengidentifikasi penyebab utamanya. Aspek politik, ekonomi, hukum apa di Indonesia yang menyediakan insentif seperti penyewaan lahan, terus berlangsung? Ketika ini diakibatkan oleh kurangnya mekanisme checks and balances dan ketika kurangnya penegakan dari unsur pemeriksaan (checks) (apakah melalui kebijakan investigasi dan penuntutan dari potensi korupsi atau bentuk subversi dari proses hukum melalui penangkapan)?

DI AREA LAINNYA, SEPERTI INFRASTRUKTUR, ANALISIS YANG TELITI DIBUTUHKAN UNTUK MEMETAKAN KEBUTUHAN DAERAH TERHADAP INVESTASI. Agenda penelitian di masa depan juga harus mempertimbangkan bagaimana infrastruktur dapat ditingkatkan dengan baik pada level daerah. Sebagai contoh, di berbagai lokasi yang berbeda, dibutuhkan jenis infrastruktur yang berbeda untuk membantu meningkatkan akses terhadap pasar dan pelayanan atau untuk menciptakan pekerjaan. Solusi terhadap hambatan akses mungkin berupa jembatan di suatu lokasi, jalan desa di lokasi lain, dan pelabuhan di lokasi lainnya. Analisa infrastruktur yang rinci dapat dikerjakan menggunakan data-data di tingkat daerah, termasuk pemetaan tingkat kemiskinan kabupaten dan desa, serta keadaan fasilitas kabupaten dan desa.

Menghadapi ketimpangan membutuhkan waktu; sangat penting untuk dimulai dari sekarang

Referensi

Acemoglu, Daron and Robinson, James A. 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York: Crown Publishers.

Agénor, P.R. and; B. Moreno-Dodson. 2006. Public Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications. Washington, DC: World Bank

Alderman H. and J.R. Behrman. 2004. Estimated Economic Benefits of Reducing Low Birth Weight in Low-Income Countries. Health, Nutrition and Population Discussion Paper. Washington, DC: World Bank

Alesina, A. and R. Perotti. 1994. The political economy of growth: a critical survey of the recent literature. The World Bank Economic Review 8: 350-371.

Alesina, A. and D. Rodrik. 1994. Distributive politics and economic growth. Quarterly Journal of Economics 109: 465-490.

Armas, E. B., Osorio, C. G. and B. Moreno-Dodson. 2010. Agriculture Public Spending and Growth: The Example of Indonesia. World Bank Economic Premise, No.9, April. Washington, DC: World Bank

Arunatilake, N., Inchauste, G. and Lustig, N. 2014. Forthcoming paper (untitled).

Banerjee, A. V. and E. Duflo. 2003. Inequality and Growth: What Can the Data Say? Journal of Economic Growth, Vol. 8, No. 3, pp.267–99.

Banerjee, A. and A. Newman, A. 1993. Occupational choice and the process of development. Journal of Political Economy 101(2), pp.211-35.

Barro, Robert. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy 98(5), pp.s103-26.

Beneke de Sanfeliu, Margarita, Nora Lustig and José Andrés Oliva. 2014. La incidencia de los impuestos y el gasto social sobre la pobreza y la desigualdad en El Salvador.

Berg, A. and J. Ostry. 2011. Inequality and Unsustainable Growth: Two Side of the Same Coin? IMF Staff Discussion Note SDN/11/08. Washington, DC: International Monetary Fund.

Brandt, P.M. Jesse and Benarto, Clara L. 2013. Final Report of the Contraceptive Supply Chain Management Assessment Team. Jakarta: United National Population Fund (UNFPA) and BKKBN.

Bredenkamp, C., A. Tandon, P. Harimurti, E. Pambundi and C. Rokx. 2011. Enhancing Health Equity and Financial Protection in Indonesia: How Well Does Jamkesmas Do? (Working Paper). Washington, DC: World Bank

Bucheli, M., N. Lustig, M. Rossi and F. Amábile. 2014. Social Spending, Taxes and Income Redistribution in Uruguay. In Lustig, Nora, Carola Pessino and John Scott. (eds.) The Redistributive Impact of Taxes and Social Spending in Latin America. Special Issue, Public Finance Review: 42(3)

Bussolo, Maurizio and Luis F. Lopez-Calva. 2014. Shared Prosperity: Paving the Way in Europe and Central Asia. Washington, DC: World Bank

Cabrera, Maynor, Nora Lustig and Hilicías E. Morán. 2014. Fiscal Policy, Inequality and the Ethnic Divide in Guatemala. Commitment to Equity Working Paper 20. Center for Inter-American Policy and Research and Department of Economics, Tulane University and Inter-American Dialogue.

Credit Suisse. 2014. Global Wealth Databook. Zurich: Credit Suisse Research Institute.

Dabla-Norris, E., K. Kochhar, N. Suphaphiphat, F. Ricka and E. Tsounta. 2015. Causes and Consequences of Income Inequality: a global perspective. IMF Staff Discussion Note SDN/15/13. Washington, DC: International Monetary Fund.

Duflo, E. 2001. Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. American Economic Review 795-813.

Febriani, Esty. 2012. Laporan hasil analisa situasi program KB di kabupaten. Jakarta.

Fenochietto, R. and C. Pessino. 2013. Understanding Countries' Tax Effort. IMF Working Paper WP/13/244. Washington, DC: International Monetary Fund.

Ferreira, F. and M. Lugo. 2012. Multidimensional Poverty Analysis: Looking for a middle ground. Policy Research Working Paper 5964. Washington, DC: World Bank.

Galaini, Sebastian, Paul Gertler and Ernesto Schargrodsky. 2005. Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality. Journal of Political Economy 113(1): 83-120.

Galor, O. and H. Zang. 1997. Fertility, income distribution and economic growth: theory and cross-country race obviousness. Japan and the World Economy 9: 197-229.

Galor, O. and J. Zeira. 1993. Income distribution and macroeconomics. Review of Economic Studies 60: 35-52.

Gupta, Dipak. 1990. The Economics of Political Violence. New York: Praeger.

Hadiwidjaja, G., C. Paladines and M. Wai-Poi, M. 2013. Multidimensional Child Poverty in Indonesia. (Working Paper). Washington, DC: World Bank

Hammer, J. and W. Jack. 2001. Designing incentives for rural health care providers. Journal of Development Economics 69(1): 297-303.

Harimurti, P., E. Pambudi, A. Pigazzini and A. Tandon. 2013. The Nuts & Bolts of Jamkesmas: Indonesia's Government-Financed Health Coverage Program for the Poor and Near-Poor. Universal Health Coverage Studies Series (UNICO) Studies Series No. 8.

Hasan, A., M. Hyson and M. Chang, eds. 2013. Early Childhood Education and Development in Poor Villages of Indonesia: Strong Foundations, Later Success. Washington, DC: World Bank

Hashemi, Syed, and Richard Rosenberg. 2006. Graduating the Poorest into Microfinance: Linking Safety Nets and Financial Services. Focus Note 34. Washington, D.C.: CGAP.

Haughton, Jonathan and Shahidur Khandker. 2009. Handbook on Poverty and Inequality. Washington, DC: World Bank

Higgins, S. and C. Pereira. 2014. The Effects of Brazil's Taxation and Social Spending on the Distribution of Household Income. In Lustig, Nora, Carola Pessino and John Scott, eds. The Redistributive Impact of Taxes and Social Spending in Latin America. Special Issue, Public Finance Review: 42(3).

Hill, Hal. 2000. The Indonesian Economy (2nd ed.). Cambridge University Press.

Hull, T. Forthcoming. Indonesia's Fertility Levels, Trends and Determinants: dilemmas of analysis. In Jones, G. and C. Guilomo, eds. 40% of the World: Population and Development Issues in China, India and Indonesia. Singapore: NUS Press.

International Monetary Fund. 2011a. Revenue Mobilization in Developing Countries. IMF Policy Paper. Washington, DC: International Monetary Fund.

International Monetary Fund. 2011b. IMF Country Report: Indonesia No. 11/30.

Inchauste, Gabriela, Nora Lustig, Mashekwa Maboshe, Catriona Purfield, and Ingrid Woolard. 2015. The Distributional Impact of Fiscal Policy in South Africa. CEQ Working Paper No. 29, Center for Inter- American Policy and Research and Department of Economics, Tulane University and Inter-American Dialogue.

Jaramillo, Miguel. 2014. The Incidence of Social Spending and Taxes in Peru. In Lustig, Nora, Carola Pessino and John Scott, eds. The Redistributive Impact of Taxes and Social Spending in Latin America. Special Issue, Public Finance Review: 42(3)

Jellema, J., Matthew Wai-Poi, and Rythia Afkar. 2015. Fiscal Policy, Redistribution, and Inequality in Indonesia (Working Paper). Washington, DC: World Bank

Jha, Abbas K. and Zuzana Stanton-Geddes, eds. 2012. Strong, Safe, and Resilient: A Strategic Policy Guide for Disaster Risk Management in East Asia and the Pacific. Washington, DC: World Bank.

Jones Lang LaSalle. 2013. Property Market Update October. Jakarta: Jones Lang Lasalle.

Jones, G. and SM. Adioetomo, SM. 2014. Population, Family Planning and Reproductive Health. Background document for 2014-19 RPJM.

Karabarbounis, Loukas and Brent Neiman. 2014. The Global Decline of the Labor Share. Quarterly Journal of Economics 2014: 61–103.

Keefer, Philip and Stephen Knack. 2002. Polarization, Politics and Property Rights: Links between inequality and growth. Public Choice 111: 127-154.

Kremer, Michael and Daniel Chen. 2002. Income distribution dynamics with endogenous fertility. Journal of Economic Growth 7: 227-258.

Kusumaningrum, D., T. Purwaningsih, S. Rahardja and K. Tanaguchi. 2015. The Evaluation of Rice Market Operation at the Macro Level. World Bank study, unpublished.

Lewis, Gary L. and Haripurnomo. 2009. Revitalization of Family Planning in Indonesia: A Strategy for Empirically Based Implementation. Jakarta: BKKBN and UNFPA.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). 2014. Inequality Perceptions Survey. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

Lustig, Nora. 2014. Taxes, Transfers, Inequality and the Poor in the Developing World. Round 1. CEQ Working Paper No. 23, Center for Inter-American Policy and Research and Department of Economics, Tulane University and Inter-American Dialogue.

Lustig, N. and C. Pessino. 2014. Social Spending and Income Redistribution in Argentina in the 2000s: The Rising Role of Noncontributory Pensions. Pubic Finance Review. Published online 20 Nov 2013.

Lustig, N., C. Pessino and J. Scott. 2013. The Impact of Taxes and Social Spending on Inequality and Poverty in Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico, Peru and Uruguay: An Overview. CEQ Working Paper No. 3. Center for Inter-American Policy and Research and Department of Economics, Tulane University and Inter-American Dialogue

Mani, Anandi. 2001. Income distribution and the demand constraint. Journal of Economic Growth 6(2): 107-133.

Marshall, Adriana. 1988. Income Distribution, the Domestic Market and Growth in Argentina. Labour and Society 13(1): 79-103.

Mason, Andrew. 1988. Savings, Economic Growth and Demographic Change. Population and Development Review 14: 113-144.

Ministry of Finance and World Bank. 2015. The Distributional Impact of Fiscal policy in Indonesia. Policy Paper. Jakarta: Ministry of Finance and World Bank.

Murphy, K. M., A. Schleifer and R. Vishny. 1989. Income distribution, market size, and industrialization. Quarterly Journal of Economics 104: 537-564.

North, D., J. Wallis and B. Weingast. 2009. Violence and Social Orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press.

OECD. Hanushek E. and L. Woessmann. 2015. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain. Paris: OECD Publishing.

Paz Arauco, V., GG. Molina, W. Jiménez Pozo, W. and E. Yáñez Aguilar. 2014. Explaining Low Redistributive Impact in Bolivia. In Lustig, Nora, Carola Pessino and John Scott, eds. The Redistributive Impact of Taxes and Social Spending in Latin America. Special Issue, Public Finance Review: 42(3).

Peirskalla, Jan and Audrey Sacks. 2015. Unpacking the Effect of Decentralization on Conflict: Lessons from Indonesia. Unpublished Manuscript.

Persson, T. and G. Tabellini. 1994. Is inequality harmful for growth? American Economic Review 84(3), pp.600-621.

Rao, C.H.H., S.K. Ray and K. Subbarao. 1988. Unstable Agriculture and Droughts - Implications for Policy. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Rokx, C., J. Giles, E. Satriawan, P. Marzoeki, P. Harimurti, E. Yavux. 2010. New Insight into the Distribution and Quality of Health Services in Indonesia: A Health Work Force Study. Washington DC: World Bank.

Sauma, Juan Diego Trejos. 2014. Social Public Spending, Taxes, Redistribution of Income, and Poverty in Costa. CEQ Working Paper No. 18. Center for Inter-American Policy and Research and Department of Economics, Tulane University and Inter-American Dialogue.

Scott, John. 2014. Redistributive Impact and Efficiency of Mexico's Fiscal System. In Lustig, Nora, Carola Pessino and John Scott, eds. The Redistributive Impact of Taxes and Social Spending in Latin America. Special Issue, Public Finance Review: 42(3)

Thomas, William J. and Sri Moertiningsih Adioetomo. 2010. BKKBN Organization Development Consultation March 18-April 15, 2010. Jakarta: BKKBN.

Transparency International. 2014. Corruption Perceptions Index 2014: Results. http://transparency.org/cpi2014/results (accessed May 7, 2015).

United States Agency for International Development (USAID). 2014. Indonesia 2014: The National Early Grade Reading Assessment (EGRA) and Snapshot of School Management Effectiveness (SSME) Survey, Report of Findings. EdData II Technical and Managerial Assistance, Task Number 23. Jakarta: United States Agency for International Development/ Indonesia.

Victora C.G., L. Adair, C. Fall, P.C. Hallal, R. Martorel, L. Richter and H.S. Sachdev, for the Maternal and Child Undernutrition Study Group. 2008. Maternal and Child Undernutrition: Consequences for Adult Health and Human Capital. The Lancet 371: 340-357.

Woldehanna, Tassew, Eyasu Tsehaye, Gabriela Inchauste, Ruth Hill and Nora Lustig. 2014. Fiscal Incidence in Ethiopia. In World Bank. 2014. Ethiopia Poverty Assessment. Washington DC: World Bank.

WHO. 2010. Health Systems Financing: the Path to Universal Coverage. Geneva: World Health Organization

World Bank. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. Washington, DC: World Bank.

World Bank. 2009. Indonesia's Doctors, Midwives and Nurses: Current Stock, Increasing Needs, Future Challenges and Options. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2010a. Crisis Monitoring and Response System Detailed Report. Jakarta: World Bank. World Bank. 2010b. Preparing for the Next Crisis: Establishing a vulnerability and shock monitoring and response system in Indonesia. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2010c. Indonesia Jobs Report: Towards Better Jobs and Security for All. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2011. Skills for the Labor Market in Indonesia: Trends in Deman, Gaps and Supply. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2012a. Protecting the Poor and Vulnerable in Indonesia. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2012b. Targeting the Poor and Vulnerable in Indonesia. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2012c. Bantuan Siswa Miskin Cash Transfer for Poor Students. Social assistance public expenditure review background paper. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2012d. Jamkesmas Health Service Fee Waiver. Social assistance public expenditure review background paper. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2012e. Inequality in Focus, April 2012. Washington DC: World Bank.

World Bank. 2012f. Investing in Indonesia's Roads: Improving Efficient and Closing the Financing Gap. Road Sector Public Expenditure Review. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2012g. Food Prices, Nutrition, and the Millennium Development Goals. Washington DC: World Bank.

World Bank. 2013. Slower Growth, High Risks. Indonesia Economic Quarterly, December 2013. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2014a. Delivering Change. Indonesia Economic Quarterly, December 2014. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2014b. Hard Choices. Indonesia Economic Quarterly, July 2014. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2014c. Indonesia: Avoiding the Trap (Development Policy Review 2014). Jakarta: World Bank.

World Bank. 2014d. Universal Maternal health Care Coverage? Assessing the readiness of Public health facilities to provide maternal health care in Indonesia. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2014e. Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Washington DC: World Bank. World Bank. 2014f. Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS) in Improving Education Outcomes in Indonesia. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2014g. An Update on Vietnam's Recent Economic Developments. Taking Stock, July 2014. Hanoi: World Bank.

World Bank. 2015a. A Perceived Divide: How Indonesians think about inequality and what should be done (Working Paper). Jakarta: World Bank.

World Bank. 2015b. An Unfair Start: How unequal opportunities affect Indonesia's children (Working Paper). Jakarta: World Bank.

World Bank. 2015c. Risk and Informal Risk Management among the Rural Poor in Indonesia: A qualitative study across four sites. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2015d. High Expectations. Indonesian Economic Quarterly, March 2015. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2015e. Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2015g. Assessing The Role of the School Operational Grants Program (BOS) in Improving Education Outcomes in Indonesia. Washington DC: World Bank.

World Bank. Forthcoming (a). Indonesia's New Climbers: Who are the middle class and what does it mean for the country? Jakarta: World Bank.

World Bank. Forthcoming (b). A Video Study of Teaching Practices in TIMSS Eighth Grade mathematics Classrooms. World Bank.

World Bank. Forthcoming (c). Report on top incomes in Indonesia (Working Paper). Jakarta: World Bank.

Younger, S. and A. Khachatryan. 2014. Fiscal Incidence in Armenia. Background Paper for World Bank (forthcoming) Armenia Public Expenditure Review.

Zhuang, J., R. Kanbur and C. Rhee. 2014. Asia's income inequalities. In Zhuang, J., R. Kanbur and C. Rhee, eds. Inequality in Asia and the Pacific: Trends, Drivers, and Policy Implications. New York: Asia Development Bank and Routledge.